
MEMBANGUN PERADABAN BANGSA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA



**Pengembangan Keilmuan dan Keislaman
Berwawasan Lintas Negara**

**Karman, Asman, Jamiat Akadol, Iwan Kusnadi,
Alkadri, Zarul Arifin, Risa, Jaelani, Deni Irawan,
Henny Yusnita, Sri Deti, Rusiadi, Sumar'in, Aslan,
Serli, Rifki Muhammad, Purniadi Putra,
Oskar Hutagaluh, Hifza**

Editor:
Risa dan Jaelani

**MEMBANGUN PERADABAN BANGSA
DI WILAYAH PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA
Pengembangan Keilmuan dan Keislaman
Berwawasan Lintas Negara**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**MEMBANGUN PERADABAN BANGSA
DI WILAYAH PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA**
**Pengembangan Keilmuan dan Keislaman
Berwawasan Lintas Negara**

Tim Penulis:

Karman, Asman, Jamiat Akadol, Iwan Kusnadi,
Alkadri, Zarul Arifin, Risa, Jaelani, Deni Irawan,
Henny Yusnita, Sri Deti, Rusiadi, Sumar'in, Aslan,
Serli, Rifki Muhammad, Purniadi Putra,
Oskar Hutagaluh, Hifza

Editor:

Risa dan Jaelani



**MEMBANGUN PERADABAN BANGSA
DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA
Pengembangan Keilmuan dan Keislaman
Berwawasan Lintas Negara**

Oleh: Karman, Asman, Jamiat Akadol, Iwan Kusnadi,
Alkadri, Zarul Arifin, Risa, Jaelani, Deni Irawan,
Henny Yusnita, Sri Deti, Rusiadi, Sumar'in, Aslan,
Serli, Rifki Muhammad, Purniadi Putra,
Oskar Hutagaluh, Hifza

Editor: Risa dan Jaelani

Copyright © 2022, Karman, dkk

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia
Oleh Penerbit CV. Feniks Muda Sejahtera,
Anggota IKAPI NO. 007/SUL-TENG/2022

Desain Sampul: August Leonardo
Profreader & Tata Letak: Darwis Septrian Manteende

Terbit Perdana (PDF): Juli, 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang memperbanyak dan memperjual-belikan sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

ISBN No. 978-623-5403-39-7 (PDF)

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	v	
Kata Sambutan Rektor.....	vii	
Kata Pengantar Ketua LP2M	ix	
Bagian Satu: Dinamika Sosial Budaya dan Pembangunan Daerah 1		
Krisis Multidimensi dan Harmoni yang Terkoyak	2	
<i>Oleh: Karman dan Asman</i>		
Pemekaran Wilayah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.....	35	
<i>Oleh: Jamiat Akadol dan Iwan Kusnadi</i>		
Ibukota Kabupaten Sambas dan Dinamika Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Politik, Hukum dan Pemerintahan.....	85	
<i>Oleh: Alkadri dan Zarul Arifin</i>		
Bagian Dua: Sejarah dan Perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Wilayah Perbatasan Indonesia		103
Latar Historis dan Filosofis Pendirian Kampus Islam di Sambas.	104	
<i>Oleh: Risa dan Jaelani</i>		
Dari STAIN Pontianak Filial Sambas Hingga IAIS Sambas 2002-2014	128	
<i>Oleh: Deni Irawan dan Henny Yusnita</i>		
Bagian Tiga: Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara		159
Pengembangan Kelembagaan dan Akademik: Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi	160	
<i>Oleh: Sri Deti dan Rusiadi</i>		
Pengembangan dan Inovasi Kurikulum: Distingsi Kajian Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara	177	
<i>Oleh: Sumar'in dan Aslan</i>		
Membangun Mutu dan Mengawal Perkembangan	204	
<i>Oleh: Serli dan Rifki Muhammad</i>		

Bagian Empat: Menuju <i>World Class Islamic University</i> di Kawasan Asia Tenggara	263
Menuju IAIN Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	264
<i>Oleh: Purniadi Putra dan Oskar Hutagaluh</i>	
Menjadi Perguruan Tinggi Rujukan Dalam Pengembangan Kajian Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara di Asia Tenggara.....	280
<i>Oleh: Hifza</i>	



INSTITUT AGAMA ISLAM

SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Alamat: Jalan Raya Sejangkung No, 126 Kawasan Pendidikan, Sebeyan, Sambas, 79462

Telepon: (0562) 6303087

Website: www.iainsambas.ac.id, E-mail: rektorat@iainsambas.ac.id

KATA SAMBUTAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

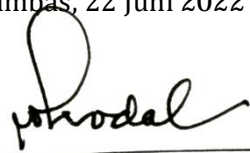
Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, atas penerbitan buku “MEMBANGUN PRADABAN BANGSA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: *Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara*”. Buku ini menjadi istimewa karena disiapkan secara khusus sebagai rekam jejak perjalanan IAIS Sambas, dalam kiprahnya membangun dunia pendidikan di wilayah perbatasan. Penerbitan buku seperti ini adalah sebuah tradisi akademik yang sangat baik dan perlu terus didukung agar tumbuh berkembang di lingkungan IAIS Sambas. Kita menyadari bahwa buku adalah media penunjang kemajuan ilmu pengetahuan, komunikasi gagasan, dan salah satunya dilakukan melalui penerbitan buku.

Melalui sambutan ini, sebagai rektor, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Sekretaris LP2M, Kepala-kepala Pusat di lingkungan LP2M dan semua pihak yang mendukung terbitnya buku “MEMBANGUN PERADABAN BANGSA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: *Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara*”. Begitu pula ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada para penulis dan editor yang telah bekerja keras menyiapkan penerbitan buku ini. Saya

mengharapkan agar buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam upaya menjelaskan kepada masyarakat tentang kiprah IAIS Sambas sejak awal berdirinya hingga sekarang serta harapan besar dan cita-citanya ke depan. Sesuai Visi IAIS Sambas yakni “Menjadi Perguruan Tinggi Rujukan Dalam Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara Bagi Kemajuan Peradaban di Asia Tenggara”.

Akhirnya, sebagai rektor, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam proses penerbitan buku ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca di lingkungan IAIS Sambas khususnya, dan umumnya kepada seluruh pembaca atau yang memanfaatkan buku ini. Dan kepada para pembaca dimohon memberikan saran perbaikannya, bilamana menemukan kesalahan dan kekeliruan, sebagai bahan penyempurnaan dalam penerbitan selanjutnya. Semoga seluruh sumbang saran pemikirannya, baik moral maupun material mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT.

Sambas, 22 Juni 2022



Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si., MH
NIP. 19590703 198403 1012

KATA PENGANTAR KETUA LP2M

Kehadiran Perguruan Tinggi di wilayah perbatasan NKRI, salah satunya yang berada di wilayah Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Sambas merupakan sebuah mimpi yang telah menjadi kenyataan. Impian dan harapan masyarakat Sambas yang selama ini untuk mengkuliahkan anak-anaknya, lebih-lebih biaya yang tidak mencukupi untuk mengkuliahkan anak, sekarang telah terobati karena adanya kehadiran perguruan tinggi Islam Swasta dengan nama Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas. Waktu demi waktu, perguruan tinggi di Sambas yang pada awalnya merupakan Kampus Filial dari STAIN Pontianak (Sekarang sudah menjadi IAIN Pontianak), tetapi saat ini sudah berdiri sendiri dengan beberapa fakultas dan program studi yaitu, dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah dan Humaniora, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sampai sudah mempunyai Program Pascasarjana.

Buku ini hadir dengan judul “MEMBANGUN PERADABAN BANGSA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: *Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara*”, diuraikan dalam empat bagian pembahasan; *pertama*, Dinamika Sosial Budaya dan Pembangunan Daerah. *Kedua*, Sejarah dan Perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Ketiga*, Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara. *Keempat*, Menuju *World Class Islamic University* di Kawasan Asia Tenggara.

Keempat bagian tersebut, masing-masing ditulis oleh Dosen IAIS Sambas yang mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan

keahliannya, sehingga dari bagian pembahasan ini juga melihat kehadiran perguruan tinggi di Sambas tidak terlepas dari kaca mata sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Masing-masing mempunyai argumen yang berbeda yang didukung dengan teori sehingga kehadiran buku “MEMBANGUN PERADABAN BANGSA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: *Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara*”, menggambarkan sejarah IAIS Sambas dari sejak pendirian Perguruan Tinggi Islam di Sambas sampai IAIS Sambas diusulkan menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan jauh ke depan diharapkan akan menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Oleh karena itu, tantangan, konflik dan lainnya tidak terlepas dari perubahan termasuk perubahan perguruan tinggi Islam ini.

Buku ini juga, bukan hanya membuka cakrawala bagi para akademisi untuk mengetahui sejarah IAIS Sambas, tetapi bisa juga dijadikan sebagai “zimat” untuk masyarakat umum lainnya, baik yang berada di Kabupaten Sambas maupun yang berada di luar Kabupaten Sambas, yang mana dengan adanya “zimat” berupa buku ini sebagai langkah awal untuk mengetahui Sejarah Sambas ke depan dan yang akan datang.

Sambas, 22 Juni 2022
Ketua LP2M

Aslan

BAGIAN SATU
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH

KRISIS MULTIDIMENSI DAN HARMONI YANG TERKOYAK

Karman dan Asman

A. *Pendahuluan*

Indonesia mengalami momen sejarah baru, yakni adanya gerakan reformasi sebagai akibat dari krisis multidimensional Negara Indonesia yang mempengaruhi banyak aspek seperti bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, perdamaian dan ketertiban Indonesia. Krisis multidimensional yang melanda Negara Indonesia sejak tahun 1997 mencerminkan ketidakamanan masyarakat dalam menghadapi nilai dan perkembangan yang berubah dengan begitu cepat (Soedarsono, 2010). Hal ini ditandai dengan adanya aksi-aksi anarkisme yang muncul dalam kehidupan masyarakat, yang dikenal dengan gejolak sosial, sehingga merasakan dampaknya. Krisis yang diawali dengan krisis ekonomi telah meluas menjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia (Adiwilaga et al., 2018). Terjadinya krisis berimbas kepada tokoh seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sudah tidak mampu lagi untuk mengendalikan keresahan masyarakat ketika itu. Situasi demikian semakin memudahkan terjadinya konflik, salah satunya konflik etnis di Kabupaten Sambas.

Di tengah gejolak sosial yang terjadi di masyarakat, ternyata menjadi landasan untuk lahirnya pergerakan pembaharuan yang menjadi titik tolak bangsa Indonesia dalam menata kembali tatanan pemerintahannya. Lajunya pergerakan reformasi menuntut adanya tata pemerintahan yang baik yang dikenal dengan istilah "*good governance*" (Karianga, 2015). Istilah "pemerintahan yang baik" telah menjadi

informasi umum pada saat ini. Sehingga, *good governance* menjadi topik yang semakin hangat di kalangan masyarakat Indonesia (Tobari, 2015)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu antara lain karena prosedur regulasi yang tidak dikelola dan dijalankan dengan baik. Akibat dari tata pemerintahan yang buruk mengakibatkan munculnya seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang berkembang biak dan sulit dihilangkan di Negara Indonesia, masalah penegakan hukum yang sulit dikelola, kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh beberapa monopoli dan penurunan kualitas pelayanan pada masyarakat (Simanjuntak, 2013). Pemerintahan yang baik merupakan konsepsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efisien yang sejalan dengan cita-cita terbentuknya masyarakat madani. Tata kelola yang baik dikaitkan dengan kontribusi, pemberdayaan, dan peran penyeimbang antara tiga pilar, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat (Khamim, 2021). Tata pemerintahan yang baik juga membutuhkan kapasitas birokrasi sebagai penegak kebijakan publik, serta sebagai perangkat otoritas atas peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Rahmadana et al., 2020).

Namun penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam praktiknya seringkali menemui kendala, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kesadaran dan konektifitas ketiga pilar yakni pemerintah, swasta dan masyarakat yang tidak seimbang. Dari ketiga komponen tersebut, pemerintah memiliki peran terbesar dalam pelaksanaan *good governance*. Memang, selain fungsi eksekutif daerah, pemerintah juga merupakan fungsi administrasi dan birokrasi yang bersentuhan langsung dengan rakyat sehingga terjadi keselarasan dan terjalin harmonisasi.

B. Krisis Multidimensi Hingga Lahirnya Reformasi

1. Krisis Multidimensi di Indonesia

Krisis multidimensi adalah krisis yang terjadi secara bersamaan di beberapa wilayah (Suryono, 2010) Krisis multidimensi lebih sukar diatasi, karena saling ketergantungan antara krisis disatu sektor dengan sektor lainnya. Krisis multidimensi adalah situasi di mana suatu negara mengalami berbagai jenis konflik yang besar dan konflik yang kecil (Turmudi, 2021).

Menurut Soekarnoputri (2021), penyebab terjadinya krisis multidimensi tersebut ada tiga yaitu: (1) Akar utama konflik dalam krisis multidimensi adalah individu itu sendiri. Dari seorang individu harus memiliki visi yang baik, untuk mengubah dirinya untuk menghindari keterpurukan, tetapi harus berusaha mencari pemikiran baru untuk bangkit bersama membangun negaranya. (2) Komunikasi sangat besar pengaruhnya dalam menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara, dapat ditunjukkan bahwa tanpa komunikasi yang jelas antar masyarakat bisa menimbulkan gesekan yang berujung pada perpecahan yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik antar kelompok di masyarakat. (3) Harus adanya peran pemerintah. Pemerintah disini memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara, disini pemerintah dengan istilah "*waiter*" dan masyarakat dengan istilah "*king*", seorang pelayan harus mengetahui keinginan seorang raja. Namun yang terjadi justru sebaliknya, banyak fasilitas yang dibuat bukan untuk rakyat hanya untuk individu tertentu, dan kepentingan kelompok tertentu.

Dengan demikian, perlu ditekankan adanya komunikasi, pemantauan dan transparansi serta akuntabilitas baik pemerintah

maupun warga negara. Krisis multidimensi adalah situasi dimana negara mengalami banyak konflik, dengan kompleksitas yang berbeda di bidang perekonomian, perpolitikan, sosial budaya dan moralitas bangsa (Miswardi & Antoni, 2021). Oleh karena itu, krisis multidimensi akar masalah utama yaitu meliputi krisis akhlak, krisis politik, krisis iptek, krisis budaya, krisis ekonomi dan krisis sosial yang ada di negara Indonesia.

Krisis-krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Moral

Krisis moral adalah hilangnya hati nurani yang membimbing perilaku batin dalam kehidupan (Harris, 2021). Akibat krisis moral, moralitas bangsa Indonesia sudah tidak bisa ditolerir sehingga menjadikan kehancuran bagi bangsa sendiri (Maarif, 2019). Sekarang, di mana moralitas rusak orang suka memaksakan kehendaknya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Ini adalah akar dari masalah etika yang disebabkan oleh krisis ekonomi sebelumnya. Misalnya terjadinya korupsi ingin cepat kaya instan sehingga kerugian negara tidak sedikit, oleh para koruptor, menyerahkan tugas kepemimpinan bukan kepada ahlinya sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam memimpin sehingga sulit untuk memberantas korupsi (Danil, 2016).

b. Politik

Krisis politik ini terkait dengan calon politisi bisa melakukan pembenaran dengan berbagai cara agar bisa duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Cara yang dilakukan adalah dengan politik uang sehingga menimbulkan kecurangan dalam berpolitik (Tjahjoko, 2020). Krisis politik disebabkan oleh kepemimpinan yang buruk yang tidak

bisa bekerja di bidangnya dan hanya mencari keuntungan saja sebagai biaya kampanye (Qadaruddin, 2016). Seharusnya politik sebagai pengendali, dapat memulihkan negara Indonesia dari krisis. Jika politik diarahkan ke arah yang benar dan politik sehat, sehingga kepemimpinan menjadi baik negara akan maju dari segala aspek bidang tanpa ada hambatan.

c. IPTEK

Krisis Ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya tidak banyak membantu manusia dalam segala aspek kehidupannya. Namun pemanfaatan Iptek saat ini secara moral merusak bangsa Indonesia. Di era digital ini, informasi sangat mudah didapatkan, baik itu informasi yang tidak jelas (hoak) dan informasi yang jelas (Rodin, 2020). Oleh karena itu, media informasi yang sering menampilkan informasi-informasi yang kurang baik dan kurang mendidik bagi masyarakat.

Memfilter konten yang tidak pantas untuk ditonton publik melalui televisi. Televisi merupakan “sumber informasi” bagi masyarakat, karena masyarakat Indonesia tidak jauh dari sumber informasi dari menonton acara televisi (Morissan, 2018). Jadi, seharusnya yang harus dimunculkan dalam siaran televisi atau media massa lainnya adalah siaran dan berita yang bisa mendidik dan bisa memberikan perubahan pada masyarakat agar tidak ada unsur propokasi dari sebuah siaran atau berita yang ditampilkan.

d. Budaya

Krisis budaya negara Indonesia semakin parah. Tidak ada lagi citra negara kita sebagai negara agraris (Fuadi, 2020). Tidak jarang banyak budaya dihancurkan, tidak pernah terwujud lagi. Dikarenakan masyarakat terlalu egois berhadapan dengan budaya (Luthfi, 2018),

misalnya ketika ada klaim salah satu budaya kita yaitu batik yang diklaim oleh Negara Malaysia. Sedikit yang peduli terhadap budaya yang di klaim oleh negara lain sehingga berkesan masalah biasa yang tidak perlu di bela.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan dunia internasional, pemerintah Orde Baru mencanangkan program pembangunan jangka panjang, yang mencakup lima tahun kerja, yang disebut dengan PELITA (Kuncoro, 2018). Hingga puncaknya pada tahun 1984 program PELITA berjalan dengan baik. Indonesia sudah swasembada beras yang sangat luar biasa. Pada tahun 1997-1998, Indonesia mengalami keterpurukan krisis multidimensi yang sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia (Hariyanto, 2020). Krisis multidimensi merupakan efek dari krisis ekonomi ASEAN. Fundamental ekonomi yang lemah membuat Negara Indonesia sukar menyusun kembali perekonomian dari krisis yang melanda negara (Damanik, 2021).

Menurut para ahli ekonomi, pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dimulai tak lama setelah perjanjian bantuan IMF yang ditandatangani pada pertengahan 1997 untuk mengatasi krisis yang melanda Indonesia (Suparno, 2012). Dampak dari kesepakatan mendukung IMF adalah memperketat kebijakan fiskal, menghapus subsidi, menutup beberapa bank di Indonesia dan menaikkan suku bunga menjadi tinggi (Suleman, 2021). Fakta ini menyebabkan krisis yang lebih dalam berujung pada berakhirnya Era Orde Baru. Indonesia akhirnya memasuki era baru, disebut dengan Era Reformasi. Ditunjuknya BJ Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto

merupakan dorongan untuk memperbaiki kondisi politik, ekonomi dan sosial yang berkejolak di Indonesia (Budiarti et al., 2019).

Krisis yang terjadi di Indonesia berdampak pada berbagai bidang, antara lain bidang keuangan, ekonomi, politik, hukum dan kepercayaan publik. Krisis multidimensi 1997-1998 semakin meningkat oleh karena itu ada tuntutan dari gerakan reformasi di Indonesia (Haris, 2014). Agenda utama dari gerakan reformasi adalah mendorong Presiden Soeharto untuk mundur karena dianggap tidak bisa amanah dalam memimpin Indonesia (Ali, 2021). Dengan demikian, gerakan reformasi tahun 1998 memiliki beberapa agenda lain juga, seperti penegakan hukum dengan baik, penghormatan hak asasi manusia dan penghapusan dwi fungsi kepemimpinan dari angkatan bersenjata.

Penyimpangan-penyimpangan yang melahirkan krisis multidimensi dan menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi (Julijanto, 2015) diantaranya:

a. Krisis Hukum

Dalam bidang hukum, pemerintah melakukan intervensi, artinya kekuasaan kehakiman harus dijalankan untuk melayani kepentingan penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat secara penuh. Hukum sering digunakan sebagai alat untuk membenarkan penguasa. Fakta ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan.

b. Krisis Ekonomi

Krisis mata uang yang melanda negara-negara di Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia dan

tidak mampu mengatasi krisis global. Krisis ekonomi terjadi tidak terlepas dari kondisi yang berbeda, seperti utang luar negeri Indonesia yang besar sebagai penyebab krisis ekonomi, namun dengan adanya utang negara berdampak besar pada upaya mengatasi krisis ekonomi yang ada di Negara Indonesia.

c. Krisis Politik

Krisis politik yang muncul pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik dari pemerintah Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru selalu didasarkan pada kenyataan bahwa mereka adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila yang mejadi landasan utama. Namun yang sebenarnya terjadi, demokrasi yang dipimpin oleh pemerintah Orde Baru bukanlah demokrasi sejati, melainkan demokrasi buatan.

d. Krisis Sosial

Penerapan kebijakan yang represif dan anti demokrasi menimbulkan konflik politik serta konflik antar suku dan agama. Semua ini berakhir dengan pecahnya banyak kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan dalam perekonomian memberikan kontribusi terbesar terhadap krisis sosial. Dimana, banyaknya pengangguran, terbatasnya pasokan kebutuhan, tingginya harga kebutuhan, dan rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor yang mudah terkena dampak sosial di masyarakat.

e. Krisis Kepercayaan

Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun politik yang demokratis, sistem peradilan, menegakkan hukum, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat telah menimbulkan krisis kepercayaan. Semula, gerakan reformasi menuntut

potongan harga barang-barang kebutuhan pokok yang meroket sejak 1997. Tujuan reformasi itu juga menuntut MPR untuk tidak mengangkat Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya.

Langkah-langkah mengatasi krisis multidimensional, (Rahmawati et al., 2021) yaitu dengan cara:

- 1) Mengembangkan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.
- 2) Menempuh pendidikan karakter untuk mengajarkan budi pekerti yang baik.
- 3) Menyesuaikan perkembangan teknologi pada setiap waktu.
- 4) Memberantas para koruptor dengan serius karena koruptor adalah musuh negara yang nyata.
- 5) Masyarakat tidak boleh terlalu dipengaruhi oleh gaya dan perilaku orang Barat, karena sangat berbeda dengan tatakrama kita di Indonesia.

Dengan demikian agar krisis multidimensi dapat segera teratasi, masyarakat harus mulai membangun rasa saling percaya. Masyarakat Indonesia harus membutuhkan pengorbanan dan keikhlasan untuk dipimpin oleh orang-orang pilihan melalui sistem yang terpadu. Kerjasama pemerintah dan masyarakat harus berjalan baik agar fokus untuk menangani krisis multidimensi yang ada di Indonesia agar tidak terulang kembali.

2. Lahirnya Reformasi di Indonesia

Indonesia mengalami momen sejarah baru, yaitu proses reformasi tatakelola kepemimpinan di Indonesia. Adanya reformasi sebagai akibat dari adanya krisis multidimensi di Indonesia yang melibatkan bidang ekonomi, politik, sosial maupun ketentraman dan ketertiban di Negara Indonesia (Rokhmin & Samah, 2019). Keadaan yang sangat rentan juga berlanjut karena adanya perbedaan antara kasta di pemerintahan dengan masyarakat yang hidup menderita, yang tertekan dan tidak berdaya dalam menghadapi krisis moneter yang terjadi di Indonesia.

Gerakan reformasi yang dipimpin mahasiswa ketika itu, didorong oleh keprihatinan moral tentang berbagai krisis domestik yang disebabkan oleh melonjaknya kebutuhan hidup, meluasnya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan perilaku kepemimpinan yang menyimpang secara signifikan dari tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Gafur, 2015). Dengan demikian semangat reformasi menyebar ke semua bidang kehidupan masyarakat dalam rangka mengakhiri kekuasaan Orde Baru yang telah lama berkuasa memimpin Indonesia.

Secara universal reformasi di Indonesia dapat diartikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik dengan menata kembali apa yang tidak sesuai lagi, berbeda dengan kondisi kehidupan bernegara dan menyimpang dari struktur UUD 1945 (Dwiyanto, 2021). Indonesia salah satu negara yang mempunyai historis kelam dalam memperjuangkan keadilan rakyatnya dari pemerintahan yang otoriter. Sulitnya masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok merupakan faktor utama lahirnya gerakan reformasi di Indonesia. Gerakan

reformasi yang dipimpin oleh seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk menggulingkan kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang dipandang menjalankan roda pemerintahan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Arrobi, 2020).

Pergerakan reformasi adalah gerakan yang menginginkan sebuah perubahan dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan ke arah konstitusionalitas yang lebih baik. Maksudnya adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya menjadi lebih baik, lebih demokratis, dan berdasarkan prinsip kebebasan. Reformasi lahir sebagai menjawab atas krisis yang melanda berbagai aspek kehidupan di Indonesia (Klaudia & Wartha, 2020). Tujuan dari gerakan reformasi adalah untuk menata kembali tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang ada di Indonesia (Jones, 2015). Jadi dengan demikian faktor yang menyebabkan adanya gerakan reformasi di Indonesia, adalah ketimpangan sosial yang tidak seimbang, ketidakadilan dalam politik, ekonomi tidak seimbang, dan penegakan hukum tidak memihak kepada rakyat kecil.

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun tidak konsisten dalam implementasi cita-cita Orde Baru. Pada awal berdirinya pada tahun 1966, Orde Baru ditetapkan sebagai suatu pemerintahan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Thoha, 2016). Namun dalam kepemimpinan, pemerintah Orde Baru banyak melakukan penyelewengan dari nilai-nilai norma Pancasila dan ketentuan UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil.

Tujuan dari reformasi yang perlu diketahui, (Rivai, 2020) sebagai berikut:

- a. Menata kembali seluruh struktur negara, termasuk hukum dan ekonomi, agar tidak menyimpang dari perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia.
- b. Berubah secara sungguh-sungguh untuk menemukan nilai-nilai baru dalam berbangsa dan bernegara.
- c. Membawa perbaikan di segala bidang, baik bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.
- d. Menghilangkan gaya hidup masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan inovasi seperti tidak ramah lingkungan, otoriter, menyimpang, dan perilaku kasar lainnya.

Tujuan reformasi tentu saja dimotivasi oleh sesuatu yang menyebabkannya. Reformasi tentu tidak akan terjadi tanpa sebab. Berikut adalah beberapa alasan munculnya reformasi (Sumitro, 2014):

- a. Melemahnya kehidupan ekonomi setiap warga Indonesia sebagai akibat dari krisis multidimensi yang berlarut-larut tanpa batas waktu.
- b. Adanya penyimpangan, penyelenggaraan di bidang ketatanegaraan, termasuk di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum yang ada di Indonesia.
- c. Penyelenggara negara telah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang di luar moralitas sehingga melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan besar dan menekan kehidupan seluruh penduduk yang ada Indonesia.
- d. Tindakan penyelamatan diperlukan di semua bidang kehidupan, terutama yang mempengaruhi keinginan masyarakat untuk hidup.
- e. Gerakan reformasi harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang telah di ataur di Negara Indonesia.

Jadi setelah melihat tujuan dari reformasi, maka pemahaman dan penyebabnya harus diketahui. Reformasi merupakan titik balik bagi Negara Indonesia untuk berkembang ke arah yang lebih baik (Lestari & Ani, 2019). Untuk melakukannya, bangsa Indonesia harus memahami bahwa gerakan reformasi adalah merupakan pelajaran sebuah sejarah berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia yang tidak boleh dilupakan.

Perlu kita ketahui bahwa dampak dari reformasi yang dirasakan rakyat Indonesia sangat terasa sekali baik dari dampak negatif maupun dampak positif, berikut ini dua dampak yang sangat menonjol dari gerakan reformasi:

a. Dampak Negatif

Reformasi diatur oleh berbagai klausul MPR dan berbagai Undang-Undang baru, tetapi bahkan setelah lebih dari satu dekade, kesan reformasi gagal mencapai tujuannya. Meninjau kembali situasi pra-reformasi, tampaknya kekuatan utama saat itu harus demokratis, dan pemerintah yang terpusat harus didesentralisasi (Haris, 2014) Dari itu ada tekanan untuk pemerintahan yang tertutup dalam pengawasan harus lebih terbuka, transparan dan bebas terhadap masyarakat Indonesia.

Pemikiran yang rasional dan mencerdaskan bangsa harus didorong untuk menciptakan egoisme bagi individu dan kelompok, terlepas dari etika, moral, norma dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Menurut Aminah (2016) politik kekerasan banyak bermunculan dan berkembang mewarnai kehidupan dalam masyarakat di era reformasi sehingga sulit mengatasi konflik kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, munculnya era

reformasi sangat berdampak negatif juga bagi kehidupan masyarakat Indonesia sehingga gerakan reformasi terkesan politisasi yang tidak sehat sehingga memicu konflik baik di masyarakat maupun sesama politisi yang berkuasa.

b. Dampak Positif

Kita dapat merasakan efek positif dari reformasi, dan kita dapat melihatnya dalam berita dari media massa, di surat kabar dan di internet, dan dalam opini para pengamat berbagai bidang. Munculnya suasana dari reformasi seperti kebebasan pers, kebebasan akademik, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan berpikir sehingga pembebasan para penjahat politik (Ghofur et al., 2021).

Munculnya persepsi baru bahwa proses penipuan yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun dapat diubah oleh publik dengan bertindak, melakukan sesuatu, dan meruntuhkan ketakutan politik. Sebelum gerakan reformasi dimulai, semua orang merasakan kelemahan tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa sehingga enggan masuk perangah politik (Dani, 2022). Jadi pengalaman reformasi yang baru akan membuat masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, untuk menyadari, dan memperjuangkan kebijakan yang dapat membawa perubahan yang benar-benar positif. Kesadaran baru ini sangat penting dalam konteks perjuangan selanjutnya untuk reformasi yang lengkap dan komprehensif.

Menjalankan reformasi memang tidak mudah, tapi butuh waktu. Kita menghadapi dan menyaksikan berbagai jenis paradoks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama gerakan reformasi banyak perhatian diberikan kepada masyarakat luas, yang muncul selama penegakan hukum, pencegahan, penuntutan, dan reformasi eks KKN

(Hamson, 2021). Oleh karena itu, menyangkut ketertiban umum dan moral dan keamanan, termasuk perlindungan para reformis, terutama investor asing yang diharapkan mendapat perhatian serius dari otoritas terkait. Dikatakan, sangat diinginkan untuk memiliki tata kelola yang baik yang dapat menangani semua masalah krisis yang belum selesai.

Dengan demikian perlu juga didukung oleh masyarakat luas dan organisasi non-pemerintah. Organisasi-organisasi ini saat ini sebagian besar tidak menyadari keberadaan ruang publik untuk bertindak dan bekerja untuk membantu membangun dan memperluas kemampuan tata kelola yang baik sebuah negara. Untuk melihat hasil reformasi, diharapkan munculnya pemimpin yang dapat mengatasi tantangan bersama di tingkat nasional akan memberikan kepemimpinan yang benar-benar efektif dan dapat diterima secara universal. Tentunya melalui visi misi, dan program yang benar-benar dapat dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab.

C. *Konflik Etnis Tahun 1999*

1. Asal-Usul Tragedi Konflik Etnis di Sambas

Konflik antar masyarakat di Kabupaten Sambas merupakan suatu kejadian yang tidak terduga, pertama kali orang Melayu terlibat langsung dalam konflik khususnya dengan orang Madura. Selama ini telah terjadi konflik antara orang Madura dan Dayak di Kalimantan Barat, dimana mereka sering bertengkar. Mengingat berbagai faktor dan alasan yang menyebabkan konflik ini, dapat dianalisis dari sudut pandang struktural.

Konflik 1999 antara Melayu dan Madura di Sambas dapat ditelusuri kembali ke tahun 1992. Sengketa muncul di pedesaan,

khususnya petani jeruk Melayu berkonflik dengan Bimantara Citra Mandiri yang merupakan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan yang mencoba memonopoli pemasaran *limau* (jeruk). Ternyata masuknya BCM didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan sengaja memonopoli penjualan *limau* (jeruk). Sejak saat itu, orang Melayu Sambas khususnya, mengalami krisis ekonomi yang sangat parah sekali.

Selama krisis ekonomi, orang Melayu terpaksa menghadapi tekanan dari orang Madura. Para pendatang orang Madura dianggap berkuasa dengan kekerasan. Kedatangan orang Madura ke Kabupaten Sambas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun membuat orang Melayu semakin terdesak dalam kancah perekonomian, terutama akibat krisis jeruk yang semakin membuat frustrasi masyarakat Melayu di kampung halaman sendiri.

Kegiatan orang Madura dan Melayu didasarkan pada jenis pekerjaan yang sama, yakni sama-sama petani, dan memilih bekerja di pedesaan. (Jailani et al., 2003). Dari sekitar 400 responden Madura, 317 (79,5%) tidak berpendidikan atau buta huruf, dan 261 (65,25%), menurut survei migrasi mandiri Madura ke Kalimantan Barat, adalah responden ketika datang ke Kalimantan Barat. 268 responden lajang (67%) bekerja sebagai petani di kampung halaman, 191 (47,8%) dari Kabupaten Bangkalan dan 205 (52,2) dari Sampang. Sebagian besar dari mereka memiliki kurang dari 0,05 hektar tanah di kampung halaman mereka (Jailani et al., 2021)

Sebagian besar orang Madura yang datang ke Sambas datang dan bekerja dari petani dan buruh. Dari hasil kerja yang dilakukan oleh orang Madura ternyata terdapat tanda-tanda perebutan sumber daya

ekonomi, terutama di lahan pertanian pedesaan dan sektor korporasi, karena sama dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang Melayu. Munculnya gejala awal ketika orang Melayu diusir oleh orang Madura. Oleh karena itu, dalam hubungan antara pendatang dan masyarakat Melayu di Sambas, hubungan ekonomi cenderung ke arah subordinasi masyarakat setempat oleh pendatang baru.

Sebagian besar orang Madura datang ke Sambas menurut pola reinkarnasi mandiri tanpa dukungan pemerintah. Pola ini menimbulkan masalah besar bagi sektor pertanian, karena pendatang dari Madura adalah petani yang membutuhkan lahan pertanian untuk menopang penghidupan mereka. Hubungan ekonomi antara orang Melayu dan orang Madura telah dimulai dengan sangat baik. Namun seiring perkembangannya, hubungan tersebut berkembang menjadi tidak baik seperti mencoba mengelola tanah tempat dia bekerja dan mengusir majikannya. Hal yang sama terjadi ketika orang Madura sedang bekerja dan suatu saat diminta pergi, berbagai alasan mereka tolak. Dalam banyak kasus, orang Melayu akhirnya menyerah dan terpaksa menyerahkan kepemilikan tanah mereka tanpa pertimbangan lagi.

Dengan pecahnya konflik pada tahun 1999, orang Madura yang tidak memiliki lahan pada saat kedatangan, mampu mengelola 6.694,78 hektar lahan garapan dan perkebunan, menurut pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sambas. Sebagian besar tanah yang mereka miliki tidak bersertifikat dan tidak memiliki kepemilikan yang sah. Sebagian besar pemilik hanya memiliki Surat Keterangan Tanah (SPT) dan/atau Surat Keterangan Tanah (SKT). Terjadi perpindahan kepemilikan tanah pertanian dan sengketa lokasi tambang batu dan tanah uruk. Dalam

perjuangan ini, banyak orang Melayu yang gagal mempertahankan kepemilikan tanahnya.

Konflik tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi di hutan para penebang kayu di perbatasan Indonesia-Malaysia, ternyata terjadi pertempuran seru antara Madura dan Melayu. Sebelum orang-orang Madura memasuki bisnis kayu, orang Melayu sudah lama terlibat dalam bisnis tersebut. Berjalannya waktu, banyak orang Madura yang tertarik untuk berpartisipasi dalam bisnis kayu, sehingga orang Melayu dengan mudah mengalah dalam bisnis dari bagian kawasan hutan perbatasan sehingga menimbulkan persaingan yang menyebabkan konflik antar pekerja Melayu dan Madura.

Selain dari sektor pertanian, faktor lain munculnya konflik adalah perebutan bisnis di sektor transportasi. Hal ini penting karena bisnis jasa transportasi merupakan urat nadi sumber pendapatan yang menghasilkan pendapatan yang menjanjikan ketika itu. Ketika bidang ini pertama kali dikuasai oleh orang Melayu beralih ke dominasi orang Madura, sehingga menimbulkan persaingan dan gesekan yang tidak sehat (Suroyo, 2021).

Konflik antar suku di Kabupaten Sambas merupakan masalah besar, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah, seringkali dengan kesalahpahaman dan kecemburuan sosial. Ada juga persaingan antara orang Melayu dan Madura di sektor informal seperti penguasaan terminal bus dan calo penumpang pelabuhan, tukang ojek, jasa penyeberangan sungai, dan penghancur batu. Orang Melayu dan orang Madura memiliki etos kerja yang sama kuat (Doddy, 2021)

Budidaya jeruk merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Sambas. Perkebunan jeruk ini telah dibudidayakan secara

besar-besaran sejak tahun 1978 dan mencapai puncaknya di tahun 1992 dan 1993 terkena virus antrak. Berdasarkan jumlah produksi pada tahun 1992, sentra produksi jeruk di pantai utara dihuni oleh 524.361 jiwa atau 68,02 jiwa. Sebagai sentra utama produksi jeruk, Kabupaten Tebas dan Pemangkat berpenduduk 163.289 jiwa, atau 31,14% dari total penduduk kabupaten sentra penghasil jeruk, atau 21,18% dari total penduduk Kabupaten Sambas saat itu (Suta, 2003)

Awal dari pemberlakuan tata niaga jeruk oleh pemerintah pada tahun 1992. Skema Tata Niaga Jeruk merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah Kalimantan Barat yang bertujuan untuk mengatur mekanisme perdagangan jeruk. Kebijakan ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dari Gubernur KDH Tk.I Kalbar. Keputusan tersebut bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh para pelaku sistem perdagangan tanpa menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelakunya. Surat Keputusan Gubernur diterbitkan dengan pada tanggal 15 April 1988. Kep. Nomor 88 tahun 1988 mengatur proyek percontohan untuk mempromosikan petani dan mencatat produksi di Distrik Tebas di Kabupaten Sambas (Haryono & Winarno, 2003) inilah awal mulanya jeruk Tebas mengalami kemunduran tidak bersinar lagi sebagai sentral budidaya jeruk terbesar di Kabupaten Sambas.

Kebijakan ini diberlakukan selain untuk mengatur perdagangan jeruk dan membuat Koperasi Unit Desa (KUD) bekerja lebih baik. Oleh karena itu, sebagai pelaksana teknis kebijakan tata niaga jeruk, KUD dalam hal ini adalah PUSKUD Kalbar. Dalam pelaksanaan sehari-hari, PUSKUD bekerja sama dengan PT. HUMPUSS. Namun karena kendala modal dan infrastruktur, kerjasama ini tidak berlangsung lama. Tahun

1991, pemerintah Kalimantan Barat mengangkat PT. Bimantara Citra Mandiri sebagai Koordinator Eksekutif Sistem Perdagangan Jeruk, Melalui Pergub 296 Tahun 1991.

Setelah bergabung dengan PT. Bimantara Citra Mandiri sangat merugikan petani karena harga jeruk setelah perusahaan berdiri cenderung lebih rendah dibandingkan sebelum perusahaan berdiri. Hal ini dipengaruhi oleh pola tata niaga jeruk. Disini ada permainan oknum di perusahaan tersebut sehingga harga jeruk bisa anjlok dan merugikan petani jeruk di Kabupaten Sambas. Sejak saat itu, orang Melayu yang berprofesi sebagai petani jeruk mengalami krisis ekonomi yang sangat besar. Di tempat lain, orang Melayu yang berprofesi sebagai pekerja menebang kayu di hutan, jasa transportasi, tukang ojek, dan lain-lain, juga terjebak dalam penguasaan tanah oleh orang Madura di sektor informal. Akibat situasi ini, banyak generasi muda orang Melayu terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja seperti ke Malaysia, karena Negara Malaysia adalah berdampingan dengan Kabupaten Sambas sebagai negara perbatasan Indonesia-Malaysia.

Orang Madura adalah minoritas baik dari segi jumlah maupun kekuatannya. Namun, karena kesuksesan finansial orang Madura, beberapa orang mulai terjun ke dunia politik yang ada di Kabupaten Sambas. Dalam hubungan antara mayoritas dan minoritas, ada banyak contoh dominasi minoritas di zona ekonomi ini. Itu tidak berhenti di satu area dan bisa menyebar ke area kehidupan lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Rothhschild (1981) yaitu minoritas yang telah mencapai dominasi ekonomi cenderung memperluasnya ke kesadaran budaya dan kekuatan politik.

Menurut Syarif Ibrahim Alqadrie melihat kepemimpinan politik berkontribusi pada konflik. Para pemimpin seperti gubernur dan bupati, dipandang tidak mampu mengendalikan banyak suku sebagai kekuatan untuk menggerakkan kepentingan bersama. Di sisi lain, perbedaan yang ada dituntut untuk menjadi salah, membuat mereka lebih rentan terhadap konflik horizontal. Taktik ini adalah bagian berdasarkan upaya mempertahankan kekuasaan dan memperkuat kepemimpinan (Ramadhan, 2021).

Di tingkat desa, orang Madura mampu mempertahankan posisinya sebagai perangkat desa, seperti kepala Desa dan kepala Dusun. Hal ini terjadi di Desa Rambayan A dan Sempadian. Keberhasilan diberbagai sektor hingga mampu masuk dalam dunia politik, hal ini menunjukkan bahwa eksistensi orang-orang Madura sangat berpengaruh ketika itu. Kronologis konflik antar suku di Sambas tahun 1999 dimulai dengan ditangkapnya orang Madura dari Desa Sari Makmur di Kabupaten Tebas, di mana mereka ditangkap karena mencuri sepeda motor dari sebuah rumah Melayu di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Peristiwa ini terjadi pada 17 Januari 1999. Hasan yang diduga maling ditangkap warga dan dipukuli sebelum diserahkan ke Polsek Jawai. Selanjutnya, teman dari Hasan dari Desa Sari Makmur mediasi ke Polres Jawai dan merekomendasikan ke petugas agar temannya yang titahan segera dibebaskan (Cahyono et al., 2008).

Kembalinya Hasan yang terluka akibat pemukulan itu membuat marah keluarganya. Pada tanggal 19 Januari 1999, hari pertama di raya Idul Fitri sekitar 300 orang Madura di Desa Salimamur menyerang orang-orang Melayu di Desa Parit Setia. Akibatnya, tiga orang tewas,

termasuk dua orang Melayu dan satu orang Dayak yang pindah agama ke Agama Islam. Setelah kejadian tersebut, dilakukan upaya untuk berdamai yang ditengahi oleh Camat Tebas, namun pihak Melayu tidak puas karena penyerangan tersebut sudah melampaui batas. Menurut keterangan korban, orang yang terlibat langsung dalam penyerangan yang diyakini sebagai tersangka, bukanlah penjahat sebenarnya dan masih menjadi teka-teki atau tidak diketahui. Orang Melayu menuntut agar semua pelaku diadili, tetapi hanya satu yang ditangkap, anak seorang kepala desa yang memiliki truk untuk mengangkut orang Madura ketika diserang. Sementara itu, orang Melayu ditangkap hingga delapan orang, semuanya mengakui melakukan tindakan yang memicu kemarahan orang Madura terhadap Melayu (Mendayun & Setiawan, 1999).

Pada bulan yang sama, pembakaran dan penyerangan di Desa Madura di beberapa bagian seperti di Desa Selakau, Samalantan, Sanggau Ledo, dan beberapa bagian di desa Kalimantan Barat menyisakan konflik yang belum terselesaikan. Orang-orang Madura melarikan diri dan dikejar ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Kemudian datanglah massa mencapai sekitar 1.000 orang, dan massa bergerak ke beberapa arah untuk membakar rumah orang Madura. Sore harinya, seorang warga Madura yang baru saja datang dari melaut setelah empat hari melaut, tewas saat menjual ikan. Konflik perang besar-besaran juga terjadi di Desa Mentibar dan di Pegunungan Selindung. Api yang menghancurkan rumah orang Madura itu mulai padam dan tersisa puing-puing rumah yang terbakar lagi. Mulai pertengahan pekan berikutnya, aparat keamanan dikerahkan ke titik kerusuhan di wilayah Kabupaten Sambas. Menurut informasi,

kerusuhan antar etnis di Kabupaten Sambas ribuan pengungsi berdesakan di penampungan sementara, yang menimbulkan masalah baru lagi (Mendayun & Setiawan, 1999).

Secara keseluruhan, data resmi pasca-konflik tahun 1999 menunjukkan bahwa konflik tersebut merenggut nyawa 200 orang (Cahyono et al., 2008) dan evakuasi 58.544 orang Madura dari Kabupaten Sambas. Sejauh ini, perselisihan telah diselesaikan oleh pemerintah dengan mengeluarkan orang Madura dari Sambas ke Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Dalam keadaan ini, orang Madura tidak akan bisa kembali lagi ke wilayah asalnya yaitu Kabupaten Sambas. Ketika orang Madura hendak pulang, terjadi penolakan keras oleh orang Melayu Sambas tidak bisa masuk ke Daerah Sambas. Warga Sambas pendapat mengenai wilayah yang boleh dimasuki oleh orang Madura, di batas Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa kemarahan orang Melayu Sambas sudah di luar batas kesabaran mereka. Akibat konflik ini, segala dengan aspek kehidupan orang-orang Madura yang hendak memasuki Kabupaten Sambas identitas harus di periksa terlebih dahulu sehingga para pengusaha dan pedagang Madura takut untuk mengembangkan usahanya di wilayah Kabupaten Sambas.

2. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perdamaian Konflik Antar Etnis di Sambas

Kalimantan Barat memiliki sejarah panjang konflik etnis khususnya di Kabupaten Sambas, dengan berbagai kerusuhan sosial, terutama tragedi yang hampir tak ada habisnya kerusuhan antara etnis Dayak dan etnis Madura. Orang Melayu juga memiliki dendam sangat subyektif yang luar biasa terhadap orang Madura, namun orang Melayu

masih mempertahankan budayanya sehingga tidak dicampuri oleh budaya orang lain dan tetap idealis terhadap budaya dan tradisi Sambas. Konflik antar suku di Kabupaten Sambas mendapat respon dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, namun hasil kesepakatan tetap dilanggar, karena ketidaksepakatan dan kurangnya toleransi antar suku dalam kehidupan sosial Masyarakat. Keikutsertaan pemerintah dalam penyelesaian konflik di Kabupaten Sambas tidak berdampak apa-apa, dan upaya perdamaian berupa eskalasi konflik umumnya tidak berhasil menemui kesepakatan. Pemerintah berusaha bertindak cepat dalam penanganan konflik horizontal kemanusiaan, namun tetap terhambat terhadap penanganan korban jiwa konflik dalam penempatan pengungsi dan pengelolaan harta benda yang oleh orang Madura di Kabupaten Sambas.

Peran terakhir ini kemudian dibantu dengan terbitnya surat edaran dari Bupati Sambas untuk melakukan inventarisasi tanah orang Madura. Namun masih ada kendala dan kesulitan dalam pemberian sertifikat tanah, status tanah yang tidak jelas, sehingga orang Madura sulit mendapatkannya kembali harta mereka. Kedatangan Brimob dari Jawa dan Kaltim benar-benar membuat kerusuhan semakin rusuh dan tidak terkendali. Memang, tindakan dan perilaku agen di tempat kejadian menyebabkan interpretasi yang berbeda antara etnis yang berkonflik (Cahyono et al., 2008). Dengan kejadian itu orang Melayu menduga pasukan pengamanan dari Jawa dikarenakan Madura juga dari Jawa sehingga ketidakberpihakan kepada orang Melayu.

Terlepas dari informasi yang didapatkan, kerusuhan di Kabupaten Sambas dipengaruhi oleh hilangnya otoritas kepercayaan di mata publik. Terkait kejadian awal Januari 1999, aparat tidak menindak

para pelaku pencurian di Desa Parit Setia sehingga menimbulkan ketegangan antar suku. Tragedi Parit Setia pada 19 Januari 1999 merupakan pecahnya konflik. Ketika konflik etnis pecah, aparat keamanan tampaknya mengalami kesulitan dalam kontrol di masyarakat terhadap etnis yang berkonflik.

Aparat keamanan perlu mengenali dan mengantisipasi potensi perluasan konflik. Kelemahan ini juga terkait dengan sangat terbatasnya jumlah penjaga yang tersedia di lokasi. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi tampaknya menghindari isu penyelesaian sengketa. Bahkan saat dialog berlangsung, Pemda Sambas tidak berani menjamin resiko jika pemprov tidak melindungi warga Madura yang hendak pulang ke Sambas. Tampaknya tidak ada koordinasi antara Pemda Sambas dan Pemprov Kalimantan Barat dalam menangani penyelesaian konflik di Kabupaten Sambas, terutama dalam menangani masalah pengungsi.

Pendekatan secara internal pada umumnya merupakan cara untuk meyakinkan orang Melayu Sambas, bahwa orang Madura ingin membangun citra positif ketika kembali ke Sambas dan orang Madura tidak ingin menimbulkan permasalahan baru ketika mereka kembali ke Kabupaten Sambas. Beberapa kelompok masyarakat telah mengangkat isu perdamaian di Kalimantan Barat dan meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat adat melalui sosialisasi yang ditujukan kepada orang Madura. Keharmonisan dan kenyamanan orang Melayu dalam perjalanan ke Pontianak sekebaliknya mereka secara langsung memberi tahu kerabat mereka bahwa orang Madura telah melayani orang Sambas dengan baik. Sehingga orang Madura, Melayu, maupun Dayak perlu membangun kesan positif agar bisa

menghilangkan prasangka dan stereotip ketidakpercayaan dari mereka yang pernah mengalami konflik.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa pada kenyataannya simbol-simbol kekerasan terhadap orang Madura di Kalimantan Barat sudah mulai melunak, termasuk di Kota Pontianak, orang Madura tidak lagi ingin memakai arit sebagai alat senjatanya meskipun hanya beberapa, mereka tidak lagi tanggap dan relatif sudah berusaha belajar untuk lebih mudah berinteraksi dengan baik antar etnis, terutama pada etnis Melayu. Peran monopoli etnis telah terpenuhi, tetapi rekonsiliasi belum tercapai. Terjadinya konflik antar etnis di Kabupaten Sambas tidak lepas dari permasalahan sebelumnya. Orang Melayu Sambas sebagian besar bekerja di bidang pertanian dan perikanan dengan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 1992 di Sambas, pohon jeruk mulai dikembangkan bagi petani untuk membuka lahan untuk menanam jeruk. Pada waktu itu taraf hidup petani jeruk naik.

Diakses yang nyaman dan mudah dijangkau di banyak daerah, imigran menggantikan peran orang Sambas sebagai aktor baru. Namun pekerjaan padi, kelapa, kelapa, karet dan nelayan membantu mereka, sehingga masyarakat Sambas yang berprofesi sebagai petani bisa hidup. Secara struktural, banyak orang Madura yang memiliki tanah dan tambang, dan beberapa duduk di DPR.

D. Penutup

Krisis multidimensi merupakan situasi dimana suatu negara mengalami banyak konflik dengan berbagai kompleksitas di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan moralitas bangsa. Krisis yang

dimulai dengan krisis ekonomi telah meningkat menjadi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan nilai-nilai sosial dari masyarakat. Krisis telah mempengaruhi banyak bidang keuangan, ekonomi, politik, hukum dan kepercayaan publik. Masyarakat harus menuntut pengorbanan dan integritas agar dapat dipimpin oleh pemimpin yang memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Terjadinya konflik ini juga ada ketidaktegasan pemerintah daerah dalam kebijakan sehingga masyarakat berada dalam ketidakadilan kepemimpinan, sehingga masyarakat tertekan dan tidak berdaya menghadapi krisis yang melanda Indonesia. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar menjadi faktor kunci lahirnya gerakan reformasi di Indonesia. Dengan munculnya reformasi tersebut diharapkan pemerintahan daerah maupun pemerintahan provinsi yang mampu mengatasi tantangan konflik yang terjadi di daerah yakni konflik antar etnis sehingga benar-benar dan bertanggung jawab.

Konflik etnis di Kabupaten Sambas merupakan masalah besar, menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah agar konflik serupa tidak terulang lagi. Munculnya konflik etnis di Kabupaten Sambas merupakan peristiwa yang tidak terduga, pertama kali orang Melayu terlibat langsung dalam konflik, terutama dengan orang Madura. Akibat kerja yang dilakukan oleh orang Madura, tampak tanda-tanda persaingan sumber daya ekonomi, terutama lahan pertanian pedesaan dan sektor korporasi, seperti kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang Madura yang dilakukan oleh orang Melayu. Orang Madura mampu memasuki dunia politik di berbagai bidang menunjukkan bahwa keberadaan orang Madura sangat berpengaruh saat itu. Kerukunan antar etnis sangat diperlukan untuk merajut keharmonisan pada masyarakat dan

pemerintahan harus benar-benar memperhatikan masalah keharmonisan antar etnis baik di tingkat daerah maupun provinsi agar tercipta kedamaian dan ketentraman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Alfian, Y. & Rusdia, A. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aminah, S. (2016). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arrobi, M.Z. (2020). *Islamisme Ala Kaum Muda Kampus: Dinamika Aktivisme Mahasiswa Islam di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia di Era Pasca Soeharto*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Budiarti, A.P. et al. (2019). *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cahyono, H., Traymo, M.W., Adam, A.W., Setriani, S. (2008). *Konflik Kalbar dan Kalteng: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI.
- Damanik, D. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Dani, R. (2022). *Reformasi Administrasi*. Sumatera Barat: Azka Pustaka.
- Danil, E. (2016). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ali, D.J. (2021). *Runtuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: CeraH Budaya Indonesia.
- Doddy, I.D. (2021). *Peristiwa Sambas di Kalimantan Barat 1999*. Jambi: Universitas Jambi.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Fuadi, A. (2020). *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perikat Bangsa*. Jakarta: Deepublish.
- Gafur, H. (2015). *Mahasiswa & Dinamika Dunia Kampus*. Bandung: Rasi Terbit.
- Ghofur, M.A, Widodo, H.P., Jara, A.B.J.J., Qorib, F. (2021). Demonstrasi Mahasiswa 'Tolak Reformasi Dikorupsi' Dalam Agenda Media Tirto.Id. *KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah*, 11(1), 13-28.

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/komunida/article/view/192>.

- Hamson, Z. (2021). *Membedah Anatomi Korupsi*. Jawa Tengah: Penerbit NEM.
- Haris, S. (2014). *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hariyanto, E. (2020). *Mewaspadaai Terulangnya Krisis Ekonomi 1998 & Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: TAZKIA.
- Harris, K.M.A. (2021). Sekularisasi Etika dan Krisis Moral Masa Kini. *Afkar-Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 23(2), 121–70.
<http://jice.um.edu.my/index.php/afkar/article/view/34353>
(16 Maret 2022).
- Haryono, D. & Winarno, B. (2003). The Struktur Faktors Cousing the Conflict Between the Malay and Madura Etnics at Sambas District of West Kalimantan. *Sosiohumanika Jurnal Gajah Mada*.
- Jailani, M., Dewantra, J.A., & Rahmani, E.F. (2021). The Awareness of Mutual Respect Post-Conflicts: Ethnic Chinese Strategy through Social Interaction and Engagement in West Kalimantan. <https://doi.org/10.1080/10911359.2021.1990170>.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10911359.2021.1990170>.
- Jones, T. (2015). *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke 20 Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Julijanto, M. (2015). *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Karianga, H. (2015). *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khamim, M. (2021). *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah*. Jawa Tengah: Penerbit NEM.
- Klaudia, M. W. & Wartha, I.D.B. (2020). Perkembangan Politik dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 10(1), 69–

75. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jsp/article/view/699>.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lestari & Ani, R. (2019). Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1). <http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/142>.
- Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Jakarta: Guepedia.
- Maarif, A.S. (2019). *Mencari Autentitas Dalam Dinamika Zaman*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mendayun, R.F. & Setiawan, I. (1999). Mereka Lari ke Malaysia. www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/04/01/009.
- Miswardi, N & Antoni. (2021). Etika, Moralitas dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu*, 15(2). <http://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu>.
- Morissan. (2018). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio Dan Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qadaruddin, M. (2016). *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ramadhan, I. (2021). *Sosiologi Etnik Dan Ras*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.
- Rahmadana, M.F. et al. (2020). *Pelayanan Publik*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Rahmawati, Azizah, R.N. & Trisiana, A. (2021). Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 146–57. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/4719>
- Rivai, V. (2020). Reformasi Birokrasi Pemerintah Perwujudan Good Governance Melalui Pemerintahan Yang Efisien, Efektif dan Produktif. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 10(4), 17–33.

<http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/388>.

- Rodin, R. (2020). *Informasi Dalam Konteks Sosial Budaya*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rokhmin & Samah, K. (2019). *Gerakan Reformasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rothhschild, J. (1981). *Etnopolitics, A. Conceptual Frame Work*. Colombia: University Press, Ny.
- Simanjuntak, B. A. (2013). *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik Dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soedarsono, S. (2010). *Karakter Mengenal Bangsa Gelap Menuju Terang*. Jakarta: Gramedia.
- Soekarnoputri, M. (2021). Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(1), 49-66. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/1211>.
- Suleman, A.R. (2021). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sumitro, W. (2014). *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi Di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Suparno, B.A. (2012). *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Suroyo, S.H. (2021). *Mengurai Pertikaian Orang-Orang: Migrasi Swakarsa Orang-Orang Madura Ke Kalimantan Barat*. Jakarta: ISAI.
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Suta, P B. H. (2003). *Konflik Antar Komunitas di Sambas 1999; Suatu Tinjauan Budaya*. Pontianak: Romeo Grafika.
- Thoha, M. (2016). *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjahjoko, G.T. (2020). *Uang Makan Orang: Politik Etnis dan Politik Uang Dalam Pilkada*. Mentawai: Pohon Tua Pustaka.

- Tobari. (2015). *Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Turmudi, E. (2021). *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik Dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

PEMEKARAN WILAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT

Jamiat Akadol dan Iwan Kusnadi¹

A. *Pendahuluan*

Pemekaran wilayah adalah istilah yang paling banyak dibicarakan baik di masyarakat, dunia akademis juga di lingkungan pemerintahan. Istilah pemekaran wilayah ada juga yang menyebutnya sebagai pemekaran daerah (Makagansa, 2008). Bahkan pembentukan daerah paling menarik untuk dikaji sejak era reformasi tahun 1999, yakni ketika ditetapkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah (Wahidin, 2013). Meski UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara efektif dilaksanakan pada tahun 2001, tapi pengaruhnya terhadap perkembangan politik lokal dalam negeri sangat luar biasa (Said, 2008). Tuntutan pemekaran wilayah begitu besar dari daerah, terlebih dari daerah yang kaya karena sumber daya alamnya melimpah yang selama ini dinilai hanya menguntungkan pemerintah pusat (Hasibuan et al., 2002).

Bersamaan dengan ditetapkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pula UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tersebut, meski nanti resmi terhitung *full* operasional pada tahun 2001, namun pantas disebut justru dampaknya berhasil meredam teriakan daerah untuk merdeka (separasi/sesionis). Artinya selintas disimpulkan pemekaran daerah

¹ Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si., MH Rektor IAIS Sambas dan Iwan Kusnadi, SE., ME Dosen Tetap IAIS Sambas

malah berfungsi menjadi semacam mekanisme khas peredam disintegrasi (Makagansa, 2008).

Dua paket UU tentang Otonomi Daerah tersebut ternyata mampu meredam suara keras daerah kaya seperti Riau, Kalimantan Timur, Aceh Nangro Darussalam. Bahkan Papua ingin mendirikan daerah sebagai negara federasi yang berarti bukan lagi sebagai Negara Kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dapat ditenangkan (Dewantoro, 2001).

Berbeda dengan desakan pemekaran di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang berdasarkan PP No. 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan. Kabupaten Sambas telah mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah pusat yakni sebagai satu-satunya daerah di Kalimantan Barat yang ditunjuk sebagai daerah otonomi percontohan. Ternyata otonomi percontohan tidak memuaskan warga Kabupaten Sambas karena justru pada tahun 1996 mengusulkan pemekaran Kabupaten Sambas menjadi tiga daerah yaitu Kabupaten Sambas dengan ibukotanya Sambas atau pindah dari Singkawang ke Sambas, Kabupaten Bengkayang di Bengkayang dan Kota Singkawang di Singkawang. Salah satu alasan utama pemekaran tersebut karena di Kabupaten Sambas penduduknya banyak, terbanyak di Kalimantan Barat dan sering terjadi kerusuhan sosial antar suku yang ada. Di lain pihak ketimpangan pembangunan antara Singkawang sebagai ibukota Kabupaten Sambas dengan kecamatan di luar Kota Singkawang sangat nyata sehingga sebagian tokoh masyarakat ingin mengembalikan ibukota Kabupaten Sambas ke Sambas. Sementara itu, masyarakat wilayah Bengkayang ingin pemekaran dengan Kabupaten Sambas lebih

pada politik “berbagi kekuasaan” antar etnis yang diterapkan di Kabupaten Sambas untuk menghilangkan pemicu kekerasan dan mencegah terulangnya konflik yang terjadi tahun 1997 dan 1999 (Tanasaldy, 2007).

Kajian ini sengaja dibuat sebagai sumbangan pengalaman dan hasil penelitian penulis ketika bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan terlibat langsung dalam penyusunan usul pemekaran Kabupaten Sambas. Kemudian pindah Ibukota ke Sambas dan selanjutnya terlibat dalam berbagai program pembangunan di Kabupaten Sambas dalam kedudukannya sebagai pejabat birokrasi dari staf hingga jabatan tertinggi di Kabupaten Sambas. Sebagai alat ukur untuk menilai dampak pemekaran Kabupaten Sambas, penulis menggunakan data perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan data lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Untuk mempertajam analisis, penulis menggunakan, dasar kebijakan pembangunan perbatasan negara yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas.

B. *Otonomi Daerah dan Pemekaran Kabupaten Sambas*

1. Alasan Pemekaran Kabupaten Sambas

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian pendahuluan bahwa pemekaran Kabupaten Sambas tahun 1999 sangat unik. Pemekaran Kabupaten Sambas diidentifikasi sebagai berikut: *pertama*, Kabupaten Sambas sebagai salah satu daerah otonomi percontohan di Indonesia yang ditetapkan dengan PP No. 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Dati II Percontohan sebagai tindaklanjut dari PP No. 45 Tahun 1992 tentang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Dati II dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 1994 tentang Pembentukan Tim Teknis Percontohan Otonomi Daerah pada Dati II. (Joso, 1986). Sebagai daerah otonomi percontohan, Kabupaten Sambas berarti mendapat limpahan wewenang urusan pemerintahan yang banyak karena meliputi seluruh urusan pemerintahan, kecuali urusan pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri, moneter dan sebagian urusan pemerintahan umum yang menjadi wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah dan urusan pemerintahan lainnya yang secara nasional lebih berdayaguna dan berhasilguna tetap diurus oleh pemerintah (Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1992). Terjadi perubahan yang luar biasa dimana dinas daerah yang selama ini sangat sedikit (ada 4 dinas daerah) menjadi 23 perangkat daerah. Seluruh aset dan pegawai pusat dan provinsi yang ada di Kabupaten Sambas diserahkan menjadi milik Kabupaten Sambas, kecuali urusan pusat dan provinsi yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan provinsi.

Kedua, sebagian tokoh masyarakat Kabupaten Sambas ternyata tidak puas dengan otonomi percontohan dimana kewenangan daerah menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sebagian tokoh masyarakat Melayu dari wilayah Sambas menginginkan ibukota Kabupaten Sambas kembali ke Kota Sambas karena berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959 tentang UU Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan di Sambas, namun pada awal 1960 ibukota Kabupaten Sambas pindah ke Singkawang (Tanasaldy, 2007).

Sementara itu, masyarakat Suku Dayak yang berasal dari wilayah Bengkayang menginginkan adanya pemekaran Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang menjadi Daerah Otonomi

tersendiri. Keinginan pemekaran Kabupaten Sambas dan membentuk Kabupaten Bengkayang pada dasarnya berkaitan dengan *power sharing* dan pemberian akses ke birokrasi. Pemerintah mempercepat pembentukan Kabupaten Bengkayang agar orang Dayak bisa memiliki daerah, tempat mereka bisa memerintah, salah satu tujuannya adalah mencegah terulangnya konflik etnis yang diwarnai kekerasan (Tanasaldy, 2007). Kemudian, Kota Singkawang yang dihuni mayoritas Suku Tionghoa pada saat itu sebagai kota administratif yang meliputi Kecamatan Pasiran dan Roban juga berharap agar Singkawang menjadi Kotamadya Dati II Singkawang.

Berdasarkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Dati II Sambas melakukan berbagai langkah konkrit untuk pemekaran Kabupaten Sambas menjadi tiga Dati II. Dibentuklah Tim Pemekaran Kabupaten Dati II Sambas dan melakukan studi banding ke berbagai daerah yang telah dimekarkan antara lain Kabupaten Dati II Tanggamus di Provinsi Dati I Lampung. Tim juga berkonsultasi ke Gubernur dan salah satu Dirjen di Departemen Dalam Negeri.

Ketiga, kerusuhan sosial (konflik) antar Suku Madura dan Dayak tahun 1997 dan antara Suku Madura dengan sebagian besar suku yang ada di Kabupaten Sambas (terutama Melayu) tahun 1999 semakin meyakinkan tokoh masyarakat dan Pemerintah Dati II Sambas untuk mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Sambas menjadi tiga Dati II. Kerusuhan sosial sebenarnya sudah seringkali terjadi di Kabupaten Sambas, terutama antara Suku Dayak dengan Suku Madura. Namun kerusuhan sosial yang terjadi pada tahun 1997 sangat berbeda dari kerusuhan sosial sebelumnya. Tambahan pula krisis moneter yang

melanda hancurnya nilai tukar rupiah dari semula sekitar Rp2500/1 US \$ menjadi sekitar Rp 17500/1 US \$ memperparah situasi keamanan negara dan daerah pada saat itu. Perekonomian Indonesia saat itu benar-benar ambruk dan mulai terjadi krisis multidimensi (Tanasaldy, 2007).

Krisis moneter pada tahun 1997 tidak hanya menyebabkan perekonomian dunia terutama di kawasan ASEAN berantakan, tetapi lebih jauh berdampak pada krisis sosial dan politik bahkan keamanan dan ketertiban (Cheema & Popovski, 2010). Krisis sosial terjadi diberbagai pelosok tanah air seperti di Ambon, Palu, Jakarta, Kalimantan Barat dan sebagian di Jawa Barat. Karena terjadi kerusuhan suku bangsa yang ada di Indonesia tersebut, rasa tidak aman untuk beraktivitas bagi masyarakat terjadi dan memperburuk krisis ekonomi saat itu. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal karena dibakar atau dirusak oleh perusuh. Akibatnya, rumah ditinggal termasuk kegiatan usaha pertanian, peternakan dan perdagangan ditinggal untuk mengungsi ditempat yang lebih aman. Kondisi mencekam benar-benar dirasakan oleh masyarakat (Acemoglu & Robinson, 2012).

Negara yang seharusnya memberikan perlindungan rasa aman bagi seluruh warga negara tidak dirasakan pada saat kerusuhan tersebut. Luasnya wilayah konflik dan terbatasnya jumlah petugas dan sarana-sarana keamanan menambah masalah kurangnya rasa aman masyarakat (Acemoglu & Robinson, 2012). Kabupaten Dati II Sambas pada tahun 1997 meliputi wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang dengan luas mencapai lebih kurang 1.200.000 Ha dengan penduduk berjumlah lebih kurang 800.000-an orang. Aparat keamanan hanya ada di Kota Singkawang dan sebagian kecil di kecamatan (saat itu

ada 17 kecamatan). Demikian pula aparat pertahanan (TNI) hanya terkonsentrasi di sekitar Kota Singkawang dan kota-kota kecil yang jumlahnya sangat terbatas. Terlebih infrastruktur jalan dan peralatan transportasi serta komunikasi juga belum banyak justru memperburuk terjadi kerusuhan sosial. Aparat tidak mampu mengamankan kerusuhan di suatu tempat, sementara terjadi kerusuhan yang sama diberbagai tempat lainnya (Tanasaldy, 2007).

Menyikapi lemahnya perlindungan keamanan oleh negara terhadap warga negara saat itu, makin mendorong para tokoh masyarakat untuk segera mewujudkan pemekaran Kabupaten Sambas. Hal tersebut terungkap dalam berbagai kesempatan bertemu dengan pejabat pemerintah dari Provinsi Kalimantan Barat dan dari Pemerintah Pusat.

Keempat, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sangat berpengaruh besar kepada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun, yaitu Jenderal Soeharto. Ketidakpercayaan itu diungkap dalam berbagai unjuk rasa (demo) oleh mahasiswa diseluruh penjuru Indonesia (Sufianto, 2016). Mahasiswa menyuarakan aspirasinya untuk melakukan reformasi dan pergantian penguasa yang dinilai sudah tidak mampu mensejahterakan rakyat. Sementara para tokoh masyarakat memanfaatkan situasi konflik tersebut untuk mendorong perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis karena di zaman orde baru, pemerintahan sangat sentralistis dan otoriter (Mietzner & Aspinall, 2010).

Tuntutan reformasi dengan jorgan hapuskan “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)” begitu meluas baik bagi kalangan intelektual, juga bagi rakyat jelata (Latif, 2014). Negara benar-benar tidak mampu

mengatasi konflik yang terjadi. Pada tahun 1998 terjadi konflik sosial yang luar biasa terjadi diberbagai tempat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Mahasiswa semakin meningkatkan aksi demonya dengan menduduki gedung DPR/MPR di Jakarta. Dilain pihak sekelompok masyarakat melakukan tindakan anarkis dengan merusak fasilitas umum dan bahkan fasilitas perkantoran dan perdagangan (Acemoglu & Robinson, 2012).

Situasi keamanan sudah tidak terkendali. Aparat melakukan kegiatan refresif yang berakibat banyak korban nyawa. Masyarakat justru semakin brutal dengan merusak berbagai fasilitas umum dan milik pribadi. Konon diinformasikan saat itu terjadi penjarahan harta para pedagang dari Tionghoa di pusat-pusat perdagangan grosir di Jakarta. Bahkan ada informasi telah terjadi pemerkosaan terhadap warga keturunan tersebut. Akibatnya terjadi pengungsian besar-besaran ke luar negeri dan ke daerah, termasuk ke Kabupaten Sambas yang saat itu sebenarnya kondisi keamanan sangat lemah.

Keamanan sangat lemah dan rapuh, dimana banyak sekali sekatan-sekatan di jalan umum yang dilakukan oleh masyarakat, bukan oleh aparat keamanan. Banyak warga yang terbunuh akibat dari penyekatan tersebut. Namun negara tidak mampu menertibkannya. Peristiwa itu justru memperburuk terjadinya konflik sosial lebih lanjut. Mereka beranggapan bahwa untuk apa kesepakatan damai yang telah dilakukan, tetapi masih dilanggar dan pemerintah seharusnya menjamin dan mengamankan situasi. (Acemoglu & Robinson, 2012).

Konflik sosial makin berkembang dan mulai sedikit reda ketika Jenderal Soeharto, Presiden RI menyatakan mundur sebagai Presiden RI dan melimpahkan kekuasaan sebagai Presiden RI kepada B.J. Habibie

pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa mundurnya Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI dimaknai sebagai berakhirnya kekuasaan orde baru. Orde baru berkuasa sejak tahun 1966 sampai dengan 1998, selama 32 tahun. selanjutnya Indonesia memasuki era reformasi, tantangan pemerintah masa ini cukup berat yaitu mengatasi krisis multidimensi, yang memicu berbagai protes tingkat pusat dan lokal (Thoha, 2012; Wahidin, 2013). Presiden B.J Habibi memimpin pemerintahan RI memperhatikan situasi negara yang hancur dari aspek ekonomi, politik dan keamanan berupaya keras untuk memperbaikinya (Subarsono, 2016). Aspek ekonomi belum juga teratasi tapi aspek politik secara pelan tapi pasti dilakukan. Terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam konstelasi politik dimana dilakukan amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 (4 kali amandemen UUD 1945). Dengan amandemen tersebut, dan dikuatkan oleh beberapa ketetapan MPR (Tap MPR Nomor IV/MPR/2000) yang diantaranya untuk mengatasi perekonomian negara melakukan reformasi diberbagai bidang dan menata kelembagaan negara, maka dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan pengganti peraturan yang lama yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Salah satu Undang-Undang yang dinilai sangat revolusioner adalah paket UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditetapkan pada bulan Mei 1999 (Wasistiono et al., 2016; Huda, 2009)

Kerusuhan sosial di Kabupaten Sambas ternyata berlanjut pada awal tahun 1999. Kerusuhan itu justru terjadi antara Suku Madura dengan Suku Melayu yang didukung oleh suku-suku lainnya yang ada di

Kabupaten Sambas. Penyebab kerusuhan dikarenakan ulah oknum Suku Madura yang tidak melaksanakan kesepakatan damai yang telah dilakukan. Kerusuhan tersebut juga telah membangkitkan semangat orang Melayu yang sejak lama dikatakan “penakut” dan lemah ibarat, “kerupuk” oleh suku lain, ternyata berani dan justru lebih anarkis lagi. Bahkan menurut Tanasaldy (2007), kesuksesan orang Melayu dalam konflik tersebut membuat mereka semakin percaya diri. Melalui konflik tersebut orang Melayu membuktikan bahwa mereka juga mempunyai kekuatan yang setara dengan orang Dayak.

Kasus bermula dari penyerangan sekelompok orang Madura kepada warga Parit Setia, Kecamatan Jawai pada hari lebaran Idul Fitri, menyebabkan tiga orang meninggal dan dua orang terluka parah. Meski sudah diamankan sebulan setelah peristiwa itu, peristiwa kernit mobil penumpang diserang dan hampir terbunuh oleh beberapa orang Madura di Tebas. Akibatnya terjadi penyerangan dan pembakaran rumah dan pembunuhan terhadap orang Madura oleh Suku Melayu di Semparuk, Pemangkat, Tebas dan lain-lain. Ternyata warga Madura tidak pernah menyerah dimana pada awal tahun 1999 terjadi penyerangan pasien di RSUD Abdul Azis Singkawang oleh oknum Suku Madura di Kota Singkawang. Meski peristiwa itu segera dapat diamankan oleh aparat, tetapi dampaknya luar biasa, dimana warga yang berasal dari berbagai arah ingin masuk menyerbu warga Madura yang ada di Singkawang. Kembali warga menyerang tempat-tempat pengungsian di luar Kota Singkawang dan terjadi lagi pengungsian yang sangat berdampak luas karena hingga saat ini sebagian orang Melayu Sambas tidak mau warga Madura kembali ke Sambas (Tanasaldy, 2007).

Kerusuhan sosial tahun 1997 telah merusak berbagai infrastruktur, sarana ibadah, sarana pendidikan, rumah penduduk, tempat usaha dan lain-lain. Segera diperbaiki dengan dibuatkan tempat-tempat pengungsian di Samalantan, Singkawang dan Sungai Raya. Tapi karena kerusuhan lagi pada tahun 1999, tempat-tempat pengungsian dirusak dan dibakar, maka terjadi pengungsian besar-besaran ke wilayah Kabupaten Dati II Pontianak dan di Kota Pontianak serta di Kota Singkawang.

Kerusuhan sosial pada tahun 1999 dianggap sebagai puncak “**kesabaran**” Suku Melayu yang selama ini sebagai mediator jika terjadi kerusuhan atau perkelahian antara Suku Dayak dan Madura di Kabupaten Sambas. Suku Melayu adalah penduduk mayoritas Kabupaten Sambas dan beragama Islam itu menjadi kehabisan kesabarannya atas perilaku Suku Madura yang juga beragama Islam itu. Perilaku Suku Madura yang tidak menyadari adat istiadat Kabupaten Sambas dinilai sudah keterlaluan dan harus diberi peringatan dengan cara “memerangi” mereka (Tanasaldy, 2007).

Dalam situasi konflik sosial dan krisis moneter yang belum juga pulih pemerintah pusat bersama-sama dengan DPR-RI membuat suatu keputusan luar biasa menyetujui pemekaran Dati II Sambas dengan UU No. 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Bengkayang pada tanggal 20 April 1999. Melalui Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa pembentukan Dati II Bengkayang karena adanya tuntutan aspirasi masyarakat dan wilayah Dati II Bengkayang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Dati II Sambas. Ibu kota Kabupaten Dati II Bengkayang di Bengkayang dan ibu kota Kabupaten Dati II Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas. Kemudian

melalui UU No. 12 Tahun 2001 dibentuk Kota Singkawang pada tanggal 21 Juni 2001.

2. Proses dan Tindaklanjut Pemekaran Kabupaten Dati II Sambas

Pemekaran Kabupaten Dati II Sambas yang direncanakan sejak tahun 1996 jika dicermati secara seksama tidak ada dasar hukum yang kuat karena dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak secara spesifik diatur tentang pemekaran wilayah atau daerah, bahkan tidak ada Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan pemekaran wilayah. Justru adanya PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, dianggap sebagai terpaksa dikeluarkan karena banyaknya desakan pemekaran daerah saat itu (Joso, 1986).

Selanjutnya dengan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah sebagai pelaksanaan pasal 8 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dianggap bahwa pemekaran wilayah sedikit terarah karena hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut masih berlaku (Pasolong, 2010). Sementara itu, titik berat otonomi daerah pada Dati II berdasarkan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah baru ditetapkan dengan PP No. 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Dati II pada tanggal 19 Agustus 1992. Jadi baru diatur setelah 18 tahun UU No. 5 Tahun 1974 ditetapkan (Joso, 1986).

Mencermati hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pemekaran daerah/wilayah atau pembentukan daerah baru di Indonesia pada saat

ini tidak ada dasar aturannya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah bahwa daerah dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab (Widjaja, 2002). Ketentuan inilah yang dijadikan dasar pemekaran daerah, bersifat umum dan tidak ada perintah untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelum lebih lanjut membahas tentang pemekaran wilayah di Kabupaten Sambas, sebaiknya istilah pemekaran wilayah tersebut didefinisikan. Istilah pemekaran wilayah tidak dikenal di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yang ada adalah pembentukan daerah atau pemekaran daerah. Istilah pemekaran daerah kini lazim dipakai untuk menggambarkan fenomena kelajuan pertambahan daerah otonomi baru di Indonesia (Said, 2008). Istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok untuk mengekspresikan proses terjadinya daerah-daerah baru pasca reformasi karena pada hakikatnya proses terjadinya daerah baru dikurun mutakhir ini tidak lain adalah proses pemisahan diri dari satu bagian wilayah tertentu dari sebuah daerah otonom yang sudah ada dengan niat hendak mewujudkan sebuah status administrasi baru daerah yang otonom (Makagansa, 2008).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah diartikan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau

kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan pembentukan daerah menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah ini adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota (Bratakusuma & Solihin, 2003). Dengan demikian istilah yang tepat digunakan adalah pemekaran daerah dan wujud nyatanya adanya pembentukan daerah baru akibat dari pemekaran daerah tersebut.

Pemekaran daerah Kabupaten Sambas berakibat pada pembentukan daerah baru yaitu (1). Kabupaten Dati II Bengkayang dengan UU No. 10 Tahun 1999 dengan ibukotanya di Bengkayang, (2). Kabupaten Dati II Sambas dengan ibukotanya di Sambas dan (3). Kota Singkawang yang ditetapkan dengan UU No. 12 Tahun 2001 dengan ibukotanya Singkawang. Jadi, wilayah administratif Kabupaten Dati II Sambas yang semula ditetapkan dengan UU No. 27 Tahun 1959 tentang UU Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan kembali dimekarkan menjadi tiga Dati II.

Pemekaran daerah Kabupaten Dati II Sambas beranjak dari pemikiran bahwa istilah “Sambas” dimaknai sebagai “Sam” yang artinya tiga (bahasa tionghoa) dan “Bas” diartikan sebagai bangsa. Sambas dimaknai sebagai “Tiga Suku Bangsa”. Tiga suku bangsa tersebut adalah Melayu, Dayak dan Tionghoa. Ketiga suku bangsa itulah yang menjadi ciri Kabupaten Sambas yang harus tetap dijaga sebagai wujud dari Bhineka Tunggal Ika “berbeda suku bangsa tetapi tetap satu, yaitu Kabupaten Sambas. Oleh karena itu ketika ingin memekarkan Kabupaten Sambas, maka ciri khas tiga suku bangsa itu harus ada dan sebagai perekat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mekarkan Kabupaten Sambas bukan memisah

berdasarkan suku bangsa. Misalnya, kita tidak ingin membentuk kabupaten Dayak di Bengkayang, membentuk kota Tionghoa di Singkawang dan membentuk kabupaten Melayu di Sambas. Beranjak dari pemikiran tersebut disepakati sebagai berikut :

- a. Kota Singkawang yang semula hanya meliputi Kecamatan Pasiran dan Roban yang mayoritas Suku Tionghoa diperluas ke Kecamatan Tujuh Belas yang penduduknya Melayu dan Dayak walau harus diakui mayoritas Suku Tionghoa di wilayah Kota Singkawang.
- b. Kabupaten Bengkayang wilayahnya juga meliputi Kecamatan Sungai Raya yang mayoritas penduduknya Suku Tionghoa dan Melayu. Wilayah Kabupaten Bengkayang semula direncanakan wilayah Kecamatan Samalantan ke Timur yang mayoritas dihuni Suku Dayak. Masuknya wilayah Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang selain mengurangi mayoritas Suku Dayak juga Kabupaten Bengkayang ke bagian wilayah pantai dan laut selain wilayah perbatasan negara.
- c. Kabupaten Sambas yang wilayahnya berkurang dari semula lebih kurang 1.200.000 Ha menjadi 600.000 Ha berada di daerah pantai dan laut serta perbatasan negara. Suku Melayu adalah suku mayoritas di Kabupaten Sambas, namun tetap ada walau sedikit jumlah Suku Dayak dan Tionghoa.

Dasar pemikiran pemekaran Kabupaten Sambas tersebut di atas ternyata sangat diapresiasi oleh Mahkamah Konstitusi ketika ada seseorang warga Kabupaten Bengkayang yang menggugat pemekaran Kabupaten Sambas. Utusan pemerintah Kabupaten Sambas hadir dan memberikan keterangan atas nama pemerintah Kabupaten Sambas, menjelaskan secara lantang bahwa pemekaran Kabupaten Sambas

tidak ditujukan untuk memecahbelah berdasar suku bangsa, tetapi justru dipertahankannya keragaman suku bangsa yang menjiwai hidup dalam istilah “Sambas” tersebut. Melalui penjelasan itu, gugatan warga ditolak.

Sesuai amanah Pasal 4 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Bengkayang bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Dati II Bengkayang, ibukota Kabupaten Dati II Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas. Perpindahan ibukota Kabupaten Sambas ke Sambas dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1999. Perpindahan ibukota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas dimaknai oleh berbagai kalangan secara berbeda yang dapat disarikan sebagai berikut:

- a. Bagi tokoh masyarakat Kabupaten Sambas yang selama ini berjuang keras untuk mengembalikan ibukota Kabupaten Sambas ke Sambas merasakan bahwa perjuangan mereka terwujud, meski luas wilayah Kabupaten Sambas berkurang dari sebelum pemekaran. Mereka puas dan berharap kota Sambas akan maju selayaknya kabupaten lain yang sudah lebih maju.
- b. Bagi aparatur pemerintah Kabupaten Sambas, perpindahan ibukota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas dianggap sebagai beban yang harus dipikul karena pindah ke Sambas tidak tersedia tempat kerja dan sarana transportasi yang memadai. Berarti pula biaya dan keringat yang ekstra harus dikorbankan yang harusnya tidak terjadi jika ibukota Kabupaten Sambas tetap di Singkawang. Disiplin PNS menjadi berkurang karena banyak PNS yang tidak masuk kerja. Sebagian PNS pindah ke daerah lain bahkan ke pusat karena merasa lingkungan kerja tidak sesuai harapan. Tambahan

pula ada perilaku sebagian masyarakat di Sambas yang menekan aktivitas pulang pergi PNS dari Singkawang ke Sambas. Menganggap mereka yang pulang pergi sebagai perbuatan pemborosan keuangan negara. Bahkan sikap tidak suka dengan perilaku pulang pergi PNS dari Singkawang ke Sambas juga disuarakan oleh anggota DPRD Kabupaten Sambas dan tokoh masyarakat Kabupaten Sambas.

- c. Tokoh politik diuntungkan oleh pemekaran Kabupaten Sambas. Anggota DPRD yang berjumlah 45 orang tetap dipertahankan, maka terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW). Demikian pula di Kabupaten Bengkayang, anggota DPRD dilakukan penambahan sesuai ketentuan Pasal 9 UU No. 10 Tahun 1999 tersebut.
- d. Kota Singkawang pada saat perpindahan ibukota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas berada dalam wilayah Kabupaten Dati II Bengkayang. Namun setelah ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang tanggal 21 Juni 2001, Kota Singkawang berubah status dari Kota Administratif menjadi Pemerintah Kota yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Pasiran, Roban, dan Tujuh Belas. Dengan undang-undang tersebut berarti Kota Singkawang sebagai daerah otonomi baru lepas dari Kabupaten Bengkayang. Perpindahan ibukota Kabupaten Sambas ke Sambas menyebabkan kantor eks pemerintah Kabupaten Sambas di Singkawang dibiarkan kosong selama lebih kurang dua tahun. Sementara itu, satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sambas dan Bengkayang tinggal di tempat-tempat yang tidak layak.

e. Kabupaten Dati II Bengkayang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) mendapat 19 urusan pemerintahan, hampir sama dengan Kabupaten Sambas sebagai kabupaten induk yang menerima pelimpahan wewenang urusan pemerintahan dari pemerintah pusat dan dari provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah otonomi percontohan. Sementara Kota Singkawang yang ditetapkan setelah adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mendapat wewenang seluruh urusan pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2001).

Peristiwa pemekaran Kabupaten Sambas yang diawali dengan penetapan Kabupaten Sambas sebagai daerah otonomi percontohan dengan PP No. 8 Tahun 1995 tanggal 21 April 1995 dilanjutkan dengan pembentukan Kabupaten Bengkayang berdasarkan UU No. 10 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 dan pembentukan Kota Singkawang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001, sangat mempengaruhi pengelolaan aset daerah Kabupaten Sambas. Diperparah lagi dengan peristiwa kerusakan dan kondisi nyata sarana dan prasarana pemerintahan Kabupaten Sambas pada saat perpindahan ibukota dari Singkawang ke Sambas.

Pengelolaan perpindahan aset daerah dari pusat dan provinsi Kalimantan Barat ke Pemerintah Kabupaten Dati II Sambas dilakukan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 1994 tentang Pembentukan Tim Teknis Percontohan Otonomi Daerah pada Dati II dan PP No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi

Daerah dengan titikberat pada Dati II serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1999 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Bengkayang (Syaukani et al., 2003)

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b, bahwa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai atau dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Dati I Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Dati II Sambas yang berada di wilayah Kabupaten Dati II Bengkayang diinventarisir dan diserahkan kepada Pemerintah Dati II Bengkayang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat (2) bahwa pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya harus selesai dalam waktu satu tahun terhitung sejak disesuaikan Kabupaten Dati II Bengkayang. Sementara itu berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang ditegaskan bahwa barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang yang berada di Kota Singkawang diinventarisir dan diserahkan oleh Bupati Bengkayang kepada Pemerintah Kota Singkawang dan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) pelaksanaan sebagaimana ayat (1) paling lambat diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan pejabat Walikota Singkawang.

Terkait penyerahan pegawai yang juga ditegaskan dalam undang-undang tersebut di atas untuk diinventarisir dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang ke

Pemerintah Kota Singkawang meski ada banyak permasalahannya, tetapi lebih cepat dapat diselesaikan. Namun terkait penyerahan aset ternyata tidak dapat dilaksanakan sesuai amanah kedua undang-undang tersebut di atas. Penyerahan aset dari Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang baru benar-benar tuntas pada akhir tahun 2016 atau sekitar 17 tahun setelah pemekaran. Selanjutnya dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang ke Pemerintah Kota Singkawang dapat diselesaikan pada tahun 2017.

Terlambatnya penyerahan aset daerah tersebut sangat berdampak negatif, baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan tiga daerah tersebut maupun terhadap hubungan diantara ketiga daerah tersebut (Wahidin, 2013). Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan ketiga daerah tersebut hanya mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) karena tersangkut masalah aset yang dikuasai tetapi tidak jelas status kepemilikannya kecuali pada tahun 2006, Kabupaten Sambas mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Setelah masalah penyerahan aset dituntaskan, maka pada tahun 2018 Kabupaten Sambas mendapat penilaian WTP dari BPK-RI.

Terlambatnya penyerahan aset dari Kabupaten Sambas kepada Kabupaten Bengkayang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Pemerintah Kabupaten Sambas baru saja menerima aset dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Barat karena Kabupaten Sambas sebagai daerah otonomi percontohan berdasarkan PP No. 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintah kepada 26 Dati II Percontohan pada tanggal 21 April 1995. Belum

tuntas menata aset daerah, ternyata terjadi dua peristiwa kerusuhan sosial pada tahun 1997 dan 1999. Kerusuhan sosial tersebut sangat menyita pikiran, waktu dan biaya bagi Kabupaten Sambas saat itu.

- b. Pembentukan Kabupaten Bengkayang dengan UU No. 10 Tahun 1999 yang berakibat pada perpindahan ibukota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas pada tanggal 15 Juli 1999. Di Kota Sambas hanya ada kantor Pembantu Bupati Sambas yang ditetapkan sebagai kantor Bupati Sambas. Sementara dinas daerah, DPRD dan lain-lain yang jumlahnya lebih dari 20 buah harus sewa untuk kantor. Sungguh miris, pindah ibukota ketempat yang tidak siap, sementara kantor yang bagus dan pantas ditinggalkan. Kita sering mengibaratkannya “kawinkan anak tapi jual rumah satu-satunya, akhirnya tinggal di rumah gubuk yang sangat tidak layak”.
- c. Pemerintah Kabupaten Sambas sengaja menunggu terbentuknya Pemerintah Kota Singkawang agar penyerahan aset secara bersamaan. Hal tersebut memang telah dibicarakan dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat menggunakan aset bahkan diserahkan secara bertahap, kecuali aset yang berada di wilayah Kota Singkawang. Namun ternyata penyerahan aset ke Pemkab Bengkayang dan ke Kota Singkawang baru terealisasi pada akhir tahun 2016.
- d. Ternyata aset yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Barat ke Kabupaten Sambas ketika otonomi percontohan tidak akurat. Banyak sekali ditemukan perbedaan antara catatan aset yang diserahkan dengan bukti konkrit aset di lapangan, khususnya barang tidak bergerak tidak sesuai luasan,

batas-batas fisik aset tersebut bahkan tidak jelas, tetapi ada bangunan di atasnya sebagai milik pemerintah Kabupaten Dati II Sambas. Misalnya ada sekolahnya, tetapi tidak ada bukti kepemilikan lahan di atas bangunan tersebut. Akibatnya, pihak yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut agar dikemudian hari terhindar dari masalah hukum, kecuali aset yang diyakini tidak bermasalah.

C. *Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan di Kabupaten Sambas*

1. Pemerataan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur

Perpindahan ibukota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas dihadapkan kepada banyak pertimbangan dan permasalahan. Selain perpindahan tersebut karena amanah Pasal 4 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Bengkayang juga aspirasi masyarakat Kabupaten Sambas yang sudah lama diinginkan. Padahal saat itu prasarana dan sarana pemerintahan sangat tidak layak dan jumlahnya terbatas. Bupati dan Wakil Bupati Sambas berkantor sementara di kantor Pembantu Bupati Sambas dan Pembantu Bupati Sambas berkantor di bangunan Museum Daerah sekarang. Sementara DPRD menggunakan gedung Pancasila dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyewa rumah penduduk sebagai kantornya. Kondisi tersebut berlangsung cukup lama sehingga kantor Bupati Sambas terbakar pada tahun 2007.

Terlambatnya pembangunan kantor pemerintahan di Kabupaten Sambas selain keterbatasan dana juga adanya salah persepsi pejabat pusat tentang kondisi nyata prasarana dan sarana

pemerintahan di Kabupaten Sambas. Pemerintah pusat justru membantu pembangunan kantor Bupati Bengkayang dan kantor Walikota Singkawang, sementara kantor Bupati Sambas tidak dibantu. Pemerintah Kabupaten Sambas dalam beberapa tahun setelah perpindahan ibukota ke Sambas telah berupaya membebaskan lahan dan bertahap membangun kantor pemerintahan sehingga sekarang belum sempurna sebagaimana diharapkan dalam Kawasan Pemerintahan. Penataan ruang dijadikan prioritas pertama. Penataan ruang kabupaten, tata ruang kota, kecamatan, tata ruang perbatasan negara dianggap sangat mendesak karena hal tersebut sebagai tindak lanjut dari pemekaran Kabupaten Sambas. Perbatasan negara dengan Malaysia masih menyisakan sengketa batas negara di beberapa titik. Selain itu juga perbatasan Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang masih ada permasalahan yang juga belum terselesaikan, apalagi perbatasan kecamatan, dan antar desa di Kabupaten Sambas.

Masih adanya sengketa wilayah dengan negara tetangga Malaysia seringkali ribut dan diributkan ditingkat nasional dan antar dua negara. Akibatnya terjadi demonstrasi di Jakarta yang disertai tindakan anarkis dan caci maki bahkan bakar bendera negara Malaysia (Edward & Meitzner, 2010). Akibat lain dari sengketa batas negara tersebut seringkali terjadi pencurian kayu, ikan dan barang tambang oleh oknum Malaysia. Hingga saat ini sengketa batas negara ini belum juga selesai dan entah kapan diselesaikan.

Kabupaten Sambas adalah salah satu daerah perbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan dengan negara tetangga Malaysia di Kalimantan Barat. Sebagai daerah perbatasan laut dan darat dengan negara tetangga posisi Kabupaten Sambas sangat strategis dalam jalur

perdagangan luar negeri dan provinsi lainnya di Indonesia. Namun nyatanya transportasi darat ke Malaysia tidak ada. Kondisi Kabupaten Sambas berada di ujung yang buntu dan tidak diminati oleh orang-orang luar termasuk para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sambas. Menyadari hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas dengan dukungan “Otorita Batam” merancang model pembangunan otoritas Batam untuk dilaksanakan di Kabupaten Sambas dengan titik poin di Paloh dan Sajingan yang dikenal dengan kebijakan pembangunan Palsa (Paloh-Sajingan). Pihak pemerintah Pusat seperti Depdagri, Menko Ekonomi, Departemen Pekerjaan Umum dan lain-lain sangat mendukung bahkan petinggi Negeri Sarawak dan Kuala Lumpur mendukung kebijakan Palsa tersebut (Pangabeau, 2014).

Untuk mendukung terwujudnya pembangunan otoritas Palsa disinergikan dengan pengelolaan migas Blok Natuna. Pihak Petronas Malaysia sangat mendukung inisiatif tersebut tapi sungguh sayang ada persaingan bisnis dengan beberapa negara yang berakibat pada pudarnya program pembangunan otorita Palsa tersebut (Thoha, 2012).

Pemerintah Kabupaten Sambas terus berupaya untuk merubah situasi Kabupaten Sambas sebagai daerah terdepan dan maju. Peluang itu sangat besar karena didukung oleh kebijakan pemerintah RI yang menegaskan bahwa di daerah perbatasan tersebut sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) baik dalam RPJMN tahun 2004 sampai dengan 2009, juga RPJMN tahun 2009/2014. Bahkan dalam RPJMN 2015/2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 (Kaloh, 2002). Dengan kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran (Perdesaan/Perbatasan daerah tertinggal, maka kebijakan pembangunan PALSA yang telah dirintis oleh Bupati Sambas

periode 2001-2006 dilanjutkan dengan dukungan yang luar biasa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan dan prasarana pendidikan dan kesehatan dengan dasar kebijakan “mendekatkan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat”. Bupati Sambas saat itu berkata, “Saya tidak akan bangun rumah dinas Bupati sebelum seluruh sekolah dan tempat pelayanan kesehatan terbangun”. Benar, hingga saat ini belum ada dibangun Rumah Dinas Bupati Sambas. Rumah dinas yang ditempati Bupati Sambas saat ini adalah Rumah Dinas Wakil Bupati. Sementara Bupati menempati kantor eks Kantor Swapraja yang sekarang dijadikan sebagai Museum Daerah Kabupaten Sambas. Bupati Sambas periode 2011-2016 hingga sekarang menempati Rumah Dinas Wakil Bupati Sambas sebagai Rumah Dinas Bupati Sambas. Sementara Wakil Bupati Sambas menempati Rumah Dinas Camat Sambas.

Menurut Raymond Charles Barker *“Building Government Infrastructure means freeing up community land”* yang artinya “membangun Infrastruktur Pemerintah berarti membebaskan lahan masyarakat” (Barker, 1968). Demikian pula, mengembangkan kawasan perbatasan negara telah menguras dana APBD Kabupaten Sambas yang tidak sedikit. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas periode 2011-2016 menginisiasi. Pembangunan Perguruan Tinggi Agama Islam (Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Sekarang) dan membangun Politeknik Terigas Sambas (Poltesa) serta Akademi Dakwah. Bersama dengan kebijakan mendekatkan pendidikan dan kesehatan kemasyarakat dibangun SMP, SMA dan SMK serta Puskesmas di setiap Kecamatan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan

dan Kesehatan tersebut terkait pula dengan kebijakan reformasi birokrasi dan percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak 2010-2016.

2. Kebijakan Mendekatkan Pendidikan dan Kesehatan Kepada Masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kerusuhan sosial tahun 1997 dan 1999 telah memporak porandakan berbagai sarana dan prasarana di masyarakat. Banyak tempat tinggal dan tempat ibadah dan pertokoan dirusak bahkan dibakar massa. Tanah dan hasil pertanian dan peternakan ikut jadi korban. Akibatnya data pokok Kabupaten Sambas yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi berubah total dari sebelum kerusuhan dianggap terbaik sehingga Kabupaten Sambas dijadikan sebagai daerah otonomi percontohan dengan titik berat pada Dati II pada tahun 1995. Perubahan paling nyata terlihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana pasca kerusuhan, IPM Kabupaten Sambas berada di urutan terendah di Kalimantan Barat atau berada di urutan ke 14 dari 14 Kabupaten atau Kota di Kalimantan Barat sebelumnya tahun 2010.

Rendahnya IPM Kabupaten Sambas ditandai dengan rendahnya harapan hidup (aspek kesehatan) yakni usia sekitar usia 51 tahun. Rata-rata lama sekolah (pendidikan) hanya 5,11 tahun, kecuali daya beli masyarakat lumayan tinggi dibandingkan dengan berapa daerah lainnya di Kalimantan Barat. Rendahnya angka harapan hidup di Kabupaten Sambas karena saat kerusuhan 1997 dan 1999 banyak korban nyawa. Demikian pula rendahnya lama sekolah ada kaitannya dengan kerusuhan. Menyadari masalah rendahnya IPM Kabupaten

Sambas maka sejak tahun 2011 fokus mempercepat peningkatan IPM yang disertai dengan reformasi birokrasi.² Pemerintah daerah membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sampai ke tingkat Desa. Rumah Sakit Daerah (RSUD Pemangkat dan Sambas) dan seluruh Puskesmas (ada 28 buah) ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perguruan Tinggi yang ada didorong untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dosen dan Mahasiswa nya melalui bantuan beasiswa dengan kebijakan **“beasiswa 50 Doktor”**. Kebijakan tersebut melanjutkan kebijakan beasiswa bagi dosen dan mahasiswa oleh Bupati Periode 2006-2011.

Percepatan peningkatan IPM melalui bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong semangat masyarakat yang sempat terkoyak oleh peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi di Kabupaten Sambas. Kerusuhan sosial menyisakan rasa benci, takut dan secara psikis merasa malu karena dianggap “biadab, barbar dan kejam” oleh orang luar. Sebagian masyarakat bahkan aparat pemerintah Kabupaten Sambas takut untuk bepergian dari Kabupaten Sambas hanya untuk ke Singkawang dan Pontianak. Ketika kita ada pertemuan di Jakarta atau luar Kalimantan Barat maka yang ditanya orang luar bahkan warga negara asing, “apakah Kabupaten Sambas sudah aman?”. Nyatanya memang belum aman diawal tahun 2000-an. Terbukti dari masih sering didengar dan dijumpai ada pembunuhan pengungsi kerusuhan yang pulang diam-

² Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2014. Sedangkan upaya Percepatan Peningkatan IPM ditetapkan dengan Instruksi Bupati Sambas.

diam ke kampung dahulu dimana dia tinggal. Meski dengan pengawasan yang ketat oleh petugas dengan senjata api, tetapi pembunuhan tetap terjadi. Ada ungkapan yang sering disuarakan bagi pengungsi dan bahkan disampaikan kepada peneliti dan pejabat Provinsi dan Pusat yang ingin mencari jalan rekonsiliasi adalah “datang kami sambut, pulang tinggal rambut”.

Mencermati kondisi yang amat penting saat itu, Bupati Sambas periode 2001-2006 membuat visi **Terigas** (Tertib, Ekonomi Kerakyatan yang Sinergi dengan Investasi, Religius, Good Governance, Akhlakul Karimah dan Sosial Control). Visi tersebut berlanjut pada periode 2006-2011 dan periode 2011-2016 ditambah dengan **Lanjutkan Terigas**. Ketertiban dan/atau terukur sebagai prioritas utama visi Bupati Sambas saat itu adalah untuk mengatasi perilaku masyarakat pasca kerusuhan yang menyisakan pola pikir dan sikap kasar dari sebagian masyarakat. Mereka merasa sebagai pemenang dalam kerusuhan tersebut, merasa paling berjasa seolah sebagai pahlawan. Para pendatang dan orang-orang yang dianggapnya tidak terlibat kerusuhan dianggap sebagai orang yang tidak pantas dapat kesempatan menikmati perpindahan ibukota Kabupaten Sambas. Para PNS Kabupaten Sambas yang tinggal di Singkawang dan bekerja di Kabupaten Sambas dianggap sebagai bukan orang Sambas. Mereka sering ditanya “kamu orang mana?”. PNS yang tinggal di Kota Singkawang dianggap telah merampas harta orang Sambas karena di gaji dari APBD Kabupaten Sambas tetapi tinggal di Singkawang. Peristiwa tersebut berlangsung lama dan bagi PNS asal Kota Singkawang atau daerah lain di Kalbar berbondong-bondong pindah ke daerah lain baik di Kalbar maupun di luar Kalbar. Pindah ke

Singkawang ketika telah dibentuk Kota Singkawang dengan UU No. 12 Tahun 2021 terjadi tanpa kendali sehingga dirasakan kekurangan PNS dalam melaksanakan visi misi Bupati untuk pembangunan Kabupaten Sambas.

Perpindahan PNS secara besar-besaran juga terjadi karena ada perilaku tokoh masyarakat Kabupaten Sambas yang seharusnya menjadi teladan, tapi justru membuat selebaran dan spanduk yang terkesan membenci orang Singkawang dan daerah lain untuk tinggal di Kabupaten Sambas. Perilaku tokoh masyarakat yang arogan tersebut sempat membuat Bupati dan Sekretaris Daerah hampir putus asa. Meski demikian langkah penyelesaian masalah tetap dilakukan.

Secara tegas saya katakan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah saat itu, Bapak Bupati sebagai Kapten dan Sekda sebagai Nakhoda, harusnya tegas dengan goncangan ini agar para awak kapal (PNS) kuat untuk tekad dan kerja agar kapal sampai ditempat tujuan dengan selamat. Selain itu saya teruskan pembicaraan saya bahwa saya saat itu hanya seorang Kepala Bagian (Bukan Camat, Bukan Asisten, Bukan Kepala Dinas dan Bukan Pula Sekda apalagi sebagai Orang Terkenal) minta kepada Bupati untuk mengadakan pertemuan dengan mengundang para tokoh masyarakat se-Kabupaten Sambas, Tokoh Agama, Pejabat Pemkab Sambas, Para Camat dan lain-lain termasuk pula undang tokoh masyarakat yang membuat provokasi tersebut dan saya siap pimpin acara tersebut. Pada saat pertemuan betul saya yang pimpin, tapi sungguh kami kecewa karena tokoh masyarakat pembuat provokasi memalukan itu tidak hadir rapat termasuk anggota DPRD Kabupaten Sambas yang memperuncing masalah. Namun rapat bersepakat untuk tidak mempermasalahkan pulang pergi kerja Singkawang-Sambas.

Bupati Sambas atas dasar rekomendasi masyarakat Kabupaten Sambas melanjutkan kebijakan yang telah disusun dalam visi dan misinya tersebut tanpa menghiraukan suara-suara sumbang tersebut.

Kebijakan mendekatkan pendidikan dan kesehatan kepada rakyat terus dilakukan, dan pada tahun 2006 disetujui terbentuknya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas. Kemudian disusul dibangunnya Politeknik Terigas Sambas (Poltesa) pada tahun 2008 dan Akademi Dakwah. Di setiap Kecamatan dibangun Puskesmas, SMP, SMA, SMK. Untuk daerah perbatasan seperti Paloh dan Sajingan serta daerah tertinggal seperti Subah, Salatiga dan pedalaman Kecamatan Tebas dibangun sekolah dari SD dan SMP yang tentunya disesuaikan dengan kondisi jumlah dan sebaran penduduk di wilayah tersebut juga dibangun.

Meski sudah dibangun berbagai prasarana pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sambas ternyata IPM Kabupaten Sambas belum berubah dari sebelumnya. Bupati Sambas, Wakil Bupati Sambas bersama dengan Tim Percepatan Peningkatan IPM Kabupaten Sambas melakukan konsultasi ke BPS Provinsi Kalbar dan BPS Pusat. Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut diperoleh banyak masukan untuk perbaikan IPM. Diinformasikan pula bahwa pada tahun 2010 akan dilakukan perbaikan indikator IPM cara baru yang akan sangat mempengaruhi cara penilaian IPM selama ini, yakni dengan memasukkan Indikator Harapan lama Sekolah. Selanjutnya Bupati Sambas bertekad hasil konsultasi langsung menyusun program kerja peningkatan IPM Kabupaten Sambas dengan membuat Instruksi Bupati Sambas tentang Percepatan Peningkatan IPM Kabupaten Sambas. Instruksi tersebut dirancang dengan melibatkan akademisi dan seluruh komponen masyarakat serta satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya atas dasar instruksi tersebut, dilakukan sosialisasi agar seluruh lapisan masyarakat bersama-sama melaksanakannya. Ditingkat

Kabupaten, percepatan peningkatan IPM diwujudkan dalam APBD Kabupaten Sambas. Terbukti hasilnya memuaskan, bahkan dapat dikatakan sangat memuaskan. Berdasarkan data BPS tanggal 13 Juli 2017 IPM Kabupaten Sambas meningkat luar biasa sebagai **“Top Movers”** 2010-2016 dengan pertumbuhan 8,58%. IPM Kabupaten Sambas pada tahun 2010 sebesar 59,81 yakni berada pada ranking ke 11 terus meningkat menjadi 64,94 pada tahun 2016 atau berada pada ranking ke 5 dari 14 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 masih bertahan diranking ke-5 untuk kemudian turun diurutan ranking ke-6 pada tahun 2019 dan 2020.

Indikator Angka Harapan Hidup (kesehatan) terus meningkat dari 67,40 pada tahun 2010 menjadi 68,83 pada tahun 2019 dan 68,93 pada tahun 2020. Capaian tersebut masih kalah jauh dari angka harapan hidup di Kota Singkawang pada tahun 2020 sebesar 72,06 dan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bengkayang sebesar 73,03 pada tahun 2020. Sementara itu Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sambas pada tahun 2010 hanya sebesar 10,69 dibawah Kabupaten Bangkayang sebesar 10,80 dan di bawah Kota Singkawang sebesar 10,86. Pada tahun 2020 HLS Kabupaten Sambas meningkat menjadi 12,61 berada di atas Kabupaten Bengkayang yang hanya sebesar 12,09 dan Kota Singkawang sebesar 12,90. Kabupaten Sambas pada tahun 2010 HLS nya melebihi rata-rata provinsi kalbar sebesar 12,60. Selanjutnya indikator rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Sambas pada tahun 2010 sebesar 5,11 Kabupaten Bengkayang 5,82 dan Kota Singkawang 7,03. Pada tahun 2020 RLS Kabupaten Sambas sebesar 6,71 kalah dari Kabupaten Bengkayang sebesar 6,76 dan

di bawah RLS Kota Singkawang 7,89. Juga RLS Kabupaten Sambas berada di bawah rata-rata provinsi Kalbar sebesar 7,37. Dan sungguh memalukan RLS Kabupaten Sambas pada tahun 2020 di bawah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 7,52, di bawah Kabupaten Sekadau sebesar 6,83, di bawah Kabupaten Melawi dengan nilai 6,76 dan juga di bawah Kabupaten Kubu Raya sebesar 6,83.

Perbedaan jauh antara HLS dengan RLS di Kabupaten Sambas pada tahun 2020 yakni HLS sebesar 12,61 sementara RLS pada tahun yang sama sebesar 6,71. Jauhnya perbedaan ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sambas. Data ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sambas HLS sangat tinggi karena tersedia sarana dan prasarana pendidikan akses untuk ke prasarana pendidikan juga bagus dan tersedia tetapi nyatanya banyak orang di Kabupaten Sambas tidak bersekolah atau rendah pendidikannya terutama mereka yang berumur di atas 25 tahun. Ada kemungkinan lain bahwa warga Kabupaten Sambas yang berpendidikan di atas 6 tahun tidak tinggal di Kabupaten Sambas karena bekerja melebihi waktu 6 bulan di luar Kabupaten Sambas meskipun ber-KTP Kabupaten Sambas.

Indikator selanjutnya adalah pengeluaran perkapita. Indikator ini pada tahun 2010 sebesar 7.858 dan tahun 2020 sebesar 9.858 yang turun dari perolehan pada tahun 2019 sebesar 9.924. Indikator pengeluaran perkapita di Kabupaten Sambas tergolong tinggi dibanding dengan Kabupaten Bengkayang yang pada tahun 2020 sebesar 9.102 dan Kota Singkawang sebesar 11.650, berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat sebesar 8.930. bahkan dalam 10 tahun terakhir pengeluaran perkapita di Kabupaten Sambas selalu berada di atas rata-rata Provinsi Kalbar.

Mencermati data BPS di atas, dapat disimpulkan bahwa percepatan peningkatan IPM Kabupaten Sambas hanya terjadi pada periode Bupati Sambas tahun 2006-2011 dan 2011-2016. IPM Kabupaten Sambas sebelum 2010 berada pada urutan 14 dari 14 Kabupaten Kota di Kalimantan Barat, terus meningkat menjadi urutan 11 pada tahun 2011 dan terus meningkat lagi menjadi ke-5 pada tahun 2016. Tahun 2017 dan 2018 hanya bertahan di urutan ke-5, namun selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 turun ke urutan 6 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalbar (Balilatfo KDPDTT, 2019). Dapat pula disimpulkan bahwa periode Bupati Tahun 2016-2021 tidak ada peningkatan bahkan yang terjadi penurunan IPM. Penurunan IPM berarti pula, Bupati Sambas pada periode 2016-2021 telah gagal mewujudkan atau memperlancar terwujudnya visi RPJPD, 2005-2025 yakni Kabupaten Sambas terunggul di Kabupaten Kalbar pada tahun 2025. Kegagalan tersebut kiranya menjadi perhatian serius Bupati periode 2021-2026 yang menjadi tahapan terakhir RPJPD Kabupaten Sambas.

3. Pembangunan Perbatasan Negara

Kabupaten Sambas sebagai salah satu dari lima daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Kalau empat daerah lainnya yakni Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sanggau berbatasan darat dengan Malaysia, tetapi Kabupaten Sambas selain berbatasan darat juga berbatasan laut dengan Malaysia. Kondisi geografis Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia dari darat dan juga berbatasan laut dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan (Laut Natuna) menempatkan Kabupaten Sambas sebagai salah satu

daerah paling strategis bagi pelayaran asing dan Nusantara bahkan Samudera dan Internasional.³ Letak Kabupaten Sambas dengan demikian sangat menguntungkan bagi usaha perdagangan antar pulau dan antar negara lewat laut dan darat. Kondisi strategis inilah yang barangkali di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas dengan Sarawak Malaysia ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang sangat jelas telah ditegaskan dalam RPJMN sejak 2004 hingga 2024. RPJMN tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Pembangunan perbatasan negara sebagai paling prioritas dalam 10 tahun terakhir. Pemerintahan Jokowi dengan kebijakan pembangunan dari pinggir (perbatasan) membangun sarana PLBN di Aruk Kabupaten Sambas yang sangat modern lebih bagus dari PLBN yang dibangun oleh Malaysia di wilayah Biawak. Pemerintah Pusat juga membangun jalan 4 jalur disekitar PLBN dan membangun jalan poros perbatasan dari Desa Temajuk Kecamatan Paloh sampai ke Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini jalan poros perbatasan negara sedang dibangun dan direncanakan selesai pada tahun 2024. Di Kabupaten Sambas juga dibangun jalan dan jembatan Sungai Sambas Besar. Direncanakan jalan dan jembatan tersebut tuntas pada tahun 2024. Jalan yang melintasi jembatan sungai sambas besar direncanakan dari Tebas menuju Paloh.

Kebijakan pembangunan perbatasan negara di Kabupaten Sambas dipertegas dengan Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2015

³ Jalur Pelayaran Asing menurut Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (21) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan bahwa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut Internasional.

tentang Percepatan Pembangunan Perbatasan di tujuh Wilayah Perbatasan Negara dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Negara di Aruk Kabupaten Sambas, Motaain di Nusa Tenggara Timur dan Skow di Papua. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, perbatasan negara yang ada di wilayah Kabupaten Sambas selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Instruksi presiden pada tahun 2015 fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan PLBN Aruk (Sajingan Besar) dan Temajuk (Paloh). Sedangkan Instruksi Presiden pada tahun 2021 dirancang lebih luas yakni pembangunan ekonomi wilayah perbatasan negara dan diseluruh Kabupaten Sambas.

Pembangunan perbatasan negara secara serius dirancang oleh pemerintah pusat sejak ditetapkannya Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2025 dan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014. Peraturan tersebut sebagai tindaklanjut dari UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. Kemudian dipertegas kembali dengan Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Secara spesifik, pembangunan perbatasan negara diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan dan terakhir dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2021 tentang

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Negara di Aruk Kabupaten Sambas, Motaain di Nusa Tenggara Timur dan Skow di Papua. Pembangunan perbatasan negara pada dasarnya untuk (Pasal 7 Peraturan Presiden RI No. 31 Tahun 2015):

- a. Mewujudkan keutuhan negara diperbatasan dengan menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan dan keamanan negara pada kawasan perbatasan negara meliputi :
 - 1) Peningkatan upaya penegakan kedaulatan negara di kawasan perbatasan,
 - 2) Peningkatan upaya pengamanan melalui penerapan sabuk pengamanan perbatasan negara, dan
 - 3) Pemertahanan eksistensi PPKT yang meliputi Pulau Sebatik dan Pulau Gosong di Makasar sebagai titik garis pangkal Kepulauan Indonesia
- b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang mandiri meliputi:
 - 1) Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perbatasan negara secara sinergis dan
 - 2) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dilakukan secara sinergis dengan kawasan pengembangan ekonomi dalam sistem klaster.
- c. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung sebagai paru-paru dunia dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Kawasan perbatasan negara di Kalimantan, termasuk di Paloh dan Sajingan Besar adalah Kawasan Strategis Nasional (Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden RI No. 31 Tahun 2015), yang berada dibagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah

Indonesia di Kalimantan dengan negara Malaysia, dalam hal batas negara di darat kawasan perbatasan berada di Kalimantan (Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Presiden RI No. 31 Tahun 2015) (Huda, 2009). Karena strategisnya kawasan perbatasan negara bagi pemerintah saat ini, maka pemerintah sejak tahun 2010 telah menegaskan bahwa paradigma tentang perbatasan negara telah berubah dari *inward looking* menjadi *outward looking*. Artinya cara kita memandang negara tetangga bukan lagi membelakangi mereka (*inward-looking*) melainkan dalam perspektif berhadap-hadapan dengan mereka (*outward-looking*) (BNPP, 2011; lemhannas.go.id, 2013). Kawasan perbatasan negara dengan demikian dijadikan beranda depan negara yang sudah pasti perlu dihiasi ibarat rumah kita bagian depan dengan warna warni yang menarik. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang modern dan lengkap layaknya sebuah pigura dengan ornamen adat budaya masyarakat Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat membedakannya dengan bangunan untuk fasilitas *Customs, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS) yang sama di Malaysia.

Dalam rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Kalimantan direncanakan berbagai infrastruktur akan dibangun seperti jalan perbatasan negara, berbagai fasilitas PLBN, jalan poros perbatasan sepanjang perbatasan negara di Kalimantan, jalan rel kereta api, dryport, terminal kelas A dan B, dermaga, penyeberangan, jembatan, bandara dan lain sebagainya. Sementara itu, dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dipertegas kembali pembangunan jalan dan jembatan sungai sambas besar, pembangunan jalan poros perbatasan negara dan berbagai sarana dan prasarana

perdagangan dan ekonomi di kawasan PLBN Aruk. Bahkan lebih spesifik dibangun berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, dimana presiden memerintahkan 10 menteri untuk melaksanakan dan menyelesaikan program percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk. Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Presiden instruksikan untuk :

- a. Memberikan pengarahan dan pengendalian secara umum dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk.
- b. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan di Aruk.

Kepada Menteri Dalam Negeri diminta Bapak Presiden untuk sinkronisasi percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan dengan kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RPJMD dan RKPD. Demikian pula kepada beberapa menteri lainnya seperti Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Menteri Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Sambas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Begitu detailnya instruksi presiden tersebut tertera dalam lampiran instruksi tersebut antara lain: pembangunan pertanian (padi, lada, kelapa dalam, jeruk dan lain-lain), industri pengolahan

(lada, kelapa dalam, jeruk), juga pembangunan terminal orang dan barang, jalan sejajar perbatasan negara, jaringan telekomunikasi, distribusi listrik, SPAM, gudang/depo non-SRG, SPBU di kawasan Aruk, bibit ternak sapi, rumah potong hewan, peternakan terpadu, dan lain-lain. Dalam Instruksi Presiden tersebut, ditegaskan bahwa Kementerian/lembaga melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk paling lama dua tahun terhitung sejak instruksi tersebut dibuat (ditetapkan tanggal 11 Januari 2021).

Mencermati kebijakan pemerintah tentang pembangunan perbatasan negara di Kabupaten Sambas tersebut di atas dapat dimaknai sebagai berikut :

- a. Bahwa pemerintah pusat sangat serius dan terus-menerus membangun perbatasan negara. Hal ini merupakan peluang bagi Kabupaten Sambas untuk maju lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Barat dan di Indonesia.
- b. Karena dana pembangunan untuk perbatasan dari APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Barat, maka dana APBD Kabupaten Sambas dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting, terutama untuk mendorong masyarakat Kabupaten Sambas membangun sektor seperti pertanian tanaman, perkebunan nelayan dan industri pengolahan yang dapat dilakukan melalui pelatihan, bantuan penyediaan sarana produksi dan lain-lain.
- c. Begitu banyak program pemerintah akan dilaksanakan di Kabupaten Sambas kiranya terbuka peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Kondisi ini juga membuka peluang investasi dari investor dalam dan luar negeri di Kabupaten Sambas.

- d. Menyikapi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas perlu bersinergi/berkolaborasi dengan stakeholder termasuk perguruan tinggi baik yang ada di Kabupaten Sambas, di Provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional bahkan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.
- e. Agar pembangunan perbatasan negara lebih intensif dibicarakan dan dilakukan tindaklanjutnya harus dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Sinergisitas pembangunan di Kalimantan perlu sikapi dengan mengadakan pertemuan secara berkala dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan atau lebih spesifik dalam wilayah singbebas (Singkawang Bengkayang dan Sambas).

Catatan penting di atas, ditunjukkan untuk mengatasi secara nyata adanya manfaat yang langsung dari pemekaran Kabupaten Sambas. Ternyata hasil pengamatan dan wawancara dengan aparat pemerintah di berbagai daerah khususnya Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Singkawang bahwa:

- a. Pemekaran Kabupaten Sambas terbukti hanya pemisahan kekuasaan berdasarkan etnis. Penguasa di Sambas oleh Melayu, di Bengkayang oleh Dayak dan di Singkawang yang berbeda yakni percampuran Tionghoa Melayu, Madura dan Dayak (multietnis).
- b. Kebijakan pembangunan perbatasan di Kabupaten Sambas belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten Sambas untuk kesejahteraannya, malah ada kecenderungan orang dari Kabupaten Sambas ingin kerja di Malaysia. Namun sangat sedikit terhambat karena pandemi *covid-19* yang melarang masuknya warga Kabupaten Sambas ke Malaysia.

- c. Adanya kebijakan pembangunan perbatasan, terakhir dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi perbatasan negara di Aruk belum terencana dengan baik tindak lanjutnya karena adanya pergantian kepemimpinan di Kabupaten Sambas. Sementara Bupati baru sedang berbenah diri menyiapkan rencana aksi dan anggaran untuk mendukung instruksi tersebut, waktu terus berjalan tapi belum terlihat kebijakan nyata yang dilakukan. Bupati baru akan memulai kebijakannya pada tahun 2022, padahal Instruksi Presiden tersebut membatasi waktu paling lama dua tahun (2021 dan 2022).

4. Pembangunan Sektor Unggulan

Rasyid (2005) menyatakan bahwa tujuan utama dari desentralisasi tahun 1999 itu adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkontribusi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Dilain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, daerah akan mengalami pemberdayaan yang signifikan. (Sobandi et al., 2006). Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kredibilitas dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat.

Kutipan panjang dari orang paling berpengaruh dalam menyusun konsep desentralisasi pasca jatuhnya pemerintahan orde baru yakni dengan ditetapkannya satu paket undang-undang otonomi saat itu adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

yang mencabut UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang sangat sentralistik dan UU No. 25 tahun 1999 tentang pembangunan keutuhan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Namun banyak praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pemerintah pusat yang seharusnya fokus pada penyusunan kebijakan dalam kaitannya dengan keterlibatan Indonesia dengan dunia internasional, malah disibukkan mengurus daerah yang harusnya tugas daerah dalam membangun NKRI tercinta. Dengan desentralisasi akan tumbuh kreativitas daerah, dengan kewenangan yang lebih luas kepada daerah (Setiawan et al., 2017). Sehingga daerah akan lebih leluasa mengatur dan mengurus warganya karena masyarakat di daerah lebih mengerti apa yang harus mereka lakukan sekaligus mensejahterakan mereka.

Kabupaten Sambas sebagai daerah otonom menyelenggarakan wewenang desentralisasi didorong oleh tersedianya potensi unggulan, yakni bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, perdagangan dan pariwisata. Potensi yang ada tersebut dapat dilihat dari sektor-sektor unggulan yang berkontribusi dalam menyumbangkan produk domestik regional bruto (PDRB). Berdasarkan data statistik Kabupaten Sambas tahun 2020 sektor pertanian masih paling besar kontribusinya dalam PDRB Kabupaten Sambas, yakni sebesar 33,62%, disusul perdagangan 17,02%, industri pengolahan 11,64%, konstruksi 8,09%, administrasi pemerintahan, perumahan dan jaminan sosial 6,65%, informasi dan komunikasi 4,55% dan jasa pendidikan 4,52% serta lainnya di sekitar jasa.

Namun akibat pandemi *covid-19* di Kabupaten Sambas, pertumbuhan ekonomi tumbuh minus (-2.02%), kecuali jasa kesehatan 19,57%, informasi dan komunikasi 8,12% dan pertanian hanya 1,04%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2016 sebesar 5,24% turun menjadi 5,06% (2017), 4,93% (2018), 4,76% (2019) dan -2,02% (2020). Fakta ini menjelaskan bahwa kontribusi sektor unggulan di Kabupaten Sambas, khususnya pertanian belum membawa kesejahteraan bagi rakyat Kabupaten Sambas. Bahkan jika dicermati dari banyaknya warga Kabupaten Sambas yang bekerja di sektor pertanian mencapai 70% penduduk Kabupaten Sambas hanya berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas sebesar 4,57% (2016), 5,50% (2017), 5,89% (2018), 5,59% (2019) dan 1,04% (2020). Kemudian distribusi kontribusinya dalam PDRB Kabupaten Sambas hanya sebesar 32,52% tahun 2016, 32,57% tahun 2017 32,603% tahun 2018 dan 32,54% tahun 2019 serta 33,62% pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat bahwa lebih kurang 70% warga Kabupaten Sambas hanya menghasilkan 33,62% pada tahun 2020 untuk menyumbang PDRB nya di tahun 2020.

Sementara itu sektor lain seperti perdagangan yang jumlah pekerjanya sangat sedikit kurang dari 10% tapi mampu menyumbang PDRB terbesar 17,02%. Terlebih di sektor industri, tenaga kerjanya sangat sedikit kurang dari 3% tetapi sangat besar kontribusinya bagi PDRB Kabupaten Sambas yakni sebesar 11,6 9% (Pejabat Bappeda Kabupaten Sambas, *Wawancara*, 2021). Hal ini dapat pula dikatakan bahwa sektor pertanian diharapkan menjadi sektor unggulan ternyata tidak mensejahterakan rakyat Kabupaten Sambas. Sebaliknya sektor non unggulan justru sangat besar kontribusinya bagi pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Sambas. Fakta ini dapat menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas tidak mampu mencermati potensi menjadi pengungkit pembangunan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Bappeda dan Dinas Pertanian Kabupaten Sambas (2021) bahwa pembangunan pertanian tanaman pangan harus ditetapkan sebagai sektor unggulan di mana Kabupaten Sambas telah ditetapkan sebagai “lumbung beras” Kalimantan Barat. Namun kebijakan nyata yang berkaitan dengan kebijakan Sambas sebagai lumbung beras Kalbar tidak jelas, termasuk penganggarannya dalam RAPBD Kabupaten Sambas. Jika dikaitkan fakta ini dengan pernyataan pakar desentralisasi di atas, maka desentralisasi yang begitu luas dinyatakan dalam pelimpahan kewenangan yang luas pula kepada daerah terbukti tidak mampu memacu kreativitas pemerintah daerah dalam mengatasi masalah domestik (daerah) tersebut.

Petani dan sektor pertanian seharusnya diperhatikan dalam membuat kebijakan daerah karena sektor tersebut terkait dengan banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Sambas yang terlibat dan dilibatkan dalam pembangunan daerah. Selain itu, bukti lain bahwa desentralisasi bahkan belum mampu mendorong kreativitas daerah dalam memanfaatkan potensi unggulan di daerahnya. Khususnya di Kabupaten Sambas dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Barat masih jauh lebih besar pada tahun 2016. Perbandingan PAD dengan dana transfer sebesar 6,42% meningkat 12,22% pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 sebesar 7,50% dan tahun 2019 sebesar 8,11% serta pada tahun 2020 sebesar 7,66%. Perbandingan tersebut diperoleh dari APBD Kabupaten Sambas dalam

lima tahun terakhir. Sungguh miris bahwa dana APBD Kabupaten Sambas tersebut lebih banyak digunakan untuk operasional pemerintahan daerah (di atas 60% selama lima tahun terakhir). Belanja modal yang seharusnya mendapatkan porsi yang terus meningkat setiap tahunnya justru sedikit dan terus berkurang. Berdasarkan data statistik Kabupaten Sambas belanja modal di Kabupaten Sambas tahun 2016 yakni 20,63%, 19,5% pada tahun 2017, 16,85% pada tahun 2018, 18,52% pada tahun 2019 dan 14,05% pada tahun 2020. Keterbatasan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sambas tersebut dapat dipastikan menyebabkan berkurangnya peluang berusaha dan pengangguran dan kemiskinan akan meningkat. Berarti pula kesejahteraan yang di diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Sambas semakin jauh dan sangat tidak jelas.

D. Penutup

Otonomi daerah yang seluas-luasnya diterapkan pasca perubahan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah adalah antiklimaks atas kebijakan otonomi nyata dan bertanggungjawab yang selama orde baru diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui otonomi seluas-luasnya sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya terakhir dengan UU No. 23 tahun 2014. Diharapkan daerah akan maju dan mensejahterakan rakyatnya. Kabupaten Sambas sebagai daerah percontohan otonomi daerah dengan titik berat pada Dati II mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah pusat. Perhatian yang didapat oleh Kabupaten Sambas saat itu diberikan pelimpahan urusan pemerintahan yang lebih banyak

dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun ternyata, kebijakan otonomi percontohan yang tentunya diharapkan membuat masyarakat Kabupaten Sambas menjadi senang justru terjadi sebaliknya dimana masyarakat tidak puas dan ingin adanya pemekaran Kabupaten Sambas menjadi tiga daerah yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Situasi krisis moneter pada tahun 1997 yang menyebabkan jatuhnya nilai tukar rupiah ditambah lagi dengan kerusuhan sosial di Kabupaten Sambas 1997 dan 1999 yang menyebabkan banyak korban harta dan nyawa serta pengusiran yang sangat besar di Kalimantan Barat memaksa pemerintah pusat menyetujui pemekaran Kabupaten Sambas dengan ditetapkannya Kabupaten Bengkayang dengan UU No. 10 Tahun 1999 dan kemudian pembentukan Kota Singkawang dengan UU No. 12 tahun 2001.

Pemekaran Kabupaten Sambas di satu sisi mampu meredam kerusuhan sosial, namun menyisakan banyak permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas. Terbukti bahwa setelah lebih dari 20 tahun pemekaran Kabupaten Sambas belum banyak kemajuan yang didapatkan, padahal harapan adanya meningkatkan kesejahteraan rakyat paling utama, kecuali manfaat politik bagi sebagian orang yang menikmatinya. Adanya kecenderungan disintegrasi bangsa, dimana yang terjadi adanya pemisahan daerah berdasarkan etnis bukan kesejahteraan didapatkan.

Kiranya sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Sambas mengatasi permasalahan ini untuk merancang perubahan menjadikan kesejahteraan yang hakiki bagi masyarakat Kabupaten Sambas, dengan memanfaatkan perhatian sangat besar pemerintah pusat pada

kebijakan pembangunan perbatasan negara dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi pada perbatasan negara. Sangat tepat bila pemerintah daerah bersama-sama seluruh masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi membahas dan melaksanakan kebijakan pembangunan perbatasan tersebut secara serius dan terus-menerus. Perlunya langkah nyata tersebut terkait upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Sambas terunggul di Kalimantan Barat pada tahun 2025 sebagaimana ditegaskan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas 2005-2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. & Robinson, J.A. (2014). *Mengapa Negara Gagal: Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan*. Terj. Arif Subianto. Jakarta: PT. Gramedia.
- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. (2011). *Semangat Baru Mengubah Wajah Perbatasan Negara: Refleksi dan Proyeksi*. Jakarta: BNPP Republik Indonesia.
- Barker, R.C. (1968). *The Power of Decision*. New York: Dodd, Mead and Company.
- Balilatfo KDPDTT. (2019). *Profil dan Potensi Daerah Tertinggal Pulau Kalimantan*. Jakarta: UGM.
- Bratakusumah, D.S. & Solihin, D. (2003). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cheema, G.S. & Popovski, V. (2010). *Building Trust in Government: Innovations in Governance Reform in Asia*. New York: United Nation University Press.
- Dewantoro, Boedi (2001). *Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi*. Yogyakarta: Medprint Offset.
- Hasibuan, A. et al. (2002). *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Suara Pembaharuan.
- Huda, N. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Joso, S. (1986). *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: CV. Yulina.
- Kaloh, J. (2002). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Latif, A. (2014). *Hukum Administrasi: Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lemhannas. (2013). Diakses 10 Mei 2022, dari <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000129/swf/3732/files/basic-html/page14.html>.
- Makagansa, H. R. (2008). *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Fuspada.

- Mietzner, M. & Aspinall, E. (2010). Problems of Democratisation in Indonesia: On Overview. In A. Edward & M. Mietzner (Eds). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Pangabean, H. et al. (2014). *Kearifan Lokal Keunggulan Global*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Pasolong, H. (2010). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Pejabat Bappeda Kabupaten Sambas. *Wawancara*, 2021.
- Pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Sambas. *Wawancara*. 2021
- Rasyid, M. R. (2005). Otonomi daerah : Latar Belakang dan Masa. Syamsudin Haris (Ed). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Said, M.M. (2008). *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Setiawan, Y. et al. (2017). *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktek*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sobandi, B. et al. (2006). *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Subarsono, A. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sufianto, D. (2016). *Etika Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani, et al. (2003). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tanasaldy, T. (2007). Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat. In H. S. Nordholt & G. van Klinken et al. (Eds). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Toha, M. (2012). *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wahidin, S. (2013). *Hukum Pemerintahan Daerah: Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasistiono, S. et al. (2001). *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebagai Upaya Awal Merevisi Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999*. Bandung: STPDN.

Widjaja, HAW. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada.

IBUKOTA KABUPATEN SAMBAS DAN DINAMIKA SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, AGAMA, POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN

Alkadri dan Zarul Arifin

A. Pendahuluan

Menanggapi masalah perkotaan yang semakin meningkat, Indonesia telah mengembangkan kerangka aturan tata ruang yang sesuai dengan karakteristik dan latar belakang nasional. Undang-Undang (UU) yang digunakan saat ini adalah UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007. Berdasarkan UU tersebut, kegiatan perencanaan tata ruang akan menghasilkan dua rencana, yaitu rencana umum dan rencana detail. Selain itu, khususnya pada rencana detail, dikenal dengan kawasan strategis. Kawasan strategis merupakan daerah khusus yang mempunyai nilai penting dan prioritas nasional (strategis) dalam beberapa pertimbangan. Selain itu, dalam sistem hierarki perkotaan beberapa wilayah juga dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang didefinisikan sebagai daerah perkotaan yang ditugaskan untuk mendorong pembangunan di sejumlah wilayah perbatasan nasional. Sejauh ini ada 26 PKSN yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tingkat provinsi jumlah wilayah strategis terbanyak terdapat di Kalimantan Barat dengan lima wilayah perbatasan, diikuti Kalimantan Timur dan Maluku dengan empat wilayah perbatasan.

Salah satu kabupaten perbatasan di Provinsi Kalbar adalah Kabupaten Sambas yang terletak di bagian utara. Wilayah ini memiliki luas 6.395,70 km² atau sekitar 4,36% dari luas wilayah provinsi (146.807 km²). Seperti yang tercatat dalam publikasi BPS Kabupaten

Sambas (2017), Kabupaten Sambas terbagi menjadi 19 kecamatan dan 183 desa. Sebelumnya, daerah perbatasan atau daerah luar di Indonesia mempunyai keterbatasan dalam pembangunan daerah. Saat ini dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat melalui undang-undang dan peraturan lainnya telah memberikan perhatian khusus kepada daerah perbatasan melalui pembentukan kawasan strategis, baik di sistem perkotaan (dalam struktur ruang) maupun kawasan strategis nasional (dalam pola spasial). Semua peraturan tersebut memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus dan mendorong percepatan pembangunan di daerah perbatasan. Dalam mendorong Kabupaten Sambas sebagai kabupaten perbatasan, pemerintah telah menetapkan beberapa kawasan strategis (PKSN) tepatnya di area-area perbatasan (Paloh dan Aruk). Selain itu, dalam perspektif pembangunan lainnya (pariwisata), Sambas dan sekitarnya juga telah ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Kajian ini secara khusus memotret Kabupaten Sambas dalam berbagai aspek yaitu sosial, budaya, ekonomi, agama, politik, hukum dan pemerintahan.

B. Kabupaten Sambas Dalam Perspektif Sosial, Budaya dan Ekonomi.

Kajian khusus tentang identitas agama orang Sambas di hulu sungai Sambas, sepanjang yang diketahui, belum pernah dilakukan. Kajian-kajian tentang Melayu Sambas selama ini lebih dititikberatkan pada sejarah, pendidikan dan budaya, serta disajikan secara umum. Purba et al. (2011) dalam buku berjudul Sejarah Penyebaran dan Pengaruh Budaya Melayu di Kalimantan Barat dalam salah satu bagian menulis tentang Kesultanan Sambas. Tulisan Purba et al. menampilkan

sejarah awal Sambas, sejak nama ini mulai ditulis hingga sultan-sultan yang berkuasa. Bahan yang digunakan dalam tulisan tersebut antara lain tulisan Muljana (2007) untuk sejarah awal, dan bahan dari Ismail (1985) dan Musa (2008) untuk menggambarkan sejarah sultan. Karya Ismail yang dikutip berupa tesis tentang politik Kesultanan Sambas di Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Ismail melakukan studi terkait sejarah politik dalam rentang waktu 1808-1818. Rentang waktu tersebut menurutnya adalah masa krusial Kesultanan Sambas, karena setelah tahun tersebut kekuasaan sultan beralih ke tangan Belanda. Pada tahun 1808 adalah masa kedatangan orang-orang Cina ke Daerah Monterado untuk menambang emas atas usaha Sultan Umar Akhamuddin, dan tahun 1818 adalah masa peralihan kekuasaan sultan kepada Belanda. Pada tahun 1818 ditandatangani kontrak atau perjanjian antara Sultan Sambas dengan Belanda. Sedangkan tulisan Musa adalah Sejarah Kesultanan Sambas, Kalimantan Barat: Kajian Naskah Asal Raja-raja dan Salsilah Raja Sambas. Naskah tersebut merupakan naskah lama yang diperolehnya dari koleksi perpustakaan nasional merupakan data penting mengenai siapa orang Sambas dan dinamika yang terjadi dalam kesultanan. Dalam naskah itu menyebutkan nama-nama sultan dan gambaran singkat tentang apa yang terjadi pada kesultanan dan sultan, termasuk pemindahan pusat kerajaan. Dinamika politik dalam Kesultanan Sambas, serta implikasinya, tergambar cukup jelas dalam karya Musa.

Tulisan tentang Sambas masa lalu dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat juga bisa dilihat dalam Wati (1989), yang melakukan aliterasi syair perang Cina di Monterado, memaparkan tentang bagaimana keadaan sosial politik di pedalaman Sambas pada

abad ke-18. Meskipun berbentuk syair, namun informasi yang dikandung dalam teks sastra ini memberikan gambaran yang semakin jelas mengenai situasi peralihan kekuasaan Sultan Sambas atas wilayah pedalaman (wilayah hulu sungai), dan perkembangan pengaruh Kongsi Cina, serta situasi hiruk pikuk dalam peperangan antara Kesultanan Sambas yang kemudian mendapatkan bantuan Belanda, melawan Kongsi Cina.

Munawar (2001) pernah menulis secara khusus tentang Islam di Kabupaten Sambas. Menurutnya, Islam di Sambas sudah ada sejak Raden Sulaiman berkuasa. Hingga kini Islam sangat dominan, persentasinya mencapai 81% dari seluruh penduduk Sambas. Dominasi itu tentu mempengaruhi sektor kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di Sambas. Dijelaskan bahwa masyarakat Islam di Sambas masih menjunjung tinggi tradisi dan adat, terutama dalam kehidupan spiritual. Malah katanya, kehidupan keagamaan yang dijalankan lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi dan budaya nenek moyang. Hal ini juga yang membuat orang Melayu kadang susah dibedakan dengan orang Dayak. Informasi yang kurang lebih sama tentang masuknya Islam di Sambas ditulis oleh Suni et al. (2007) dan Mahrus (2008).

Sementara itu, terdapat juga tulisan mengenai sejarah khusus pada bidang pendidikan di Sambas dalam Erwin (2007). Sedangkan tentang budaya Sambas dapat dilihat dalam tulisan Lontaan (1975) dan Ikram (2004). Dalam bukunya Sejarah-Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan – Barat, pada bagian Perkawinan Adat Daerah Sambas (Melayu), Lontaan menampilkan gambaran tentang adat perkawinan dalam masyarakat Melayu Sambas. Adat yang dideskripsikan di sini meliputi mencari jodoh, perantara, adat menyongsong perkawinan,

mandi belulus, balik tikar dan tepung tawar. Meskipun terbatas informasi yang disajikan, tetapi, deskripsi ini membantu memahami bahwa perkawinan merupakan salah satu bahan identitas masyarakat Sambas, bahan yang membuat mereka berbeda dibandingkan Melayu yang lain. Selain itu, bahan ini sebenarnya memuat beberapa ciri tersirat tentang identitas Melayu Sambas. Lontaan menyebutkan ada jenis “kain Sambas”, yaitu kain tenunan yang dibuat oleh dara-dara Sambas sebagai persiapan mereka memasuki fase menjadi “siap kawin”. Seseorang anak yang sudah dapat membuat kain tenun Sambas ini berarti dia sudah siap dilepas untuk berumah tangga.

Tulisan Ikram (2004) juga seiras dengan gambaran yang diberikan oleh Lontaan. Bedanya Ikram memaparkan dengan lebih detail dan istilah-istilah yang dipakai dalam bahasa Sambas disebutkannya. Misalnya, berkaitan dengan pinang meminang, Ikram menyebutkan adanya tradisi “Antar Cikram”, “Balik Tikar”, dan lain-lain. Masih tentang budaya Sambas, Ikram menulis tentang tradisi tepung tawar dalam masyarakat Sambas. Menurutnya, tepung tawar merupakan tradisi turun temurun yang diwarisi orang Melayu yang dilakukan pada acara perkawinan, kehamilan, pindah rumah baru, dan keluarga yang meninggal.

C. *Keberagaman Masyarakat Sambas*

Karakteristik masyarakat Sambas dipengaruhi kondisi geografis, dimensi sejarah dan Sambas dalam konteks bagian dari Indonesia. Secara geografis berbatasan langsung dengan Sarawak-Malaysia, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang dan Laut Natuna sehingga keberadaan budaya masyarakat sekitar saling mewarnai

dengan budaya masyarakat Sambas. Selain itu, pengaruh dimensi sejarah khususnya keberadaan Kesultanan Sambas tempo dulu menjadikan Sambas identik dengan Islam dan Melayu. Sedangkan, Sambas masa kini tergolong masyarakat multikultural sebagai bagian dari Indonesia, di dalamnya terdapat berbagai suku dan agama yang mengakui kebebasan beragama sebagaimana dalam pasal 29 UUD 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Realitas ini menunjukkan keberagaman masyarakat Sambas tergolong masyarakat pluralis. Sisi lain, identik dengan agama Islam dan suku Melayu.

Penduduk Kabupaten Sambas berjumlah 629.905 jiwa, tingkat kepadatan penduduk sekitar 98 jiwa per-kilometer persegi atau setara 3.264 jiwa per-desa dengan rincian jumlah pemeluk agama dan tempat ibadah, terdiri: (1) Islam berjumlah 560.286 jiwa memiliki 731 masjid dan 425 mushala, (2) Kristen Protestan berjumlah 11.645 jiwa, 95 gereja, (3) Kristen Katolik berjumlah 18.186 jiwa memiliki 75 gereja dan 11 kapel, (4) Hindu berjumlah 194 jiwa memiliki 2 Pura, (5) Budha berjumlah 43.918 jiwa dan 136 Vihara, (6) dan lain-lain berjumlah 3.019 jiwa. Konghucu memiliki 136 Klenteng (BPS, 2021). Pemeluk agama ini tersebar dalam beberapa suku, seperti Melayu, Dayak, Cina, Jawa, Batak, Bugis dan lain-lain. Pemeluk agama Islam sebagai pemeluk agama mayoritas sekitar 88%. Kemudian, pemeluk Budha sekitar 7% dan Kristen Katolik maupun Protestan sekitar 5%. Sisanya, Konghucu sekitar 0,47% dan Hindu sekitar 0,3%.

Pemeluk agama Islam rata-rata adalah suku Melayu yang identik dengan Islam, meskipun tidak semua orang Islam di Kabupaten Sambas bersuku Melayu. Identitas ini tidak lepas dari dimensi sejarah

dalam dunia Melayu ini sendiri yang secara umum disebabkan perdagangan dan perkawinan antara pendatang muslim dengan wanita pribumi. Peran ahli sufi dalam menyebarkan Islam yang didukung secara politik dengan cara mengislamkan para penguasa dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar terutama pada lembaga pendidikan Islam (Zami, 2018). Kemudian, ada ungkapan “Masuk Melayu” bisa bermakna suku lain non-muslim masuk Islam (*mu'allaf*) atau suku lain yang hidup bersama dalam masyarakat melayu, mengikuti dengan adat istiadat Melayu (Darmawan, 2019). Selain itu juga diperkuat dengan pengaruh keberadaan Kesultanan Sambas masa lalu sehingga masyarakat Sambas dekat dengan dimensi kemelayuan dari aspek tradisi, agama dan bahasa dan lain-lainnya.

Potret keberagamaan maupun hubungan antar umat beragama dapat dilihat dari aktivitas keagamaan dan peran lembaga keagamaan. Aktivitas keagamaan dalam bentuk praktek rutinitas peribadatan dan perayaan hari besar keagamaan yang berpusat di berbagai tempat ibadah masing-masing agama. Bagi umat Islam, masjid selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat belajar Alquran dan pusat aktivitas dakwah terutama pada moment peringatan hari-hari besar Islam. Bagi umat Kristen, moment perayaan Natal menghiasi aktivitas peribadatan di gereja-gereja. Sedangkan, moment perayaan Imlek, menghiasi semarak kegiatan keagamaan di berbagai Kelenteng dan Vihara bagi pemeluk Budha dan Konghucu.

Keberadaan lembaga pendidikan Islam bagi umat Islam memiliki peran penting dalam pembinaan akhlak dan dakwah sehingga terdapat banyak lembaga pendidikan Islam yang dikelola pemerintah (negeri) maupun dikelola yayasan (swasta) mulai dari tingkat kanak-

kanak dengan istilah Raudhatul Athfal, tingkat dasar dengan istilah Madrasah Ibtidaiyah, tingkat menengah dengan istilah Madrasah Tsanawiyah dan tingkat atas dengan istilah Madrasah Aliyah. Sedangkan, untuk tingkat perguruan tinggi terdapat perguruan tinggi Islam bernama Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, selanjutnya disingkat IAIS Sambas. Selain itu, terdapat lembaga pendidikan Islam non-formal seperti Rumah Tahfiz, Taman Pendidikan Alquran dan berbagai kajian Islam rutin lainnya. Sedangkan bagi pemeluk agama lainnya memiliki berbagai lembaga pendidikan umum yang dikelola secara mandiri melalui yayasan mulai dari tingkat kanak-kanak, dasar, menengah dan umum.

Pasang-surut hubungan antar umat beragama terjadi ketika terdapat perbedaan pandangan terkait mengenai sesuatu bersifat teologi atau keyakinan keagamaan yang umumnya masuk dalam ranah perbincangan publik. Contoh, ada dua isu sensitif menarik dan selalu mendapat perhatian publik yaitu ucapan “Selamat Natal” dan keterlibatan orang Islam dalam perayaan Imlek atau agama lain. *Pertama*, bagi sebagian orang Islam menolak untuk mengucapkan selamat natal baik secara langsung atau tidak langsung, apalagi ucapan tersebut disampaikan di ruang publik dengan anggapan bahwa ucapan tersebut adalah bagian dari keikutsertaan dalam ibadah agama lain. Sedangkan, bagi yang berpendapat membolehkan dengan anggapan bahwa ucapan tersebut bagian dari hubungan baik sesama manusia di luar dimensi ibadah. Menurut Gus Dur, sesungguhnya persoalan ini belum ditemukan pemecahannya (Wahid, 1999) sehingga bisa menjadi menghambat hubungan baik antar umat beragama.

Kedua, persoalan keterlibatan sebagian umat Islam dalam

perayaan Imlek terutama acara pawai *tatung*. Bagi sebagian umat Islam menolak dengan alasan bahwa perayaan ini bagian dari ritual keagamaan orang lain, tidak sebatas dianggap sebagai festival budaya. Untuk itu, keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi sosial keagamaan menjadi sangat penting dalam upaya membangun komunikasi antar umat beragama. Pemerintah dalam hal ini memiliki otoritas sebagai pengatur sekaligus pembuat kebijakan dalam membangun komunikasi urusan antar umat beragama dengan melibatkan organisasi sosial keagamaan dan perguruan tinggi sesuai dengan fungsinya masing-masing agar terwujud suasana rukun dan damai.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sambas merupakan forum yang bersentuhan langsung dengan tokoh agama yang berbeda agama sehingga perannya sangat penting dalam membangun komunikasi antar umat beragama guna membangun semangat toleransi. Selain itu, peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Sambas sangat penting. Menurut Azra bahwa dua organisasi sosial Islam ini mampu menjaga kedamaian dan toleransi antar umat beragama (Wulandari, 2015) sebab memiliki sejarah panjang dalam menjaga toleransi beragama di Indonesia.

IAIS Sambas sebagai lembaga perguruan tinggi Islam di Sambas memiliki peran strategis dalam pengembangan wawasan keilmuan sebagaimana dalam visi IAIS Sambas yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi Rujukan Dalam Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara Bagi Kemajuan Peradaban di Asia Tenggara” (Visi, Misi dan Tujuan, 2019). Perhatian IAIS Sambas dalam menggali nilai toleransi beragama dengan berorientasi pada kearifan lokal

masyarakat Sambas dan sekitarnya dalam aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Salah satunya dalam bentuk karya tulis seperti Sri Sudono Saliro menulis tentang “Toleransi di Meja Makan” (Kabar Gembira, Dosen IAIS Sambas Meraih Peringkat Terbaik 2 dalam Call of Paper Nalar, 2021). Selain itu, masih banyak kearifan lokal lainnya yang perlu digali seperti semangat toleransi beragama dalam urusan mitra kerja yaitu izin dari pemilik toko kepada karyawannya yang berbeda agama untuk beribadah pada saat jam kerja. Budaya bertamu antar umat beragama saat lebaran dan berbagai topik lainnya. Sedangkan, pengabdian IAIS Sambas dalam menanamkan nilai toleransi beragama, salah satunya adalah memberikan perlakuan yang sama antara mahasiswa muslim dengan non-muslim sesuai antara hak dan kewajibannya di IAIS Sambas.

D. Dinamika Politik, Hukum dan Pemerintahan

Masyarakat Sambas tergolong masyarakat multikultural yang terdiri dari banyak suku, agama dan budaya. Menurut Rofi (2006) ada kelompok suku besar yang tinggal di wilayah ini yaitu Melayu, Cina dan Dayak. Melayu adalah kelompok suku terbesar dengan jumlah 84% diikuti Cina 8% dan Dayak 6% dari total populasi. Setiap suku di suatu daerah berbeda satu sama lain dalam hal agama, bahasa, budaya dan status sosial ekonomi. Peran tiga suku ini meleburkan dirinya dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga pemerintahan maupun partai politik.

Salah satu dari sekian banyak organisasi sosial kemasyarakatan yang bernuansa kesukuan terbaru di Kabupaten Sambas adalah Persatuan Orang Melayu (POM), terdaftar secara resmi 26 Februari 2018, berpusat di Pontianak, tersebar beberapa cabang tingkat

kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Barat. Tujuannya mengangkat budaya, semangat kemelayuan serta syiar Islam. Kabupaten Sambas adalah salah satu cabang POM yang aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Salah satunya adalah mengangkat simbol identitas Melayu seperti beduk, tanjak dan lain sebagainya.

Pandangan seseorang mempengaruhi sikap politiknya (Wahid, 2018). Dalam masyarakat multikultural, politik identitas cukup memberikan warna tersendiri dalam dimensi politik. Di mana, kecenderungan seseorang untuk memilih berdasarkan keturunan, lingkungan, termasuk di dalamnya tempat lahir, warna kulit, bahasa, kekerabatan, agama dan paham keagamaan yang berdampak pada pilihan politik (Lampe, 2010). Menurut Tanasaldy dalam (Nordholt & Klinken, 2007) bahwa politik lokal di Kalimantan Barat telah diwarnai dengan kuatnya warna kesukuan sejak berakhirnya Orde Baru yang ditandai dengan konflik tahun 1997 dan 1999 melalui mobilisasi massa. Namun pendekatan kesukuan ini juga menurutnya cukup mendamaikan terutama setelah tahun 2000. Selanjutnya, politik “pembagian kekuasaan” kesukuan ini diadopsi secara luas di tingkat kabupaten dan mencegah terulangnya kekerasan episode 1997 dan 1999.

Perkembangan partai politik dan perolehan jumlah kursi anggota dewan perwakilan daerah Kabupaten Sambas dalam masa dua periode yaitu periode tahun 2014-2019, terdiri dari: PKB 0 kursi, Gerinda 5 kursi, PDI Perjuangan 6 kursi, Golkar 7 kursi, NasDem 4 kursi, PKS 4 kursi, PPP 4 kursi, PAN 6 kursi, Hanura 3 kursi, Demokrat 4 kurs, PBB 1 kursi, PKPI 1 kursi. Sedangkan, periode tahun 2019-2024, terdiri dari: PKB 4 kursi, Gerinda 7 kursi, PDI Perjuangan 6 kursi,

Golkar 6 kursi, NasDem 5 kursi, PKS 4 kursi, Perindo 1 kursi, PPP 2 kursi, PAN 4 kursi, Hanura 3 kursi, Demokrat 3 kursi sehingga selama dalam dua periode tersebut jumlah total 45 kursi dengan 11 partai.

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa: (1) Partai yang mengalami peningkatan kursi yaitu PKB yang periode sebelumnya tidak ada, diikuti Gerindra dan NasDem, (2) Partai yang tidak mengalami perubahan kursi atau tetap jumlahnya yaitu PDI Perjuangan, PKS, Hanura, (3) Partai yang mengalami penurunan jumlah kursi yaitu Golkar, PPP, PAN, Demokrat. Sedangkan, PBB dan PKPI tidak ada kursi, (4) Partai baru yang hadir pada periode 2019-2024 adalah Perindo 1 kursi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, 2021).

Pandangan mengenai adanya kesamaan agama dan suku sebagai wacana yang terkadang muncul dan sensitif dalam pentas politik, meskipun pada individu tertentu tidak selamanya sikap pemilih dalam menentukan pilihannya disebabkan kesamaan agama atau etnis tertentu. Tetapi, bersifat dinamis. Dinamisasi perilaku pemilih masyarakat Sambas dalam menentukan pilihannya tampak dalam berbagai wacana yang berkembang sesuai dengan situasinya. Menurut Rofi (2006) bahwa pada pemilihan pemilu Bupati tahun 2006, afiliasi suku tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap orientasi kandidat. Tetapi, penting bagi para calon untuk mengamati dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan struktur sosial masyarakat di wilayahnya. Dalam hal ini, pengetahuan bagi para pemimpin. Apakah sebagai legislatif atau eksekutif harus mampu memahami kondisi sosial, ekonomi dan struktur masyarakat Sambas sebagai dasar pemahaman dalam membangun kepercayaan masyarakat maupun

dalam menjalankan pemerintahan.

Masyarakat Sambas sejak pemekaran wilayah sampai kini berkembang maju dalam berbagai aspek. Salah satu potensi utamanya adalah berbatasan langsung dengan Sarawak-Malaysia. Untuk itu, konsistensi tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*), kepuasan akses layanan publik, penyelesaian berbagai persoalan sosial dan kesesuaian antara kebijakan pusat dengan daerah menjadi modal utama pembangunan. Selama pasca pemekaran wilayah salah satu pembangunan dan kebijakan yang bisa menjadi rujukan dalam membangun masyarakat Sambas ini yaitu pembangunan pos lintas batas negara dan penanganan perdagangan orang.

Pembangunan Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) Aruk. Berangkat dari salah satu program prioritas pemerintah pusat yang disebut NAWA CITA pada point ketiga menegaskan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka memperkuat kedaulatan Indonesia yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.

Keinginan untuk membangun pos perbatasan juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Kabupaten Sambas. Menurut Firdaus (2019), ada pertumbuhan sektor sosial ekonomi sebagai akibat dampak kebijakan pembangunan PLBN yang disertai adanya fakta yang memperlihatkan telah adanya penambahan jumlah sarana pendidikan dan ibadah. Sedangkan, peningkatan pembangunan bidang ekonomi yang disertai dengan adanya pembangunan sarana umum, sarana perbankan dan pasar di kawasan tersebut.

Persoalan sosial kemanusiaan berupa perdagangan orang

(*trafficking*) meskipun isu ini secara global bagian dari isu nasional, namun Kabupaten Sambas juga salah satu daerah yang rawan terjadinya perdagangan orang sebab secara geografis berbatasan langsung dengan Sarawak-Malaysia. Umumnya, korban berstatus sebagai pekerja imigran tetapi selanjutnya diperdagangkan. Korban utamanya adalah wanita dan anak-anak. Untuk itu, salah satu kebijakan pemerintah daerah menjawab persoalan ini dengan menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 tahun 2015 tentang Penanganan dan Pencegahan Korban Perdagangan Orang. Selanjutnya, diikuti dengan berbagai penanganan untuk menyelamatkan dan membantu pemulihan korban.

Keberadaan IAIS Sambas di tengah-tengah masyarakat Sambas adalah bagian dari sistem pembangunan ini sendiri sesuai dengan kapasitasnya yaitu lembaga pendidikan tinggi yang berorientasi pada tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) khususnya membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus mengangkat budaya lokal ke ranah internasional. Dalam hal ini, peran insan akademis dan keterlibatan alumni IAIS Sambas dapat menjadi tolok ukur pencapaian tersebut yang mengabdikan dirinya dalam berbagai aspek seperti pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi dan lain-lain yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

E. Penutup

Aktivitas usaha atau bisnis di Sambas cenderung bergerak ke daerah terdekat dan internal sendiri, seperti Tebas dan Sebawi sampai kota-kota lain di bagian selatan Sambas (mengarah ke ibukota

provinsi). Hal ini terjadi karena Tebas lebih dekat dengan Pontianak, dan kawasan ini dianggap sebagai salah satu pemasok utama untuk memenuhi aktivitas bisnis/usaha. Sebagian besar unit usaha di Sambas adalah usaha kecil dengan cabang dan jumlah karyawan yang terbatas. Sebagai ibukota kabupaten, sebagian besar infrastruktur telah mendukung kegiatan usaha di Sambas. Untuk interaksi dengan Temajuk-Paloh dan negara tetangganya (Sarawak-Malaysia), pelaku usaha dari Sambas menganggap Paloh sebagai daerah potensial, dan Sarawak sebagai daerah pasar utama. Aktivitas usaha atau bisnis di Temajuk-Paloh mengarah ke Sarawak-Malaysia untuk transaksi dan pemasok utama mereka. Sebagian besar unit usaha di Temajuk-Paloh adalah usaha kecil tanpa cabang dan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Sebagai salah satu wilayah paling ujung di Kalimantan Barat, infrastrukturnya sangat terbatas terutama untuk listrik dan telekomunikasi. Oleh karena itu, warga lebih sering berorientasi ke Sarawak. Sementara itu untuk interaksi dengan negara tetangga (Sarawak-Malaysia), pelaku usaha dari Temajuk-Paloh mengatakan bahwa Sarawak (terutama Melano) adalah pasar utama untuk aktivitas usaha mereka. Selain itu, Sarawak juga dianggap sebagai pemasok mereka untuk kebutuhan barang sehari-hari karena akses yang begitu dekat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, T. (2021). *Kabupaten Sambas dalam Angka 2021*. Sambas: BPS Kabupten Sambas.
- Darmawan, Z. (2019). Keterlibatan Tokoh Melayu Dalam Pilkada di Kota Palembang Sumatra Selatan. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 12(1), 13-29.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas. (8 Februari 2022). Diakses 20 Maret 2022, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Sambas.
- Firdaus. (2019). Dampak kebijakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *JIIP* 3(2), 109-122. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3881>
- Ikram, A.M. (2004). Adat Istiadat Perkawinan Melayu Sambas. *Naskah*. Sambas: MABM Sambas.
- Kabar Gembira, Dosen IAIS Sambas Meraih Peringkat Terbaik 2 dalam Call of Paper NALAR. (2019). *Situs Resmi IAIS Sambas*. Diakses 8 Juni 2021, dari <https://www.iaisambas.ac.id/kabar-gembira-dosen-iais-sambas-meraih-peringkat-terbaik-2-dalam-call-of-paper-nalar/>.
- Lampe, I. (2010). Identitas Etnik dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 299-313.
- Lontaan, J.U. (1975). *Sejarah-Hukum Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Jakarta: Pemda Tingkat I Kalimantan Barat.
- Mahrus, E. (2007). *Falsafah dan Gerakan Pendidikan Islam, Maharaja Imam Sambas Muhammad Basiuni Imran (1885-1976)*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Munawar. (2001). Islam di Kabupaten Sambas. *Jurnal Khatulistiwa*. Edisi Khusus Juni 2005, 65-72.
- Nordholt, H.S. & Klinken, G.van (Eds.). (2007). *Ethnic Identity Politics in West Kalimantan, in: Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia, Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde*. Leiden: KITLV Press.

- Purba, J., Alqadri, S.I., Hermansyah, Yusriadi, & Ahyat, I.T. (2011). *Sejarah Penyebaran & Pengaruh Budaya Melayu di Kalimantan*. Jakarta: Direktorat Nilai Sejarah, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Rofi, F. (2006). *Voting Behaviour in Indonesia Democracy: A Study of Sambas Regency Election*. Jakarta: Sedaun.
- Suni, B. et al. (2007). Sejarah Islam Masuk Sambas: Teori dan Analisis. Dalam Yusriadi (Ed). *Sejarah Islam di Kalimantan Barat*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Visi, Misi dan Tujuan. (2019). *Situs Resmi IAIS Sambas*. Diakses 8 Juni 2021, dari <https://www.iaisambas.ac.id/visi-misi-dan-tujuan/>
- Wahid, A. (1999). *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Edisi ke-12). Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, D. (2018). Pandangan Keagamaan Guru Agama Persepsi Guru Agama Tentang Toleransi dan Islamisme di Mataram. Dalam Didin Syafruddin et al. (Eds). *Potret Guru Agama: Pandangan tentang Toleransi dan Isu-isu Kehidupan Keagamaan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wati, A. (1989). *Syair Perang Cina di Montrado*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Wulandari, I. (9 Oktober 2015). Ormas Islam Efektif Jaga Toleransi Umat Beragama. *Republika Online*. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/09/nvxoc7346-ormas-islam-efektif-jaga-toleransi-umat-beragama>.
- Zami, R. (2018). Orang Melayu Pasti Islam: Analisis Perkembangan Peradaban Melayu. *Jurnal ISLAMICA*, 2(1), 66-81

BAGIAN DUA

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
PERGURUAN TINGGI ISLAM
DI WILAYAH PERBATASAN
INDONESIA

LATAR HISTORIS DAN FILOSOFIS PENDIRIAN KAMPUS ISLAM DI SAMBAS

Risa dan Jaelani

A. *Pendahuluan*

Keberadaan pendidikan Islam di Nusantara dapat dilacak dari proses islamisasi di bumi Nusantara. Meskipun masuknya Islam ke Nusantara tidak secara bersamaan, namun para ahli sepakat bahwa sekitar abad ke-7 dan ke-8 M Islam masuk pertama kali ke wilayah ini tepatnya di Sumatera. Selanjutnya Islam hadir di Jawa sekitar 1082 M berdasarkan nisan Fatimah binti Maimun. Di bagian Timur pula misal di Maluku, Islam diperkirakan masuk abad ke-14 M. Di bagian selatan Sulawesi sudah ada pedagang muslim sejak abad ke-15 M. Kemudian di Kalimantan yakni Daerah Banjarmasin islamisasi terjadi sekitar tahun 1550 M (Susmihara, 2018). Secara khusus wilayah Kalimantan Barat paling utara yaitu Daerah Sambas, kehadiran Islam sedikit lebih awal dari Banjarmasin yaitu pada 1407 M dibawa oleh komunitas Cina muslim Hanafi (Parlindungan, 2007).

Islam mengalami perkembangan pesat sejalan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Maka pendidikan Islam juga semakin berkembang seiring dinamika pertumbuhan dan perkembangan Islam di berbagai wilayah tersebut termasuk di wilayah Sambas masa kesultanan. Keberadaan dua ulama terkenal Nusantara yang berasal dari Kesultanan Sambas yaitu Syaikh Ahmad Khatib Sambas dan Syaikh Muhammad Basiuni Imran menjadi bukti kuat bahwa Sambas pernah menjadi salah satu pusat transmisi Islam yang penting di Nusantara. Kemajuan Islam kala itu menjadi salah

satu dasar yang sangat kuat mendorong munculnya keinginan masyarakat Sambas untuk mendirikan perguruan tinggi Islam di Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

B. Sejarah Pendidikan Islam di Sambas

Kota Sambas saat ini berstatus ibukota Kabupaten Sambas. Sebelumnya sejak tahun 1957-1999, Kota Sambas hanya sebuah kecamatan di Daerah Tingkat II Sambas beribukota di Singkawang (Rahman et al., 2001). Dalam sejarahnya, Sambas merupakan salah satu kesultanan besar di Borneo Barat berdiri pada 10 Zulhijah 1040 H, mempunyai peran penting dalam perkembangan Islam. Pembangunan surau-surau di setiap desa dan masjid oleh Sultan-sultan Sambas menjadi bukti pertumbuhan aktivitas pendidikan Islam di wilayah ini.

Islam mengalami puncak kegemilangan pada masa Sultan Muhammad Syafiuddin II (1866-1922), suatu masa yang sangat kontras dengan kondisi politik negeri karena Sambas saat itu merupakan *vasal* kolonial Belanda, namun mampu mendongkrak kemajuan terutama bidang keagamaan. Sambas dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan atau pembinaan keagamaan yang penting di Kalimantan Barat dengan sebutan Sambas “Serambi Mekkah”.

Setelah masa kemerdekaan citra Sambas “Serambi Mekkah” senantiasa hidup dalam kenangan masyarakat Sambas. Bentuk-bentuk pendidikan Islam dapat ditemukan di daerah ini yaitu mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren dan pendidikan non formal lainnya. Proses pendirian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS)

Sambas yang cikal bakalnya dimulai dari Sambas kelas jauh STAIN Pontianak sejak 2002 adalah bagian upaya mengembalikan citra tersebut yang dirasa mulai memudar.

1. Pendidikan Islam Masa Kesultanan

Kesultanan Sambas mampu bertahan dalam kontestasi sejarah selama kurang lebih tiga abad dan telah diperintah oleh 15 orang sultan mulai dari Raden Sulaiman bergelar Sultan Muhammad Syafiuddin I (1631-1669) sampai Raden Mulia Ibrahim bergelar Sultan Muhammad Mulia Ibrahim (1931-1943) yang wafat dibunuh Jepang pada 1943. Kesultanan Sambas berdaulat penuh sejak berdirinya sampai tahun 1818 masa pemerintahan Sultan ke-8, Sultan Muhammad Ali Syafiuddin (1814-1828). Kesultanan terbesar di Kalimantan Barat ini secara perlahan digantikan oleh Kerajaan Pontianak dimulai sejak Belanda menanamkan pengaruhnya di Sambas pada 1818 (Risa, 2019). Berdirinya Kesultanan Sambas *Alwatzihoebillah* memiliki arti penting dalam proses islamisasi karena menjadi awal terbentuknya kekuatan Islam yang membawa perubahan besar salah satunya di bidang keagamaan. Islam menjadi agama resmi kesultanan dan aktivitas pendidikan Islam terus mengalami perkembangan.

Model pendidikan Islam di Kesultanan Sambas masa awal masih bersifat tradisional, biasanya pendidikan dipusatkan di rumah para guru *ngaji*, surau atau mesjid, dan istana. Pendidikan Islam tahap pertama ini merupakan pendidikan di lingkungan keluarga yang lebih fokus pada aktivitas “mengaji” Alquran dimulai sejak umur 5-10 tahun. Kegiatan *mengaji* ini biasanya dilakukan secara kolektif di rumah guru *ngaji* yaitu dimulai dengan kegiatan membaca dan

mengenal huruf *hijaiyah* dan *harakat* nya diakhiri membaca Juz Amma yang dibukukan tersendiri. Pengajian itu dalam masyarakat Sambas disebut *mengaji* “Alquran Kecil”. Dilanjutkan dengan *mengaji* “Alquran Besar” dimulai dari Juz pertama Alquran lengkap dengan mempelajari hukum *tajwid* sampai tamat ditandai dengan *khataman* Alquran. Penghargaan orang tua pada guru *ngaji* tampak pada acara *khataman*, dimana para orang tua memberikan beras, kelapa dan kain sesuai kemampuan masing-masing (Mahrus, 2007).

Pendidikan *mengaji* Alquran selain di rumah guru *ngaji* juga dilakukan di surau atau masjid. Oleh karena itu, pendidikan tersebut dapat dikatakan sudah dimulai sebelum berdirinya kesultanan, bisa dilacak dari keberadaan komunitas muslim ditandai dengan adanya Masjid di Kota Lama dan Kota Bangun. Selanjutnya masa kesultanan surau-surau dibangun di setiap desa oleh Sultan ke-2, Sultan Muhammad Tajuddin (1669-1708). Kebijakan pembangunan tempat ibadah dilanjutkan oleh Sultan ke-3, Sultan Umar Akamaddin I (1708-1732) dengan membangun masjid Kamasalaita (Risa, 2019). Aktivitas pendidikan Islam masa Sultan ke-3 semakin menemukan momentumnya dengan kehadiran ulama bernama Syaikh Abdul al-Jalil al-Fatani yang mampu merangsang pembelajaran Islam. Bahkan keberadaan para ulama di Sambas nantinya mampu memotivasi masyarakat Sambas satu diantaranya adalah ayah Ahmad Khatib Sambas untuk mengirim anaknya melaksanakan rihlah ilmiah ke Mekkah.

Kehadiran para ulama di Sambas menjadi titik penting perkembangan pendidikan Islam karena materi pendidikan semakin luas mulai dari bahasa Arab, fiqh, tauhid dan tasawuf (Mahrus et al.,

2003), ilmu dasar-dasar nahwu, saraf dan semacam ilmu *ushul* (Mahrus, 2007) di samping pelajaran membaca Alquran dan bahasa Arab Melayu. Tahap inilah menurut kategori Mahrus (2007), disebut sebagai tahap kedua, perkembangan lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat.

Pada tahap ketiga, pendidikan Islam di lingkungan istana (Mahrus, 2007). Pendidikan Islam di istana dilakukan secara khusus oleh imam di kesultanan bernama Imam Ya'kub yang diangkat Sultan ke-5, Sultan Umar Akamaddin II (1762-1786). Semakin meningkat dengan diangkat secara resmi H. Nurudin Mustafa sebagai imam kesultanan oleh Sultan Muhammad Ali Syafiuddin, dengan tugas pokoknya mendidik kalangan elit dan menyelesaikan persoalan keagamaan masyarakat Sambas. Lembaga Pendidikan Istana (*palace school*) inilah nanti cikal bakal kemunculan sekolah Melayu al-Sultaniyah eksklusif untuk kalangan elit kesultanan (Risa, 2015).

2. Pendidikan Islam Masa Kolonial

Intervensi bangsa asing di Sambas sudah dimulai sejak Masa Kerajaan Sambas Tua bercorak Hindu melalui perjanjian monopoli perdagangan emas oleh VOC yang diwakili Samuel Bloemaert dengan Raja Sambas tahun 1609 (ANRI. Borneo West. No. 16/17, 1609). Selanjutnya pada masa Kesultanan Sambas pernah ditaklukkan oleh Inggris pada 1813. Karena kekuasaan Inggris ternyata telah diserahkan ke pemerintah Hindia Belanda pada 1816 dengan gubernur jenderal van der Capellen. Setelah itu, kesultanan aman dari penguasaan orang Eropa.

Pada tahun 1818 terjadi perjanjian persekutuan dan persahabatan antara Sultan Sambas dengan pemerintah kolonial

Belanda sebagai konsekuensi bantuan Belanda mengatasi pemberontakan Kongsi Cina. Perjanjian tersebut diperbaharui pada 1819 isinya tentang pengakuan terhadap kekuasaan Belanda di Kesultanan Sambas, disahkan dengan penandatanganan kontrak oleh Sultan Muhammad Ali Syafiuddin I (ANRI. Borneo West. No. 41.05). Meskipun demikian, kesepakatan awal abad ke-19 ini masih sebatas kesepakatan untuk saling menghormati kekuasaan masing-masing, menjelang pertengahan abad ke-19 baru ada upaya serius kolonial di Sambas setelah adanya intervensi Inggris bernama James Brooke di Serawak.

Bercokolnya kolonial Belanda membawa pengaruh pada perluasan pendidikan di Sambas ditandai dengan berdirinya sekolah-sekolah ala Barat terutama setelah kebijakan politik balas budi, yang pada prakteknya sangat diskriminatif. Bahkan ide pemberian pendidikan Barat sudah ada sebelum diberlakukan politik etis dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh Islam. Maka sekolah kolonial tingkat rendah dibuka di Sambas sejak 1872 dengan empat pelajaran yaitu membaca, menulis, bahasa (daerah atau Melayu) dan berhitung. Diikuti dengan didirikan *Volkschool* oleh misi Katolik di Singkawang tahun 1892 (Mahrus, 2007). Selanjutnya pemerintah kolonial juga mendirikan *Volkschool* di Singkawang, Sintang dan Sambas sampai tahun 1918. Setelah tamat Sekolah Rakyat selama tiga tahun, bisa lanjut ke *Vervolgschool* (Sekolah Lanjutan) bagi siswa yang berprestasi selama lima tahun (Hasanuddin, 2014). Rahman et al. (2001) dan Mahrus (2003) mencatat beberapa sekolah kolonial lainnya yang didirikan di Sambas yaitu Sekolah Bumi Putra Kelas II (1903), *Byzondere School* (1910) berubah menjadi sekolah *Hollands*

Inlandsch School (1915), *Hollands Chineesche School* (HCS) untuk orang Timur Asing (1915).

Pendidikan modern ala kolonial beriringan dengan kemunculan gerakan pembaharuan di Timur Tengah yang menyebar ke wilayah Nusantara setelah datangnya jamaah haji dari menuntut ilmu di Haramain, yang kemudian juga mendorong munculnya inovasi pendidikan Islam bernama madrasah. Eksistensi madrasah khususnya di Sambas dan umumnya di Kalimantan Barat bisa dikatakan di mulai dari Madrasah al-Sultaniyah (1915) di Kesultanan Sambas yang sudah dirintis oleh Sultan Muhammad Syafiuddin II. Bisa dikatakan karena semangat intelektualisme Sultan ke-13 ini mampu mendongkrak kemajuan pendidikan Islam di Sambas. Selanjutnya di Mempawah muncul Madrasah Darul Falah wa al-Najah (1918). Di Pontianak muncul lima madrasah yaitu Madrasah Islamiyah Kampung Bangka (1926), Madrasah Islamiyah Kampung Mariana (1926), Madrasah Saigoniyah (1928), Madrasah BAWARI (1936), Madrasah Abdurrahmaniyah (1938) (Bab I Pendahuluan, n.d).

Madrasah al-Sultaniyah merupakan sekolah Islam modern yang menggabungkan pelajaran agama lebih dari 60% dan umum pertama kurang dari 40% (Risa, 2015). Kehadiran madrasah disambut antusias masyarakat dan merupakan sekolah yang tamatan berijazah. Madrasah ketika itu juga menjadi bukti adanya gerakan moderasi beragama di wilayah Kalimantan Barat (Mahrus et al., 2020). Menggunakan pengantar berbahasa Arab dengan kitab rujukan yang juga berbahasa Arab dan *style* pengajar menggunakan jubah dan serban menjadikan Madrasah al-Sultaniyah disebut juga dengan Sekolah Arab (Mahrus, 2018). Untuk menghindari campur tangan

kolonial dalam pendidikan madrasah ini menolak subsidi pemerintah kolonial. Sehingga biaya pengelolaan diperoleh dari pemerintah kesultanan dan memungut dari murid-murid (Bab I Pendahuluan, n.d).

Kesultanan mengalami krisis ekonomi yang berpengaruh pada eksistensi Madrasah al-Sultaniyah, mendorong inisiatif Maharaja Imam, Raden Muchsin Panji Anom, Raden Abubakar Panjianom dan Daeng Muhammad Harun mendirikan Perkoempoelan Tarbiatoel Islam pada 19 April 1936. Perkumpulan tersebut mendirikan Sekolah Tarbiatoel Islam, tiga sekolah lainnya masing-masing di Sambas, Pemangkat dan Singkawang. Geliat semangat pendidikan terus bermunculan dengan didirikan Madrasah Asasun Najah oleh H. Murad Kasim alumni Madrasah al-Sultaniyah dengan masa belajar tiga tahun. Alumni madrasah ini bisa melanjutkan studinya ke kelas 4 pada Sekolah Tarbiatoel Islam.

Bahkan sebelum Sekolah Tarbiatoel Islam didirikan, di Desa Penakalan juga pernah berdiri Madrasah Pedoman Islam tepatnya pada 2 Maret 1936 sebagai wujud keperluan masyarakat akan pendidikan Islam. Pada perkembangannya pendidikan Islam terus mendapat tekanan dengan dikeluarkannya Ordonasi Guru oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan pada masa Pemerintahan Jepang yang berkuasa di Sambas sejak 1942 seluruh sekolah harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebagaimana dilakukan oleh Bujang Marghani melaporkan Madrasah Pedoman Islam di Desa Penakalan pada 1942. (Sunandar et al., 2020). Maka dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam di Kesultanan Sambas tetap *survive* meskipun dihadapkan dengan berbagai kebijakan pemerintah kolonial sebagai

kontrol mereka terhadap sekolah-sekolah Islam di wilayah tersebut.

3. Pendidikan Islam Masa Kemerdekaan

Lembaga pendidikan Islam masa kemerdekaan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat antara lain pesantren, sekolah, madrasah dan perguruan tinggi. Sedangkan sekolah ini terbagi menjadi dua, yaitu sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta ini juga terbagi menjadi dua yaitu sekolah Islam dan sekolah non Islam (Posha, 2015). Wilayah Sambas sendiri sejak tahun 1950 sudah menjadi daerah kabupaten yang merupakan bagian dari pemerintahan Republik Indonesia (Rahman et al., 2001). Pada tahun yang sama terdapat sebuah Sekolah Buta Huruf di Pendawan yang muridnya adalah kaum perempuan.



Sekolah Buta Huruf Wanita Desa Pendawan Tahun 1950.
Koleksi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sambas

Sekolah Islam juga semakin tumbuh dan berkembang sampai ke kampung-kampung, salah satunya Kampung Sejangkung yang mendirikan Sekolah Arab tahun 1960. Berdirinya sekolah tersebut atas kesepakatan beberapa tokoh seperti H. Bujang Tarmizi,

Muhammad Thayib, H. Mustafa, Monziri, dan Hairah (Mustakim et al., 2021). Jumlah murid pada generasi awal sebanyak 16 orang terdiri dari 15 orang perempuan dan 1 orang laki-laki.



Murid Perempuan Bersama Guru Sekolah Arab Tahun 1960.
Koleksi Bahtiar Salah Satu Murid Sekolah Arab

Pada perkembangan selanjutnya ditemukan banyak lembaga pendidikan formal di Kabupaten Sambas baik berbentuk sekolah umum yang didominasi oleh mata pelajaran umum dari pada mata pelajaran agama maupun sekolah Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Keberadaan pesantren, sekolah, dan madrasah, menjadi dasar penting bagi pendirian sebuah perguruan tinggi di Sambas (baca: IAIS Sambas). Secara rinci keberadaan sekolah Islam/madrasah sampai tahun 2002-2003 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini (Kemenag Kalbar, 2020).

No	Nama Madrasah	Status	Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kab/Kota	Tahun Pendirian
1	MIN 1 Sambas	Negeri	Jl. Penjajap Timur	Penjajap	Pemangkat	Sambas	1936
2	MIN 2 Sambas	Negeri	Jl. Raya Sekuduk Desa Sekuduk	Sekuduk	Sejangkung	Sambas	1997
3	MIN 3 Sambas	Negeri	Jl. Sebebal Batu Makjage	Batu Makjage	Tebas	Sambas	1997
4	MIS Islamiyah Merabuan	Swasta	Jl. Merabuan	Merabuan	Tangaran	Sambas	1937
5	MIS Darul Ihsan Sepinggang	Swasta	Ds.Sepinggang Besar	Sepinggang	Semparuk	Sambas	1948
6	MIS Darul Ulum Matang Danau	Swasta	Jl. Raya Matang Danau	Matang Danau	Paloh	Sambas	1948
7	MIS Islamiyah Sb.Danau	Swasta	Jl. Raya Sb. Danau	Sarang Burung Danau	Jawai	Sambas	1949
8	MIS Yasti Pauh	Swasta	Dsn.Pauh Desa Merpati			Sambas	1952
9	MIS Darul Falah Jawai	Swasta	Jl. Santot Tahir		Jawai	Sambas	1953
10	MIS Al-Islam Parit Jawai	Swasta	Jl. Parit Jawai B. Sigoler		Tebas	Sambas	1955
11	MIS Al Hidayah	Swasta	Jl. H.Dul Semparuk Kuala	Semparuk	Semparuk	Sambas	1957
12	MIS Ijtihad Seladu	Swasta	Dsn.Seladu Desa Sepadu	Sepadu	Semparuk	Sambas	1957
13	MIS Nurul Huda Seburung	Swasta	Jl. Raya Seburung	Seburung	Semparuk	Sambas	1957
14	MIS Nurul Islam Seradi B	Swasta	Jl. Simpati Desa Serumpun Kecamatan Salatiga		Semparuk	Sambas	1960
15	MIS Roudhotul Ulum	Swasta	Jl. Orde Baru Parit Setia	Parit Setia	Jawai	Sambas	1962
16	MIS Nurul Jannah Bakau	Swasta	Jl. Raya No.109	Bakau	Jawai	Sambas	196
17	MIS Muhammadiyah Pancur	Swasta	Dsn Karet Pancur		Semparuk	Sambas	1963

18	MIS Bina Dharma Parit Rabu	Swasta	Desa Kuala Pangkalan Keramat			Sambas	1963
19	MIS Tholbiyah Rantau Panjang	Swasta	Jl. Masjid No.136		Sambas	Sambas	1964
20	MIS Amantubillah Tempatan	Swasta	Jl. Sebataan II Desa Tempatan		Sambas	Sambas	1964
21	MIS Muhamma diyah Semantir	Swasta	Dusun Semantir			Sambas	1965
22	MIS Hubbul Wathan	Swasta	Desa Serumpun			Sambas	1966
23	MIS Yasti Semata Bingsu	Swasta	Jl. Semata Bingsu Ds. Karya Bakti			Sambas	1966
24	MIS Yasti Mentibar	Swasta	Jl. Raya Mentibar	Mentibar	Paloh	Sambas	1967
25	MIS Al-Wustho Tebing Rubuh	Swasta	Dusun Tebing Rubuh Ds. Tebing Batu Kec. Sebawi		Sambas	Sambas	1969
26	MIS Nurmaliki Selangkin	Swasta	Jl. H.Yadan Dusun Selangkin		Galing	Sambas	1969
27	MIS Darussalam	Swasta	Jl. Dusun Baru			Sambas	1969
28	MIS Hidayatul Diniyah	Swasta	Dusun Dahlia Desa Serunai			Sambas	1970
29	MIS Nurul Iman Kantan	Swasta	Dusun Kantan Desa Sendoyan	Sendoyan	Sejangkung	Sambas	1970
30	MIS Al-Hikmah	Swasta	Desa Sidang		Tebas	Sambas	1971
31	MIS Minu Seradi A	Swasta	Jl. Seradi A Desa Salatiga			Sambas	1972
32	MIS Nurul Hasanah	Swasta	Jl. Parit Jawa Dusun Air Terjun RT 05 RW 05	Desa Parit Baru		Sambas	1972
33	MIS Nurul Yaqin Sijang	Swasta	Jl. Tanjungpura Dusun Sejati RT 03 RW 01	Sijang	Galing	Sambas	1973
34	MIS Nurul Huda Tumpak Jawai	Swasta	Jl. Tumpak Jawai RT 12 RW 06	Pangkalan Kongsi	Tebas	Sambas	1980

35	MIS Al-Azhar Sb. Kuala	Swasta	Jl. Cahaya Sb. Kuala		Jawai	Sambas	1985
36	MIS Al- Mustaqim	Swasta	Jl. Tiga Serumpun RT 11 RW 05 Desa Batu Makjage	Batu Makjage	Tebas	Sambas	1989
37	MIS Tarbiyah Tebas	Swasta	Jl. Amanah Tebas	Tebas Sungai	Tebas	Sambas	1992
38	MIS Ikhlashul `Amal Sebawi	Swasta	Jl. Pasar Sebawi		Sambas	Sambas	2001
39	MIS Darul Falah Selakau	Swasta	Jl. Ampera RT 02/ RW 02	Parit Baru	Selakau	Sambas	2002
40	MIS Muhammadiyah Pemangkat	Swasta	Jl. Banjar Kuala No.28			Sambas	2003
41	MIS Al Amin	Swasta	Jl. Pemuda No. 227				2003
42	MTsN 1 Sambas	Negeri	Jl. Pembangunan No 29 Pemangkat	Pemangkat Kota	Pemangkat	Sambas	1978
43	MTsN 2 Sambas	Negeri	Jl. Pertasi Kencana.	Semparuk	Semparuk	Sambas	1997
44	MTs Gerpemi Tebas	Swasta	Jl. Keluarga Tebas	Tebas Sungai	Tebas	Sambas	1962
45	MTs M. Basiuni Imran Sambas	Swasta	Jl. Pembangun an N0.13	Dalam Kaum	Sambas	Sambas	1979
46	MTs Al-Hikmah	Swasta	Dusun Sidang		Tebas	Sambas	1981
47	MTs Yayasan Karya Islam	Swasta	Jl. H.Awal		Jawai	Sambas	1983
48	MTs Al-Azhar	Swasta	Jl. Cahaya Sb Kuala	Sarang Burung Kuala	Jawai	Sambas	1985
49	MTs Yasti Sekuduk	Swasta	Jl. Pendidikan	Sekuduk	Sejangkung	Sambas	1985
50	MTs Yasti Sebelitak	Swasta	Dusun Tamang			Sambas	1986
51	MTs Yasti Pimpinan	Swasta	Jl. Raya Pimpinan			Sambas	1987
52	MTs Muhammadiyah Tamang Sagang	Swasta	Jl. Raya Kupak Rebung Ratu Sepudak Kec. Galing	Ratu Sepudak	Galing	Sambas	1987

53	MTs Yasti Sekabau	Swasta	Dusun Sekabau			Sambas	1989
54	MTs YPPU Sapak Hulu	Swasta	Jl. Natuna No.08		Subah	Sambas	1995
55	MTs At-Taqwa Mensere	Swasta	Jl. Mensere Dusun Bumi Asih Desa Mensere Kec.Tebas	Mensere	Tebas	Sambas	1996
56	MTs Yasti Simpang Empat	Swasta	Dusun Simpang Empat			Sambas	1997
57	MTs Mu`Amalah Islamiyah	Swasta	Jl. Sebataan.2. Desa Tempatan Kecamatan Sebawi		Sambas	Sambas	1999
58	MTs Rosyada Sebebal	Swasta	Jl. Sebebal Nunuk	Batu Makjage	Tebas	Sambas	2000
59	MTs Muhammadiyah Sejangkung	Swasta	Jl. Raya Sejangkung	Parit Raja	Sejangkung	Sambas	2003
60	MAS Al-Hikmah Sidang	Swasta	Dusun Sidang		Tebas	Sambas	1982
61	MAS Gerpemi Tebas	Swasta	Jl. Pembangunan Tebas	Tebas Sungai	Tebas	Sambas	1992
62	MAS Mudi Pemangkat	Swasta	Jl. Pangsuma Pemangkat			Sambas	2001
63	MAS Raudhatul Ulum	Swasta	Jl. H. Morsal E Gg. H. Hadiwan Dsn Tengah	Parit Setia	Jawai	Sambas	1994
64	MAS Yasti Sekura	Swasta	Jl. Jembatan Besi Sekura			Sambas	1990
65	MAS YPPU Sapak Hulu	Swasta	Jl. Natuna No. 08 Sapak Hulu Desa Sempurna	Sempurna	Subah	Sambas	2001

C. Mengurai Gagasan Awal Pendirian Kampus Islam di Sambas

Pendidikan pada hakikatnya tidak saja upaya membangun dan mewariskan nilai yang akan menjadi penuntun manusia dalam menjalani kehidupan, tetapi juga untuk memperbaiki nasib dan

peradabannya. Pendidikan adalah proses dari usaha manusia untuk mengembangkan segenap potensi baik jasmani maupun ruhani agar menjadi pribadi yang seimbang. Tanpa pendidikan, manusia sekarang tidak akan ada bedanya dengan manusia dahulu yang tertinggal, baik kualitas kehidupan maupun proses perancangan masa depannya. Dengan kata lain, bahwa maju mundur atau baik dan buruknya peradaban suatu bangsa, ditentukan bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakatnya (Kurniawan & Mahrus, 2011). Dalam konteks ini pembahasan tentang gagasan pendirian kampus Islam di Sambas penting dilakukan, paling tidak karena dua alasan. *Pertama*, menemukan ketersambungan historis baik tentang narasi awal pendirian kampus maupun tentang gagasan pembangunan pendidikan yang dimiliki generasi terdahulu. *Kedua*, memposisikan pendirian kampus Islam di Sambas sebagai bagian dalam rangka memikul tugas dan tanggung jawab mewujudkan pembangunan masyarakat yang religius dan beradab.

D. Narasi Filosofis Kampus Islam di Sambas

Ide atau gagasan besar yang menjadi penanda pentingnya pendidikan, termasuk hadirnya kampus Islam di Sambas, dapat ditelusuri dari jejak kiprah anak bangsa dari daerah ini. Sebut saja seperti Sultan Muhammad Syafiuddin II, pernah menyatakan bahwa “*onderwijs is het fondement van alle ontwikkeling* (pengajaran adalah dasar dari segala kemajuan)”. Kemudian Muhammad Basiuni Imran (Ketua Perkoempoelan Tarbiatoel Islam, 1936), pernah juga menyatakan “Nusa dan Bangsa tidak akan maju, jika tidak memiliki perguruan bangsanya sendiri” (Mahrus, 2003). Pernyataan Sultan

Muhammad Syafiuddin II, dibuktikan dengan menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebijakan strategisnya, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Demikian halnya Muhammad Basiuni Imran, ungkapan tersebut merupakan ekspresi keprihatinannya melihat realitas pendidikan di Sambas, yang kemudian dijawab dengan mendirikan sebuah “Perkoempoelan Tarbiatoel Islam”.

Jejak kiprah di atas mengandung nilai moral dan etika luhur bangsa yang patut ditelisik kembali dan mengambil pelajaran berharga dari para pendahulu. Meneladani para pendahulu bangsa, menjadikan kita memiliki sikap arif dan bijaksana sehingga generasi sekarang dan akan datang dapat mengemban amanah pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perlu disadari bahwa semangat otonomi daerah dan meluasnya dampak globalisasi, turut melahirkan berbagai gejolak politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang pada akhirnya menggiring kita untuk membuat pilihan rasional yang cerdas, agar nilai-nilai luhur budaya bangsa dapat terus membersamai rentak pembangunan dewasa ini. Oleh karena itu, menurut Burhanudin warisan sejarah bangsa yang telah dipahatkan oleh para pendahulu dengan penuh dedikasi, semangat juang dan rela berkorban, perlu dikaji dan direnungkan sebagai bahan perbandingan (Usman, 2011). Dengan demikian, kita akan menjadi generasi yang tidak akan lupa dengan sejarah bangsanya.

Penelusuran kembali gagasan tentang pentingnya membangun dunia pendidikan bagi umat Islam mengandung nilai strategis. Karena setidaknya dapat mengingatkan kembali khazanah intelektual yang pernah dimiliki umat Islam masa lalu. Kesadaran historis ini pada

gilirannya akan memelihara kesinambungan atau kontinuitas keilmuan, khususnya tentang pendidikan Islam (Kurniawan & Mahrus, 2011). Di samping itu, diskusi mengenai aspek sejarah, termasuk sejarah lokal menjadi penting karena memiliki nilai dan alasan tersendiri, seperti dikemukakan Adam (2006), bahwa selain aspek keagamaan, sejarahlah yang paling baik memberikan pengajaran budi pekerti karena menimbulkan sikap rendah hati dihadapan keterbatasan manusia untuk melihat luasnya sejarah dunia. Shiddiqi (1996), juga berpendapat bahwa sejarah adalah cermin masa lalu yang dapat dijadikan pedoman pada masa kini dan akan datang, dari sejarah orang dapat mengambil ibarat dan memperoleh keteladanan dan melalui sejarah orang akan mengenal siapa dirinya. Sejarah sendiri adalah persoalan keberlanjutan dan perubahan, sehingga kita bisa belajar daripadanya. Kita tidak ingin kegagalan-kegagalan masa lalu terulang kembali, sedangkan keberhasilan atau kesuksesan tentu perlu dilanjutkan bahkan lebih ditingkatkan lagi.

Dalam kerangka filosofis, gagasan Sultan Muhammad Syafiuddin II dan Muhammad Basiuni Imran, dapat menjadi landasan berpikir untuk menghadirkan lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan tinggi sebagai upaya membangun sumber daya manusia yang cerdas dan religius. Ketersambungan gagasan dua tokoh tersebut dengan pendirian kampus Islam di Sambas bukanlah suatu kebetulan, tetapi merupakan hasil perenungan, penelusuran, diskusi mendalam, karena jejak-jejak gagasan itu tampak nyata dihadapan kita. Murtaba M. Chan, menyebutkan bahwa di Sambas pernah ada program Kulliyatul Muballighin yang dipimpin oleh Muhammad Basiuni Imran, yang sebenarnya merupakan langkah awal

untuk mendirikan perguruan tinggi Islam (Fakultas Ushuluddin) di Sambas (Kurniawan & Mahrus, 2011). Dengan demikian, gagasan membangun kampus Islam di Sambas, memiliki landasan yang kokoh baik secara historis maupun filosofis. Oleh karena itu, kehadiran kampus ini diharapkan menjadi lokomotif penggerak dalam pembangunan sumber daya manusia yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Dalam bahasa yang lain, bahwa dari kampus Islam ini akan melahirkan sarjana muslim yang utuh keilmuannya dan profesional serta memiliki integritas kepribadian yang beradab dan bermartabat dalam menjawab tantangan global.

E. *Makna Pendirian IAIS Sambas*

IAIS Sambas pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pendidikan Islam di Kalimantan Barat terutama IAIN Pontianak. Keterkaitan IAIS Sambas dan IAIN Pontianak (saat itu masih STAIN Pontianak) diawali dari pembukaan STAIN Pontianak Filial Sambas Jurusan Dakwah Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) tahun 2002. Jumlah mahasiswa mendaftar pada angkatan pertama (2002/2003) sebanyak 30 orang, sedangkan pada angkatan kedua (2003/2004) jumlah mahasiswa baru sebanyak 25 orang (Munawar, 2005).

Latar belakang pembukaan Jurusan Dakwah di Sambas adalah kondisi sosial masyarakat pasca konflik tahun 1999, yang meninggalkan bekas dan dampak yang sangat luar biasa. Kerusuhan etnis tersebut tidak dapat dipungkiri menjadi titik balik, karena terkesan masyarakat Sambas tengah mengalami degradasi moral yang ditandai dengan perilaku anak muda yang mulai meninggalkan ajaran

agama dan adat istiadat, padahal dahulu Sambas adalah pusat perkembangan sosial-keagamaan dan budaya yang bercorak Islam. Alasan lainnya adalah karena di Sambas mengalami krisis ulama, sehingga keberadaan Jurusan Dakwah di Sambas akan melahirkan tokoh ulama dan intelektual muslim (Munawar, 2005).

Selain hal tersebut, pada masa lalu sejak abad ke-19, Sambas telah dikenal jauh oleh dunia internasional yaitu melalui ulamanya, Syaikh Akhmad Khatib Sambas (1802-1875) umpamanya yang menggabungkan antara tarekat Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah, dan menjadi guru bagi para ulama yang berasal dari Nusantara. Kemudian, di akhir abad ke-19 telah lahir ulama yang tak kalah berpengaruh dalam perkembangan Islam di Sambas, yaitu Syaikh Muhammad Basiuni Imran (1885-1976), dengan merefleksikan nuansa pembaharuan Islam dari para gurunya di Mesir.

Harapan akan tercapainya kegemilangan Sambas jilid II semakin realistis dengan dibukanya Jurusan Dakwah di Sambas. Pada tahun akademik 2003/2004, sebagai wujud konsistensi pengembangan SDM Sambas, maka dibentuklah tim khusus persiapan pendirian STAIN Sambas yang mandiri dan tidak terikat kepada STAIN Pontianak. Pada tanggal 8 Maret 2004 diadakanlah seminar dan lokakarya (semiloka) Pendirian STAIN Sambas yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Kementrian Agama Kabupaten Sambas (waktu itu masih Depag Sambas), Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ketua STAIN Pontianak dan unsur Ormas yang terkait. Dalam semiloka tersebut, STAIN Sambas direncanakan menggunakan nama Basiuni Imran (STAIN Muhammad Basiuni Imran Sambas) sebagai apresiasi terhadap kiprah Maharaja Imam ketiga

Kesultanan Sambas, yang memperkenalkan pendidikan modern di daerah ini. Dari hasil semiloka tersebut, disepakati bahwa Jurusan Dakwah Kelas Sambas harus memisahkan diri dari STAIN Pontianak atau menjadi Perguruan Tinggi mandiri dengan menempatkan Yayasan sebagai payung hukumnya sebelum menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Maka pada tanggal 1 Juli 2004, Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Muhammad Syafiuddin (STAIS) Sambas, resmi berdiri berdasarkan surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Syafiuddin (YAPIS) Pontianak, dengan status terdaftar berdasarkan Rekomendasi Kopertais Wilayah XI Kalimantan.

Sejak saat itu, STAIS Sambas terus melakukan pembenahan tata kelola dan pengembangan kelembagaannya, walau kemudian pada tahun 2006 STAIS Sambas harus memilih menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas, karena hanya satu jurusan yang diminati oleh Mahasiswa, yaitu Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), sehingga Direktur Jendral Pendidikan Islam di Kementerian Agama Pusat mengeluarkan izin operasional hanya untuk Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam saja. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan niat pengelola untuk terus melakukan pengembangan dan inovasi, hasilnya pada tahun 2010 STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas telah berhasil merubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Mewujudkan keinginan dan upaya mencapai tujuan seperti telah disebutkan di atas tidaklah mudah, perlu proses, tenaga, pikiran, biaya yang tidak sedikit dan waktu yang tidak sebentar. Namun, IAIS Sambas telah melewati jalan panjang dan berliku sebelum

perkembangannya seperti sekarang. Bahkan akan terus berproses, terus berkiprah dan meneguhkan eksistensinya melalui tri dharma perguruan tinggi.

IAIS Sambas pada dasarnya adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bawah binaan Kementerian Agama RI yang secara akademik mengacu kepada sistem pendidikan nasional. Secara kelembagaan, IAIS Sambas memiliki dua tugas pokok yang harus ditunaikan sesuai fungsi dan kedudukannya sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam. *Pertama*, sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, IAIS Sambas menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang berbasis riset dan terikat pada kaidah-kaidah ilmiah. Seluruh proses keilmuan tersebut harus berpegang pada prinsip integrasi antara dalil naqliyah dan aqliyah serta sublimasi keilmuan dan keislaman dalam mewujudkan kemajuan bagi peradaban di kawasan Asia Tenggara. *Kedua*, sebagai lembaga dakwah, IAIS Sambas harus melaksanakan peran sebagai lembaga yang mampu menginternalisasikan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Peran dakwah merupakan kelanjutan dari peran IAIS Sambas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang terikat dengan visi dan misi dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, peran dakwah yang dilaksanakan IAIS Sambas harus sejalan dengan kepentingan keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan (RIP IAIS Sambas tahun 2018-2022).

Sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap jenis dan jenjang pendidikan formal, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan, dalam rangka memikul tugas dan tanggung jawab mewujudkan pembangunan masyarakat yang religius

dan beradab. Memahami dan menyadari peran penting dan strategis tersebut, IAIS Sambas telah melakukan langkah-langkah konkrit guna meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, religius, beradab, dan kegemilangan Sambas dapat diwujudkan kembali.

F. Penutup

Perkembangan Islam di Sambas tercatat pernah mencapai masa keemasannya dengan citranya Sambas “Serambi Mekkah”. Menjadi salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan berlandaskan Islam membuat Sambas dikenal, tidak hanya di wilayah West Borneo (baca: Kalimantan Barat) tetapi juga dimata dunia. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan dua duta besar berasal dari Sambas yaitu Syaikh Ahmad Khatib Sambas dan Syaikh Muhammad Basiuni Imran.

Pendidikan Islam terus *survive* meskipun Sambas di bawah kontrol kolonial Belanda. Bahkan Sambas mampu mewujudkan pendidikan Islam modern yang diawali dengan berdirinya Madrasah al-Sultaniyah, yang mendorong munculnya berbagai madrasah di wilayah ini pasca kemerdekaan yang nantinya menjadi dasar kuat untuk pendirian perguruan tinggi Islam di Sambas. Kesenambungan perjuangan pendahulu Sambas dalam memajukan dunia pendidikan Islam harus tetap terpelihara dan menjadi pijakan bagi mengembangkan pendidikan Islam ke depannya. Berdirinya IAIS Sambas yang cikal bakalnya dimulai sejak 2002 merupakan langkah awal untuk mencapai kegemilangan Sambas jilid II.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2006). Kata Pengantar; Berfikir Historis Membenahi Sejarah. Dalam Sam Wineburg. *Berfikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*. Terj. Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- ANRI. Borneo West. No. 16/17, 1609.
- ANRI. Borneo West. No. 41.05.
- Bab I Pendahuluan. (n.d.). Diakses 3 Januari 2022, dari http://digilib.uinsgd.ac.id/17448/3/4_bab1.pdf
- Hasanuddin. (2014). *Pontianak Masa Kolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Kurniawan, S. & Mahrus, E. (2011). *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mahrus, E. (2003). *Membangun Pendidikan: Gagasan Pendidikan Maharaja Imam Sambas Muhammad Basiuni Imran (1885-1976)*. Pontianak: Yayasan Luhur Nusantara.
- Mahrus, E. (2007). *Falsafah & Gerakan Pendidikan Islam: Maharaja Imam Sambas Muhammad Basiuni Imran (1885-1976)*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Mahrus, E. (2018). Prototype of the Arab School in the Kingdom of Sambas of West Borneo in the Early 20th Century. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 261. *International Conference on Islamic Education (ICIE 2018)*, 8-13.
- Mahrus, E., Jamani, R. & Hadi, E. (2003). *Shaykh Ahamad Khatib Sambas: Sufi dan Ulama Besar Dikenal Dunia (1803-1875)*. Pontianak: UNTAN Press.
- Munawar. (2005). *Profil Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan M. Syafiuddin (STAIS) Sambas*. Sambas: Yanss.com.
- Murid Perempuan Bersama Guru Sekolah Arab Tahun 1960. Sambas: Koleksi Bahtiar Salah Satu Murid Sekolah Arab.
- Mustakim, Risa & Etriadi. (2021). Sejarah Kampung Sejangkung Tahun 1946-1989. *Jurnal Sambas (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat dan Sejarah)*, 3(2), 120-133.
- Parlindungan, M. (2007). *Tuanku RAO*. Yogyakarta: LKiS.

- Posha, B.Y. (2015). Perkembangan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan. *Jurnal Historia*, 3(2), 75-82.
- Rahman, A., Achmad, Y., Anom, R.F.M.P., Munadi & Fahadi B.Z. (2001). *Kabupaten Sambas: Sejarah Kesultanan dan Pemerintahan Daerah Sambas*. Sambas: Dinas Pariwisata Pemda Kabupaten Sambas.
- RIP IAIS Sambas tahun 2018-2022.
- Risa. (2015). *Perkembangan Islam di Kesultanan Sambas: Kajian Atas Lembaga Keislaman Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas II Tahun 1866-1922*. Yogyakarta: Ombak.
- Risa. (2019). *Transformasi Sistem Birokrasi di Kesultanan Sambas Masa Pendudukan Belanda (1818-1942)*. [Disertasi tidak diterbitkan]. Makassar: PPs. UIN Alauddin Makassar.
- Sekolah Buta Huruf Wanita Desa Pendawan Tahun 1950. Sambas: Koleksi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sambas.
- Shiddiqi, N. (1996). *Jeram-jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunandar, Radimin, Syamsiah, N., Pitria & Gunawan. (2020). *Sejarah Desa Penakalan: Asal Usul, Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Budaya*. Pontianak: CV Derwati.
- Susmihara. (2018). Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam di Nusantara. *Jurnal Rihlah*, 06(01), 13-32.
- Usman, S. (2011). *Sambas Merajut Kisah Menenun Sejarah*. Sambas: Pemda Sambas.

DARI STAIN PONTIANAK FILIAL SAMBAS HINGGA IAIS SAMBAS 2002-2014

Deni Irawan dan Henny Yusnita

A. *Pendahuluan*

Merupakan cita-cita sekaligus “mimpi besar” yang ingin diwujudkan oleh para pemimpin sekaligus pejuang pendidikan dan keagamaan di tanah Sambas, yang ingin mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam. Pasca kerusuhan Sambas tahun 1998 tentunya menyisakan banyak persoalan yang harus diselesaikan secara bersama (Irawan, 2018). Salah satunya adalah dalam “dunia keagamaan” yaitu kelangkaan atau krisis para da’i dan ulama sebagai pejuang dalam mensyi’arkan agama Islam. Banyak para da’i yang dulunya berkecimpung dalam hal-hal keagamaan sekarang sudah terjadi pengurangan dikarenakan peristiwa berdarah, kerusuhan Sambas tahun 1998 tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sambas bersama Departemen Agama (dulu) dan para pemikir dalam dunia pendidikan dan keagamaan, bersama-sama memikirkan keberlangsungan Kabupaten Sambas ke depannya. Tentunya perjalanan panjang tersebut bermula dari kelas jauh yang pada awalnya dibuka untuk pertama kali adalah Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Jurusan Dakwah STAIN Pontianak yang berada di Sambas tepatnya di Jalan Pembangunan Kabupaten Sambas. Tempat perkuliahan dan administrasi di gedung SD yang berada dipertigaan Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

Merupakan harapan besar bagi masyarakat luas untuk mendirikan kampus sendiri yang berada di wilayah “Serambi Mekah” ini (Irawan, 2018). Tentunya dengan alasan dan pertimbangan yang cukup matang dan sangat panjang. Berikut beberapa alasan yang dapat dirinci sebagai landasan pendirian perguruan tinggi tersebut diantaranya: *pertama*, Kabupaten Sambas merupakan kota sejarah kerajaan kemudian berubah menjadi kesultanan yang sangat kental dengan nilai-nilai agama Islam (*religius*), sehingga pernah bergelar Kota Serambi Mekkah. *Kedua*, Sambas telah melahirkan tokoh pemikir yang sangat terkenal di dunia Islam seperti Syekh Khatib As Sambasy, pendiri Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah (Nurkholim, 2017) dan Basiuni Imran, pembaharu pendidikan Islam Sambas era kolonial di Indonesia (Mahrus, 2018). Kemajuan masa ini membawa Sambas dikenal sebagai kota pendidikan. *Ketiga*, jumlah penduduk Kabupaten Sambas 81% beragama Islam. *Keempat*, jumlah lulusan tingkat SLTA (Aliyah, SMA, SMK, dll) di Kabupaten Sambas tiap tahun kurang lebih 2000 siswa. *Kelima*, Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Serawak) dan Brunai Darussalam, memudahkan kerjasama.

Keenam, Kabupaten Sambas baru saja dilanda konflik sosial bernuansa etnik tahun 1998, meninggalkan beragam problema sosial seperti traumatis, luka mendalam, psikologis masih labil yang harus diselesaikan secara bersama salah satunya melalui lembaga pendidikan yang bercirikan Islam. *Ketujuh*, Kabupaten Sambas sebagai daerah yang memiliki ragam budaya, etnik dan sumber daya alam cukup potensial untuk dikembangkan dan dikaji lebih jauh. Dengan adanya lembaga pendidikan tinggi Islam yang berwawasan IPTEK, budaya dan religius

ini dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan keunikan yang berbasis kepada sumber daya alam dapat dilakukan dan dikembangkan. *Kedelapan*, tim khusus persiapan pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas atau kemudian disingkat STAIS Sambas (Munawar, 2004) telah mendapat dukungan politik dari Pemerintah Pusat melalui Sekjen, Dirjen Bimbaga dan Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Dep. Agama RI, KOPERTAIS Wil XI di Banjarmasin, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pernyataan tertulis dari berbagai elemen masyarakat. *Kesembilan*, tim khusus persiapan pendirian STAIS Sambas telah melaksanakan penelitian ke lapangan berupa penyebaran angket ke seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas tentang pendirian Perguruan Tinggi tersebut sejak bulan April s/d Oktober 2003. *Kesepuluh*, tim khusus persiapan pendirian STAIS Sambas telah melaksanakan Semiloka Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Sambas yang dilaksanakan bulan Maret 2004.

Kesebelas, cikal bakal STAIS Sambas telah disiapkan berupa penyelenggaraan proses pembelajaran sejak tahun 2002, bekerjasama dengan STAIN Pontianak dan STIT Singkawang dengan berbagai fasilitas yang dapat mendukung proses pembelajaran. *Keduabelas*, tersedianya lahan atau area 50 ha di Desa Sebatuk Kecamatan Sebawi dan 10 ha di Desa Sebayan Kecamatan Sambas untuk membangun kawasan pendidikan dan gedung STAIS Sambas. Tersedianya instansi dan departemen terkait serta sarana pembelajaran lainnya yang mampu menjadi lahan praktik bagi mahasiswa. *Ketigabelas*, tersedianya 10 ruangan perkuliahan yang langsung dapat dimanfaatkan untuk perkuliahan tahun-tahun pertama. *Keempatbelas*, tersedianya SDM

yang siap pakai baik lulusan strata S1 maupun S2. *Kelimabelas*, tersedianya dana awal dari Pemda Kabupaten Sambas melalui APBD sebesar 1 milyar rupiah. Dengan dibukanya perguruan tinggi Islam di Sambas semoga akan melahirkan generasi terpelajar yang dapat mengambil peran dalam pembinaan masyarakat Kabupaten Sambas serta menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas ke depan (BPS, 2021).

B. Jurusan Dakwah STAIN Pontianak Kelas Sambas

Kabupaten Sambas yang berada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, menjadi garda terdepan dalam suatu negara yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan daerah. Maka dari itu, Kabupaten Sambas sangat perlu untuk memiliki sebuah perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi Islam, agar dapat menciptakan generasi muda tidak hanya berilmu dan berwawasan tetapi memiliki keimanan dan ketaqwaan yang diharapkan sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diawali dengan sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan institusi pendidikan yang ada di provinsi, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak.

Kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dengan STAIN Pontianak dilaksanakan tahun 2002 dan diputuskan bahwa jurusan yang akan dibuka adalah Jurusan Dakwah.⁴ Setelah melalui proses persyaratan yang sudah terpenuhi, maka tahun

⁴ Alasan pembukaan Jurusan Dakwah yang pertama sekali dikarenakan: *pertama*, Sambas sebagai daerah pasca konflik tahun 1998; *kedua*, terjadi krisis ulama. Masih ada beberapa alasan lainnya yang tidak disebutkan.

2002 diputuskan untuk memulai penerimaan mahasiswa baru kelas Sambas yang akan mulai perkuliahan di tahun 2003. Maka perkuliahan jarak jauh atau yang sering disebut sebagai STAIN Pontianak Filial Sambas, dimulai sejak tahun akademik 2002/2003. Pelaksanaan pembukaan kelas jauh tersebut atas inisiasi dan kerjasama Jurusan Dakwah STAIN Pontianak dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sambas yang ketika itu dipimpin oleh Drs.H.Jawani serta Pemerintah Kabupaten Sambas yang dipimpin oleh Bupati Ir. H. Burhanuddin A Rasyid.

Mahasiswa baru yang terdaftar pada tahun akademik 2002/2003 berjumlah 30 orang dan tahun akademik 2003/2004 berjumlah 25 orang serta tahun akademik 2004/2005 berjumlah 30 orang dari berbagai daerah di wilayah Kabupaten Sambas (Munawar, 2005). Begitu tingginya respon positif dari masyarakat, Bupati Sambas dan Ketua Jurusan Dakwah STAIN Pontianak sejak tahun 2003 membentuk tim khusus persiapan pembentukan Perguruan Tinggi sendiri. Setahun kemudian, tim khusus tersebut menyelenggarakan Semiloka Pendirian Perguruan Tinggi Islam yang rencana dinamakan STAIN Basuni Imran Sambas pada tanggal 8 Maret 2004 di Sambas. Namun dalam kegiatan tersebut disepakati rencana pendirian sebuah Perguruan Tinggi Islam tersebut diberi nama Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan Muhammad Syafiuddin (STAIS) Sambas, di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Syafiuddin (YAPIS) Pontianak sebelum nantinya menjadi Perguruan Tinggi Negeri.

Melalui proses yang begitu panjang dan setelah Semiloka yang tidak memperbolehkan penyelenggaraan kelas jauh, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2004 kelanjutan penyelenggaraan perkuliahan di STAIS

Sambas ditandai dengan dikeluarkan SK Ketua YAPIS Pontianak dan terdaftar berdasarkan Rekomendasi Kopertais Wilayah XI Nomor Kop.Wil.XI/PP.03.2/48k/2004 (Kamarudin, n.d.), sambil menunggu proses mendapatkan izin operasional. Dalam rangka persiapan STAIS Sambas susunan kepengurusan pun dibentuk di bawah pimpinan Drs. Munawar, M.Si., Drs. H. Suyadi Widjaya sebagai Ketua Badan Penyelenggara Pendidikan; Ir. Burhanuddin A. Rasyid (Bupati Sambas) sebagai Pelindung; dan H. Hasan Kamaruddin, S.H., sebagai Ketua Pengawas dari pihak Yayasan Pendidikan Islam Syafiuddin (YAPIS).

Pada tahun 2004/2005 direncanakan akan membuka pendaftaran calon mahasiswa baru untuk berbagai jurusan. Untuk Strata Satu jurusan yang akan dibuka adalah Dakwah dan Komunikasi, dan Jurusan Pendidikan dan Tarbiyah dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pendaftaran dimulai tanggal 2 Mei - 11 Agustus 2004, tempat pendaftaran di sekretariat Jalan Pembangunan No.35 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas.

Sementara itu, Drs. Munawar, M.Si. yang juga sebagai salah satu dosen STAIN Pontianak sering bolak balik Pontianak-Sambas. Hal ini dilakukannya dengan harapan bahwa STAIS Sambas menjadi cikal bakal berdirinya STAIN Sambas yang lebih maju menjadi laboratorium ilmu pengetahuan, baik pengetahuan keagamaan, sosial dan lainnya (Munawar, 2004).

Gambaran di atas menunjukkan sebuah keseriusan yang tinggi untuk mengembangkan dunia pendidikan di Kabupaten Sambas. Pendirian kampus mandiri terus diupayakan. Melalui proses diplomasi atau dialog dengan pimpinan di STAIS Sambas, mahasiswa angkatan I dan II bersama meminta kejelasan status perkuliahan karena kurang

lebih satu tahun tidak ada aktivitas perkuliahan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil audiensi tersebut maka diutuslah perwakilan mahasiswa STAIS Sambas, pengelola STAIS Sambas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas untuk melakukan audiensi dengan Kasubdit Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Agama RI di Jakarta. Sampai akhirnya pada tahun 2006 keluarlah izin mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas yang hanya memperbolehkan satu jurusan (Umar, 2006). Untuk itu, Jurusan Dakwah di Sambas diberi pilihan untuk melebur ke Jurusan Tarbiyah atau menyelesaikan di Perguruan Tinggi Negeri Islam terdekat yaitu STAIN Pontianak. Ternyata kedua angkatan tersebut tetap memilih Jurusan Dakwah, maka kedua angkatan itu menyelesaikan studi ke STAIN Pontianak.

C. STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas: Awal yang Meneguhkan

STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas resmi berdiri, dengan izin operasional Departemen Agama RI melalui Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) dengan Nomor: DJ.II/197/2006 tertanggal 22 Juni 2006,⁵ dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dalam hal aspek yuridis formal STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas mendapatkan izin perpanjangan operasional dari Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Nomor: Dj.I/51/2008 yang berlaku selama lima (5) tahun ke depan yaitu pada tanggal 19 Februari 2008 (Ali, 2008).

⁵ Tanggal 22 Juni menjadi hari lahir berdirinya kampus tercinta IAIS Sambas (sekarang).

Mengacu pada dasar perpanjangan izin tersebut, maka STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas menerima dan meluluskan mahasiswanya sebagai bentuk sumbangsih dalam meningkatkan mutu/kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Surat keputusan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi ini, memberikan aura positif bagi pengelola STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas untuk lebih bersemangat memperjuangkan perguruan tinggi agar lebih berkembang dan bisa mencapai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Berbagai hal akan terus dikembangkan oleh pengelola beserta jajarannya, baik dalam aspek Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, dan lain sebagainya. Maka dari itu, perjuangan STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas untuk lebih baik dan maju, merupakan sebuah perjuangan yang panjang.

STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas yang merupakan sebuah institusi pendidikan swasta memerlukan sebuah payung hukum untuk memperkuat kedudukan institusi pendidikan, untuk itu STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas bergabung dengan Yayasan Pendidikan Islam Syafiuddin (YAPIS). Penggabungan ini dilakukan sambil menunggu pengelolaan yayasan baru, dalam arti penggabungan yang dilakukan oleh STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas ini sifatnya sementara sambil menunggu perguruan tinggi mempersiapkan dalam pembentukan yayasan sendiri. Dalam perkembangannya, STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas pada tanggal 09 Juni 2009 mengajukan surat permohonan pelepasan penggabungan dari YAPIS yang sesuai dengan surat edaran yang diberikan oleh STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas kepada YAPIS No. 227/STIT-

SBS/VI/2009 (Kamarudin, n.d.). Pelepasan penggabungan ini dilakukan karena sudah ada yayasan baru untuk dijadikan payung pelindung hukum yakni Yayasan Akhlakul Karimah dengan keluarnya surat 01/YAK/VI/2009.

Berdasarkan dasar inilah, maka YAPIS akhirnya menyetujui surat permohonan pelepasan yang diajukan oleh STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas tersebut. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya surat balasan dari YAPIS perihal surat permohonan pelepasan penggabungan STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas dengan YAPIS pada tanggal 30 Juni 2009, dengan nomor surat 06/YAPIS/VI/2009 yang berisi kesediaan melepas STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas dari YAPIS (Kamarudin, n.d.). Saat itu, periode kepemimpinan Drs. Munawar, M.Si selaku Ketua digantikan oleh Drs. H. Jami'at Akadol, M.Si.

D. Menempuh Jalan Perubahan Institusi

Perkembangan STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas ke depannya semakin baik, karena berbagai aspek sudah mulai dibenahi, baik dalam aspek manajemen, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun sarana dan prasarana yang dimiliki. Dalam hal pengembangan STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin sambas ini terus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk mengembangkan ruang lingkup institusinya ke arah lebih baik sampai kepada penergian. Hal ini dilakukan karena saat itu STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas hanya memiliki satu jurusan, jadi harapan pengelolaan agar STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas ini bisa ditingkatkan lagi agar bisa menjadi sebuah institusi yang memiliki beberapa jurusan, agar bisa

menampung keinginan masyarakat Sambas yang memiliki keinginan untuk mengkuliahkan anak-anak mereka di jenjang keilmuan yang lainnya.

Tantangan yang dihadapi oleh STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas ke depan luar biasa hebat. Maka dari itu, pengelola mempersiapkan diri agar bisa menjawab tantangan dan agar mampu menjadi sorotan masyarakat untuk mengkuliahkan putra-putri mereka di perguruan tinggi tersebut. Untuk itu, STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas meningkatkan perbaikan mutunya melalui pengusulan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2010.

Langkah berikutnya setelah diterimanya pengusulan STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas kepada BAN-PT, dilakukan penilaian setelah dilampirkan dalam bentuk berkas tertulis yang disebut dengan Borang. Borang tersebut dipersiapkan oleh BAN-PT, jadi perguruan tinggi yang ingin dilakukan penilaian akan mengisi borang yang telah dipersiapkan oleh tim dari BAN-PT tersebut.

BAN-PT adalah lembaga independen non struktural dan merupakan lembaga akreditasi pendidikan tinggi yang diakui oleh pemerintah. BAN-PT diberikan kepercayaan untuk melakukan sistem akreditasi pada institusi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), program pendidikan jarak jauh, dan program kerjasama antara pendidikan tinggi dengan pendidikan tinggi dari luar negeri. BAN-PT memiliki tugas utama yakni melakukan proses akreditasi pada perguruan tinggi. Namun begitu, ada beberapa tugas BAN-PT yang lebih rinci seperti:

1. Mengembangkan sistem akreditasi nasional
2. Melaksanakan akreditasi institusi.
3. Menilai kelayakan program studi, fakultas, atau perguruan tinggi baru bersama Ditjen Dikti.
4. Merekomendasikan dan mengevaluasi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
5. Melaksanakan program studi yang belum punyai LAM serumpun.

Begitu penting tugasnya BAN-PT yang telah disebutkan di atas. Maka dari itu, apabila sebuah perguruan tinggi ingin meningkatkan standar mutunya, dapat diukur melalui akreditasi perguruan tinggi. Sesuai dengan fungsi dari BAN-PT itu sendiri diantaranya:

1. Cek akreditasi kampus untuk bahan pertimbangan memilih perguruan tinggi.
2. Cek akreditasi untuk tes CPNS.
3. Cek akreditasi untuk mencari kerja.

Melihat begitu besar fungsi BAN-PT bagi perguruan tinggi untuk bisa bersaing dan menjadi pilihan tempat kuliah bagi masyarakat, maka sangat penting untuk melakukan akreditasi bagi perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta. Hal inilah yang menjadi salah alasan mengapa STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas mengusulkan ke BAN-PT untuk dilakukan akreditasi.

Selanjutnya STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas juga mengusulkan perubahan status kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Setelah melalui proses dan tahapan yang panjang, akhirnya perjuangan tersebut membuahkan hasil pada tahun 2010 STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas sudah berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sultan Muhammad

Syafiuddin Sambas, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/200/2010, pada tanggal 26 April 2010, yang berisi tentang Persetujuan Alih Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dari STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas menjadi STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Kalimantan Barat (Ali, 2009).

Perubahan status tersebut memberikan peluang besar bagi perkembangan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Sambas. Maka dari itu, STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas harus membenahi diri agar bisa terus meningkatkan mutu dan kualitasnya, supaya bisa menjawab tantangan dalam dunia pendidikan yang semakin hari semakin kompleks. Keseriusan yang dimiliki oleh STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dalam memajukan dunia pendidikan, agar menjadi salah satu institusi pendidikan yang menjadi kebanggaan masyarakat Sambas dengan mempersiapkan mutu pendidikan. Salah satu bukti kongkrit adalah dengan terus mendaftarkan STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk dilakukan penilaian.

Sampai tahun akademik 2010/2011 pelaksanaan pendidikan di STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas masih tetap dengan satu program studi, yakni Pendidikan Agama Islam (PAI). Seiring dengan perkembangannya, telah dibuat berbagai persiapan pembentukan program studi tambahan, mulai dari persiapan kurikulum, dosen dan kelengkapan administrasi lainnya, sebagai konsekuensi perubahan status. Pada tahun akademik 2011/2012 program studi yang mendapat izin operasional yaitu program studi S1 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IQT) dan S1 Sejarah dan Peradaban Islam (SKI). Kemudian pada tahun

akademik 2012/2013, disusul izin operasional untuk program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan D3 Perbankan Syariah (PBS).

STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas yang saat itu memiliki visi terdepan dalam “Kampus Pembelajaran” (*Teaching University*), “Kampus Penelitian” (*Research University*), dan “Kampus Wisata” (*Tourism University*). Dan beberapa misi antara lain: *pertama*, melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki pengetahuan dan kepribadian utuh sebagai seorang muslim dan memiliki kemandirian dalam hidupnya (*skill life*). *Kedua*, membangun kerjasama (*networking*) dengan berbagai pihak, instansi pemerintah, swasta dan asing. Kerjasama tersebut diantaranya bertujuan untuk pembangunan daerah, pembangunan dunia usaha, penggalan dan pelestarian Seni dan Budaya Melayu. *Ketiga*, melakukan berbagai penelitian untuk menggali potensi daerah Kabupaten Sambas. *Keempat*, memberikan layanan rekreatif, layanan wisata akademik, wisata religius dan layanan wisata sosial kepada masyarakat. *Kelima*, membangun Kabupaten Sambas sebagai kabupaten religius.

Dalam upaya pengembangan STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menghasilkan tenaga ilmiah dan ahli di bidang agama dan sebagai wahana penyebarluasan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi maka pengembangan kampus tersebut meliputi tujuh bidang pengembangan yaitu: Pengembangan Ketenagaan, Kurikulum, Perpustakaan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat, Kemahasiswaan, Prasarana dan Sarana.

Model pendidikan STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas yang ingin dikembangkan selain menjadi “Kampus Pembelajaran”

(*Teaching University*), juga menjadi “Kampus Penelitian” (*Research University*), dan “Kampus Wisata” (*Tourism University*). Ketiga macam karakteristik kampus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kampus Pembelajaran (*Teaching University*)

Sebagaimana lazimnya sebuah kampus, aktifitas pembelajaran merupakan sebuah keharusan. STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ingin menjadi pusat pembelajaran yang dapat melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki pengetahuan dan kepribadian utuh sebagai seorang muslim dan memiliki kemandirian dalam hidupnya. Oleh karena itu, STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas perlu mengembangkan berbagai disiplin ilmu secara integral.

2. Kampus Penelitian (*Research University*)

Selain sebagai pusat pembelajaran, STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ingin menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan ahli teknologi. Untuk itu, STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas perlu membangun kerjasama (*networking*) dengan berbagai pihak, instansi pemerintah, swasta dan asing.

3. Kampus Wisata (*Tourism University*)

Kampus wisata yang ingin dikembangkan di STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas adalah kampus yang tidak hanya menawarkan layanan akademik, tetapi kampus yang dapat memberikan layanan rekreatif.

Selain kampus yang memiliki karakter khusus, STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas juga dilengkapi dengan struktur organisasi yang mengacu pada Statuta pada Bab V pasal 18 tentang

Susunan Organisasi (2010). Struktur organisasi terdiri dari Yayasan, Ketua, Senat, Dewan Penyantun, Puket I, Puket II, Puket III, Kabag Administrasi, Jurusan/Prodi, Unsur Penunjang, Dosen, Subag Umum, Subag Akad, Subag Kepeg/Keu dan Mahasiswa.

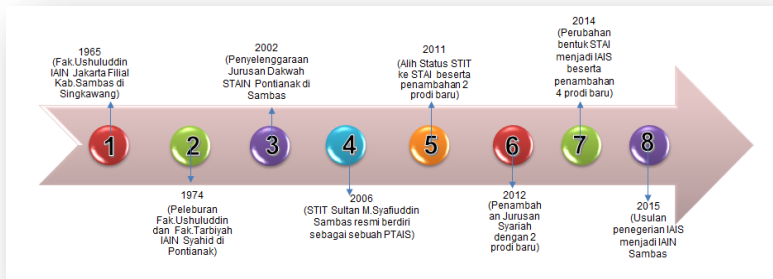
Unsur pimpinan STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas sebagai berikut Drs. H. Jamiat Akadol, M.Si sebagai Ketua STAI, Rusiadi, S.Pd.I, M.Ag sebagai Puket I, Drs. H. Mujahidin, M.Si sebagai Puket II, Drs. Gusmawan, MM sebagai Puket III, Hj. Januarti, SE, M.Si sebagai Kabag Administrasi, Sri Sunantri, S.Pd.I sebagai Kasubag Akad & Kemahasiswaan, Ahmad Yasir, SE sebagai Kasubag Keu & Kepeg/Bendahara, Iwan Kusnadi, SE sebagai Kasubag Umum.

STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas terus mengembangkan diri untuk peningkatan status institusi. Tepatnya pada bulan Agustus 2014, berdasarkan SK Direktur Pendidikan Islam Nomor: 3178 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (IAIS) Sambas (Syam, 2014). Tidak lama setelah perubahan bentuk, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3536 Tahun 2014, tentang izin penyelenggaraan untuk program studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), S1 Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan S1 Bimbingan Konseling Islam (BKI), maka IAIS Sambas telah memiliki sembilan program studi (Rosyada, 2014).

IAIS Sambas memiliki motto berilmu, beriman dan bermartabat (STATUTA, 2019), pada dasarnya merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan di bawah payung Kementerian Agama RI yang secara

akademik mengacu kepada sistem pendidikan nasional dalam rangka memikul tugas dan tanggung jawab mewujudkan pembangunan masyarakat yang religius dan beradab di Kabupaten Sambas. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Sambas yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan agama Islam.

Kehadiran IAIS Sambas ini sangat diharapkan oleh masyarakat sebagai lokomotif penggerak pembangunan di bidang agama dan mencerdaskan spiritual anak bangsa sehingga menghasilkan sarjana muslim yang utuh keilmuannya dan profesional serta memiliki integritas kepribadian sebagai sarjana yang beradab dan bermartabat dalam menjawab tantangan global. Sebagai sebuah Perguruan Tinggi, IAIS Sambas terbuka bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dari berbagai latar belakang kultur dan budaya, yang tentunya tetap terbuka untuk jalinan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri dalam upaya peningkatan kualitas akademik. Dalam perkembangannya IAIS Sambas tahun 2015 mengajukan pengusulan penegerian. Sehingga jika dirunut sejarah panjang sejak STAIN Filial Sambas hingga pengusulan penegerian, perkembangan IAIS dari 2002-2015 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Rentetan Perkembangan IAIS Sambas.
 Diambil dari Slide Presentasi Usulan Penergian IAIS Sambas
 oleh J. Akadol, 2015.

Sejarah perjalanan IAIS Sambas yang dilukiskan dalam tulisan ini membuktikan bahwa keberadaan kampus ini merupakan kampus satu-satunya yang bernuansa islami yang berada di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun daerah perbatasan menjadi daerah yang maju, terdepan dan dapat dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Sambas pada khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Kampus yang telah melahirkan pemikir-pemikir baru yang kaya akan ilmu agama dan tentunya dalam berbagai bidang keilmuan. Berawan dari sebuah “mimpi besar” para petinggi dan para pemikir yang benar-benar ikhlas untuk membangun Negeri Indonesia (NKRI) ini melalui dunia pendidikan.

E. Selayang Pandang Profil IAIS Sambas

1. Lambang

Setelah terjadi perubahan dalam beberapa kali, sampailah pada tahap institut, tentunya kampus ini memiliki lambang. Lambang yang bercirikan kekhasan dan keaderahan yang patut dibanggakan. Lambang

IAIS Sambas berbentuk persegi lima hijau dengan dua ekor kuda laut kuning emas, sebuah al-Qur'an terbuka, dan pita merah putih beruliskan "SAMBAS". Makna rinci dari lambang tersebut sebagai berikut:

- a. Bentuk lambang adalah persegi lima, melambangkan rukun Islam.
- b. Dua ekor kuda laut yang berwarna kuning emas merupakan simbol kejayaan Kesultanan Sambas dan martabat rumpun Melayu.
- c. Konfigurasi matahari melambangkan sinar dan harapan kehidupan.
- d. Pena melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya.
- e. Al-Qur'an dalam posisi terbuka melambangkan pedoman bagi umat Islam dan IAIS Sambas dalam penyelenggaraan pendidikan.
- f. Warna dasar hijau muda pada latar belakang, melambangkan keteduhan, kedamaian dan kemakmuran dalam proses melahirkan tunas bangsa. Warna hitam pada garis lengkung melambangkan kekuatan ikatan ukhuwah Islamiah.
- g. Warna merah putih pada ujung pita melambangkan kedaulatan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Tulisan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin nama Perguruan Tinggi.
- i. Tulisan Sambas menunjukkan tempat Perguruan Tinggi berada.

2. Kurikulum IAIS Sambas

Lulusan IAIS Sambas nantinya diharapkan dapat menguasai Ilmu baik secara normatif maupun teoritis-praktis. Menguasai konsep penelitian secara teoritis dan praktis dalam mengembangkan keilmuan di bidang masing-masing. Terampil menggerakkan masyarakat di

bidang sosial keagamaan. Maka kurikulum yang didesain memiliki keunggulan kompetitif, dan diharapkan menghasilkan sarjana yang memiliki kualitas intelektual, spritual serta profesional yang memadai. Kematangan intelektual terwujud dalam bentuk kemampuan menganalisis, mengeksplorasi, mempertanyakan, mempertimbangkan, mensintesis pengetahuan dan keterampilan lama dengan yang baru disertai antisipasi pengembangan di masa mendatang. Di samping itu juga diharapkan *marketable* di tengah ketatnya persaingan dunia kerja. Selain itu, desain kurikulum juga disiapkan kompatibel bagi para alumni yang bermaksud melanjutkan studi mereka ke jenjang S2 bahkan S3.

Untuk meningkatkan kualitas pemahaman, wawasan pengetahuan, dan keterampilan sebagai seorang sarjana muslim, maka setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti program sertifikasi dalam rangka pengembangan dasar keilmuan, diantaranya: Kursus Komputer, Bahasa Arab dan Inggris, Baca Tulis Al-Qur'an, Praktik Ibadah, Praktik Tilawah, Praktik Lapangan, dan Kelompok Pengabdian Masyarakat (KPM).

Struktur kurikulum yang diterapkan pada peserta didik tersebut terdiri dari kurikulum inti sebesar 67,21% dan kurikulum institusional/lokal sebesar 32,88%, dimana komposisi tersebut masih dalam *range* yang dianjurkan untuk kurikulum inti 40% - 80%, kurikulum institusional 20% - 60% (Kepmendiknas, 2002), jumlah 149 SKS - 152 SKS, dengan lama waktu tempuh perkuliahan secepat-cepatnya 7 semester atau 3,5 tahun dan selama-lamanya 14 semester atau 7 tahun, dengan masa perpanjangan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengembangan kurikulum menjadi tanggung jawab perguruan tinggi sebagai wujud otonomi perguruan tinggi. KBK dilaksanakan untuk lebih mengarahkan proses pendidikan dengan mengedepankan penguasaan kompetensi agar lulusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selanjutnya kurikulum, tenaga pengajar, laboratorium, perpustakaan dan sistem administrasi akademik IAIS Sambas pada umumnya sama dengan Perguruan Tinggi Islam lainnya di Indonesia, yang secara akademik pengembangan kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Sejarah, 2021).

Sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan ini sebagian besar dari mahasiswa. Dana yang diperoleh melalui mahasiswa meliputi: (1) Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dibayarkan mahasiswa pada tahun pertama dengan jumlah yang berbeda antara program studi satu dengan lainnya. (2) Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester dengan besaran yang sama untuk seluruh program studi. (3) Dana Skripsi, (4) Dana Kelompok Pengabdian Masyarakat (KKN), (5) Dana Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Sedangkan sumber dana alternatif dan insidental adalah dari instansi lain yang diterima dalam bentuk sumbangan (beasiswa) maupun kegiatan kerjasama dan hasil penjualan jurnal *al-Sulthaniyah* maupun *Islamica*. Untuk menopang dan menjamin keberlanjutan sumber penerimaan dana terus mengupayakan peningkatan kualitas mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah mahasiswa. Di samping dengan membentuk lembaga-lembaga profit, seperti: koperasi dan kantin.

Keseluruhan dana yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut 65% digunakan operasional, yang meliputi: pendidikan, pengajaran, pembinaan kegiatan kemahasiswaan, biaya administrasi dan biaya-biaya operasional lainnya, dan 35% untuk pengadaan fisik/pembangunan, sedangkan dalam pembiayaan pembelajaran dan hal-hal yang mendukung pembelajaran, maka struktur dana yang tersedia telah mencapai tingkat kelayakan.

3. Sarana Prasarana dan SDM

Sarana dan Prasarana sejak masih status STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, sudah memiliki tiga kampus. Kampus I terletak di Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas. Lokasi kampus yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh sarana transportasi, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung merupakan sebuah tuntutan dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menjamin untuk terus dikembangkan di masa mendatang. Kampus II terletak di Jalan Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan Tinggi, Sebayon. Kampus III terletak di Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Sedangkan untuk keadaan program studi di IAIS Sambas pada tahun 2015 dan aset kampus, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

No	Program Studi	Jenjang	Nilai
1	Pendidikan Agama Islam	Strata Satu (S1)	B
2	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Strata Satu (S1)	C
3	Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	Strata Satu (S1)	C
4	Hukum Ekonomi Syariah	Strata Satu (S1)	C
5	Perbankan Syariah	Diploma Tiga (D3)	C
6	Sejarah dan Kebudayaan Islam	Strata Satu (S1)	C
7	Ilmu Al Quran dan Tafsir	Strata Satu (S1)	C
8	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Strata Satu (S1)	C
9	Bimbingan dan Konseling Islam	Strata Satu (S1)	Dalam proses

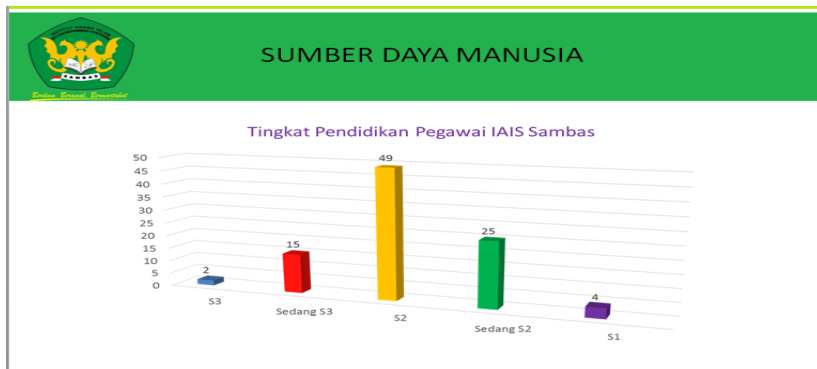
Program Studi di IAIS Sambas Tahun 2015
Diambil dari Slide Presentasi Usulan Pengerian IAIS Sambas
oleh J. Akadol, 2015.

No	Bangunan/Fasilitas	Jumlah	Ket
1	Auditorium + Rektorat	1	Bantuan Pemprov Kalbar
2	Gedung Fakultas Tarbiyah	1	Bantuan Pemkab.Sambas
3	Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	1	Bantuan Pemkab.Sambas
4	Gedung Fakultas Adab dan Ushuluddin	1	Bantuan Pemkab.Sambas
5	Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	1	Bantuan Pemkab.Sambas
6	Gedung Perpustakaan	1	Bantuan Pemprov Kalbar
7	Gedung Lab. Microteaching	1	Bantuan Pemkab.Sambas
8	Lab.Komputer	1	Bantuan Pemkab.Sambas
9	Lab.Bahasa	1	Bantuan DIKTIS
10	Sarana Olah Raga	4	Yayasan
11	Lahan	10 Ha	Hibah Pemkab Sambas

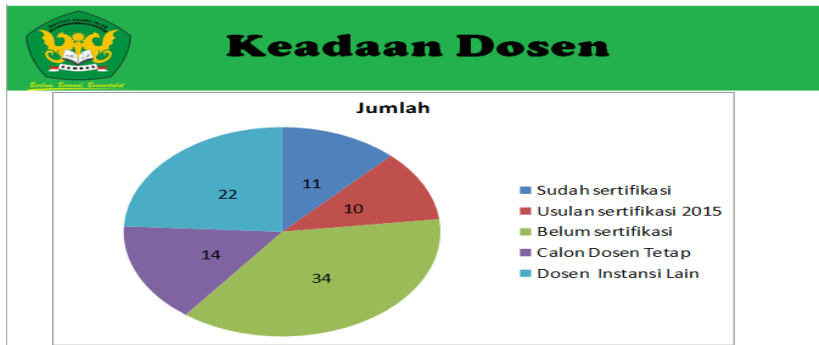
Keadaan Aset Kampus
Diambil dari Slide Presentasi Usulan Pengerian IAIS Sambas
oleh J. Akadol, 2015.

Sedangkan Sumber Daya Manusia Dosen dan Staff di IAIS Sambas diupayakan terus meningkat. Dalam upaya meningkatkan kualitas dosen, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjut jenjang S2 bahkan S3, di samping mengikuti penataran-penataran atau pelatihan untuk meningkatkan tenaga administrasi jurusan dan dilakukan pula pelatihan-pelatihan maupun lanjutan studi. Tahun akademik 2011/2012 terdapat tiga orang dosen

menempuh jenjang pendidikan S2, 1 orang di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dua orang di UIN Makasar. Sedangkan untuk peningkatan jabatan akademik tenaga pengajar, mengidentifikasi dan mendorong tenaga pengajar yang sudah saatnya mengajukan kenaikan jabatan. Untuk mendukung dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan terhadap mahasiswa, maka khusus staff yang terlibat dalam proses pelaksanaan pelayanan tersebut ditingkatkan kemampuan dan kinerjanya serta perlengkapan administrasi lainnya sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.



Sumber Daya Manusia (Dosen dan Staf)
Diambil dari Slide Presentasi Usulan Penegerian IAIS Sambas
oleh J. Akadol, 2015.



Keadaan Dosen yang Sertifikasi
 Diambil dari Slide Presentasi Usulan Penegerian IAIS Sambas
 oleh J. Akadol, 2015.

Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu. Dosen tetap di IAIS Sambas dipilah dalam dua kelompok, yaitu: *pertama*, dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS (Program Studi); *kedua*, dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS (Program Studi). Dosen yang ada di IAIS Sambas sebagian sudah mendapatkan sertifikasi dosen dan ber NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional). Yang akan menyusul untuk mendapatkan sertifikasi dosen juga ada beberapa orang. Oleh karena itu kampus IAIS Sambas, ke depan diupayakan akan semakin meningkat baik dari aspek SDM maupun dari aspek infrastruktur.

4. Organisasi Tata Kerja di IAIS Sambas

Organisasi Tata kerja di IAIS Sambas terdiri dari:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kerjasama & Pengembangan
- c. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan & Alumni
- e. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan (BAUAK)
- f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- g. Lembaga Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M)
- h. Pusat Komputer dan Teknologi Informasi (PUSKOMTI)
- i. Pusat Pelatihan Bahasa (PUSLATBA)
- j. Pusat Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan (PUSBAPROWI)
- k. Pusat Pelatihan Keterampilan Keagamaan (PUSLATRAMA)
- l. Pusat Perpustakaan

Badan Penyelenggara (BP) IAIS Sambas adalah Yayasan Akhlakul Karimah. Dewan Penyantun merupakan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah pusat, dan daerah, yang terdiri dari: (1). Ketua, merangkap anggota. (2). Sekretaris, merangkap anggota. (3). Anggota, berjumlah tiga orang. Senat beranggotakan Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana, dan Perwakilan Dosen Fakultas. Rektor adalah Ketua Senat dengan dibantu seorang Sekretaris Senat yang dipilih dari anggota senat. Rektor merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di IAIS Sambas. Rektor IAIS Sambas dibantu oleh 3 orang wakil rektor sebagai berikut: (1). Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan; (2). Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian; (3). Wakil

Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Berikut ini adalah daftar ketua/rektor IAIS Sambas sejak awal berdirinya.

NAMA PENJABAT	PERIODE	KETERANGAN
Drs. Munawar, M.Si.	2004-2006	Ketua Pengelola STAIN Pontianak Filial Sambas/Ketua STAIS Sambas
Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si.	2006-2010	Ketua STIT Sambas
Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si.	2010-2014	Ketua STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si.	2014-2018	Rektor IAIS Sambas
Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si. MH.	2018-sekarang	Rektor IAIS Sambas

Daftar Ketua/Rektor IAIS Sambas Sejak Awal Berdirinya.

Diambil dari

[https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Agama_Islam_Sultan_Muhammad_Syafiuddin_Sambas#Sejarah_Singkat\[1\]%20BPS,](https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Agama_Islam_Sultan_Muhammad_Syafiuddin_Sambas#Sejarah_Singkat[1]%20BPS,)
2022.

IAIS Sambas memiliki 4 fakultas, 1 program studi diploma, 10 program studi sarjana, dan 2 program pascasarjana. Setiap fakultas dijalankan oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, UPT Praktek Kerja Lapangan, UPT Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, Unit Penjaminan Mutu (UPM), Laboratorium, Subbagian Tata Usaha dan Dosen. Sedangkan Program Pascasarjana dijalankan oleh Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan UPT Penerbitan dan Publikasi Ilmiah.

Program pascasarjana dan fakultas serta prodi yang ada di IAIS Sambas dengan susunan antara lain Program Pascasarjana terdiri dari: (1). S2 Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI); (2). S2 Magister

Ekonomi Syariah (MEKS). Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terdiri dari: (1). S1 Pendidikan Agama Islam (PAI); (2). S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI); (3). S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD); (4). S1 Tadris/Pendidikan Bahasa Indonesia (TBI); Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri dari: (1). D3 Perbankan Syariah (PBS); (2). S1 Ekonomi Syariah (EKS); (3). S1 Manajemen Bisnis Syariah (MBS). Fakultas Syariah terdiri dari: (1). S1 Hukum Tata Negara (HTN); (2). S1 Hukum Ekonomi Syariah (HES). Fakultas Dakwah dan Humaniora terdiri dari: (1). S1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI); (2). S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI); (3). S1 Sejarah dan Peradaban Islam (SPI); (4). S1 Ilmu Qur'an dan Tafsir (IQT).

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIS Sambas yang memiliki struktur sebagai berikut: (1). Ketua, (2). Sekretaris, (3). Pusat Penelitian, (4). Pusat Pengabdian Pada Masyarakat, (5). Pusat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, (6). Pusat Studi Gender dan Anak, (7). Pusat Studi Halal. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan (BAUAK). Biro AUAK IAIS Sambas membawahi beberapa bagian sebagai berikut: (1). Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama; (2). Bagian Umum dan Kepegawaian; (3). Bagian Keuangan dan Aset. Pusat Pelatihan dan Pelayanan Bahasa (PUSLAPBA) terdiri dari PUSLAPBA IAIS Sambas merupakan unsur penunjang akademik dalam hal pelatihan dan pelayanan tes bahasa. Strukturnya sebagai berikut: (1). Kepala, (2). Sekretaris, (3). Instruktur dan Laboran. Pusat Pelatihan dan Pembinaan Keagamaan (PUSLATBIMA) IAIS Sambas merupakan unsur penunjang akademik dalam hal pelatihan dan pembinaan keagamaan bagi mahasiswa. Strukturnya sebagai berikut: (1). Kepala, (2). Sekretaris, (3). Instruktur

dan Laboran. Perpustakaan IAIS Sambas memiliki struktur organisasi sebagai berikut: (1). Kepala, (2). Sekretaris, (3). Pustakawan. Pusat Pangkalan Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) IAIS Sambas adalah unsur penunjang akademik di bidang pengelolaan dan pengolahan data elektronik serta pengelola jaringan intranet dan internet. Strukturnya sebagai berikut: (1). Kepala, (2). Sekretaris, (3). Instruktur, Laboran, dan Operator.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIS Sambas memiliki struktur organisasi sebagai berikut: (1). Ketua, (2). Sekretaris, (3). Pusat Akreditasi, Sertifikasi dan Standardisasi Mutu, (4). Pusat Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pengajaran, (5). Pusat Pengawasan dan Audit Internal / SPMI. Organisasi Kemahasiswaan IAIS Sambas terdiri dari: (1). Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), (2). Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institusi dan Fakultas, (3). Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), (4). Unit Kegiatan Khusus (UKK), (5). Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI).

F. *Dukungan Penegerian IAIS Sambas*

Dukungan untuk penegerian IAIS Sambas dari berbagai kalangan diantaranya Bupati Sambas dengan dikeluarkannya rekomendasi nomor: 400/05/Kesejahteraan/2015 yang langsung ditanda tangani dr. Juliarti Djuhardi Alwi, M.Ph. Kemudian Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas nomor: 170/179/DPRD yang ditanda tangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas yaitu H. Mas'ud Sulaiman, SE. Selanjutnya Surat pernyataan persetujuan nomor: Kd.14.01/1/PP.00.9/058/2015 Kementerian Agama Kabupaten

Sambas yaitu H.M.Asmar, S.Pd.I selaku kepala ditanda tangani tanggal 27 Januari 2015. Dari berbagai lembaga dan ormas Islam seperti PC Nahdlatul Ulama Kab. Sambas PD Muhammadiyah Kab. Sambas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sambas, DDII Kab. Sambas.

G. Penutup

Dalam upaya mengembangkan dunia pendidikan di Kabupaten Sambas memang bukan hal yang mudah karena perlu perjuangan dan pengorbanan baik waktu, tenaga, pikiran, biaya dan lain sebagainya. Dengan tekad dan keseriusan dari para pemimpin terdahulu kemudian dilanjutkan oleh para pemimpin kampus sekarang telah menampkan hasil yang sangat membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Sambas karena dengan berdirinya kampus IAIS Sambas (sekarang) menjadikan IPM Kab. Sambas meningkat dari tahun ke tahunnya. Kampus yang berada di garda terdepan perbatasan Indonesia-Malaysia ini sudah sepiantasnya dan selayaknya menjadi rujukan. Apalagi dalam waktu dekat ini, kampus IAIS Sambas akan diusulkan untuk dinegerikan, yang awalnya swasta menjadi negeri. Tentu hal ini perlu bantuan, dorongan dan do'a dari semua pihak. Semoga harapan dan cita-cita besar masyarakat Kabupaten Sambas untuk memiliki kampus yang terdepan dan ternama menjadi kenyataan. Terunggul dalam Lintas Negara di Asia Tenggara di tahun 2035.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadol, J. (18 Agustus 2015). Presentasi Usulan Penegerian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. *Slide Presentasi*. Sambas.
- Ali, M. (2008). *Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S1) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta*.
- Ali, M. (2009). *Persetujuan Alih Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2010*. 4–6.
- BPS, T. (2021). Kabupaten Sambas dalam Angka 2021. Diakses 3 Januari 2021, dari <https://sambaskab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NWRiNjdmOWIzNmNlMWVjOTEzZjk2YWUw&xzmn=aHR0cHM6Ly9zYW1iYXNrYWluYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjEvMDIvMjYvNWRiNjdmOWIzNmNlMWVjOTEzZjk2YWUwL2thYnVwYXRlbi1zYW1iYXMtZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMS5o dG1s&t>.
- Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. (18 April 2022). Diakses 22 April 2022, dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Agama_Islam_Sultan_Muhammad_Syafiuddin_Sambas#Sejarah_Singkat\[1\]%20BPS](https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Agama_Islam_Sultan_Muhammad_Syafiuddin_Sambas#Sejarah_Singkat[1]%20BPS).
- Irawan, D. (2018). *Dakwah Di Daerah Pasca Konflik (Studi Kasus di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)*. [Disertasi tidak diterbitkan]. Makassar: PPs. UIN Alauiddin Makassar. <http://repositori.uin-alauiddin.ac.id/18163/>
- Kamarudin, H. H. (n.d.). *Persetujuan Pelepasan Bergabung Dari YAPIS*.
- Kepmendiknas. (2002). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Mahrus, E. (2018). *Kontribusi Maharaja Imam H. Muhammad Basiuni Imran Dalam Pendidikan Islam Di Kerajaan Sambas, Kalimantan Barat (1915-1950)*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/17448/>
- Munawar. (15 Mei 2004). Menjadikan STAIS Embrio Pendirian STAIN. *Pontianak Post*, h. 15.

- Munawar. (2005). *Profil Sekolah Tinggi Agama Islam Sulthan M. Syafiuddin (STAIS) Sambas*, Sambas: Yanss.com.
- Nurkholim, W. (2017). *Syaikh Ahmad Khatib Sambas: Pendiri Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah (1803-1875 M)*. 25.
- Rosyada, D. (2014). *Pengumuman Daftar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang Memperoleh Izin Penyelenggaraan Program Studi Baru Tahun 2014* (Issue 3).
- Sejarah. (2019). *Situs Resmi IAIS Sambas*. Diakses 10 Juni 2021, dari <https://www.iaisambas.ac.id/visi-misi-dan-tujuan/>
- Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas . (2010).
- Statuta Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. (2019).
- Syam, N. (2014). *Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*.
- Umar, J. (2006). *SK Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sulthan M. Syafiuddin Sambas dan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat*.

BAGIAN TIGA

**PENGEMBANGAN KEILMUAN DAN
KEISLAMAN BERWAWASAN
LINTAS NEGARA**

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN AKADEMIK: STRATEGI PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI

Sri Deti dan Rusiadi

A. *Pendahuluan*

Setiap calon mahasiswa atau mahasiswa baru harus mengetahui beberapa istilah penting tentang dunia kampus yaitu fakultas, jurusan, dan program studi. Sama seperti organisasi pada umumnya, kampus juga merupakan organisasi yang punya struktur organisasi dan ada bagian/divisi di dalamnya. Secara umum garis organisasi di kampus meliputi: UNIVERSITAS/INSTITUT -> FAKULTAS -> JURUSAN -> PROGRAM STUDI

Fakultas adalah sebuah divisi dalam sebuah universitas/institut yang terdiri dari suatu area subyek, atau sejumlah bidang studi terkait (Fakultas, 2020). Sederhananya jurusan atau program studi yang ada di dalam satu fakultas mempunyai keterkaitan subjek pembelajaran atau bidang studi. Dalam satu fakultas, ada beberapa jurusan, dimana jurusan mewakili satu bidang keilmuan yang khusus.

Fakultas, jurusan, dan program studi atau yang biasa di sebut Prodi punya pimpinan. Pimpinan fakultas disebut Dekan dan biasanya dibantu oleh Wakil Dekan. Sedangkan pimpinan jurusan disebut Ketua Jurusan (Kajur) didampingi oleh Sekretaris Jurusan. Sementara untuk prodi pimpinannya disebut Ketua Prodi (Kaprodi) dan didampingi oleh Sekretaris Prodi (Sekprodi). Kalau diurutkan hirarkinya yaitu DEKAN -> KAJUR -> KAPRODI.

B. Nomenklatur Fakultas: Membentuk, Memisahkan dan Menggabungkan

Kurang lebih empat (4) tahun menjalankan aktivitas pendidikan dengan nama dan program pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas. Pada tahun 2010 STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas kemudian beralih bentuk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (Keputusan Ditjen Pendis, 2010). Sebagai akibat dari perubahan bentuk dari STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas menjadi STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, maka tidak hanya menyelenggarakan dalam disiplin ilmu Tarbiyah (Pendidikan) namun juga disiplin ilmu lainnya yaitu Program Studi Ilmu Qur'an dan Tafsir dan Sejarah dan Peradaban Islam, yang kemudian pada tahun 2012 disetujui kembali pembukaan Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah dan D3 Perbankan Syariah. Selanjutnya pada tahun 2014 diusulkan lagi beberapa program studi baru yaitu S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Guru Raudhatul Athfal, S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam dan S1 Bimbingan Konseling Islam, sekaligus diusulkan juga perubahan/alih bentuk menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Pada tanggal 9 Juni 2014 STAI Sultan Muhamamad Syafiuddin Sambas resmi berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas (Keputusan Dirjen Pendis, 2014).

Gagasan pendirian fakultas merupakan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan serta aturan yang diberikan oleh pemerintah agar membentuk fakultas sesuai dengan disiplin ilmu. Sejalan dengan perkembangan, IAIS Sambas sampai tahun 2021 sudah memiliki 4

(empat) fakultas dan memiliki 15 (lima belas) program studi serta 2 (dua) program studi pascasarjana, dengan bertambahnya fakultas di lingkungan IAIS Sambas semakin memberikan pilihan bagi masyarakat yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi di Kabupaten Sambas. Pada tanggal 23 Agustus 2017 Rektor IAIS Sambas mengeluarkan peraturan nomor 5 (2017) tentang pemekaran Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam menjadi Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Syariah terdiri dari prodi Strata 1 (S1) Hukum Ekonomi Syariah dan Strata 1 (S1) Hukum Tata Negara, sedangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri dari Program Studi Strata 1 (S1) Ekonomi Syariah dan Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah. Ini dilakukan dalam rangka pengembangan akademik.

Dalam organisasi akademis bernama perguruan tinggi dikenal satu bagian administratif bernama fakultas. Secara umum, fakultas merupakan divisi khusus dalam sebuah perguruan tinggi institut maupun universitas yang membawahi beberapa program studi/jurusan. Memisahkan fakultas merupakan bagian dalam proses pengembangan sebuah perguruan tinggi. IAIS Sambas awal berdirinya hanya memiliki lima fakultas yaitu, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan, Fakultas Ushuluddin dan Peradaban, Fakultas Dakwah dan Psikologi, Fakultas Syariah serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kelima fakultas tersebut terpisah karena memiliki konsentrasi ke ilmunan yang berbeda, dengan pemisahan tersebut, tampak jelas keahlian yang dibangun dari tiap-tiap fakultas tersebut.

Penggabungan fakultas di lingkungan IAIS Sambas dilakukan dengan mengumpulkan satu fakultas yang rumpun keilmuannya berdekatan, sebagai langkah dari efisensi dan pengembangan ilmu

pengetahuan. Adapun fakultas yang digabungkan adalah fakultas Ushuluddin dan Peradaban dan Fakultas Dakwah dan Psikologi menjadi Fakultas Dakwah dan Humaniora. Akibat dari penggabungan fakultas tersebut, maka seluruh prodi yang ada di dua fakultas menyatu dalam satu fakultas. Adapun prodi yang digabungkan dalam satu fakultas yaitu terdiri dari Program Studi Ilmu Qur'an dan Tafsir, Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, serta Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ini dibuktikan dengan Peraturan Rektor Nomor 04 (2017) tentang penggabungan Fakultas Ushuluddin dan Peradaban dengan Fakultas Dakwah dan Psikologi menjadi Fakultas Dakwah dan Humaniora.

C. Program Studi: Meneguhkan dan Menambahkan

Pendidikan pada hakikatnya adalah untuk membangun peradaban bangsa melalui membangun manusia seutuhnya. Pendidikan merupakan hak setiap orang untuk meningkatkan harkat dan martabatnya dalam kehidupan sehari-hari (UNY, 2021). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Republik Indonesia, 2003).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut terlihat bahwa tujuan pendidikan nasional tidak hanya untuk mencerdaskan generasi muda secara intelektual semata, tetapi juga mengembangkan kepribadian

mereka secara utuh. Tantangan kehidupan global sekarang ini, membutuhkan generasi muda dan manusia yang memiliki kepribadian, kemandirian, kreativitas, dan semangat atau motivasi untuk melakukan adaptasi dengan cepat terhadap perubahan kehidupan, bukan sekedar generasi muda yang menguasai pengetahuan teknikal, tetapi lemah kepribadiannya. Hal penting bagi praktik pendidikan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern dan global adalah dibutuhkannya landasan paradigma pendidikan yang bersifat transformasional, pendidikan yang membangun perubahan pada diri generasi muda, seluruh aspek kehidupan dirinya, perasaan, emosi, pikiran, nilai-nilai, dan kepribadiannya yang mendorong untuk perbaikan kehidupan (Kuntoro, 2011).

Proses pendidikan dalam literatur ilmu pendidikan, khususnya ilmu pengajaran, direduksi menjadi proses pengajaran atau proses pembelajaran, sebab mungkin proses pengajaran/pembelajaran lebih jelas, lebih tegas, objektif, bahkan universal, sedangkan proses pendidikan selain mengajar lebih subjektif, kurang jelas, kurang tegas, lebih bersifat seni daripada sebagai sains. Proses pembelajaran (*instructional*) yang sering disingkat menjadi PBM (Proses Belajar Mengajar) adalah bagian terpenting yang bersifat aktif dari kurikulum (Amin, 2018). Pendidikan memiliki cakupan yang cukup luas dan dalam mendefinisikan pendidikan juga bervariasi. Ada yang mengartikan pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di lingkungan masyarakat dimana ia berada. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses sosial, di mana seseorang dihadapkan pada kondisi dan pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol

(contoh paling nyata adalah kampus) sehingga yang bersangkutan mengalami perkembangan secara optimal (Sulistiyono, 2003). Pendidikan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda yaitu, melihat dari sudut pandang psikologis dan dari sudut pandang sosiologis. Banyak sudut pandang untuk dapat merumuskan pengertian pendidikan sehingga banyak juga definisi tentang pendidikan. Namun demikian, yang pasti bahwa pendidikan adalah proses untuk membina (UNY, 2021)

Proses Pendidikan menurut Pasal 33 Ayat 1-2 Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012, dilaksanakan melalui program studi dimana program studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan. Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu. Program studi juga merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (Peraturan Pemerintah, 2014; Permenristekdikti, 2018; Permendikbud, 2020).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa program studi merupakan pelaksana yang menyelenggarakan dan mengelola langsung proses pendidikan kepada masyarakat luas dalam hal ini masyarakat Kabupaten Sambas. Melalui IAIS Sambas masyarakat Kabupaten Sambas dapat dengan mudah untuk mengakses Pendidikan Tinggi. Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pembangunan pendidikan tinggi

didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mengemban tugas pendidikan juga harus mengikuti Renstra tersebut. Sehubungan dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, maka kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. (Lampiran Keputusan Ditjen Pendis, 2013).

Untuk itulah IAIS Sambas sejak tahun 2002 terus berupaya untuk ikut serta dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Sambas dengan dibukanya Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Jurusan Dakwah STAIN Pontianak Filial Sambas pada Tahun Akademik 2002/2003 (Sejarah, 2019). Hal tersebut dilakukan sebagai cikal bakal berdirinya IAIS Sambas, dengan melakukan segala upaya beberapa tahun setelah kerjasama tersebut IAIS Sambas mendapatkan izin operasional sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas sekaligus izin operasional Program Studi pertama yaitu S1 Pendidikan Agama Islam (Keputusan Dirjen Pendis, 2006). Sejak saat itu IAIS Sambas terus berupaya meneguhkan program studi yang telah ada dengan cara meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan tenaga kependidikan. Upaya tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah daerah yang memberikan beasiswa kepada para dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik itu

Program Magister maupun Program Doktor. Hal tersebut telah dilakukan sejak tahun 2008 hingga tahun 2018 dengan melakukan perpanjangan kerjasama pada setiap tahunnya (Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Sambas dengan IAIS Sambas, 2018; Perjanjian Kerjasama antara Pemkab, 2019). Selain itu, juga mengadakan workshop dan pelatihan-pelatihan yang bekerjasama dengan berbagai pihak (Perjanjian Kerjasama Antara Kepala UPT Bahasa UNTAN Pontianak dengan Ketua STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas, 2009; Surat Hasrat Kerjasama antara UKM dengan IAIS Sambas, 2017).

IAIS Sambas juga terus berupaya untuk mengembangkan sayap keilmuan dengan terus menambah program studi baru. Upaya tersebut mulai diwujudkan dengan membuka empat program studi baru pada tahun 2011 sebagai imbas dari perubahan bentuk STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tahun 2010 (Keputusan Ditjen Pendis, 2010). Penerbitan izin operasional empat program studi baru tersebut dilakukan dalam dua tahap dimana dua program studi diterbitkan pada awal tahun dan dua program studi di akhir tahun 2011. Tahap pertama yaitu pada bulan Januari 2011 program studi baru yang mendapatkan izin operasional yaitu S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan S1 Sejarah dan Peradaban Islam berdasarkan Keputusan Ditjen Pendis Nomor: Dj.I/54/2011. Kemudian pada bulan Desember 2011 disusul oleh D3 Perbankan Syariah dan S1 Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Keputusan Ditjen Pendis Nomor: Dj.I/1874/2011. Tidak berhenti sampai disitu, STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas terus melakukan pengembangan diri dengan menambah program studi baru dan meningkatkan bentuk/status izin operasional.

Untuk itu, tepatnya pada tanggal 9 Juni 2014 STAI Sambas berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas sekaligus menambah dua program studi baru yaitu S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan S1 Bimbingan dan Konseling Islam (Keputusan Ditjen Pendis No. 3178 Tahun 2014). Pada bulan yang sama tepatnya pada tanggal 25 Juni 2014 bertambah lagi dua program studi baru di IAIS Sambas yaitu S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam, S1 Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (Keputusan Ditjen Pendis No. 3536 Tahun 2014).

Dua tahun berjalan dengan sembilan program studi, IAIS Sambas terus berupaya untuk menambah program studi baru, sehingga pada tahun 2016 bertambah lagi dua program studi baru yaitu S1 Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syariyyah) dan S1 Ekonomi Syariah (Keputusan Ditjen Pendis, 2016). Kemudian satu tahun berikutnya tepatnya tanggal 7 September 2017 IAIS Sambas membuka Pascasarjana dengan dua Program Studi yaitu S2 Pendidikan Agama Islam dan S2 Ekonomi Syariah (Keputusan Ditjen Pendis, 2017). Dan yang terbaru pada bulan Maret 2020 telah terbit kembali dua izin penyelenggaraan Program Studi baru yaitu S1 Tadris Bahasa Indonesia dan S1 Manajemen Bisnis Syariah (Keputusan Menteri Agama, 2020). Dengan demikian pada tahun 2020 Program Studi yang ada di IAIS Sambas berjumlah lima belas Program Studi dimana terdiri dari satu Program Diploma, tiga belas Program Sarjana dan dua Program Magister. Namun demikian IAIS Sambas akan terus berupaya untuk menambah program studi baru guna memberikan akses pendidikan yang lengkap kepada masyarakat Kabupaten Sambas khususnya dan seluruh seluruh umat manusia pada umumnya.

Saat ini, program studi baru yang sedang dalam proses menunggu keluarnya izin penyelenggaraan terdiri dari enam program studi sarjana dan satu program studi magister. Dimana program studi tersebut antara lain S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 Tadris Matematika, S1 Tadris Bahasa Inggris, S1 Hukum Keluarga, S1 Akuntansi Syariah, S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, dan Magister Hukum Tata Negara (SK. Rektor IAIS Sambas, 2020). Semoga Program Studi yang sedang dan akan diajukan izin penyelenggaraannya kedepan diharapkan akan terealisasi dan mendapatkan izin dari Menteri Agama, Aamiin. Dengan demikian IAIS Sambas akan semakin besar dan semakin besar pula sumbangsihnya dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia khususnya Kabupaten Sambas, Insya Allah.

Sebagian besar program studi yang ada di IAIS Sambas telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), penjelasan lebih lengkap tentang hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG	IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI	PERINGKAT AKREDITASI
1.	Magister Pendidikan Agama Islam	S2	2017	Baik
2.	Magister Ekonomi Syariah	S2	2017	Baik
3.	Pendidikan Agama Islam	S1	2006	B
4.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	2014	Baik
5.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1	2014	B
6.	Pendidikan/Tadris Bahasa Indonesia	S1	2020	-

7.	Sejarah dan Peradaban Islam	S1	2011	B
8.	Ilmu Quran dan Tafsir	S1	2011	Baik
9.	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1	2014	Baik
10.	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	S1	2014	Baik
11.	Hukum Ekonomi Syariah	S1	2011	Baik
12.	Hukum Tata Negara	S1	2016	Baik
13.	Perbankan Syariah	S1	2011	Baik
14.	Ekonomi Syariah	D3	2016	Baik
15.	Manajemen Bisnis Syariah	S1	2020	-

Izin Pembukaan Program Studi dan Peringkat Akreditasi Program Studi di Lingkungan IAIS Sambas. Diambil dari Dokumen LPM IAIS Sambas, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa peringkat akreditasi dari sebagian besar program studi yang ada di IAIS Sambas telah menggunakan Instrumen Suplemen Konversi (ISK). ISK merupakan Instrumen Suplemen yang digunakan oleh BAN-PT untuk mengkonversi peringkat akreditasi Program Studi dari yang menggunakan 7 Standar kepada 9 Kriteria (Peraturan BAN-PT, 2020), namun masih terdapat beberapa program studi di IAIS Sambas yang masih menggunakan 7 Standar penilaian. Beberapa program studi tersebut saat ini telah mengajukan ISK dan sedang menunggu hasil konversi dari BAN-PT. Jika hasil tersebut telah keluar maka berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 2 (2020) terdapat tiga Program Studi yang ada di IAIS Sambas akan memiliki peringkat akreditasi Baik Sekali, Program studi tersebut yaitu S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Pendidikan Anak Usia Dini, dan S1 Sejarah dan Peradaban Islam.

Secara keseluruhan jumlah program studi yang ada di IAIS Sambas terus mengalami peningkatan, demikian juga secara kualitas yang diukur dari peringkat akreditasi secara perlahan tapi pasti juga terus ditingkatkan. Sejak berdiri tahun 2006 hingga sekarang tahun 2021 banyak terjadi perubahan nomenklatur yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan program studi, baik itu aturan dari Kementerian Agama maupun dari Internal IAIS Sambas, salah satunya yang berkaitan dengan nama program studi. Dari kelima belas program studi yang ada terdapat beberapa program studi yang mengalami perubahan nama sejak keluar izin penyelenggaraan hingga saat ini. Program studi tersebut yaitu Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam dimana pada saat keluar izin penyelenggaraan pertama kali pada tahun 2011 memiliki nama Sejarah dan Peradaban Islam namun pada saat perpanjangan izin penyelenggaraan pada tahun 2013 berganti nama menjadi sejarah dan Kebudayaan Islam, namun tiga tahun kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Rektor IAIS Sambas Nomor 022 (2016), program studi tersebut berubah nama kembali menjadi Sejarah dan Peradaban Islam sebagaimana izin penyelenggaraan pertama kali pada tahun 2011.

Program studi berikutnya yaitu Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dimana berdasarkan izin penyelenggaraan pertama kali tahun 2014 memiliki nama Pendidikan Guru Raudhatul Athfal. Namun pada saat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tahun 2016, program studi tersebut berganti nama menjadi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (Keputusan Ditjen Pendis, 2016). Hal tersebut sama halnya dengan Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang juga mengalami perubahan nama pada

perpanjangan izin penyelenggaraan dalam keputusan yang sama dengan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada tahun 2016. Program Studi tersebut awalnya memiliki nama Bimbingan dan Konseling Islam dan sejak tahun 2016 hingga sekarang tahun 2021 berganti nama menjadi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

Limabelas program studi mulai dari Diploma Tiga hingga Program Magister Sambas telah dihadirkan oleh IAIS selama lima belas tahun keberadaannya di Kabupaten Sambas. Semoga sumbangsih IAIS Sambas terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Sambas dapat menjadikan Sambas berdaulat dimata bangsa dan negara serta dunia. Semoga ini juga menjadi catatan amal jariyah bagi para pendiri dan seluruh civitas akademika IAIS Sambas, Aamiin.

D. Penutup

Sebagai sebuah perguruan tinggi yang berkembang, IAIS Sambas terus melakukan upaya-upaya dalam memperluas disiplin ilmu melalui pembentukan serta penggabungan fakultas serta prodi di lingkungan IAIS Sambas. Ini adalah langkah yang dilakukan agar IAIS Sambas dapat menjadi sebuah perguruan tinggi yang memiliki disiplin ilmu yang komplit. Kemudian dari 15 program studi, seluruh program studi yang ada di IAIS Sambas telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), menandakan kelayakan dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, H. (2018). Proses Pendidikan/Pembelajaran. *Raudhah Proud To Be Professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 3(1), 19-27.
- Fakultas. (5 Desember 2020). Diakses 26 April 2021, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Fakultas>.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.II/197/2006. (2006). *Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas dan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Sarjana (S1) yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat*. Jakarta. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/200/2010. (2010). *Persejutan Alih Status Perguruan tinggi Agama Islam Swasta*. Jakarta. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/54/2011. (2011). *Izin Pembukaan Program Studi Strata Satu (S.1) atau Diploma (D.3) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta*. Jakarta. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor: Dj.I/1874/2011. (2011). *Izin Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS)*. Jakarta. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3178 Tahun 2014. (2014). *Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*. Jakarta. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3536 Tahun 2014. (2014). *Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta*. Jakarta. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4957 Tahun 2016. (2016). *Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin*

Sambas. Jakarta. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5374 Tahun 2016. (2016). *Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Program Sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta*. Jakarta. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4896 Tahun 2017. (2017). *Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana dan Magister Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta*. Jakarta. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2020. (2020). *Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana Tadris Bahasa Indonesia pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*. Jakarta. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 226 Tahun 2020. (2020). *Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana Manajemen Bisnis Syariah pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*. Jakarta. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.

Kuntoro, S.A. (18 Oktober 2011). *Pendidikan dalam Kehidupan dan Untuk Perbaikan Kehidupan*. Makalah dipresentasikan. Seminar Nasional Prodi Ilmu Pendidikan Program Doktor PPs UNY, Yogyakarta.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3389 Tahun 2013. (2013). *Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam*. Jakarta. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.

LPM IAIS Sambas. (2022). Informasi Akreditasi Institusi Dan Program Studi IAIS Sambas. Diakses 15 Maret 2022, dari <http://Lpm.Iaisambas.Ac.Id/>
<http://lpm.iaisambas.ac.id/akreditasi/>

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020. (2020). *Instrumen Suplemen Konversi*.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. (2020). *Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1(9)*.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018. (2018) *Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi, Pasal 1 (1)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010. (2010). *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bab 1 Pasal 1 (22)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. (2014). *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 1 butir 13*.
- Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan IAIS Sambas Nomor: 180/5/SETDA-KESRA/2018 dan Nomor: 064/ADM.02/IAIS-SBS/II/2018. (2018). *Kerjasama Bantuan Pendidikan Program Magister*. Sambas. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.
- Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan IAIS Sambas Nomor: 180/6/SETDA-KESRA/2018 dan Nomor: 065/ADM.02/IAIS- SBS/II/2019. *Kerjasama Bantuan Pendidikan Program Doktor*. Sambas. Diunduh dari <https://www.iaisambas.ac.id/pendirian/>.
- Perjanjian Kerjasama Antara Kepala UPT Bahasa Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas Nomor: 39/H22.17/PB/2009.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20. tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 (1)*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 33 (1-2)*.
- Sejarah. (2019). *Situs Resmi IAIS Sambas*. Diakses 22 Mei 2021, dari <https://www.iaisambas.ac.id>.
- Sulistiyono, T. (2003). *Modul Umum Wawasan Pendidikan: Modul Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama DEPDIKNAS.

- Surat Hasrat untuk Kerjasama antara Universitas Kebangsaan Malaysia dengan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia. (2017).
- Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Nomor: 022 Tahun 2016. (2016). *Perubahan Nomenklatur Fakultas dan Program Studi di lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 2016*. Sambas.
- Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Nomor: 004 Tahun 2020. (2020). *Tim Pembukaan Program Studi Baru Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun 2020*. Sambas.
- Universitas Negeri Yogyakarta. (2021). Peta Jalan Pendidikan Indonesia. *Website Resmi Staff Universitas Negeri Yogyakarta*. Diakses 26 April 2021, dari <http://staffnew.uny.ac.id>.

PENGEMBANGAN DAN INOVASI KURIKULUM: DISTINGSI KAJIAN KEILMUAN DAN KEISLAMAN BERWAWASAN LINTAS NEGARA

Sumar'in dan Aslan

A. *Pendahuluan*

Perkembangan lembaga pendidikan Islam yang terjadi di Asia Tenggara tidak terlepas dari pengaruh pola pikir Timur Tengah dan Eropa sehingga seiring dengan perjalanan waktu telah mempengaruhi kurikulum yang ada di Indonesia. Kurikulum yang pada awalnya belum dikenal dalam dunia pendidikan karena hanya digunakan untuk berolahraga bagi pelari dengan mempunyai pengertian sebagai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan seperti yang kita kenal saat ini.

Kurikulum adalah segala sesuatu yang diajarkan oleh lembaga pendidikan kepada anak didiknya, dari jenjang tingkat kanak-kanak (TK, PAUD) dasar, menengah pertama, menengah atas sampai kepada perguruan tinggi. Dalam pengertian lain menurut pakar pendidikan (Hasan, 1998) kurikulum bisa dipahami dari 4 perspektif, yang selanjutnya menyimpulkan makna kurikulum ini bukanlah sesuatu yang baku dan absolut, akan menjadi lebih beragam dan dinamis artinya ketika memaknai dan mendefinisikan kurikulum dapat dilihat dari bermacam sudut pandang. Keempat perspektif kurikulum ini meliputi: (1) kurikulum menjadi suatu ide atau gagasan, (2) kurikulum sebagai rencana tertulis yang selanjutnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide, (3) kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita

atau implementasi kurikulum, (4) Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan.

Pada awalnya, ketika Islam mengalami perkembangan dengan menampilkan lembaga pendidikan Islam yang cukup banyak, seperti pondok pesantren, madrasah dan lembaga Islam lainnya kurikulum hanyalah sebatas mata pelajaran yang diajarkan tanpa adanya bukti selesai yang dibuktikan dengan selembar ijazah. Para santri dan santriwati hanya menuntut ilmu, bukanlah bertujuan untuk dunia, tetapi tujuan untuk akhirat dan sebagai salah satu kewajiban bagi umat Islam. Belajar hanyalah sebatas keingintahuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, dalam artian kepuasan tersendiri.

Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, maka pendidikan di Indonesia mengalami politik etis, baik dari ketentuan Belanda maupun Jepang sehingga mengakibatkan kurikulum di Indonesia ikut juga mengalami perubahan, walaupun masih ada pondok pesantren yang mempertahankan kurikulumnya sendiri tetapi tidak mendapat bantuan dari Belanda (Mujiburrahman, 2006); (Aisyah, 2018); (Steenbrink, 1994); Aslan & Hifza, 2019; Suhardi et al., 2020). Kurikulum pondok dan madrasah mengalami perubahan sesuai keinginan dengan Belanda. Apabila tidak mengikuti keinginan Belanda, maka sekolah tidak sama sekali mendapatkan dana dari pemerintah Belanda. Oleh karena itu, dampak dari sistem penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia, maka hasil lulusan sudah mulai diakui dengan sistem ijazah. Pada saat sistem ijazah dilakukan, maka lembaga pendidikan formal dan Islam masing-masing memberikan ijazah kepada anak didik yang telah selesai sekolah, baik dari jenjang dasar maupun jenjang tingkat selanjutnya yang sampai sekarang masih

dilaksanakan. Rata-rata untuk melangsungkan pendidikan sampai perguruan tinggi tidak terlepas dari ijazah sebagai syarat untuk menjadi seorang mahasiswa. Untuk menjadi seorang mahasiswa maka tidak terlepas dari sebuah lembaga perguruan tinggi yang diakui oleh negara, baik perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam UUD 1945, sejalan dengan visi misi kemerdekaan yang didapatkan oleh Indonesia, pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia tanpa terkecuali, sehingga di masa Indonesia merdeka sampai era reformasi ini, mahasiswa mengalami pelonjakan yang luar biasa (Tosepu, 2018). Bahkan, ketika sistem Belanda datang ke Indonesia dengan mengenalkan sistem perguruan tinggi tetapi hanya dinikmati oleh kelas-kelas sosial tertentu, tetapi pengenalan tersebut menjadi awal Indonesia mengenal sistem pendidikan perguruan tinggi (Murniatmo, 1982).

Perguruan tinggi mengalami perkembangan ke seluruh wilayah Indonesia yang tidak terkecuali juga di wilayah perbatasan Indonesia yaitu Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas yang terletak di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia membuka peluang bagi kesempatan siswa-siswi yang selesai pada tingkat sekolah menengah atas untuk melanjutkan perguruan tinggi (Aslan, 2019). Walaupun, pada awalnya perguruan tinggi di Sambas masih dalam tahap pendirian dan masih belum berdiri sendiri karena masih merupakan STAIN Pontianak Filial Sambas, namun pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sudah terlaksana dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Sambas beserta masyarakatnya sangat mendambakan adanya perguruan tinggi di Sambas, agar bagi yang tidak mampu untuk kuliah di luar Sambas, misalnya Singkawang, Pontianak,

Jawa dan daerah lainnya, dapat merasakan menjadi mahasiswa walaupun kuliah di Sambas. Dengan adanya kehadiran perguruan tinggi di Sambas dapat membuka peluang bagi masyarakat kategori strata sosial ke bawah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sampai Perguruan Tinggi. Namun, ketika perguruan tinggi di Sambas sudah disetujui oleh Pemerintah untuk berdiri pada waktu itu, maka hal utama yang harus dilakukan adalah pembenahan sumber daya manusia karena tenaga pengajar yang rata-rata masih Sarjana (S1) serta merancang kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi daerah serta kebutuhan pasar/dunia kerja.

Dengan demikian, dibutuhkan pengembangan dan inovasi kurikulum yang *up to date* sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika perguruan tinggi Islam di Sambas yang telah dirintis sejak tahun 2002 sampai saat ini dengan empat kali mengalami perkembangan dan perubahan bentuk kelembagaan. Tahun 2002, IAIS Sambas sekarang ini masih merupakan Filial dari STAIN Pontianak. Kemudian, tahun 2006 IAIS Sambas telah mendapatkan izin operasional menjadi perguruan tinggi mandiri dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas. STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di bawah Yayasan Pendidikan Islam dan di bawah Yayasan Akhlaqul Karimah pada tahun 2009. Kemudian, STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas berubah kembali di tahun 2010 dengan status Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Seiring dengan bertambahnya program studi, maka pada tahun 2014 STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS)

Sambas. Ketika perubahan bentuk STIT, STAI dan IAIS maka kurikulum ikut juga mengalami perubahan.

Kajian ini untuk melihat lebih jauh tentang perubahan kurikulum di IAIS Sambas dari sejak berdiri sampai perubahan bentuk menjadi IAIS Sambas sekarang. Dimulai kurikulum KBK sampai dengan KKNI serta distingsi (keunikan) dan ekxelensi (keunggulan) dalam kajian keilmuan dan keislaman berwawawasan lintas negara. Perubahan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi yaitu melalui penyelarasan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Jadi wajar, kehadiran kurikulum di Perguruan Tinggi dengan perubahan-perubahan yang dialaminya sesuai dengan perkembangan teknologi dalam peradaban kehidupan manusia.

B. *Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi*

Kurikulum adalah jalan roda pendidikan yang ingin dicapai bagi setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia termasuk kurikulum perguruan tinggi di Indonesia, baik swasta maupun negeri. Namun, setiap jenjang pendidikan memberikan warna dan corak yang beragam dari kurikulum yang diajarkan kepada setiap peserta didik, termasuk kurikulum dari *extrakurikuler* dan *hidden* kurikulum yang telah disediakan setiap jenjang pendidikan. Perbedaan ini juga memberikan keragaman dari mata kuliah yang diajarkan, termasuk adanya *hidden* kurikulum yang ada di setiap perguruan tinggi.

Disatu sisi, kurikulum pada setiap jenjang pendidikan adalah sama, masing-masing mempunyai empat tujuan komponen, yakni

tujuan, isi/bahan, materi, metode dan evaluasi. Kurikulum perguruan tinggi juga mempunyai empat komponen, yakni *pertama*, capaian pembelajaran atau kompetensi apa saja yang dikuasai oleh mahasiswa. *Kedua*, mata kuliah yang disampaikan agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran atau kompetensi. *Ketiga*, mata kuliah yang disampaikan dapat dikuasai dengan baik oleh mahasiswa dan *Keempat*, bagaimana cara untuk mengetahui apa yang disampaikan sudah dikuasai oleh siswa atau belum (Nurdin, 2018).

Hadirnya perguruan tinggi di Indonesia dengan perubahan kurikulum-kurikulum yang ada tidak dapat dilepaskan dari tiga tujuan; *pertama*, untuk mengkaji Islam pada tingkat tinggi agar lebih terarah. *Kedua*, untuk melakukan pengembangan dan peningkatan dakwah Islam agar dapat lebih dipahami oleh kalangan umat manusia, khususnya mahasiswa. *Ketiga*, untuk melakukan reproduksi dan kaderisasi ulama pada bidang-bidang keagamaan Islam (Ali, 2012). Namun, perjalanan pendidikan tinggi di Indonesia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena ada beberapa tantangan sehingga kurikulum pendidikan tinggi ikut juga mengalami perubahan sebagaimana jenjang pendidikan rendah, menengah pertama dan menengah atas.

Perjalanan sejarah kurikulum pendidikan tinggi yang dihitung sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, kurikulum pendidikan tinggi dari tahun 1947, 1952, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013, telah mengalami perubahan (Aslan, 2019; Aslan, 2016; Aslan & Wahyudin, 2020). Dampak dari perubahan kurikulum tersebut tidak terlepas dari faktor sosial, ekonomi, budaya dan juga politik, sehingga faktor tersebut memberikan perubahan juga dari model kurikulum

termasuk juga perubahan kurikulum di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Faktor yang paling utama dari perubahan kurikulum adalah tidak terlepas dari perubahan tantangan teknologi yang dialami oleh umat manusia.

Kurikulum di perguruan tinggi adalah sebagai wadah bagi dosen dalam menyampaikan mata kuliah kepada mahasiswa untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan di masyarakat (Ali, 2012; Digidowiseiso, 2020; Gat et al., 2021). Dari sisi sejarahnya, kurikulum perguruan tinggi di Indonesia telah mengalami perubahan sejak tahun 1994, melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 056/U/1994 tentang pedoman penyusunan kurikulum di perguruan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Orientasinya lebih kepada penguasaan IPTEKS sehingga disebut kurikulum berbasis isi (KBI). Kurikulum model kurikulum ini juga menetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Kurikulum KBI mengalami perubahan di tahun 2000 atas amanah UNESCO dengan konsep empat pilar pendidikan; *“learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together”*. Rekonstruksi kurikulum KBI menjadi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) (Kaimuddin, 2015; Sulalah, 2006).

Rekomendasi kurikulum perguruan tinggi untuk menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan tujuan untuk meningkatkan hasil lulusan mahasiswanya yang dianggap masih banyak ketertinggalan dengan perguruan tinggi di luar negeri, sehingga perlu adanya perubahan yang melihat empiri pilar tersebut. Saran UNESCO diterima dengan lapang dada oleh pemerintah Indonesia sehingga

untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia di perguruan tinggi, maka diadakan perubahan kurikulum berbasis kompetensi.

Kompetensi dari ketentuan KEPMENDIKNAS No. 045/U/2002, adalah “seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu” (Anih, 2015). Menurut Depdiknas, kurikulum berbasis kompetensi mempunyai karakteristik sebagai berikut; *pertama*, menekankan pada kecakapan kompetensi bagi mahasiswa, baik secara individu maupun klasikal. *Kedua*, orientasi pada hasil belajar dan keberagaman. *Ketiga*, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi dan beragam. *Keempat*, sumber belajar bukan hanya tergantung kepada dosen tetapi media yang lain yang mengandung unsur edukatif. *Kelima*, penilaian dari proses hasil belajar lebih menekankan kepada kompetensi. Kemudian, karakteristik pembelajaran dari kurikulum berbasis kompetensi adalah; sistem belajar dengan menggunakan modul, menggunakan keseluruhan sumber belajar, pengalaman lapangan, strategi belajar individual personal, kemudahan belajar dan belajar tuntas (Suteja, 2017). Hampir segala-galanya untuk meningkatkan hasil mutu lulusan perguruan tinggi dengan menetapkan kurikulum berbasis kompetensi adalah bertujuan untuk menghasilkan hasil lulusan masing-masing mempunyai kompetensi dari ciri khas dari prodi yang ada di perguruan tinggi.

Selain itu juga, kompetensi yang diinginkan bukan hanya sekedar kompetensi tetapi mempunyai nilai jual sehingga ketika mahasiswa selesai kuliah langsung mendapatkan pekerjaan sesuai

dengan bidang keahlian yang diambil. Oleh karena itu, untuk menyiapkan kompetensi kepada mahasiswa maka kurikulum KBK terdiri dari kurikulum inti dan institusional (Kaimuddin, 2015; Hasugian, 2008). Kurikulum inti dan institusional masing-masing mempunyai perbedaan dari kompetensi setiap prodi yang ada di perguruan tinggi dan menjadi ciri khusus bagi perguruan tinggi pada khususnya.

Kurikulum KBK dari ciri khas lulusan prodi, maka kurikulum nasional yang disusun mencakup lima kelompok, diantaranya: 1) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK); 2) Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK); 3) Mata Keahlian Berkarya (MKB); 4) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB); dan 5) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) (Qurtubi, 2019). Cakupan kurikulum nasional dari lima kompetensi yang diharapkan bagi lulusan mahasiswa di perguruan tinggi terdiri dari kemampuan *soft skills* dan *hard skills*.

Kemampuan *soft skill* diantaranya: inisiatif, etika/integritas, berpikir kritis, kemauan belajar, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandalkan, komunikasi lisan, kreatif, manajemen diri, menyelesaikan persoalan, dapat meringkas, berkooperasi, fleksibel, kerja dalam tim, mandiri, mendengarkan, tangguh dan berargumen logis. Sementara, kemampuan *hard skills* adalah kompetensi berkomunikasi, jujur/integritas, kerjasama, interpersonal, beretika, motivasi/inisiatif, beradaptasi, daya analisis, berkomputer, berorganisasi, berorientasi pada detail, kepemimpinan, kepercayaan diri, ramah, sopan, bijaksana, indeks prestasi, kreatif, humoris dan berwirausaha. Sementara, pada kompetensi (Anih, 2015; Febriyanti, 2013). Jika perguruan tinggi agama Islam, maka ciri khas yang paling

menonjol dari hasil lulusannya adalah tidak terlepas dari pandangan hidup yang bernafaskan Islam. Bahkan, jika dari prodi keguruan, maka mahasiswa sudah dibekali dengan kompetensi professional, kepribadian, sosial, dan pedagogik (Hanafi, 2014).

Dengan demikian, adanya perubahan kurikulum pada perguruan tinggi adalah untuk melihat lebih jauh terhadap nilai jual bagi lulusan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi wajar, setiap perguruan tinggi, baik negeri dan swasta yang ada di Indonesia masing-masing mempunyai kompetensi yang sama dari program studi yang diambil oleh mahasiswa dan masing-masing mempunyai perbedaan dari perguruan tinggi yang diambil. Jika kurikulum hanyalah sebatas mendidik kepada mahasiswa tanpa menyiapkan bekal dalam dunia kerja, maka tidak akan adanya regenerasi bagi generasi-generasi selanjutnya.

C. Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kurikulum tidak terlepas dari tantangan sehingga dari tantangan tersebut mengakibatkan kurikulum mengalami perubahan. Perubahan yang begitu cepat dengan waktu yang begitu singkat yang telah dialami oleh manusia, sehingga Toffler, (1970; Toffler, (1980), telah memetakan perubahan melalui tiga tahapan, yakni masa pertanian, industri dan informasi. Di era informasi dikenal dengan kecanggihan internet (Mujiburrahman, 2017). Perubahan itu juga, telah mengubah paradigma kurikulum berbasis kompetensi menjadi mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Perubahan itu juga untuk memperbaharui Kurikulum berbasis

kompetensi yang masih dianggap mempunyai banyak mempunyai kekurangan sehingga perlu ditingkatkan kembali dari hasil lulusannya.

Sebelum kurikulum perguruan tinggi mengacu kepada KKNI, maka implementasi kurikulum KBK masih kategori kurikulum PIPK (Penguasaan Isi Pengetahuan dan Keterampilan) yang masih berkuat pada pedoman SK Mendiknas No. 056/U/1994. Kendala utama dari pengimplentasian kurikulum KBK adalah: *pertama*, KBK belum sepenuhnya dipahami oleh perguruan tinggi, dosen dan civitas akademika. *Kedua*, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perguruan tinggi. *Ketiga*, memerlukan waktu yang lama untuk mewujudkannya (Anih, 2015). Walaupun, kurikulum KBK masih mengalami sisi kelemahan, tetapi dalam hal perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang, sehingga acuan kurikulum KBK tidaklah lagi sesuai untuk mahasiswa di zaman era informasi saat ini.

Oleh karena itu, perkembangan dari setiap teknologi yang dimiliki manusia dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi tergantung dari mahasiswa ketika telah menyelesaikan perkuliahan yang dibuktikan dengan ijazah yang dimilikinya. Apabila, mahasiswa tidak urgen melihat perkembangan zaman dari kemampuan yang dimilikinya, maka bukti selebar ijazah tidak akan mampu untuk mengantarkan mahasiswa dalam bidang kerja.

Mahasiswa harus mampu memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman untuk mencari informasi dari literasi yang dihasilkan oleh teknologi, baik melalui media maya maupun media cetak (Hasugian, 2008). Akan tetapi itu semua, sejak adanya perubahan kurikulum perguruan tinggi sampai sekarang masih menuai persoalan dan masalah sehingga permasalahan tersebut bukanlah melanjutkan

kurikulum yang ada tetapi mengganti kurikulum yang baru, yang dikenal dengan kurikulum berbasis KKNI.

KKNI sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 dan UU Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012, KKNI adalah singkatan dari “*Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia* atau *Indonesian Qualification Framework*. Sementara, KKNI secara tersendiri adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang dan pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Suwadi, 2017).

Tahapan-tahapan dalam pengembangan kurikulum berbasis KKNI adalah menetapkan profil lulusan sekaligus merumuskan kompetensi dari profil lulusan. Sesuai dengan ketentuan SK Mendiknas 045/U/2002, kompetensi lulusan sebagai kompetensi utama dari ciri program studi dan ciri kompetensi di perguruan tinggi (Suteja, 2017). Tahapan-tahapan perumusan KKNI; *pertama*, rumusan profil lulusan Prodi mesti dapat menjawab pertanyaan; “Program Studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa? Dan peran apa yang dapat dilakukannya di masyarakat setelah lulus?. *Kedua*, menetapkan dan menentukan capaian pembelajaran atau kompetensi. *Ketiga*, memilih dan menetapkan bahan kajian yang akan dipelajari, yang dapat dikelompokkan; inti keilmuan Program Studi, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung, ilmu pengetahuan dan teknologi pelengkap, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan, iptek masa depan dan iptek sebagai penciri dari perguruan tinggi bersangkutan (Nurdin, 2018).

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 73 tahun 2013, telah juga mengharuskan untuk perguruan tinggi, sekolah tinggi, institut maupun juga universitas untuk melaksanakan kurikulum KKNI selambat-lambatnya tahun 2016/2017. Bahkan ketetapan tersebut wajib untuk dilaksanakan dan bagi perguruan tinggi yang tidak melaksanakannya maka tidak diakui sebagai alumni perguruan tinggi (Suwadi, 2017).

Pertimbangan dalam menetapkan SKS adalah: (1) kedalaman materi (merupakan wujud dari kompetensi mata kuliah); (2) keluasan materi (merupakan wujud dari banyak/luasnya kajian yang diperlukan); (3) strategi pembelajaran; dan (4) berbanding secara proporsional terhadap keseluruhan SKS yang ditetapkan oleh program studi, misalnya S1 berjumlah 144 SKS) (Suteja, 2017).

D. Refleksi Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum KKNI: Tinjauan bagi IAIS Sambas

Pengembangan Pendidikan tinggi merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan suatu bangsa hingga ketingkat daerah. Melalui hadirnya pendidikan tinggi secara otomatis memacu kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan pendidikan tinggi harus terus dilakukan selaras, beradaptasi dengan tuntutan kebutuhan perkembangan zaman. Salah satu bagian terpenting dari sistem pengembangan pendidikan tinggi yang menjadi fokus perhatian untuk senantiasa disesuaikan dan ditingkatkan kualitasnya adalah kurikulum.

Menurut Popham, kurikulum adalah pernyataan mengenai tujuan. Sedangkan menurut Tanner kurikulum adalah suatu rencana tertulis. Olivia lebih menekankan, bahwa kurikulum adalah perangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dan kurikulum ini sangat fundamental dan menggambarkan posisi sesungguhnya suatu proses pendidikan (TPIP, 2007). Hal senada dinyatakan oleh Hasan (2013), bahwa kurikulum adalah kebijakan pendidikan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan merupakan jawaban terhadap masalah yang dihadapi bangsa.

Refleksi peninjauan terhadap kurikulum menjadi penting untuk selalu dilakukan sebagai upaya untuk meng-update dan menyesuaikan dengan tuntutan global. Mengutip pendapat Mulyatiningsih (2012), refleksi merupakan pengkajian dan pemotretan terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu upaya tertentu dalam mencapai tujuan guna menetapkan tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan. Dalam konteks tulisan ini, upaya yang dimaksud adalah implementasi kurikulum dan atau sistem kurikulum di IAIS Sambas.

IAIS Sambas pada dasarnya adalah Perguruan Tinggi Keagamaan di bawah payung Kementerian Agama RI yang secara akademik mengacu kepada sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap jenis dan jenjang pendidikan formal, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan, dalam rangka memikul tugas dan tanggung jawab mewujudkan pembangunan masyarakat yang religius dan beradab. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Sambas yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan agama Islam.

Semenjak hadir dan berdiri di pusat kota Kabupaten Sambas, cikal bakal IAIS Sambas (baca: sekarang) masih merupakan kelas jauh (filial) dari STAIN Pontianak. Hal ini menjadikan, kurikulum yang diimplementasikan di kelas Sambas mengacu pada Kurikulum di STAIN Pontianak yang menerapkan Kurikulum berbasis KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Hal ini mengacu pada Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002, meskipun masih tetap terjadi beragam pemahaman dalam implementasi kurikulum ini dalam proses pembelajarannya.

Upaya mendorong hadirnya perguruan tinggi Islam yang independen dan berdiri sendiri di Kabupaten Sambas terwujud pada tahun 2006. Atas dorongan dan upaya semua pihak tepat di bulan juni tahun 2006 kementerian Agama Republik Indonesia memberikan izin operasional untuk berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas. Awalnya STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas adalah lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di bawah Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS), sampai pada tahun 2009 perubahan pengelolaan yayasan di bawah Yayasan Akhlaqul Karimah, adapun kurikulum yang digunakan oleh STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas pada saat itu masih berbasis kurikulum KBK.

Menurut Saylor (1981), menyatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi sebagai *"...a design based on specific competencies is characterized by specific, sequential, and demonstrable learning of the task, activities, or skill which constitute the acts to be learned and performed by student"*. Lebih lanjut Eve Krakow (2003) mengemukakan bahwa pengajaran berbasis kompetensi adalah keseluruhan tentang

pembelajaran aktif (*active learning*) dimana guru atau dosen membantu siswa atau mahasiswa untuk belajar bagaimana belajar dari pada hanya mempelajari isi (*learn how to learn rather than just cover content*).

Sedangkan Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas (2002), mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai mahasiswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum ini berorientasi pada: (1) hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, dan (2) keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Penerapan KBK berorientasi pada pembelajaran tuntas (*mastery learning*).

Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada mengeksplorasi kemampuan/potensi peserta didik secara optimal, mengkonstruksi apa yang dipelajari dan mengupayakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum berbasis kompetensi berupaya mengkondisikan setiap peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sehingga proses penyampaian harus bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, lingkungan, sumber daya, norma, integrasi dan aplikasi berbagai kecakapan kinerja, dengan kata lain KBK berorientasi pada pendekatan konstruktivisme.

Seiring bertambahnya program studi baru dan pengembangan kelembagaan pada tahun 2010 STIT Sulthan Muhammad Syafiuddin

Sambas beralih status menjadi STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, selanjutnya pada tahun 2014 berubah bentuk menjadi IAIS Sambas.

Semangat serta diskusi pengembangan untuk perubahan kurikulum di lingkungan IAIS Sambas mulai terasa pada awal tahun 2015. Bahwa kurikulum adalah instrumen yang sangat penting dalam mencetak lulusan. Kurikulum adalah instrument yang paling pokok untuk mencetak lulusan, sehingga program kurikulum seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Mencermati terbitnya Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. Hadirnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Ringkas KKNI menuntut adanya standarisasi yang terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia.

Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan

uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan “kemampuan lulusan” digunakan istilah capaian pembelajaran. Di samping hal tersebut, di dalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah “*learning outcomes*”.

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Berdasarkan rumusan ‘capaian pembelajaran’ tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan

Diskusi pengembangan dan perubahan kurikulum terus bergeliat bak bola salju di lingkungan akademi IAIS Sambas, seiring dengan perubahan bentuk dan pengembangan lembaga, tuntutan perubahan kurikulum juga terus dilakukan dan benar-benar terasa. Puncaknya pada bulan juli 2018, diselenggarakan sosialisasi Kurikulum berorientasi KKNI dalam upaya penyesuaian kebutuhan pendidikan tinggi dan pasar global. Tepat di semester Ganjil tahun akademik

2018/2019, IAIS Sambas secara serentak di semua program studi menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum berorientasi KKNI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dijelaskan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, namun demikian pada pembahasan selanjutnya harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya. Hal ini memberikan peluang dalam pengembangan pengkajian yang lebih luas sesuai dengan visi misi IAIS Sambas yang berada di wilayah perbatasan negara kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa hal yang penting yang perlu kami berikan pengertian dalam pemahaman penerapan kurikulum berorientasi KKNI di IAIS Sambas meliputi:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di lingkungan IAIS Sambas.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dalam hal ini IAIS Sambas dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang

mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1)

4. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): a. Agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi yang diterapkan di IAIS Sambas.
7. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam

kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

9. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

Diterapkannya kurikulum berbasis KKNI ini diharapkan akan mampu memperbaiki kompetensi lulusan, tidak lagi semata ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan KKNI di IAIS Sambas melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan *Learning Outcomes*, Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian, Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusunan Rencana Perkuliahan. Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya.

Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Rambu-rambu yang harus dipenuhi serta diperhatikan agar pembelajaran berorientasi KKNI dapat maksimal diterapkan khususnya di lingkungan IAIS Sambas meliputi:

1. *Learning outcomes*
2. Jumlah sks
3. Waktu studi minimum
4. Mata kuliah wajib: untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum
5. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
6. Akuntabilitas asesmen
7. Kedepan perlunya *diploma supplement* (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip).

E. *Distingsi Kajian Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara*

Kehadiran perguruan tinggi di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia khususnya Kabupaten Sambas mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan bangsa dan memperkokoh jiwa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Oleh karena itu, IAIS Sambas sebagai Perguruan Tinggi pertama di Kabupaten Sambas yang pada awalnya hanya merupakan Kelas Filial (Cabang) dari STAIN Pontianak (saat ini sudah menjadi IAIN Pontianak) mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan daerah khususnya dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena tiap tahun meluluskan ratusan mahasiswa yang siap mengabdikan untuk membangun masyarakat sampai ke desa-desa.

IAIS Sambas sebagai sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dapat menjadi pionir moderasi beragama dalam upaya menangkal radikalisme dan intoleransi di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia. Di samping itu dilihat dari visinya "Menjadi Perguruan Tinggi Rujukan Dalam Pengembangan Keilmuan dan Keislaman

Berwawasan Lintas Negara Bagi Kemajuan Peradaban di Asia Tenggara”, IAIS Sambas memiliki harapan besar untuk menjadi *World Class Islamic University* khususnya di kawasan Asia Tenggara. Sehingga fokus dan orientasi pengembangan tri dharma perguruan tinggi di IAIS Sambas diarahkan pada kajian Islam Asia Tenggara. Hal tersebut dapat tergambar dari mata kuliah-mata kuliah yang berwawasan lintas negara pada setiap program studi di lingkungan IAIS Sambas seperti Mata Kuliah: Studi Islam Asia Tenggara (wajib di seluruh prodi), Pendidikan Islam Lintas Negara (Pendidikan Agama Islam)), Sosial Ekonomi Perbatasan (Ekonomi Syariah), Hukum Perbatasan Darat Antar Negara (Hukum Tatanegara), Hukum Ekonomi Internasional (Hukum Ekonomi Syariah), Komunikasi Internasional dan Diplomasi (Komunikasi dan Penyiaran Islam), Sejarah Islam Asia Tenggara (Sejarah dan Peradaban Islam), Manajemen Bisnis Internasional (Manajemen Bisnis Syariah), Manajemen Ekspor-Import (Magister Ekonomi Syariah). Selain itu, tema penelitian dosen dan mahasiswa serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh para dosen semuanya berorientasi wawasan lintas negara. Hal tersebut merupakan sebuah keunikan (distingsi) dan keunggulan (ekselensi) di IAIS Sambas yaitu Kajian Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara.

F. Penutup

Pengembangan dan inovasi kurikulum pada Perguruan Tinggi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah serta perkembangan zaman. Apa yang sudah dilakukan oleh IAIS Sambas terkait dengan pengembangan dan inovasi kurikulum sudah sangat

tepat karena menyesuaikan dengan kondisi geografis di wilayah perbatasan antar negara serta memenuhi tuntutan pasar kerja di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut wajar karena orientasi kerja masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia khususnya Kabupaten Sambas adalah bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, selain memiliki distingsi dalam kajian keilmuan dan keislaman berwawasan lintas negara, IAIS Sambas membekali mahasiswa dengan berbagai kajian yang terkait dengan penguatan moderasi beragama dalam upaya untuk menangkal radikalisasi dan intoleransi serta memperkokoh jiwa nasionalisme mahasiswa untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Salam Pancasila !!!

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2018). *Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Kiprah Sosial Dan Kiprah Akademik Alumni IAIN Antasari Banjarmasin* [Disertasi tidak diterbitkan]. UIN Antasari Banjarmasin.
- Ali, N. (2012). Paradigma Kurikulum Program Studi Umum Pada Perguruan Tinggi Agama Islam. *Madrasah*. <https://doi.org/10.18860/jt.v0i0.2185>
- Anih, E. (2015). Manajemen Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi Berbasis Kompetensi. *Judika (Jurnal Pendidikan Unsika)*, 3(1), Article 1. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/judika/article/view/196>
- Aslan. (2016). Pengembangan Kurikulum Ditinjau Dari Tingkat Kabupaten Sambas Pada Daerah Tertinggal di madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 41–49.
- Aslan. (2019a). *Hidden Curriculum*. Pena Indis. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=6VCNDwAAQB AJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=3MT1BpQ2Sr&sig=r234cqxo_z9ALakJc4V0XgZ_eHQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Aslan. (2019b, January 17). *Pergeseran Nilai Di Masyarakat Perbatasan (Studi Tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)* [Disertasi dipublikasikan]. Pasca Sarjana. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10997/>
- Aslan & Hifza. (2019). Kurikulum Pendidikan Masa Penjajahan Jepang Di Sambas. *Edukasia Islamika*, 4(2), 171–188. <https://doi.org/10.28918/jei.v4i2.2295>
- Aslan & Wahyudin. (2020). *Kurikulum Dalam Tantangan Perubahan*. Bookies Indonesia. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&cluster=17745790780728460138>
- Digdowniseiso, K. (2020). The Development Of Higher Education In Indonesia. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 9(2).
- Febriyanti, F. (2013). Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Globalisasi (Pergeseran Dari Kurikulum Inti dan Institusional Ke Kurikulum

Berbasis Kompetensi). *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(02), 294–327. <https://doi.org/10.19109/td.v18i02.51>

Gat, E. A., Warganegara, D. L., & Kosasih, W. (2021). The Influence of Online Learning on Students' Academic Achievement: Mediated by Collaborative Learning. *International Journal*, 10(1).

Hanafi, M. (2014). Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.572>

Hasugian, J. (2008). Urgensi Literasi Informasi Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi. *Pustaka*, 4(2), 34–44.

Kaimuddin, K. (2015). pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. *al-ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(1), 19–38. <https://doi.org/10.31332/atdb.v8i1.391>

Mujiburrahman. (2006). *Feeling Treated Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. University Press.

Mujiburrahman. (2017). *Agama Generasi Elektronik* (Cetakan Pertama). Pustaka Pelajar.

Murniatmo, G. (1982). *Prof. Dr. Soediman Kartohadiprodjo, SH*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Nurdin, S. (2018). Pengembangan Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (Rps) Berbasis KKNI di Perguruan Tinggi. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.31958/jaf.v5i1.813>

Qurtubi, A. (2019). *Bunga Rampai Manajemen Pendidikan Tinggi Islam Menata Ulang Pendidikan Tinggi Islam Menuju Pendidikan Bermutu (Sebuah Kajian dan Pemikiran Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia)*. Jakad Media Publishing.

Steenbrink, K. A. (1994). *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Terj. Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman (Cetakan II). LP3ES.

Suhardi, M., Mulyono, S., Aslan, Syakhrani, H. A. W., & Putra, P. (2020). Perubahan Kurikulum Lembaga Pendidikan Islam di Sambas pada Masa Kesultanan Sambas. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 034–048. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i1.2715>

- Sulalah, S. (2006). Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (Kbk) di Perguruan Tinggi Agama Islam (Studi Kasus di Fakultas Tarbiyah UIN Malang). *El-Qudwah*.
- Suteja, J. (2017). Model-Model Pembelajaran Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi KKNi Di Perguruan Tinggi (Perubahan Dari Teacher Centered Learning ke Arah Student Centered Learning). *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/edueksos.v6i1.1412>
- Suwadi, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(2), 223–252. <https://doi.org/10.14421/jpai.2016.132-08>.
- Toffler, A. (1970). *Future Shock*. Bantam Books.
- Toffler, A. (1980). *The Third Wave*. William Morrow and Company, INC.
- Tosepu, Y. A. (2018). *Arah Perkembangan Pendidikan Tinggi Indonesia*. Jakad Media Publishing.

MEMBANGUN MUTU DAN MENGAWAL PERKEMBANGAN

Serli dan Rifqi Muhammad

A. Pendahuluan

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi dan oleh Perguruan Tinggi, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi secara berkelanjutan. SPMI bersifat mandiri tanpa campur tangan atau instruksi dari Pemerintah; dan berkelanjutan.

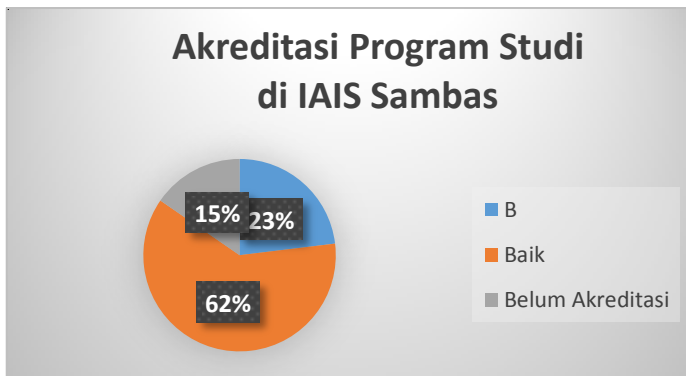
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah SNP ditambah standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi. IAIS Sambas dalam hal ini sudah menjalankan SPMI dan SPME. Kajian ini mendeskripsikan IAIS Sambas belajar menjadi Unggul melalui Akreditasi dan mendeskripsikan capaian Riset dan Publikasi serta PkM di IAIS Sambas.

B. Belajar Menjadi Unggul Melalui Akreditasi Institusi dan Program Studi

Penjaminan mutu di IAIS Sambas dilaksanakan dengan membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang bertanggungjawab menjamin mutu ditingkat Institusi dan sedangkan yang bertanggungjawab menjamin mutu di tingkat Unit Pelaksana Penjaminan Mutu (UPPS) adalah Unit Penjaminan Mutu (UPM) (IAIS Sambas, 2019a).

Adapun capaian peringkat akreditasi IAIS Sambas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Persentasi Akreditasi Program Studi di IAIS Sambas.
Diambil dari Dokumen LPM IAIS Sambas, 2022

Berdasarkan gambar di atas dari 15 program studi yang ada di IAIS Sambas ada: (1) dua prodi baru yang belum mengusul akreditasi dengan 15%; (2) ada tiga prodi yang mendapat peringkat B APS7 dengan 23%; (3) ada delapan prodi yang mendapat peringkat Baik (konversi ISK) dengan 62%. IAIS Sambas setelah mengusulkan ISK pada tahun 2021 memperoleh peringkat akreditasi Baik.

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG PENDIDIKAN	PERINGKAT AKREDITASI
1	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	PT	Baik
2	Magister Pendidikan Agama Islam	S2	Baik
3	Magister Ekonomi Syariah	S2	Baik
4	Pendidikan Agama Islam	S1	B
5	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	Baik
6	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1	B
7	Tadris/Pendidikan Bahasa Indonesia	S1	-
8	Sejarah dan Peradaban Islam	S1	B
9	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1	Baik
10	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	S1	Baik
11	Ilmu Quran dan Tafsir	S1	Baik
12	Hukum Ekonomi Syariah	S1	Baik
13	Hukum Tata Negara	S1	Baik
14	Ekonomi Syariah	S1	Baik
15	Manajemen Bisnis Syariah	S1	-
16	Perbankan Syariah	D3	Baik

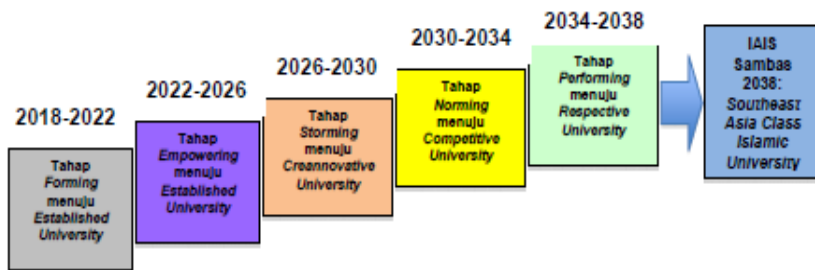
Peringkat Akreditasi
Diambil dari Dokumen LPM IAIS Sambas, 2022

NO	INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI	MASA BERLAKU
1.	IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Desember 2018 - Desember 2023
2.	S2-Magister Pendidikan Agama Islam	Desember 2019 - Desember 2024
3.	S2-Magister Ekonomi Syariah	Desember 2020 - Desember 2025
4.	S2-Magister Ekonomi Syariah	Juni 2021 - Desember 2025
5.	S1-Pendidikan Agama Islam	Januari 2011 - Januari 2016
6.	S1-Pendidikan Agama Islam	September 2014 - September 2019
7.	S1-Pendidikan Agama Islam	Mei 2020 - Mei 2025
8.	S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Juli 2015 - Juli 2020

9.	S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Desember 2020 - Desember 2025
10.	S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Juli 2021 - April 2026
11.	S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Juli 2015- Juli 2020
12.	S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Februari 2021 - Februari 2026
13.	S1-Hukum Ekonomi Syariah	Agustus 2014 - Agustus 2019
14.	S1-Hukum Ekonomi Syariah	April 2021 - April 2026
15.	S1-Hukum Tata Negara	Desember 2020 - Desember 2025

Masa Berlaku Akreditasi
Diambil dari Dokumen IAIS Sambas, 2022b

Capaian penjaminan mutu eksternal sejalan dengan milestone IAIS Sambas untuk tahun 2018-2020 sebagaimana gambar di bawah ini.



Milestone IAIS Sambas Tahun 2018-2038
Diambil dari Dokumen IAIS Sambas, 2019b

Tahap *forming* atau penataan (2018-2022) yang diarahkan menuju *Established University* dengan tujuan membangun institusi dengan tata kelola yang baik. Pada tahap ini, IAIS Sambas fokus pada penataan dan penguatan bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sarana dan manajemen.

Bercermin dari hasil *akreditasi* institusi dan program studi di atas dan merujuk pada milestone tersebut di atas menggambarkan capaian dari tahapan *Forming*. IAIS Sambas optimis pada akreditasi berikutnya dengan berpijak pada tahapan *Empowering* atau Penguatan bisa memperoleh akreditasi institusi minimal peringkat **Baik Sekali dan maksimal Unggul**. Tahap *Empowering* atau Penguatan (2022-2026) yang diarahkan menuju *Empowering University* dengan tujuan memperkuat tata kelola universitas menjadi lebih mapan. Pada tahap ini, IAIS Sambas fokus pada penguatan kelembagaan.

Melalui penjaminan mutu baik internal dan eksternal yang berkelanjutan sebenarnya IAIS Sambas terus belajar untuk menjadi kampus Unggul, bukan hanya Unggul di tingkat nasional bahkan Unggul di Asia Tenggara. Akreditasi ini juga sekaligus bukti pengakuan pihak luar atas kualitas pendidikan di IAIS Sambas. Apresiasi ini kami pandang sebagai amanah, kepercayaan yang harus dijaga dan terus ditingkatkan.

C. Riset dan Publikasi

Penelitian merupakan salah satu sub unsur wujud implementasi tri dharma pada setiap perguruan tinggi. Sebagai perguruan tinggi, IAIS Sambas beritikad besar menjadi pusat keunggulan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*centre of excellence*). Salah satu tugas sebuah perguruan tinggi adalah mengembangkan penelitian. Program penelitian dengan bantuan dana diberikan kepada para dosen. Hal ini dilakukan dalam implementasi tri dharma perguruan tinggi dimana penelitian adalah pemantik bagi berkembangnya ilmu pengetahuan di samping penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta

pengabdian pada masyarakat. Seiring sifat ilmu yang terus bergerak maju (*progressive*), penelitian adalah instrumen dalam penemuan pengetahuan yang dinamis, berubah dan terus berkembang sepanjang masa, maka perguruan tinggi akan kurang bermakna keberadaannya tanpa pelaksanaan penelitian.

IAIS Sambas memerankan diri sebagai perguruan tinggi yang menjadi sentral riset yang dinamis dan terbuka, menyadari bila penelitian terus digiatkan, akan terjadi peningkatan kualitas pendidikan dari waktu ke waktu, perubahan peradaban ke arah yang lebih baik.

Penelitian yang telah dihasilkan dipublikasi agar pengembangan pengetahuan dapat diakses secara terbuka dan luas. Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen dapat diakses dalam berbagai jurnal nasional dan internasional, baik yang berskala nasional terakreditasi hingga jurnal internasional bereputasi. Penelitian yang dihasilkan dalam tiga tahun terakhir mencapai jumlah 670 jurnal.

Penelitian merupakan salah satu sub unsur wujud implementasi tri dharma pada setiap Perguruan Tinggi. Karena itu, wujud komitmen IAIS Sambas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M). Perkembangan penelitian di IAIS dimotori oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), yang secara strategi dibentuk untuk menumbuhkembangkan sumber daya manusia dalam bidang akademik yang kompeten dan kompetitif dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian bidang keilmuan.

Sebagai lembaga penelitian, LP2M memiliki tugas dan fungsi penyusunan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang

penelitian. Penelitian diselenggarakan secara periodik sebagai upaya untuk peningkatan mutu penelitian. Selain itu tujuan ideal dilaksanakan program peningkatan mutu penelitian sebagai langkah konkret untuk meningkatkan intensitas penelitian ilmiah sehingga terwujudnya *campus research*. Program penelitian merupakan satu upaya pengembangan bidang ilmu yang dikembangkan pada IAIS Sambas, diantaranya studi Islam (*Islamic studies*) maupun kajian sosial dan budaya lokal maupun keagamaan yang berkembang di masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas. Sasaran program penelitian ini pada umumnya diprioritaskan untuk seluruh dosen tetap di lingkungan IAIS Sambas.

Adapun yang menjadi Visi LP2M adalah “Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Rujukan dalam Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara bagi Kemajuan Peradaban di Asia Tenggara”, kemudian diterjemahkan dalam Misi sebagai berikut: (1) Melakukan penelitian ilmu keagamaan Islam yang berwawasan lintas negara di Asia Tenggara, (2) Meningkatkan mutu publikasi ilmiah bereputasi skala nasional dan internasional, (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Asia Tenggara, (4) Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam negeri dan luar negeri terutama di kawasan Asia Tenggara (LP2M IAIS Sambas, 2018).

Adapun tujuannya adalah: (1) Menghasilkan penelitian ilmu keagamaan Islam yang berwawasan lintas negara di Asia Tenggara, (2) Menghasilkan mutu publikasi ilmiah bereputasi skala nasional dan internasional, (3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat untuk

kepentingan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Asia Tenggara, (4) Terjalannya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam negeri dan luar negeri terutama di kawasan Asia Tenggara.

LP2M dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun pedoman penelitan sebagai standar dalam pelaksanaan penelitian, yang dapat menjadi rujukan baik secara teoretis maupun praktis. Kemudian mengarahkan penyelenggaraan program sebagai berikut:

1. Menghimpun bunga rampai disertasi doktor, tesis dan skripsi unggulan di lingkungan IAIS Sambas
2. Menghimpun naskah-naskah hasil penelitian yang tersebar dalam laporan penelitian maupun dalam jurnal.
3. Menghimpun dan menginventarisasi buku-buku yang telah ditulis oleh para dosen.

Secara lebih rinci, daftar penelitian yang telah dipublikasi dan daftar hibah penelitian dosen dideskripsikan sebagai berikut:

NO	JUDUL PENELITIAN / PUBLIKASI	PENULIS	NAMA JURNAL/ PENERBIT	TAHUN
1	Lecturers Understanding on Indexing Databases of SINTA, DOAJ, Google Scholar, SCOPUS, and Web of Science: A Study of Indonesians	AS Ahmar, N Kurniasih, DE Irawan, DU Sutiksno, D Napitupulu	Journal of Physics: Conference Series 954 (1), 012026	2018
2	Konsep dan Implementasi Pendidikan Akhlak Dalam Mencapai Humanisme-Pluralis	Kamil	BORNEO Journal of Islamic Studies, 1 (1), 1-11	2018

3	Autoregression Vector Prediction on Banking Stock Return Using CAPM Model Approach and Multi-Factor APT	S Suroso, RB Rusiadi, APU Purba, AK Siahaan, AN Sari, AIF Lubis	Int. J. Civ. Eng. Technol 9 (9), 1093-1103	2018
4	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia	SS A Prasetyo Ningrum	EQUILIBRIUM	2018
5	Penerapan Pendekatan Inkuiri pada Mata Pelajaran IPA Untuk Mengembangkan Karakter Siswa di SDN 01 Kota Bangun	P Putra	Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah 3 (1), 28-47	2018
6	Penggunaan Metode Cerita Untuk Mengembangkan Nilai Moral Anak TK/SD	H Putri	Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah 3 (1), 87-95	2018
7	Character Education Based on Gender Justice in The Islamic Perspective	S Samsuri, M Mursidin Mujahidin	AL-HAYAT 2 (2), 202-212	2018
8	Cultural Da'wah in the Tradition of Antar Pinang Pulang Memulangkan in Sambas Malay Community of West Kalimantan	Mualimin, A Yunaldi, Sunandar, Alkadri	Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies 12 (2), 201-213	2018
9	Budaya Berbalas Pantun Sebagai Media Penyampaian Pesan Perkawinan Dalam Acara Adat Istiadat Perkawinan Melayu Sambas	A Aslan, A Yunaldi	Jurnal Transformatif (Islamic Studies) 2 (2), 111-122	2018
10	Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah	A Aslan	Cross-border 1 (1), 76-94	2018
11	The Existence of Estuarine Coral Reef at Eastern Front of	MR Syahrir, T Hanjoko, A Adnan,	Aquaculture, Aquarium, Conservation Camp; Legislation 11 (2), 362-378	2018

	Mahakam Delta, East Kalimantan, Indonesia: a first record	M Yasser, M Efendi, AA Budiarsa, Iwan Suyatna.		
12	Mendarah Dagingkan Al-Qur'an	Z Ghazali	Cross-border 1 (1), 95-110	2018
13	Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin di Kesultanan Sambas 1931-1943 dalam Bidang Revitalisasi Lembaga Peradilan Agama	BY Posha, AM Sewang, SAH Kara, A Siraj	Jurnal Diskursus Islam 6 (1), 175-200	2018
14	Budaya Hukum Sebagai Faktor Pendorong Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah di Indonesia	J Akadol	Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7 (1), 12-23	2018
15	Kurikulum Pendidikan Islam di Amerika	A Aslan	Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 8 (2), 117-124	2018
16	Dinamika Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Belanda	A Aslan	Syamil 6 (1)	2018
17	Analisis Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa	SS Saliro	Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 3 (2), 187-218	2018
18	Sejarah dan Gerakan Dakwah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat	H Yusnita	NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam 2 (1), 22-32	2018
19	Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam	A Aslan, S Suhari	Razka Pustaka	2018
20	Makna Kurikulum Terhadap Teori Tentang Belajar Pada Perubahan Perilaku Anak Didik	A Aslan	Cross-border 1 (2), 56-65	2018
21	Keterampilan Menggunakan Metode Cerita dalam Pembelajaran Pendidikan Agama	AR Multahada	Intizar 24 (2), 219-226	2018

	Islam di TPQ			
22	Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam	U Ubabuddin	INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan 4 (2), 76-91	2018
23	Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Fiqih	S Suriadi	Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah 3 (1), 1-11	2018
24	Kajian Kurikulum Fiqih Pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Pada Masyarakat Perbatasan	A Aslan	Madinah: Jurnal Studi Islam 5 (2), 115-124	2018
25	Kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Mengelola Kawasan Perbatasan Darat di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Tinjauan Siyasa Dusturiyyah: Studi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	N Syamsiah	UIN Sunan Ampel Surabaya	2018
26	Fitrah Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Al-Quran)	Suriadi	Muaddib Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman	2018
27	Kemitraan dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Analisis terhadap Pola dan Tingkah Laku Anak Usia Dini dan Lingkungan)	A Hafidzi, H Putri	JEA (Jurnal Edukasi AUD) 4 (1), 28-46	2018
28	Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam	Aslan, Suhari	Ebooksia Publisher	2018

29	Peran Tasawuf dan Pendidikan Islam Terhadap Akhlak Masyarakat Modern	Ubabuddin	Jurnal Alwatzikhoebillah. 4 (1), 108-120	2018
30	Pendidikan Sufistik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah (Kajian atas Pemikiran Ahmad Khatib Sambas)	S Suriadi	Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 15 (2), 263-270	2018
31	Perbedaan Pendapat di Antara Para Imam Madzhab tentang Masuknya Waktu-Waktu Salat Fadh	R Akbar	Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 4 (7), 65-74	2018
32	Potret Perkembangan Islam di Indonesia	E Etriadi	Jurnal Alwatzikhoebillah,4 (1), 35-44	2018
33	Urgensi Manajemen Sekolah dalam Membentuk Karakter Anak	Suriadi	Early Childhood: Jurnal Pendidikan, 2 (2a), 66-77	2018
34	Identitas Diri Menurut Al-Ghazali	R Muhammad	Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 8 (2), 160-169	2018
35	Child Rights to Receive Religious Education in Forming Character in the Family of Islamic Perspective	Suriadi	The 2nd International Conference on Child-Friendly Education (ICCE)	2018
36	Praktik Utang Piutang Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam	N Safitri, H Hatoli, Z Arifin	Cross-border 1 (1), 111-121	2018
37	Urgensi Majelis Taklim Sebagai Lembaga Dakwah di Masyarakat	Mujahidin	AlHadharah, 1-12	2018
38	Aplikasi Konsep Fitrah dalam QS. Al-Rum Ayat 30 Terhadap Tujuan Pendidikan Islam	S Suriadi	At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah 7 (1), 71-107	2018
39	Urgensi Bahasa Ibu di Era Modern	H Pribady	https://www.researchgate.net/publication/329880233_Urgensi_Bahasa_Ibu_dalam_Dunia_Modern	2018

40	Perubahan Nilai Budaya Pada Masyarakat Perbatasan di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas	Aslan	UIN Antasari Banjarmasin	2018
41	Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Melalui Penilaian Kinerja Guru	Ubabuddin	At-Tuhfah 7 (2), 20-33	2018
42	Melacak Jejak Kebudayaan Nusantara, Membangun Semangat ke Bhineka Tunggal Ika an	Kamil	Madaniyah 8 (2), 237-250	2018
43	Media Gambar dalam Kegiatan Pembelajaran Berhitung Siswa Pemula Pendidikan Dasar	Eliyah	Edukatif 4 (Januari-Juni), 103-110	2018
44	Pengelolaan Kawasan Perbatasan Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (Studi Perbatasan di Kabupaten Sambas)	N Syamsiah	Shar-E, 4 (8) 99-109	2018
45	Dakwah di Daerah Pasca Konflik (Studi Kasus di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)	D Irawan	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	2018
46	Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam	U Ubabuddin	Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam 3 (1), 67-76	2018
47	Etika Bisnis dan Pemasaran dalam Islam	B Iswanto	Halalan Tayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata, 1 (1), 49-59	2018
48	Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Implementasinya dalam Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar	Topik	PrimeEarly 1 (2018), 77-90	2018

49	Media Pembelajaran Edutainment Proadventure	W Setyaningrum, NH Waryanto, M Eng, A Bahauddin	ID Patent EC00,201,859,155	2018
50	Manajemen Pendidikan Karakter Dalam Mewujudkan Mutu Lulusan di SDN 01 Kota Bangun	P Putra	Primarly 1 (1), 46-56	2018
51	Supervisi Pendidikan (Upaya Menggagas Pendidik Profesional	Ubabuddin	Wade Group	2018
52	Praktik Arisan Online Sistem Menurun dalam Perspektif Masalah Pada Arisan Wahyuni Shop di Desa Mentibar Kecamatan Paloh	Y Candra, M Munadi, H Hatoli	Cross-border 1 (2), 83-103	2018
53	Pengembangan Instrumen Penilaian Keterampilan Berbahasa Arab	D Ferawati	Edukatif, 186-196	2018
54	Internalization of Tasawuf Values in Learning Fiqh at Madrasah Aliyah Sambas Kalimantan	S Suriadi	Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati 4 (2), 77-92	2018
55	Kebijakan Pembangunan Daerah Perbatasan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara	Tamrin	BORNEO: Journal of Islamic Studies, 1 (2), 111-117	2018
56	Konsep Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural	U Ubabuddin	At-Turats 12 (2), 80-90	2018
57	Eksistensi Taklit Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan dalam Islam: Studi Pengembangan pada Masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat	Asman	UIN Sunan Ampel Surabaya	2018
58	Kajian Kritis Atas Teori-teori Bentuk	R Akbar	UIN Walisongo	2018

	Bumi			
59	Tradisi Zikir Nazam sebagai Media Dakwah: Studi Etnografi di Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat	MS Nurul Hidayat, S.Th.I	Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	2018
60	Urgensi Integrasi Nilai Pendidikan Karakter di Sekolah	Suriadi	Proceedings International Conference ICTTBM 2018 Terengganu-Malaysia	2018
61	The Actualization of Woman Empowerment In Islamic Economy	I Kusnadi	Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2018, 238-253	2018
62	Legal Culture of Public Service Bureaucracy: A Response to the Policy of ASEAN Economic Community in the Border Areas	MH Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si	International Journal of Humanities and Social Science 2018 (2018), 141-153	2018
63	Peran Supervisi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Sekolah	Ubabuddin	Edukatif, 6 (1), 1-18	2018
64	Konsep Masalah Najamuddin Al-Tufi dan Relevansinya Terhadap Hukum Bisnis Syariah	M Munadi	BORNEO, Journal Islamic Studies 1 (FORPERTAIS), 28-42	2018
65	Mainstreaming Meretas Bias Jender in Islamic Education Practices	S Suriadi	PROCEEDING: The 3rd Annual International Conference on Islamic Education	2018
66	Hukum dan Keadilan Konsep Nilai Dalam Hukum: Sebuah Kajian Konseptual	Tamrin	Jurnal Alwatzikhoebillah 4 (1), 59-66	2018
67	Penanaman Moral Pada Anak Melalui Ibadah Shalat Dhuha	U Ubabuddin	An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial 5 (2), 261-174	2018
68	Studi Analisis Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim dalam Pembaharuan Hukum Islam	Asman	Jurnal Shar-E, IV (7), 117-134	2018

	Dekonstruksi Syariah			
69	Implementasi Teori Common Link dan Projecting Back dan Implikasinya terhadap Otentitas Hadis	R Akbar, US Sukmawati	Riwayat 4 (1), 35-58	2018
70	Model Layanan Bimbingan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Manja	Syar 1 (2018), 38-42	2018
71	Konsep Fitrah dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini	NC Dewi	PrimEarly: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini 1 (2), 185-192	2018
72	Islamic Economic Model In Reducing Gap of Growth and Unemployment	S Sumarin, I Kusnadi	HUNAF A Jurnal Studia Islamika 15 (2)	2018
73	Model Pendidikan Agama untuk Anak Usia Prasekolah dalam Keluarga Melayu Sambas	Adnan	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	2018
74	Qashashul Quran	Posha	Jurnal Alwatzikhoebillah, 4 (1), 1-12	2018
75	Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah	Munadi	Jurnal Alwatzikhoebillah, 4 (1), 98-107	2018
76	Relevansi Metode Pendidikan Rasulullah dalam Konteks Pendidikan Modern	S Suriadi	Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam 2 (2), 43-51	2018
77	Sketch of The Island of Borneo	H Pribady	https://www.researchgate.net/publication	2018
78	Implementasi Good Corporate Governance pada PDAM Terkait Dengan Fungsi Pelayanan Publik.	T Muchsin	WADE GROUP 2018, 140	2018
79	Penggunaan Strategi Pembelajaran Aktif dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V di MI At-Taqwa Sambas	Ubabuddin	Jurnal Ed-Humanistics	2018

80	Kajian Kritis atas Progres Sains pada Bentuk Bumi dan Keterkaitannya dengan Paradigma Penentuan Arah Kiblat	A Izzuddin, R Akbar	Jurnal Falak 4, 29-60	2018
81	Introducing English Through Songs	MS Huda	PrimEarly: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini 1 (2), 131-136	2018
82	Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Keadilan Gender	Suriadi	Al-Turats IAIN Pontianak 2018 (IAIN Pontianak), 57-69	2018
83	Penggunaan Media Pembelajaran Audio-Visual dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	R Rusiadi	Cross-border 1 (1), 122-132	2018
84	Pertentangan Asas Peraturan Perundang - Undangan yang Termuat Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi	SS Saliro	Shar - E, 19-30	2018
85	Internalization of Student Character Education in Madrasah Ibtidaiyah Country (MIN) Sekuduk of Sambas District	Adnan	Proceedings: The Annual International Conference on Islamic Education	2018
86	Assessment PAUD pada Kurikulum 2013	A Multahada	PrimEarly: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini, 1 (2), 100-109	2018
87	Konsep Pendidikan Karakter Perspektif Islam	U din Hafid	Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam 7 (1), 454-460	2018
88	Social Impact of Earlier Age Early Study in Sociology Perspective	M Mujahidin	Proceedings: The Annual International Conference on Islamic Education	2018
89	Pengantar Metodologi Penelitian Linguistik	H Pribady	Pusat Studi Humaiora Indonesia	2018
90	Nilai Holistik Konsep Pembangunan	US Sukmawati	Share-E, 75-92	2018

	Ekonomi Islam			
91	Pelatihan Keterampilan Bagi Remaja Putus Sekolah di Daerah Transmigrasi	U Ubabuddin, Umi Nasikhah	Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2 (2), 217-223	2018
92	Pengembangan Pendidikan Islam Perspektif Teologis	Kamil	Jurnal Atwatzikhoebillah, 4 (2), 9-15	2018
93	Game Edukasi: Apakah membuat Belajar Lebih Menarik?	LD Pratama, W Lestari, A Bahauddin	At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan 5 (1), 39-50	2019
94	Peran Pola Asuh Orangtua di Era Digital	A Aslan	Jurnal Studia Insania 7 (1), 20-34	2019
95	Peran Pendidikan dalam Merubah Karakter Masyarakat Dampak Akulturasi Budaya di Temajuk	A Aslan, A Setiawan, H Hifza	FENOMENA 11 (1), 11-30	2019
96	Pergeseran Nilai di Masyarakat Perbatasan (Studi tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)	A Aslan	Pasca Sarjana	2019
97	Pemimpin dan Pengaruh Geo Politik Terhadap Lahirnya Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter	A Oskar Hutagaluh	Jurnal Studi Islam Lintas Negara, 1 (2), 23-29	2019
98	Pembelajaran Bahasa Arab Maharah Qiraah Melalui Pendekatan Sainifik	A Rathomi	Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam 8 (1), 558-565	2019
99	Internalization of Value Education in Temajuk-Melano Malaysia Border School	A Aslan, A Setiawan	Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 14 (2), 419-436	2019
100	Profesionalisme Guru dalam Perspektif Al-Qur'an	SA Samsuri	JALIE; Journal of Applied Linguistics and Islamic Education 2 (1), 21-49	2019
101	Effect of Education Income Levels and Parenting Patterns on Childrens Social	H Putri, A Suriansyah, E Wahdini	Journal of K6 Education and Management 2 (2), 97-106	2019

	Behavior			
102	Implementasi Pendidikan Karakter: Integrasi Lagu Melayu Sambas dalam Pembelajaran pada MIN Kabupaten Sambas	PA Putra	Sosial Budaya 16 (2), 83-92	2019
103	Pendidikan Agama dalam Keluarga	S Suriadi, M Mursidin, K Kamil, A Adnan	Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan 15 (1), 89-105	2019
104	Kurikulum Pendidikan Masa Penjajahan Jepang di Sambas	A Aslan	Edukasia Islamika, 171-188	2019
105	Exercising Local-Wisdom-based Character Education in Madrasah: An Ethnographic Study in a Madrasah in Sambas, West Kalimantan	P Putra, A Aslan	Jurnal Pendidikan Agama Islam 7 (2)	2019
106	Teachers and Prospective-Teachers Perceptions Of Mobile Math Game Proadventure Implementation In Mathematics Learning	A Bahauddin, W Setyaningrum	Journal of Physics: Conference Series 1320 (IOP Publishing Ltd)	2019
107	Keluarga Sebagai Madrasah Pertama dan Optimalisasifungsi Edukatif Pada Anak Usia dini	NC Dewi	Jurnal Ilmiah Edukatif, 5 (1), 66-72	2019
108	Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Edutainment Berbasis Guided Inquiry Berorientasi Pemahaman Konsep dan Minat Belajar Siswa Pada Materi Peluang Kelas VIII SMP	A Bahauddin	Universitas Negeri Yogyakarta	2019

109	Cultural Da'wah and Islamic Education Values in Antar Ajong Tradition of People in Melayu Sambas West Kalimantan	Suriadi	KARSA: Journal of Social and Islamic Culture 27 (1), 1-30	2019
110	Tradisi Kemponan dan Jappe dalam Masyarakat Melayu Sambas Kalimantan Barat	R Akbar, US Sukmawati	Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 15 (1), 01-10	2019
111	Early Age Marriage Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam	Asman	Jurnal Mahkamah, 4 (2), 179-199	2019
112	Keragaman Ikan di Perairan Ekosistem Mangrove Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu	H Setiawan, M Mursidin, D Purbarani, TA Wulandari	Proceeding Simposium Nasional Kelautan dan Perikanan	2019
113	Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1885-1976) di Sambas	DI Sunandar, N Huda	Medina-Te : Jurnal Studi Islam 15 (UIN Raden Fatah Palembang), 75-91	2019
114	Wanita, jilbab & akhlak	H Setiawan	CV Jejak (Jejak Publisher)	2019
115	Religious Education Model for Children Age of Pre School in Family Melayu Sambas	Adnan	International Journal of Education, Psychology and Counseling 4 (2019), 333-349	2019
116	Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia	A Aslan	TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam 8 (1), 29-45	2019
117	Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam	R Kasmaja, SS Saliro	Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 4 (1), 45-62	2019
118	Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat	A Asman	Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 4 (1), 79-100	2019

119	Problems in The Thai Patani Malay Islamic Education	A Aslan, H Hifza	Al-Ulum 19 (2), 387-401	2019
120	Sejarah Kurikulum Pendidikan Islam di Brunei Darussalam	A Aslan, S Suhari	Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan 4 (1), 113-127	2019
121	Muslim Medical Traders In Indonesia-Malaysia Border Region: Perspective of Sharia Business Ethics	B Iswanto	Journal of Islamic 4 (20), 77-85	2019
122	Evaluasi Sistem Temu Kembali Informasi OPAC (Online Public Access Catalogue) di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	Z Ghazali	INA-Rxiv	2019
123	Implementasi Metode Cerita Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Kabupaten Sambas (Studi Kasus Pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Matang Danau Kecamatan Paloh)	A Aslan	Jurnal Cross-border, 2 (1), 60-72	2019
124	Imla;Manzhur dalam Pembelajaran Bahasa Arab pada Siswa Sekolah Dasar	A Rathomi	PrimEarly: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini 2 (1), 1-7	2019
125	Analisis Konsep Interfaith Marriage dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Indonesia	Asman	Shar-E, 1-15	2019
126	Manajemen Pendidikan Islam dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam	Suriadi	Tarbawi 5 (2), 217-228	2019
127	Komunikasi Dakwah Kultural di Era Milenial	S Deni Irawan	Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 18 (No.1), 86-96	2019

128	Implementasi Guru PAI dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Pada Siswa Sekolah Dasar	H Putri, P Putra	JMIE: Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education 3 (2)	2019
129	Kumpulan Naskah Kultum Dosen dan Mahasiswa	A Rafik	CV. RASI TERBIT ISBN 9786237214045.	2019
130	Total Quality Management Perpustakaan	Z Ghazali	INA-Rxiv	2019
131	Family Education In A Malay Cultural Perspective	Kaspullah	Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED) 4 (2), 202-212	2019
132	Harta Bersama Perkawinan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sambas (Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.S bs)	Asman	Jurnal Ulumul Syar'I, 8 (1), 38-50	2019
133	Perhitungan Waktu (Time Calculation) Fenomena Tanpa Bayangan di Kota Sambas Kalimantan Barat	R Akbar	Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan 5 (2)	2019
134	Mengembangkan Potensi Beragama Pada Anak Usia Dini di RA/TK	NC Dewi	PrimEarly: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini 2 (1), 88-95	2019
135	Pendusta Agama dalam Al-Quran (Kajian Perspektif Tafsir Al-Azhar)	A Rafik	CV. Rasi Terbit, ISBN 9786237214649.	2019
136	Makanan Halalan Thayyiban (Kajian Prespektif Tafsir)	H Setiawan	CV. Rasi Terbit	2019
137	Internalization of Multicultural Values In Learning Islamic Education	T Supriyatno, U Ubabuddin	Library Philosophy and Practice	2019
138	Pendidikan Karakter Berbasis Etnopedagogi di Madrasah	P Putra	Pascasarjana	2019

	Ibtidaiyah Negeri Kabupaten Sambas Kalimantan Barat			
139	Penguasaan Hasil Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Melalui Model Paikem Dengan Media Slide Pada Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sambas	T Topik	Cross-border, 2 (1), 33-46	2019
140	Hidden Curriculum	A Aslan	Pena Indis	2019
141	Peran Pemerintah Pada Era MEA di Kawasan Perbatasan Di Provinsi Kalimantan Barat	IA Ananda, I Kusnadi	Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 1 (2), 13-30	2019
142	Internalisasi Nilai-Nilai Positif Melalui Lagu Daerah Dalam Masyarakat Sambas	H Pribady	Jurnal Ilmiah Edukatif 5 (2), 124-129	2019
143	Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Antara Masalah dan Mafsadah	DSA Munadi, Munadi	AL-HIKMAH: Jurnal Dakwah 13 (LP2M), 291-306	2019
144	Problematika Dakwah di Dunia Maya	A Rafik	Jurnal Al-Muttaqin, Vol. V Juli-Desember	2019
145	Penjaminan Mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar	Topik	PrimEarly : Jurnal Kajian Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini, II (1), 8-17	2019
146	Pedagang Melayu di Kesultanan Sambas 1819-1942: Terbangunnya Perdagangan, Relasi dan Jaringan	J Jaelani, D Ibrahim, E Rochmiatun	Medina-Te: Jurnal Studi Islam 15 (2), 154-171	2019
147	Urgensi Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat	Iwan Kusnadi	Sebi Vol.1 No.1 1 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIS), 18-28	2019
148	Konsep Keadilan dalam Poligami (Concept Of Justice In Polygami)	Asman	Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah, 15 (1), 37-56	2019

149	Karakteristik Masyarakat Muslim Kota Sambas Dalam Menentukan Arah Kiblat Untuk Pelaksanaan Salat di Rumah	R Akbar	Sosial Budaya 16 (1), 37-48	2019
150	Implementation of Discipline Attitude in the Ibtidaiyah Madrasah Institution on Moral Children Formation	P Putra	Primary: Jurnal Keilmuan dan Kependidikan Dasar 11 (1), 35-44	2019
151	Tinjauan Awal Sejarah Sosial Hubungan Sambas dan Sarawak	Sunandar	BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN 2600-9080)	2019
152	Penyalahgunaan Label Halal Makanan di Kabupaten Sambas	Z Arifin	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	2019
153	Pendidikan Karakter Anak Dalam Keluarga	Suriadi	Madaniyah 2019 (STIT Pemalang), 251-267	2019
154	Pendidikan Agama Islam Berbasis Nasionalisme	M Mursidin	Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam, 8 (1), 566-576	2019
155	Bimbingan Karier Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	Patriana	Edukatif 5 (Bimbingan dan Konseling), 28-34	2019
156	Menciptakan Harmoni Melalui Dialog Antar Umat Beragama	D Irawan	RELIGI; Studi Agama-Agama, XV (2), 123-140	2019
157	Materi Pendidikan Islam untuk Perguruan Tinggi	Ubabuddin	Literasi Nusantara Abadi, Malang	2019
158	Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang di Sambas, Indonesia	A Aslan, H Hifza	EDUKASIA ISLAMIKA: Jurnal Pendidikan Islam 4 (2), 171-188	2019
159	Reading Comprehension through Jigsaw Technique	MS Huda	Jurnal Ilmiah Edukatif 5 (1), 1-5	2019
160	Validitas Tes Sebagai Media kur Ketepatan Evaluasi Mengukur Pencapaian Tujuan Pembelajaran	Eliyah	Jurnal Ilmiah Edukatif 5 (1), 43-49	2019

	di SD/MI			
161	Pendekatan Budaya Lokal: Meningkatkan Perekonomian dan Tatahan Sosial Masyarakat Perbatasan (dalam Perspektif Ekonomi Islam)	B Iswanto	BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship 2 (1), 13-20	2019
162	Perkembangan Pendidikan Islam di Banglades	P Putra	Cross-border Journal Of Islamic studies (CBJIS) 1, 1-89	2019
163	Perpustakaan Digital Dalam Kacamata Hukum	Z Ghazali	Cross-border	2019
164	The Misuse of Halal Food Labels in Sambas Regency	Z Arifin	International Journal Of Science and Research, 8 (8), 1070-1075	2019
165	Urgency of Character Education Integration Value In School	Suriadi	Global Academic Excellence 4 (2019), 333-345	2019
166	Internalization of Cultural Values in Schools Early Steps in Building Nation Characters	Suriadi	Proceedings of 1st Workshop on Environmental Science, Society, and Technology, WESTECH 2018, December 8th, 2018, Medan, Indonesia	2019
167	Model Bimbingan Kelompok dengan Teknik Modeling untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa	P Patriana	JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia) 4 (2), 55-59	2019
168	Kumpulan Khutbah Jumat	Deni Irawan, dkk	CV Rasi Terbit	2019
169	Meningkatkan Kinerja Guru Melalui Supervisi Pembelajaran	Ubabuddin	Ed-Humanistics	2019
170	Silent Behavior in English Language Classroom: Good Language Learners Perspectives	MS Huda	DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science	2019
171	Esensi Pendidikan Keluarga (Studi QS. Luqman Ayat 13-19)	A Zabidi	PrimEarly 2 (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan), 130-142	2019

172	Perspektif Sosiologis Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Singkawang	SSS Saliro	Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 17 (2), 283-296	2019
173	The Students Learning From Home Experiences During Covid-19 School Closures Policy in Indonesia	P Putra, FY Liriwati, T Tahrim, S Syafrudin, A Aslan	Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 5 (2), 30-42	2020
174	The Relevancy on Education Release Revolution 4.0 in Islamic Basic Education Perspective in Indonesia (An Analysis Study of Paulo Freires Thought)	A Purniadi Putra, Hilmi Mizani, Abdul Basir, Ahmad Muflihin	Test Engeneering & Management, 83 (1), 10256-10263	2020
175	The Strategic Foundation for Competitive Excellent Development in Integrated Islamic Primary Schools in Indonesia	J Hifza, A Palapa, A Maskur	International Journal of Advanced Science and Technology 29 (12s), 1747-1753	2020
176	The Community Of Temajuk Border Education Values Paradigm On The School	A Aslan, H Hifza	International Journal of Humanities, Religion and Social Science 4 (1)	2020
177	The Model of Competitive Advantage Development in Private Islamic Education Institutions	A Hifza	BASA 2019: Proceedings of the Third International Seminar on Recent Language, Literature, and Local Culture Studies, BASA, 20-21 September 2019, Surakarta, Central Java, Indonesia	2020
178	Situational Leadership on Islamic Education	SM Oskar Hutagaluh, Aslan, Purniadi Putra, Abdul Wahab Syakhrani	IJGIE : International journal of Graduate of Islamic Education 1 (1), 1-7	2020
179	Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Interdisipliner	H Hifza, M Suhardi, A Aslan, S Ekasari	Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 5 (1), 46-61	2020

180	Teachers Leadership Teaching Strategy Supporting Student Learning During The Covid-19 Disruption	A Aslan, S Silvia, BS Nugroho, M Ramli, R Rusiadi	Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 5 (3), 321-333	2020
181	Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak	NC Dewi, A Aslan, M Suhardi	JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan) 4 (2), 159-164	2020
182	The English Camps as Method of Promoting Fun English at Elementary School Level in Indonesia	M Rachmawati, S Widjajanti, A Ahmad, A Aslan	Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah 4 (2), 174-182	2020
183	Curriculum As Cultural Acculturation	AW Syakhrani, H Putri	Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora) 4 (1), 1-9	2020
184	Kurikulum dalam Tantangan Perubahan	A Aslan, W Wahyudin	Bookies Indonesia	2020
185	Responsive Leadership in Preventing Transmission of Covid-19 in the Indonesia-Malaysia Border Area	O Hutagaluh, A Rustam, SS Sangadji, Baharuddin, AZ Kurniullah	OSF Preprints	2020
186	Understanding Islamic Education Model for Children of Early Married Families in South Kalimantan	H Mizani, A Basir, S Giri, A Juhaidi, A Aslan	Talent Development & Excellence 12 (2), 4365-4374	2020
187	Dinamika Keagamaan Masyarakat Perbatasan Paloh Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat	A Aslan, S Suhari, A Antoni, MA Mauludin, GNK MR	Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 22 (1), 90-101	2020
188	Perubahan Kurikulum Lembaga Pendidikan Islam di Sambas Pada Masa Kesultanan Sambas	M Suhardi, S Mulyono, H Syakhrani, A Aslan, P Putra	Tadibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 9 (1)	2020
189	Paradigma Baru Tradisi Antar Ajung Pada Masyarakat Paloh, Kabupaten Sambas	A Aslan, NTP Sihaloho, IH Nugraha, B Karyanto, Z Zakaria	IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya 18 (1), 87-103	2020
190	Dinamika Pendidikan Islam di Thailand Pada	A Aslan, H Hifza,	Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam 3 (1), 38-	2020

	Abad 19-20	M Suhardi	54	
191	Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Imaq dan Iptek di Era Revolusi Industri 4.0 Pada Mata Pelajaran Sains Madrasah Ibtidaiyah	A Aslan	TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam 9 (1), 1-15	2020
192	Efektivitas Pelaksanaan Pasal 66 Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Kota Singkawang	T Muchsin, SS Saliro, SO Manullang, NTP Sihaloho	HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum 4 (2)	2020
193	Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam	H Setiawan	Borneo: Journal of Islamic Studies, 3 (2), 59-74	2020
194	Discession of the Sambas Resorts Police in The Implementation of Administrative Law Perspective Investigation	T Muchsin, SS Saliro, NTP Sihaloho, SO Manullang	Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 4 (2), 147-159	2020
195	Konsep Teori Belajar Konstruktivisme Anak Usia Dini di Era Revolusi Industri 4.0	PP Hadisa Putri	Jurnal Primearly 2 (Fatik), 192-199	2020
196	Pantun Melayu Sambas Sebagai Media Dakwah	W Masrura, Sabari, Sunandar	JURNAL SAMBAS: (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah), 3 (1), 1-12	2020
197	Hamil Di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)	Asman	Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 6 (1), 1-16	2020
198	Globalization In Islamic Education (Internalization Strategy of Local Values In Islamic Education In The Era of Globalization)	K Kaspullah, S Suriadi	Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam, 9 (1)	2020

199	Komunikasi Dakwah Kultural di Era Millennial	D Irawan, S Suriadi	Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 18 (2)	2020
200	Parental Rights and Obligations to Children in the Era of Industrial Revolution 4.0 (Islamic Family Law Perspective)	A Asman	Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 4 (1), 232-258	2020
201	Konsep Al-Bala' dalam Al-Quran	A Zabidi	Fikruna 2 (1), 43-58	2020
202	Pengembangan Home Industri di Desa Nibung-Paloh: Kajian Komunikasi Terhadap Air Batu Mineral Al-Barokah	SH Sasmitasen, H Setiawan	CV Jejak (Jejak Publisher)	2020
203	The Concept Masalahah of Najamuddin al Tufi and Its Relevance of Sharia Business	BI M Munadi	IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 9 (2), 151-166	2020
204	Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kota Singkawang Perspektif Ketatanegaraan	SS Saliro, J Akadol, S Rachman, A Setiawan	Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 5 (1), 93-108	2020
205	Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Syariah Pada Jakarta Islamic Index Yang Lesting di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019	US Sukmawati, I Kusnadi, S Ayuni	Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 6 (2), 54-69	2020
206	Problematika Konsep Bentuk Bumi dan Upaya Mencari Titik Temunya Dalam Penentuan Arah Kiblat	R Akbar, RA Mustaqim	Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 6 (1), 43-52	2020
207	Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kota Singkawang	SS Saliro, J Akadol, S Rachman, A Setiawan	Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam 5 (1), 93-108	2020
208	Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban	H Setiawan	Halalan Tayyiban, 3 (2), 40-54	2020

	dalam Al-Quran			
209	Internalisasi Moderasi Beragama dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik	R Muhammad	Al-Muttaqin: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 6 (1), 95-102	2020
210	Pendidikan Islam Terpadu: Sebuah Kajian Teoritik	Suriadi	Paedagogia Jurnal Pendidikan 9 (1), 145-166	2020
211	Poligami Dalam Putusan Hakim	H dan Asman	Yayasan Barcode Makassar	2020
212	Kelompok Sosial dalam Masyarakat Perspektif QS. Al-Maidah Ayat 2	A Zabidi	Borneo: Journal of Islamic Studies, 3 (2), 42-58	2020
213	Discession of The Sample Resorts Police In The Implementation of Administrative Law Perspective Investigation	T Muchsin, SS Saliro, NTP Sihaloho, SO Manullang	Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 4 (2), 147-159	2020
214	Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan	SO Manullang, M Wardani, SN Alam, S Sudono Saliro	Legalitas: Jurnal Hukum 12 (2), 231-236	2020
215	Pandangan MUI Kabupaten Sambas Terhadap Pro Kontra Penerapan Sertifikasi Halal Produk Elektronik	M Tehedi	Halalan Thayyiban 3 (No. 2), 55-65	2020
216	School Culture in Instilling Religious Character of Madrasah Tsanawiyah	Suriadi	Edukasia 15 (1), 163-182	2020
217	The The Concept Masalahah of Najamuddin Al-Tufi and its Relevance of Sharia Business	M Munadi, B Iswanto	IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam	2020
218	Penerapan Strategi Pembelajaran Edutainment dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar Anak Usia Dini	NC Dewi	PrimEarly: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini, 3 (1), 54-66	2020

219	The Problem of Distribution of Inheritance: A Case Study on The Malay Community of Sambas Kalimantan Barat In Indonesia	Asman	Jurnal Syariah, Jil. 28, Bil. 3, 343-358	2020
220	Komunitas dan Institusi Sosial Muslim di Indonesia (Telaah Historis atas Pembentukan dan Perkembangannya)	J Jaelani	Borneo: Journal of Islamic Studies 3 (2), 75-84	2020
221	Pemerintah Desa dan Open Defecation Free di Era Otonomi Daerah	SSS Muchsin, Tamrin	Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 20 (2), 121-134	2020
222	Tasawuf Sebagai Metode Untuk Meningkatkan Akhlak, Memperkuat Jiwa dan Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT	E Eliyah	Tarbiya Islamica, 1 (2), 136-144	2020
223	Al-Quran Sebagai Media Pembelajaran Biologi Pada Materi Evolusi Manusia (Menolak Teori Darwin: Manusia Berasal dari Kera)	Eliyah	Primearly 3 (Medai Pembelajaran Interaktif)	2020
224	Hakikat Fitrah Manusia dalam Islam	S Samsuri	AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam 18 (1), 85-100	2020
225	Konsep Abd Allah dalam Perspektif Teologi Pendidikan	Suriadi	Madaniyah 10 (2), 185-204	2020
226	Dakwah Berbasis Konseling Islam	Y Yusrain	Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 10 (1), 44-54	2020
227	Mendidik dan Membangun Keluarga Bernafaskan Islami di Era Globalisasi 4.0	Asman	CV Insan Cendekia Mandiri 1, 1-261	2020
228	The Effectiveness of The Wakalah Account on Women Group Specific Loan Savings From The National Program For Sharia-Based Community E	Z Arifin	Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat 20 (2), 295-306	2020

229	Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Sajad dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020	Kurnia, R Muhammad, Lamazi	Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam, 3 (1)	2020
230	Tantangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Pasca Pandemi Covid-19	Suriadi	http://repository.stainparepare.ac.id/1701/ 2020, 176-194	2020
231	The Model of Management of One Door Agriculture Business in the Border of Indonesia; Malaysia Sambas District based on Islamic Economic Perspective	D Nurdiansyah, Wulan Purnamasari, S Giri, MA Akbar	Jour of Adv Research in Dynamical Control Systems 12 (8)	2020
232	Etnopedagogic Studies In Character Education In The Millineal Era: Case Study MIN 1 Sambas	P Putra, H Heryanto, A Hafiz, AY Setianto, A Aslan	Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam 12 (2), 237-252	2020
233	Seloko Pada Acara Lamaran Masyarakat Melayu Jambi: Tindak Tutur Searle	I Nurzafira, B Prastio, A Asman, Y Fahriyan	AKSARA: Jurnal Bahasa dan Sastra 21 (2)	2020
234	Metode, Corak dan Pendekatan Muktaizilah Dalam Penafsiran Al-Quran	A Zabidi	Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora 6 (1), 16-27	2020
235	Kumpulan Khutbah Jumat; MUI Kabupaten Sambas	dkk Deni Irawan	Pustaka One	2020
236	Model Pembelajaran Scramble untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadits di Madrasah Ibtidaiyah	P Putra, S Syafrudin	AL-MUDARRIS: Journal of Education 3(1)	2020
237	Village Government and Implementation of Open Defecation Free during Regional Autonomy	T Muchsin, SS Saliro	Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 20(2)	2020

238	Change Management in Educational Institutions: Problems, Causes and Alternative Solutions	H Hifza, S Susilawati, N Nuraini, S Suriadi	Al-Hayat: Journal of Islamic Education 4(1), 69-78	2020
239	Budaya Sekolah dalam Menumbuhkan Karakter Religius di Madrasah Tsanawiyah	Suriadi	Edukasia 1(1), 163-182	2020
240	Pemberdayaan Restorasi Karang Taruna dan Remaja Islam Masjid Desa Argopeni Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus	S Deti, AH Syarif, U Nopriansyah	Al-Muawanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1 (1)	2020
241	Psikologi Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini	NC Dewi, A Aslan	Madinah: 2 (1), 2015, 39-48	2020
242	Integritas Kepemimpinan Dalam Al-Quran Terhadap Pilkada dan Permasalahannya	A Zabidi	Al-Muttaqin: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 6 (1), 44-59	2020
243	Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah	T Muchsin, SS Saliro	Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 5 (2), 72-90	2020
244	Reconstruction of Legal Culture in the Recovery of Madura and Malay Ethnic Conflict in Sambas District Based on Justice Value	Karman	Scholars International Journal of Law, Crime and Justice 3 (11), 342-348	2020
245	Kondisi Pendidikan Dasar di Sambas Sebagai Wilayah Perbatasan Tahun 2013	Eliyah	Cross-Border, 3 (2), 70-83	2020
246	Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Sosiologis dan Edukatif	Suriadi	Unesa University Press 2019, 13-25	2020

247	Penggunaan Media Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Islam Parit Jawai	T Topik	Cross-Border, 3 (1), 90-100	2020
248	Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan di Pengadilan Agama	A Asman	Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 7 (1), 31-44	2020
249	Sayyid Qutbs Concept of Da'wa in His Fi Zilal al Quran	A Zabidi	Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies 14 (2), 167-186	2020
250	Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam	Z Arifin	Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 258-274	2020
251	Variasi Metode dan Media Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam	R Rusiadi	Jurnal Alwatzkikhoebilla, 6 (2), 10-21	2020
252	Strategi Public Relation Tarekat Qodariah wa Naqsabandiyah dalam Mensosialisasikan Eksistensi Tarekat di Kecamatan Sambas	H Setiawan	Syi'ar : Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam, 3 (1), 1-11.	2020
253	Dari Identitas Nasional Menjadi Identitas Diri	R Muhammad	Psikologi dan Integrasi Bangsa 4, 331-343	2020
254	Hakikat Fitrah Manusia dalam Islam	S Samsuri	Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam 18 (1), 85-100	2020
255	Uncover Local Wisdom Value of Trade At The Border of Indonesia-Malaysia: An Islamic Economics Perspective	B Iswanto, M Munadi, S Suriadi	Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 9 (2), 138-163	2020
256	Kemampuan Pustakawan dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pustakawan Institut	Z Ghazali	Cross-Border, 3 (1), 75-89	2020

	Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas)			
257	Agama dan Budaya Nusantara Pasca Islamisasi; Dampak Islamisasi terhadap Agama dan Kebudayaan Lokal di Paloh, Kalimantan Barat	P Putra, A Aslan	Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press	2020
258	Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syariat Islam	Asman	Borneo: Journal of Islamic Studies, 3 (2), 1-16	2020
259	Metode Amina Wadud Dalam Penafsiran Al-Qur'an	A Zabidi	Jurnal Alwatzikhoebillah,6 (2), 1-9	2020
260	Structural Dakwah Strategy of The Local Government of Sambas Post Conflict of Sambas Ethnicity In West Kalimantan	NS Deni Irawan, Muliati Amin, Baharuddin Ali	Diskursus Islam 8 (No.1), 58-66	2020
261	Pengaruh Persepsi Guru Terhadap Kepemimpinan Kepala Madrasah, Motivasi Kerja dan Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kabupaten Sambas	K Kaspullah, P Putra, I Imelda	JIP: Jurnal Inspiratif Pendidikan, 9 (1), 110-127	2020
262	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode Triwulan 2013-2017	Nurhasanah, SS Saliro	Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah) 3 (1), 80-97	2020
263	Internalization of Multicultural Values In Learning Islamic Education At Mts Yasti Bengkayang	U Ubabuddin, T Supriyatno, N Nuraini, S Susilawati, S Suhari	Conciencia 20 (1), 40-51	2020
264	Teori; Teori Pengembangan	Suriadi	Al-Qiyam 1 (2), 51-62	2020

	Pendidik: Sebuah Tinjauan Ilmu Pendidikan Islam			
265	Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Kehidupan	U Nasikhah	Al-Muttaqin: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 6 (1), 60-76	2020
266	Bunga Rampai Meretas Kampus Masa Depan Gemilang	HRA HS	Desanta Publisher	2020
267	Instrument Development for Measuring Spiritual Intelligence of Muslim Nurses: A Conceptual Framework	MA Atarhim, J Manap, KA Mastor, MK Mokhtar, AFM Zabidi	Jurnal Psikologi Malaysia 34 (2)	2020
268	The Multicultural Islamic Education Development Strategy on Educational Institutions	H Hifza, A Antoni	Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan, 5 (1), 158-170	2020
269	Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan dan Akibat Hukum	T Muchsin, SS Saliro, SO Manullang, M Miharja	Madani Legal Review 4 (1), 63-80	2020
270	Membangun Perpustakaan Sekolah Yang Nyaman Untuk Belajar	Azwar	Edukatif 6 (2020), 17-26	2020
271	Kolerasi Antara Sains dan Islam Dengan Pemikiran Perves Hoodbhoy	Eliyah	Tarbiya Islamica, 1(1).	2020
272	Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Dalam Menumbuhkan Semangat Kebhinnekaan	Suriadi	Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 11 (1), 55-72	2020
273	Islamisasi Sains Menurut Sayyed Hossein Nasr	Topik	Edukatif, 6 (2), 121-131	2020
274	Al-Qur'an Hadits Learning Using Cooperative Learning Strategy	Suriadi	Tarbiyatuna 11 (2), 153-160	2020

275	Tantangan Penerapan Sertifikasi Halal Pasca Pemberlakuan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	DZ Arifin MSI		2020
276	Peran Lembaga Konsultasi dalam Merubah Sikap dan Persepsi Istri Korban Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Sambas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	T Tamrin, SO Manullang, G Widjaja, H H Sijabat	Intizar 26 (2), 73-80	2020
277	Sejarah Desa Penakalan, Asal Usul, Perkembangan Sosia, Ekonomi dan Budaya	N Sunandar, Gunawan, Fitria, Radimin	CV. Derwati	2020
278	Competency-Based Curriculum and Educational Unit Level Curriculum	Suriadi	International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24 (8), 3141-3153	2020
279	Peluang dan Tantangan Profesi Pustakawan yang Melek Informasi di Era Disrupsi	Z Ghazali	Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam, 3 (1), 38-56	2020
280	Mendidik dan Membangun Keluarga Bernafaskan Islami di Era Globalisasi 4.0 (The Concept of Education in Islamic Families)	Asman	CV Insan Cendekia Mandiri	2020
281	Pengajaran Reflektif Berteraskan Nilai Al-Suhbah	AFM Zabidi, MM Zabidi, WNW Abdullah, H Ishak, H Hussin, WQAW Razali	ASEAN Journal of Teaching Learning in Higher Education 12 (2)	2020
282	Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas	J Akadol, T Muchsin, SS Saliro	Jurnal Wawasan Yuridika 4 (2), 175-193	2020

283	Tradisi Khitan Perempuan	A Sander, S Sunantri	Jurnal SAMBAS : (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah), 3 (1), 28-41	2020
284	Professionalism of Teacher (An Overview of The Hadiths and Islamic Education Experts)	Suriadi	Edukasi 2 (STAIM TULUNGAGUNG), 112-130	2020
285	Development Strategy for Multicultural Education at MTs. Al-Muhajirin Sambas	Ubabuddin	Al-Ta lim Journal 27 (3)	2020
286	The Untold Story of Abdul Muin Ikram: Catatan Lengkap Mengenai Khazanah Kajian Budaya Melayu Sambas: Bintang Pustaka	MH Lubis	Bintang Pustaka Madani	2020
287	Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam	Asman	Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 7 (2), 99-116	2020
288	Metode Pendidikan Dalam Al-Qur'an (Studi Qs Al-Maidah [5]: 67, Al-A'raf [7]: 176-177, Ibrahim [14]: 24-25, dan Qs Al-Nahl [16]: 125)	A Zabidi	PrimEarly: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini 3 (1), 84-92	2020
289	Kontribusi Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pengembangan Kain Tenin Sambas di Desa Sumber Harapan	Ahmad Yasir	Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 2 (2), 80-93	2020
290	Budaya Sekolah Dalam Menumbuhkan Karakter Religius	Suriadi	Edukasia 1 (1), 163-182	2020
291	Korelasi Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Semayong Tahun Pelajaran 2019-2020	P Parni, T Topik	Jurnal Pendidikan Dasar Islam 2 (1), 19-39	2020

292	Social Conflict Due To The Controversy Of Mosques Qibla Direction In Sejiram Village, Sambas Regency	R Akbar, A Asman	Jurnal Ilmiah Al-Syirah 18 (1), 1-12	2020
293	Pendidikan Islam di Kesultanan Sambas Awal Abad XX	Y Safitri, H Yusnita	Jurnal SAMPAS: (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah), 3 (1), 73-94	2020
294	Flat Earth Vs Globe Earth : Telaah Kritis Atas Teori Bumi Bulat dan Datar Perspektif Filsafat Ilmu dan Sains	R Akbar	PT Lontar Digital Asia	2020
295	Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam	Z Arifin	Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 5 (1), 141-158	2020
296	Open Defecation Free in Kartiasa Village in The Era Of Regional Autonomy: Implementation and Barriers	T Muchsin, SS Saliro	Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 20 (2), 121-134	2020
297	Pengembangan Multimedia CD Interaktif Materi Khulafa'ur Rasyidin Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Eliyah	Primarily	2020
298	Problematika Pernikahan Dini di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas	D Juliana	Al-Muttaqin: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 6 (1), 77-94	2020
299	Implementation of Religious Character Education Through School Culture Transformation	Suriadi	International Journal of Advanced Science and Technology 29 (8), 2749 - 2755	2020

300	Pengembangan Keterampilan Motorik Halus Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Mewarnai	D Nurvitri, NA Multahada	PrimEarly: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini 3(2), 128-133	2020
301	Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat	N Nur Syamsiah	Cros-border, 3 (2), 84-95	2020
302	Dampak Islamisasi terhadap Agama dan Kebudayaan Lokal di Paloh, Kalimantan Barat, dalam Buku Agama & Budaya Nusantara Pasca Islamisasi	A dan Purniadi Putra	Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama	2020
303	A Brief History of Primordial Light from the Perspectives of Sufi and Modern Science	WQAW Razali, AFM Zabidi, S Radiman, AL Samian	Islmiyyt 42 (2), 3-13	2020
304	The Implication of the Application of the Differentiation Focus Strategies to Competitive Advantage at Private Islamic Education Institution	Hifza, Marlina, Widiyanti, A Rustam, AH Fathani, P Wahyuni	International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24 (06)	2020
305	The Role of Regional House of Representatives In Carrying Out Good Government (Good Governance) In Regional Autonomy Era	T Muchsin, J Akadol	Journal of Islamic 5 (30), 76-85	2020
306	How The Research Skills Development Framework May Be Useful For Indonesian Higher Education Learning Practice	O Hutagaluh, SO Manullang, M Hamid, AS Arief, D Abdurrahman	Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 5 (3), 347-359	2020

307	Bureaucracy of The Sambas Sultanate During The Dutch Colonial Period (1818-1942)	R Risa, AM Sewang, S Syamsudduha, H Hasaruddin	Jurnal Adabiyah 20 (1), 69-91	2020
308	Masyiah Dalam Al-Qur'an Ditinjau Dari Perspektif Teologi Pendidikan	Suriadi	Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam 2 (2), 151-166	2020
309	Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Tugas Dan Peran Guru Dalam Mengajar	U Ubabuddin	Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 5 (1), 102-118	2020
310	Sejarah dan Budaya Lokal dalam Bingkai Politik Kebudayaan Nasional	Sunandar	CV. Bintang Surya Madani	2020
311	Recitation of Wedding Agreements In Islam: Study On Sambas Malay Society of West Kalimantan	Asman	MJSL: Malaysian Journal of Syariah and Law, 8 (2), 41-53	2020
312	Tafsir Ayat-ayat Sosial Kemasyarakatan Dalam Al-Quran	A Zabidi	Al-Muttaqin: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 6 (1), 24-37	2020
313	Improving The Quality of Education Throgh Technical Proficiency	A Arnadi, H Hifza, Dedi S	<u>International Journal of Social Sciences and Humanities</u> , 4 (3), 68-74	2020
314	Penerapan Pendekatan Pragmatik Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Kelas IV	Y Supyana, P Putra	Jurnal Keilmuan dan Kependidikan Dasar 12 (2)	2020
316	Perkembangan Tarekat Al-Mu'min di Kabupaten Sambas Tahun 1997-2018	R Purnama, Tomi	Jurnal SAMBAS:(Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah), 3 (1), 42-52	2020
317	Tantangan Ekonomi Syariah Zaman Modern	B Iswanto	CBJIS Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross Border Islamic Studies, 2 (1), 16-29	2020
318	Implikasi Covid Terhadap Proses Pembelajaran di Sekolah	Patriana	Edukatif 6, 132-139	2020
319	Keterampilan Kitabah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab	A Rathomi	Tarbiya Islamica 1 (Jurnal Keguruan dan Pendidikan Islam), 1-8	2020

320	Problematika Orang Tua Single Parent Dalam Memberikan Pembinaan Keagamaan di Lingkungan Keluarga	H Yusnita, E Sartika	Al-Muttaqin: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 6 (1), 1-23	2020
321	Implementasi Pendekatan Contextual Teaching and Learning pada Pembelajaran Qur'an Hadits	Suriadi	Journal Educative : Journal of Educational Studies 5 (1), 84-99	2020
322	Konsep Fitrah Dalam Pendidikan Anak Usia Dini	A Multahada	PrimEarly: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini 3 (1), 93-99	2020
323	Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi	Asman	PT. Raja Grafindo Persada	2020
324	Challenges and Opportunities Towards Islamic Cultured Generation: Socio-Cultural Analysis	A Suroso, P Hendriarto, GNK MR, PJ Pattiasina, A Aslan	Linguistics and Culture Review 5 (1), 180-194	2021
325	Gejala Diagnostik dan Remedial Pada Anak Didik di Pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	R Rusiadi, A Aslan	Borneo: Journal of Islamic Studies 1 (2), 18-27	2021
326	The Effectiveness of Al-Quran Memorization Methods for Millennials Santri During Covid-19 in Indonesia	SO Manullang, M Mardani, A Aslan	Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam 4 (2), 195-207	2021
327	Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media Permainan Ular Tangga Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 02 Lengkenat	A Hasan, P Putra	Jurnal Bidang Kependidikan, Pembelajaran, dan Pengembangan, 3 (1), 15-20	2021
328	Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Z Arifin	Teraju 1 (TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum), 1-11	2021

329	Establishment of A Religious Culture in School	U Ubabuddin, U Nasikhah, A Subowo	Journal of Contemporary Islamic Education 1 (1), 1-9	2021
330	Pencak Silat Sebagai Media Dakwah (Analisis Pada Perguruan Pencak Silat Susun Sirih Kecamatan Selakau)	AR Dagun, Deni Irawan	Al-Muttaqin : Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 6 (1), 24-43	2021
331	Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Di Masa Pandemi Covid-19 (di SMA Negeri 1 Ketungau Hilir)	D Saputra, P Putra, WP Sari	Cross-border 4 (2), 87-95	2021
332	Demi Waktu: Perjalanan Menempuh Pendidikan Formal	A Aslan	Pusaka Pranala	2021
333	The Understanding Strategy of Worship To Exceptional Children	S Syamsuri, K Kaspullah, A Aslan	EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal) 9 (1), 18-31	2021
334	Perbatasan Negara Perspektif Hukum Internasional	MH Nur Syamsiah,S.Hum.		2021
335	The Patterns of Islamic Education Development during the Era of Bani Umayyah: Education Institution and Curriculum, and Teachers	W Wahidah, S Samsuri	Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies), 9 (1)	2021
336	Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective	ZA dan Hatoli	Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 19 (1), 91-105	2021
337	Kurikulum PAI Tematik Dalam Pembentukan Akhlaq Anak Sholeh Pada Usia	A Hasan, A Aslan, U Ubabuddin	Cross-border 4 (2), 180-188	2021

	Dini			
338	Existence of Marriage Agreements in Islam Development Studies in the Community of Malay Border Indonesia-Malaysia	A Asman, M Marilang, K Kurniati	Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 19 (1), 16-29	2021
339	Proses Penciptaan Manusia Sebagai Media Pembelajaran Dalam Al-Quran	Eliyah	Cross-Border	2021
340	Praktik Perjanjian Jual Beli Perumahan Hijau Daun Asri Kota Singkawang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam	D Armelia, D Yuniarti, T Tehedi	AL-SULTHANIYAH: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik Pemerintahan 1 (1), 39-49	2021
341	Implikasi Teori Belajar Gestalt	Patriana	Cross-border, Jurnal Kajian Perbatasan 4, 73-82	2021
342	Fungsi Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur)	M Tamrin	Madani Legal Review 5 (1), 13-27	2021
343	Sebuah Pengantar Hukum Perdata Islam : Kajian Teoritis	Asman		2021
344	Tantangan Pendidikan Islam di Wilayah Perbatasan	Y Ridwan	Cross-border 4 (1), 103-113	2021
345	Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Otoriter, Demokratis dan Permisif Terhadap Perilaku Keagamaan Siswa di SDN 32 Tanjung Bakau Kecamatan Teluk Keramat	J Juniardi, P Putra, J Jaelani	Jurnal Pendidikan Dasar 1 (1), 23-30	2021
346	Application of Halal Certification by Indonesian Ulema Council on Electronic and Non-Consumption Products: Masalah Perspective	ZA dan Hatoli	Justicia Islamica 18 (juni 2021), 115-131	2021

347	Analisis Minat Menabung Nasabah Pada Masa Pandemi Covid 19 di Bank Kalbar Syariah Cabang Singkawang	E Nathasa, I Kusnadi	Cross-Border 4 (2), 96-119	2021
348	Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Imtaq dan Iptek di Era Revolusi Industri 4.0 Pada Mata Pelajaran Sains di Madrasah Ibtidaiyah	P Putra	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	2021
349	Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas	H Hasiah, T Tamrin, S Somiadi	YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum 7 (1), 39-45	2021
350	Profesionalisme Guru Berbasis Religius	Suriadi		2021
351	Women in View West Law and Islamic Law	Z Arifin	Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 4 (2)	2021
352	Penilaian Pengetahuan Penugasan Dalam Pembelajaran di Sekolah	J Jeprianto, U Ubabuddin, H Herwani	Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2 (1), 16-20	2021
353	Hukum Waris: Panduan Dasar untuk Keluarga Muslim: Kajian Teori, Praktik, dan Contoh Kasus	SPI Asman	Insan Cendekia Mandiri	2021
354	Upaya Guru Dalam Melatih Kemandirian Anak Usia Dini	D Ferawati, A Multahada	PrimEarly: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini 4 (1), 192-199	2021
355	Strategi Fundraising dan Filantropi Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) di Kabupaten Sambas	S Sunantri, A Rafik	Al-Muttaqin: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 6 (2), 103-115	2021
356	Integritas Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an Terhadap	A Zabidi	Al-Muttaqin: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 6 (1), 44-59	2021

	Pilkada dan Permasalahannya			
357	The Relevance of Inquiry-Based Learning in Basic Reading Skills Exercises for Improving Student Learning Outcomes in Madrasah Ibtidaiyah	A Aslan	At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam 5 (01), 28-41	2021
358	Maqasid al-Shariah in Islamic Law Renewal: The Impact of New Normal Rules on Islamic Law Practices during the Covid-19 Pandemic	A Asman, T Muchsin	Mazahib 20 (1)	2021
359	Wajah Pendidikan Era New Normal	P Putra, H Putri, U Salamah, YT Astuti, N Listiyaningsih, A Fauzi	Pustaka Learning Center	2021
360	The Strategy of Tadzkirah in Implementing Characters at MAN Insan Cendekia Sambas	L Liliana, P Putra, A Aslan	Edukasi 9 (1)	2021
361	The Use Malays-Sambas Expressions in Developing Character Education in Sambas Primary Madrasah in Millennial Era	P Putra, G NK MR, A Hafiz, D Pratama, A Samad	Jurnal Ilmiah Peuradeun 9 (2), 329-344	2021
362	Penerapan Metode Keteladanan Oleh Guru Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Siswa Dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak di MIS At-Taqwa Sambas	H Pratiwi, R Rusiadi	Cross-border 4 (2), 189-200	2021
363	Transformasi Gender ke Transgender Perspektif Hukum Islam	Asman	Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah): Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak, 4 (1)	2021

364	Transdisiplinartitas Dalam Pendidikan Islam	P Putra	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	2021
365	Problematika Orang Tua Single Parent Dalam Memberikan Pembinaan Keagamaan di Lingkungan Keluarga	H Yusnita, E Sartika	Al-Muttaqin: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 6 (1), 1-23	2021
366	Pendidikan karakter berbasis budaya dalam Kelurahan Melayu Muslim Sambas	S Samsuri	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	2021
367	The Distribution Mechanism of Subsidized Liquid Petroleum Gas in Sajad District West Kalimantan: An Investigation Based on Islamic Law	Z Arifin	Jurnal Manahij 1 1-18	2021
368	The Red Yarn of Contemporary Islamic Law Reform: A Critical Study of Abdullahi Ahmed An-Nas Thought	A Asman	Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 21 (1)	2021
369	Tradisi Bepapas Sebagai Media Dakwah di Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas	E Berti, Manja	Jurnal SAMBAS : (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah), 3 (2)	2021
370	Konseling Human Trafficking di Sambas	R Muhammad	Jurnal Pendidikan dan Konseling 3 (2), 157-161	2021
371	Pengaruh Ekspektasi Guru terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas VI Semester I di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Muawwanah Jombang	I Muttaqin	Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 4 (1), 1-12	2021
372	Mempertanyakan Materi Muatan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dan	T Muchsin, S Sudono Saliro	Pamator Journal 14 (1), 79-87	2021

	Pornografi di Kabupaten Sambas			
373	Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan di Polres Sambas Pasca Diundangkannya PP Nomor 58 Tahun 2010	P Yudono, SSS Rini	Madani Legal Review 5 (1), 1-12	2021
374	Education of Religious Characters in Indonesia	M Adnan, S Jayadi, AI Yayan Ridwan		2021
375	Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam Menanankan Karakter Sopan Santun Peserta Didik Kelas V B di Madrasah Ibtidaiyah Swasta At-Taqwa Sambas	T Wiwit Destu, Nuraini	Edukatif 7 (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan), 17-24	2021
376	The Values of Islamic Education In The Betawar Tradition of The Sambas Melayu Society	M Madri, P Putra, A Aslan	At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam 4 (1)	2021
377	Implementasi Teknik Reading Aloud dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Surah Pendek Pada Siswa Kelas V di MIN 2 Sambas Tahun Pelajaran 2019-2020	N Syaifudin, Wildawati	Jurnal Keislaman 4 (Maret 2021), 70-84	2021
378	Understanding the Implications of Research Skills Development Framework for Indonesian Academic Outcomes Improvement	P Hendriarto, A Mursidi, N Kalbuana, N Aini, A Aslan	Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan 6 (2), 51-60	2021
379	Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif	Asman	JIL: Journal of Islamic Law, 2 (1), 119-137	2021

380	Pendekatan Etnopedagogi dalam Pembelajaran IPA SD/MI	P Putra	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	2021
381	Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Berdemokrasi (Studi Kasus Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia)	I Riadi, P Putra, S Sunantri, A Arnadi	Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan 3 (5), 2551-2558	2021
382	Epistemologi: Ilmu Hadits dan Ilmu Hukum Islam	R Nuryadin, AM Par, H Angkasa, MP Sugiharto, MSI Zarul Arifin	EDU PUBLISHER	2021
383	Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)	ABW Rani Rahim, Saodah, Sri Sulistyaningsih Natalia Daeng Tiring, Asman		2021
384	The Students Learning From Home Experience During Covid-19 School Closures Policy in Indonesia	P Putra	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	2021
385	Analisis Implementasi Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling	R Muhammad, Patriana	Edukatif 7 (1), 53-65	2021
386	Toleransi Meja Makan: Bisnis, Budaya Pedagang Kuliner, dan Interaksi Sosial Pedagang di Kota Singkawang	SS Saliro, T Muchsin, B Baharuddin	NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam 5 (1), 31-40	2021
387	Upaya Mediasi dan Akibat Hukum Sengketa Pertanahan di Kantor BPN Kabupaten Sambas	J Jamiat, SS Saliro, S Samsul	YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum 7 (1), 46-51	2021
388	Study on the Causes of Inaccuracy of Qibla Direction of the Great Mosque Baitul Makmur West Aceh	RA Mustaqim, R Akbar	Jurnal Ilmiah Al-Syirah 19 (1), 30-45	2021

389	Permasalahan Sekolah di Perkotaan	MS Huda	Cross-border 4 (1), 30-36	2021
390	Implementasi Sikap Disiplin di Lembaga Madrasah Ibtidaiyah (MI) Dalam Pembentukan Moral Anak	P Putra	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	2021
391	Pengaruh Kebiasaan Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran Tematik Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta At-Taqwa Sambas	P Parni, T Topik	Cross-border 4 (1), 52-60	2021
392	Model Pembelajaran Scramble untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadits di Madrasah Ibtidaiyah	P Putra	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	2021
393	Implementasi Teori Belajar Gestalt	Patriana	Cross-border, Jurnal Kajian Perbatasan 4, 73-82	2021
394	Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	H Asman, Zarul Arifin, Desi Yuniarti, Sri Sudono Saliro	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	2021
395	Baitul Mal in Sambas in The Colonial Period: The History of Establishment And Management	S Sunandar, BY Posha, L Lamazi, H Yusnita	JURISDICTION 12 (1), 63-85	2021
396	The Relationship Between Fundamentalism and Islamic Radicalism Relationship With Social Conflict	D Irawan, Z Arifin	Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 21 (1)	2021
397	Sharia Banking Strategy in Improving Gross Regional Domestic Products in Sambas District, Indonesia	S Deti, O Hutagaluh, H Towpek	IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 10 (1), 1-16	2021

398	Pengantar Hukum Islam di Indonesia	UH Rosida, MH SH, SEI Baiq Ismiati, ME MH, MHI Umi Salamah	EDU PUBLISHER	2021
399	Agama dan Budaya Nusantara Pasca Islamisasi	P Putra	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	2021
400	Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik	R Muhammad	Al-Muttaqin: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 6 (1), 95-102	2021
401	Siyasah Dusturiyyah: Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Sambas	H Hasiah, SS Saliro, T Tamrin, TI Harada	HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum 5 (1)	2021
402	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Tahun 2019 Perspektif Siyasah Syariahy	H Hasiah, SS Saliro, Y Purwadi	Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 7 (1), 1-16	2021
403	The Marketing Mix Strategy Analysis To Attract Prospective Students In Selecting Programs In Islamic Institute of Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	B Iswanto	Cross-Border Journal of Business Management 1 (1), 52-64	2021
404	Pengaruh Ekspektasi Guru terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas VI Semester I di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Muawwanah Jombang Authors Eliyah	A Eliyah, Imam Muttaqin	Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 4(1), 1-12.	2021
405	Pengaruh Supervisi Kepala Madrasah dan Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-	A Arnadi, P Putra, H Hamdah	Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 5 (2), 90-100	2021

	Kabupaten Sambas			
406	Pengaruh Pendidikan Keluarga Terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam di SD Pimpinan Parit Kabupaten Sambas	P Topik	FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan, 75-90	2021
407	Kesulitan Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Dalam Melakukan Penilaian Sikap Peserta Didik	S Awaliyah, SA Patriana	PrimEarly: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini 4 (1), 167-177	2021
408	Understanding Islam and The Impact on Indonesian Harmony and Diversity	SO Manullang, M Mardani, P Hendriarto, A Aslan	Al-Ulum 21 (1), 68-88	2021
409	Islam di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Potret Dakwah di Sajingan Besar, Kalimantan Barat	DIM Imanuddin Imanuddin, Deni Irawan, Zulfikar Ghazali	Syams: Jurnal Kajian Keislaman 2 (1)	2021
410	Adaptasi dan Tranformasi Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19	SS Baiq Ismiati, Nanang Rustandi, Muchamad Adam Basori, Jeri Ardiansa, Asman .	Mentari Bookstore	2021
411	Perubahan Kurikulum Lembaga Pendidikan Islam di Sambas Pada Masa Kesultanan Sambas	P Putra	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	2021
412	Tari Japen Lambut Sebagai Media Dakwah Pada Masyarakat di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas	N Hidayat	Jurnal SAMBAS : (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah), 3 (2)	2021
413	Performance of Islamic Law In Indonesia In The Fields of Civil, Private Law, Public Law And Ethics	Z Arifin	Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 21 (1)	2021

414	Menelisik Nikah Beda Agama di Indonesia dalam Kajian Yuridis Normatif	Asman	Al-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 7 (1)	2021
-----	---	-------	---	------

Daftar Publikasi Penelitian Dosen IAIS Sambas Tahun 2018-2021.
Diambil dari Dokumen IAIS Sambas, 2022a

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN
1	Iva Ashari Ananda,SEI.,ME (Ketua Tim) U.Sulia Sukmawati,ME (Anggota Tim) Ahmad Yasir, SE.,ME (Anggota Tim)	Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan
2	Neli, Lc.,ME (Ketua Tim) U.Sulia Sukmawati,ME (Anggota Tim) Ahmad Yasir, SE.,ME (Anggota Tim)	Analisis Kontribusi Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Bisnis Online selama Pandemi Covid 19 Perspektif Islam

Program Hibah Penelitian Dosen IAIS Sambas Tahun Anggaran
2019/2020
Diambil dari Dokumen LP2M IAIS Sambas, 2020.

NO	KETUA PENELITI	JUDUL
1	Dr. Aslan, M.Pd.I	Relevansi Buku-Buku Referensi Ilmu Falak di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) terhadap Konsep Sains Kebumihan pada Pokok Bahasan Arab Kiblat
2	Dewi Ferawati,S.S.,M.Pd	Pengembangan Bahan Arab Berbasis Sosial Budaya Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
3	Eliyah, S,Pd.I.,M.Pd	Hubungan Antara Pengetahuan Pendidikan Agama Islam dan Matematika Dasar Mahasiswa Semester III Di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas Tahun Akademik 2020/2021
4	Dr. Jaelani, M.Hum	Eksististensi Budaya Melayu dalam Tantangan

		Global (Studi Terhadap Tradisi Besaprah Pada Masyarakat Melayu di Kecamatan Sambas Tahun 2001-2020)
5	Dr. Purniadi Putra, M.Pd.I	Transformasi Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus MIN 2 Sambas dan SD IT Sulthoniyah Sambas)
6	Tahedi, S.E.I.,M.S.I	Strategi Badan Wakaf Indonesia Terhadap Perlindungan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Sambas
7	Dr. Wulan Purnamasari, M.Ec.,Dev.	Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan Negara Kabupaten Sambas Di Kecamatan Paloh

Program Hibah Penelitian Dosen IAIS Sambas Tahun Anggaran
2020/2021

Diambil dari Dokumen LP2M IAIS Sambas, 2021a

D. Merasakan Kehadiran Kita

IAIS Sambas dalam mengawal unsur tri dharma perguruan tinggi, sejak mulai berdiri hingga sekarang telah melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diantaranya dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bagi mahasiswa S1 pada setiap semester VI sebagai pemenuhan unsur pengabdian mahasiswa dalam SKS program sarjana. PkM dilaksanakan di lingkungan Kecamatan/Kabupaten Sambas juga disebar di berbagai wilayah luar Sambas, dan PkM luar negeri.

Kegiatan pengabdian meliputi jenis kegiatan bimbingan keagamaan, motivasi kesejahteraan sosial, dakwah, penyaluran stimulasi ekonomi mikro masyarakat, penyuluhan edukatif, serta bantuan dan advokasi hukum. Di samping itu, program desa binaan yang telah ditetapkan oleh IAIS Sambas sebagai segmentasi pengabdian meliputi kegiatan pembinaan masyarakat, pengembangan karakter,

siraman rohani, pengembangan ekonomi masyarakat, dan mengupayakan pengembangan status desa binaan.

Secara lebih rinci, daftar pengabdian masyarakat yang telah dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Rekor IAIS Sambas Nomor: 032 Tahun 2021 dideskripsikan sebagai berikut:

NO	NAMA	KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1	Wahab, MM (Ketua) Gustina, MM (Anggota) Jum'an ,SE,MM (Anggota)	Pengelolaan Manajemen GAPOKTAN dalam Meningkatkan Perekonomian pada Masa Pandemi di Desa Tebas Kuala Kecamatan
2	Dr. Wulan Purnamasari, M.Ec.,Dev (Ketua) U. Sulia Sukmawati, ME (Anggota) Oskar Hutagaluh, MM.,M.Si (Anggota)	Pengembangan Desa Pandawan Sebagai Desa Wisata
3	Dr. Deni Irawan, S.Sos.I.MSI (Ketua) Dr. Munadi, SEI.,MSI (Anggota)	Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah pada Masyarakat Muslim di Desa Pandawan Kecamatan Sambas
4	Dewi Ferawati, SS.,M,Pd.I (Ketua) Elsa Mulya Karllina, S.Pd.MS (Anggota) Effiyadi, S.Pd,M.Pd (Anggota)	Program Pelatihan Guru Bahasa Indonesia dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Puisi dengan Model Amati, Tiru dan Modifikasi Menggunakan Media Video Pembacaan Puisi pada Siswa Kelas X dan XI SMA Negeri 2 Teluk Keramat
5	M. Sabiqul Huda, M.Pd.I (Ketua) Muhammad Asyura, M.Pd (Anggota) H.Syafiuddin, M.Pd (Anggota)	Program Seminar Public Speaking dan Event Organizer dalam Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara dan Efektivitas Penyelenggaraan Acara Layanan Masyarakat pada Pegawai Perangkat Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat
6	Tahedi ,SEI.,MSI (Ketua) Reza Akbar, S.Si.MH (Anggota)	Inisiasi Pendirian Lembaga Falakiyah dalam Rangka Memberikan Layanan Falakiyah kepada Masyarakat Muslim Kabupaten Sambas
7	H.Tamrin,S.IP.,MH (Ketua) Sri Sudono Saliro, SH,MH (Anggota) Hasiah, MH (Anggota)	Teknik Penyusunan Peraturan Desa dalam Rangka Penangan Pelanggaran Oleh Anak di Desa Tengguli

8	Suhari, MSI (Ketua) Muspian, S.Pd.I.,M.Pd (Anggota)	Pelatihan Pengurusan Jenazah di Desa Sebangun
9	Rusiadi, M.Ag (Ketua) Dr. Aslan., M.Pd.I (Anggota)	Pembinaan Khotib dan Imam Sholat Jum'at di Desa Sebangun
10	Desi Yuniarti, SEI.,M.Si (Ketua) Nur Syamsiah, MH (Anggota) Mayang Rosana, SH.,MH (Anggota)	Peranan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Sejangkung dalam Meningkatkan Perekonomian Desa
11	Dr. H. Sumar'in. MSI(Ketua) H.Nashirun. Lc.,ME (Anggota)	Pendampingan Pendirian MBT di Kecamatan Tekarang
12	Eliyah, S.Pd.I.,M.Pd.I (Ketua) Asyruni Multahada, M.Pd (Anggota) Astaman, MA (Anggota)	Program Pelatihan Guru Dalam Pembuatan dan Implementasi Media Cerita Bergambar pada Anak Usia Dini di Pusat Kerja Guru (PKG) Kecamatan Semparuk
13	Dr.Aslan, M.Pd (Ketua) Rusiadi, M.Ag (Anggota)	Pembinaan Majelis Aklim Al-Itqiyah' Desa Matang Danau Kecamatan Paloh
14	Dr.Purniadi Putra, M.Pd (Ketua) Dr.Arnadi, M.Pd (Anggota) Hadisa Putri, M.Pd.I (Anggota)	Pelatihan Pedidikan bagi Orang Tua Siswa pada Masa Pandemi Covid 19 di Madrasah Ibtidayah Negeri 2 Sambas
15	Yusrain, S.Pd.,M.Pd (Ketua) Enik Sartika, S.Pd.I.,M.Pd (Anggota)	Penyuluhan Pemahaman Gender pada Siswa di Lingkungan MAN 1 Sambas

Daftar PkM Dosen IAIS Sambas Tahun Anggaran 2020/2021
Diambil dari Dokumen LP2M IAIS Sambas, 2021b

E. Penutup

Mutu IAIS Sambas secara umum tergambar melalui SPMI yang dilaksanakan di internal kampus dan SPME atau hasil akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT. Secara bertahap dan berkelanjutan IAIS Sambas berusaha untuk selalui meningkatkan mutu dan mengawal perkembangannya. Bukti nyata usaha tersebut diwakili oleh hasil *akreditasi* institusi dan program studi. Hal ini sejalan dengan milestone IAIS Sambas menggambarkan capaian dari tahapan *Forming* (2018-2022). Capaian ini akan dikawal agar berkelanjutan pada tahap

Empowering atau Penguatan (2022-2026) yang diarahkan menuju *Empowering University*.

Publikasi penelitian dosen IAIS Sambas Tahun 2018-2021 yang tercatat di SINTA berjumlah 414 artikel. Program hibah penelitian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun Anggaran 2019/2020 berjumlah 2 judul penelitian. Program hibah penelitian IAIS Sambas Tahun Anggaran 2020/2021 berjumlah 7 judul penelitian. Penerima Dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat IAIS Sambas Tahun Anggaran 2020/2021 berjumlah 15 judul.

DAFTAR PUSTAKA

- IAIS Sambas. (2019a). Peraturan Yayasan Akhlakul Karimah Nomor 1 Tentang Statuta IAIS Sambas. Sambas.
- IAIS Sambas. (2019b). Rencana Induk Pengembangan (RIP). Sambas
- IAIS Sambas. (2022a.) Data Artikel Dosen IAIS Sambas di Sinta. *Sinta3.Kemdikbud.Go.Id*
<<https://sinta3.kemdikbud.go.id/journals/index/4817>>
- IAIS Sambas. (2022b). Masa Akreditasi Institusi dan Program Studi IAIS Sambas. Diakses 15 Maret 2022, dari www.laisambas.ac.id
<<https://www.laisambas.ac.id/sertifikat-akreditasi-program-studi/>> .
- LP2M IAIS Sambas. (2018). *Pedoman Penelitian*. Sambas.
- LP2M IAIS Sambas. (2020). *Program Hibah Penelitian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun Anggaran 2019/2020*
- LP2M IAIS Sambas. (2021a.) *Program Hibah Penelitian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun Anggaran 2020/2021*.
- LP2M IAIS Sambas. (2021b). *Surat Keputusan Rekor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Nomor: 032 Tentang Rekapitulasi Penerima Dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Tahun Anggaran 2020/2021*.
- LPM IAIS Sambas. (2022). Informasi Akreditasi Institusi Dan Program Studi IAIS Sambas. Diakses 15 Maret 2022, dari <http://lpm.laisambas.ac.id/>
<<http://lpm.laisambas.ac.id/akreditasi/>>.

BAGIAN EMPAT

MENUJU *WORLD CLASS*
ISLAMIC UNIVERSITY
DI KAWASAN ASIA TENGGARA

MENUJU IAIN SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Purniadi Putra dan Oskar Hutagaluh

A. *Pendahuluan*

Perubahan status Perguruan Tinggi dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang, sekaligus perluasan akses pendidikan tinggi. Seperti diketahui, dalam Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU-PT) yang akan disahkan pada Juli 2012 mendatang tercantum aturan main mengenai kewajiban pemerintah membangun minimal satu PTN di setiap provinsi dan daerah-daerah perbatasan (Akuntono, 2012).

Berdasarkan pernyataan di atas menurut Tilaar (Yaniasti, 2017) pentingnya suatu paradigma baru dalam menghadapi tantangan yang baru dalam menghadapi paradigma lama, maka segala usaha yang dijalankan akan menemui kegagalan. Tantangan yang baru menuntut adanya paradigma yang baru, dan paradigma baru menuntut proses terobosan pemikiran (*break through thinking process*), apalagi jika yang kita inginkan adalah *output* yang bermutu yang dapat bersaing dengan karya dalam dunia yang serba terbuka.

Keberadaan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ini merupakan lokomotif penggerak pembangunan di bidang agama dan non agama serta pencerdasan spiritual anak bangsa, sehingga menghasilkan sarjana yang utuh keilmuan, berakhlakul karimah dan profesional dalam menjawab tantangan global. Selain itu, hadirnya lembaga pendidikan tinggi agama Islam di wilayah perbatasan diharapkan mampu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI dalam upaya mencegah radikalisme,

menumbuhkan sikap nasionalisme dalam bingkai pemahaman keagamaan yang utuh dan upaya-upaya lain yang dapat memecah-belah wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, alasan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dikarenakan beberapa hal diantaranya: (a) perkembangan wilayah yang sangat cepat baik yang menuntutantisipasi pengembangan pendidikan tinggi baik dari jenis program studi maupun jenjang, hal ini menuntut investasi yang cukup besar melebihi kemampuan daerah, (b) Luas wilayah Kabupaten Sambas 6395,70 KM persegi dengan jumlah penduduk 538.799 jiwa dengan jumlah SMA/MA sebanyak 55 sekolah dengan jumlah siswa 7.521 dan jumlah SMK sebanyak 21 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 16.310 siswa, memerlukan pendidikan lanjut, mengingat keberadaan Pendidikan tinggi Islam Negeri terdekat adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dengan waktu tempuh perjalanan 5-6 jam perjalan darat, (c) dengan menjadi Institut Agama Islam (IAI) Negeri pemerintah pusat dapat mengintergrasikan program pemerintah dalam pendidikan tinggi untuk mengantisipasi dan menetralsir dampak negatif dan mengeksploitasi dampak positif dari keberadaan geopolitik dan ekonomi sebagai bagian terdepan dari batas dengan wilayah Malaysia dan (d) dapat berperan lebih optimal dalam menunjang Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Nasional.

Dengan demikian tujuan yang akan diharapkan adanya perubahan status Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri pada IAIS Sambas di daerah perbatasan akan terwujud karena sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia,

keadaan strategis menuntut pengembangan sarana pendidikan tinggi yang siap bersaing di antar negara.

B. Roadmap Dukungan Stakeholder

Stakeholder adalah individu kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (*positie* atau *negative*) oleh suatu kegiatan. Menurut Nugroho (Mahfud et al., 2011) stakeholder dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu: (a) *policy creator*, stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan, (b) koordinator, stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat, (c) fasilitator, stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran, (d) *Implementer*, stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran, (e) *akselerator*, stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa usulan penegerian IAIS Sambas ini harus di dukung penuh oleh Yayasan Akhlakul Karimah Sambas dan IAIS Sambas bersama Pemerintah Kabupaten Sambas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas. Hal tersebut merupakan dukungan yang kuat dari seluruh pemerksa penegerian mengingat pendirian IAIS Sambas merupakan inisintif dan keinginan dari Pemerintah Kabupaten Sambas yang disetujui DPRD Sambas pada waktu itu untuk mendirikan sebuah Perguruan Tinggi di Kabupaten Sambas.

Selain itu, secara tertulis penegerian IAIS Sambas juga telah mendapat dukungan secara tertulis dari beberapa elemen antara lain :

1. Bupati Sambas
2. DPRD Sambas
3. Yayasan Akhlakul Karimah Sambas
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas
6. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sambas
7. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Sambas
8. Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sambas
9. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kabupaten Sambas
10. Pengadilan Agama Sambas
11. Perbankan Syariah
12. Dewan Penyantun IAIS Sambas

Dengan adanya roadmap dukungan stakeholder menuju IAIN Sambas melibatkan pemerintah maupun non pemerintah. Seluruh stakeholders melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing untuk mencapai terpenuhinya IAIN Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dan tercapainya solusi untuk masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai Ditjen Dikti dalam penelitian (Purnama, 2014) adanya *higher education Long Term Strategy 2003-2010 (HELTS)* oleh Dirjen Dikti, wacana penjaminan mutu menjadi sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini mengingat di masa mendatang, eksistensi suatu perguruan tinggi tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian stakeholder tentang mutu pendidikan yang diselenggarakannya. Dengan demikian, stakeholder menempati posisi

yang menentukan kesinambungan penyelenggaraan pendidikan disuatu Perguruan Tinggi.

C. Membedah Jalan Berliku Menuju IAIN

Hadirnya IAIS Sambas merupakan salah satu mata rantai pendidikan tinggi Islam di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang dicita-citakan oleh seluruh elemen masyarakat Sambas yang terkenal religi dan berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. IAIS Sambas merupakan Perguruan Tinggi Agama di bawah payung Kementerian Agama RI yang secara akademik mengacu kepada system pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap jenis dan jenjang pendidikan formal, termasuk Perguruan Tinggi Agama, dalam rangka memikul tugas dan tanggungjawab mewujudkan pembangunan masyarakat yang religius dan berkeadaban. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Sambas yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan Agama Islam.

Visi dan praksis A. Malik Fadjar dalam pengembangan STAIN/IAIN menuju UIN merupakan usaha mempertegas, mempertajam dan memperbaharui pendidikan Islam dalam hal melayani kebutuhan mendasar manusia. Sebab pendidikan berkaitan masa depan umat manusia yang *sustainable* yang selalu mengalami dinamika di era global. Lembaga pendidikan tinggi agama sudah harus mendapatkan *wider mandate*, sebagai respon atas tantangan-tantangan baru yang dihadapinya. Dengan mandat lebih luas ini, antara lain, IAIN secara praksis diharapkan mampu berpartisipasi dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu normatif dengan ilmu-ilmu obyektif.

Tujuan dari perluasan mandat ini adalah reproduksi manusia akademis yang siap pakai dalam menghadapi tantangan zaman yang penuh dinamika di era global (Tunru, 2018).

Visi akademik PTI di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Setelah memperhatikan situasi sosial kemasyarakatan waktu itu, maka kemudian PTAIN dan ADIA dilebur menjadi satu lembaga PTI dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta. Pada saat diresmikan, visi IAIN ini adalah: “Untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam”. Yang menarik, terdapat sejumlah data sejarah yang semakin memperjelas visi atau arah ke depan orientasi akademik dari lembaga yang baru itu. Wasil Aziz (sekretaris pertama Senat Institut), misalnya menulis: “Perkembangan PTAIN dan ADIA menjadi IAIN memang sudah sewajarnya, karena mengingat bahwa perguruan tinggi tersebut telah berkembang dan tidak dapat lagi dimasukkan dalam satu fakultas (Minhaji, 2007).

D. Pentingnya Penegerian Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

1. Aspek Fundamental Pentingnya Penegerian

Dilihat dari sudut pandang politis, perubahan status dari swasta menjadi negeri membawa dampak politik yang luas. Dengan menjadi IAIN Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas pemerintah pusat dapat mengintergrasikan program pemerintah dalam pendidikan tinggi untuk mengantisipasi dan menetralsir dampak negatif dan mengeksploitasi dampak positif dari keberadaan geopolitik dan ekonomi sebagai bagian terdepan dari batas dengan wilayah Malaysia. Disisi lain, perubahan

status ini dalam rangka peningkatan Daya Saing Bangsa. Daya saing bangsa ditentukan oleh daya saing lokal/daerah. Oleh karena itu peningkatan daya saing daerah dalam rangka peningkatan daya saing bangsa secara umum.

Sebagaimana telah digambarkan secara umum perlunya status Perguruan Tinggi Negeri pada IAIS Sambas karena beberapa alasan penting sebagai berikut:

- a. Saat ini IAIS Sambas telah menjadi asset unggul daerah. Pemerintah Daerah, Yayasan Akhlakul Karimah dan Masyarakat Kabupaten Sambas mendukung sepenuhnya keberadaan dan pengembangan IAIS Sambas serta perubahan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Penegerian IAIS Sambas adalah sebuah usaha untuk mengkolaborasikan dukungan pihak swasta, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mempercepat pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya di Kabupaten Sambas dan sekitarnya.
- b. Sejak berdirinya IAIS Sambas hingga saat ini minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi terus meningkat hal dapat dilihat dari data jumlah lulusan SLTA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi di luar Kabupaten Sambas terutama ke Perguruan Tinggi Negeri, dikarenakan paradigma masyarakat yang masih kuat lebih mempercayai Perguruan Tinggi Negeri.
- c. Status sebagai Perguruan Tinggi Negeri akan meningkatkan citra IAIS Sambas dimata masyarakat Khususnya di Kabupaten Sambas dan umumnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kepercayaan masyarakat yang masih terikat kuat dengan status negeri sebuah perguruan tinggi akan menjadi modal untuk mempercepat

pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi melalui Perguruan Tinggi Negeri Islam khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

- d. Dengan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak melalui penegrian IAIS Sambas ditargetkan menjadi salah satu IAIN yang unggul ditingkat daerah dan nasional akhirnya mampu memberikan kontribusi lebih bagi peningkatan daya saing bangsa.
- e. Persaingan perguruan tinggi Agama dan non Agama yang ada di Kabupaten Sambas menjadi tidak berimbang di mana Perguruan Tinggi Non agama yakni Politeknik sudah berubah status menjadi Politeknik Negeri Sambas pada tahun 2013, hal ini berdampak pada berkurangnya minat mahasiswa untuk melanjutkan studinya di IAIS Sambas karena dianggap masih berstatus swasta.

Perubahan iklim, bencana, kerusakan lingkungan harus menjadi faktor yang harus ditanggulangi dalam pola pembangunan berkesinambungan. Konsep pengembangan ekonomi dan masyarakat yang mengedepankan pembangunan yang berkesinambungan, di dalamnya termuat konsep pengembangan karakter (keagamaan), lingkungan, energi terbarukan dan penanggulangan bencana alam. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia adalah, peningkatan sumber daya manusia khususnya di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, pengembangan sistem inovasi nasional, dan dukungan sector keuangan yang berpihak kepada pendanaan sektor riil yang produktif dalam kerangka pola pembangunan yang berkesinambungan.

2. Aspek Perekat Nasionalisme dan Kesatuan Bangsa

Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Ferrijana et al., 2018).

Letak geografis Kabupaten Sambas yang strategis tersebut merupakan bagian dari Geostrategi Indonesia yang harus dimanfaatkan sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan bangsa agar tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, sosial budaya dan hankam. Geostrategi Indonesia memanfaatkan wilayah Negara Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ATHG baik bersifat internal maupun eksternal.

Mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ipoleksusbudhankam maupun aspek alamiah, upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Hal ini juga berfungsi menunjang tugas pokok pemerintahan dalam:

- a. Menegakkan hukum dan ketertiban (*Law and Order*)
- b. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (*Welfare and Prosperity*)
- c. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan (*Defense and Prosperity*)
- d. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (*Yuridical Justice and Social Justice*)
- e. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (*Freedom of the People*)

Pengelolaan daerah perbatasan merupakan upaya untuk membentuk pertahanan Nasional (Tannas). Hakikat dari Tannas yaitu: *pertama*, bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. *Kedua*, membina aspek alamiah serta aspek sosial, dan *ketiga*, keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional. Dengan demikian pengelolaan geostrategik yang tepat kemampuan dan ketangguhan suatu dapat berdampak pada:

- a. Daya Tangkal (Ketahanan Idiologi, Ketahanan Politik, Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial Budaya dan Ketahanan Pertahanan dan Keamanan),
- b. Pengerah Potensi dan
- c. Menyatukan Pola Pikir dan Tindak.

Nasionalisme sejatinya juga dapat menjadi senjata ampuh dalam konteks kehidupan modern terutama di tengah arus globalisasi, terutama untuk mempertahankan identitas bangsa dari gempuran budaya asing. Nasionalisme dapat berfungsi untuk memberikan garis yang jelas antara budaya bangsa yang sesuai dengan perikehidupan masyarakat Indonesia dan budaya asing yang mengurangi rasa

kebangsaan secara nasional. Nasionalisme dengan demikian diharapkan menjadi filter aktif yang membentengi bangsa dari gaya hidup ala bangsa lain yang tidak sesuai bahkan tidak konstruktif bagi pembangunan karakter bangsa (Hamid, 2012).

3. Aspek Kebutuhan

Seiring dengan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Sambas diseluruh sektor mengakibatkan makin terbukanya lapangan usaha yang akhirnya kebutuhan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan bidang kerjanya atau bidang usaha turut meningkat. Bukan hanya di Kabupaten Sambas perkembangan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten tetapi juga di Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Provinsi di Kalimantan.

Otonomi perguruan tinggi seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan mutu akademik yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, masyarakat, pemerintah dan kebutuhan pasar serta lapangan kerja di bidang industri lainnya. Apalagi dengan kebijakan pemerintah tentang *zero growth* yang bermakna bahwa pengangkatan pegawai negeri berdasarkan kepada penggantian yang meninggal dan pensiun. Otonomi pendidikan seharusnya mengubah paradigma pendidikan tinggi dengan prinsip demokratisasi, keadilan serta memberdayakan potensi masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan (Pairin, 2017).

4. Aspek Pemerataan dan Kebutuhan Pendidikan

Kondisi objektif bangsa, tantangan global dan tantangan informasi teknologi, menjadikan perguruan tinggi di Indonesia dalam kondisi tertekan amat berat. Membangun perguruan tinggi, terutama

pada era globalisasi saat ini, dihadapkan kepada dinamika lingkungan eksternal perguruan tinggi yang sangat dipengaruhi ekonomi pasar. Sebaliknya, peran dan posisi perguruan tinggi juga mempengaruhi dinamika pasar terutama dalam kaitannya dengan pengembangan SDM dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkungan eksternal perguruan tinggi ini: adalah lingkungan strategik dimana kompetensi teras menerus terjadi dan tidak dapat berhenti atau dihentikan (Muhtaram et al., 2012).

Tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi pada masa revolusi global dewasa ini antara lain) antara lain adalah: (a) *High quality of human resources* yang diperlukan untuk mendorong pendidikan menjawab berbagai tantangan baru yang muncul akibat globalisasi, (b) *High capacity of management* yang intinya profesionalisme yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas manajemen untuk bersaing di pasar global, (c) Internasionalisasi sebagai akibat terbukanya perguruan tinggi dan sebagai akibat *networking* yang dibangun oleh perguruan tinggi dan (d) Daya saing global yang masuk ke dunia pendidikan tinggi, maka untuk dapat memposisikan lembaga pendidikan tinggi sejajar dengan perguruan tinggi dunia, maka diperlukan berbagai perubahan dan strategi dan dalam meningkatkan profesionalisme dalam manajemen.

Salah satu faktor penunjang keberlanjutan sebuah Perguruan Tinggi adalah *input* atau masukan yaitu jumlah peminat untuk masuk ke Perguruan Tinggi tersebut yang setiap tahun harus meningkat terus. Dengan meningkatnya peminat calon mahasiswa selain menjaga keberlanjutan sebuah Perguruan Tinggi juga dapat meningkatkan kompetitifnis yang pada akhirnya meningkatkan kualitas calon

mahasiswa yang diterima. Secara kelembagaan, posisi penting SMA/SMK/MA adalah mempersiapkan anak didiknya untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi. Jumlah angka siswa yang mengikuti ujian nasional tiap tahunnya, selanjutnya menjadi peluang dan potensi bagi perguruan tinggi khususnya IAIS Sambas untuk menjadi bagian dan pilihan para siswa yang akan melanjutkan studinya diperguruan tinggi. Salah satu misi Indonesia merdeka adalah mencerdaskan bangsa dalam rangka mewujudkan visi Indonesia yang sejahtera adil dan makmur. Mencerdaskan bangsa tidak dapat dilepaskan dari pendidikan terutama pendidikan formal. Kondisi saat ini dapat dilihat dari indikator yang ada secara umum agak memprihatinkan terutama dalam hal pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dan APK (Angka Partisipasi Kasar).

IPM adalah ukuran keberhasilan pembangunan yang diukur dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Saat ini Indonesia menempati urutan ke 117 dari 125 negara di Asia Pasifik dan menempati urutan paling bawah untuk tingkat ASEAN. Hal ini juga berdampak dalam peringkat *Human Competitiveness Indeks* yang menempati urutan ke 33 dari 33 negara (data OECD).

Di lain pihak dilihat dari APK (Angka Partisipasi kasar) yaitu mengukur sejauh mana proporsi masyarakat Indonesia yang berusia 19 tahun sampai dengan 25 tahun memasuki perguruan tinggi. Indonesia saat ini baru mencapai 17 % atau hanya 4,5 juta orang dari 25 juta orang yang memasuki pendidikan tinggi. Bandingkan dengan Malaysia 25 % dan Singapore 45 %, Filipina 20%, Korea 35 %. Padahal APK ini ikut menentukan kemampuan daya saing bangsa (*National Competitiveness*) yaitu sejauh mana produk kita memiliki pangsa

(*share*) di pasar global. Keadaan inipun bersifat semu karena diukur secara aggregate dimana rata-rata APK tingkat Wilayah hanya 5% sd. 7 % dan besaran menjadi 17 % karena dikontrol oleh Kopertis Wilayah DKI Jakarta 63 % dan Kopertis Wilayah V Jogyakarta 65 %. Salah satu upaya untuk mengatasi kondisi di atas diantaranya melalui peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi khususnya IAIN di Kabupaten Sambas.

Perguruan tinggi merupakan sebuah pihak yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penentuan kebijakan. Jikalau masuk dalam kajian kebijakan publik, maka perguruan tinggi dapat dimasukkan ke dalam *epistemic community*. Perguruan tinggi memiliki para professional yang memiliki kajian dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan hal tersebut dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan (Nulhaqim et al., 2016).

Hadirnya IAIN yang berlokasi di luar pulau Jawa yaitu di Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Sambas yang merupakan daerah perbatasan dengan Malaysia, IAIN Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dapat memberikan perluasan kesempatan kepada masyarakat yang akan melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. Dengan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak yaitu dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat melalui perubahan status penegrian, IAIN Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dapat berperan dalam menunjang Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Nasional.

E. Penutup

Paradigma perkembangan pendidikan dan adanya regulasi banyak membawa dampak terhadap Perguruan Tinggi Swasta. Dalam kajian Perguruan Tinggi swasta, masalah SDM yang menjadi hal yang krusial dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Mutu dosen dan keefektifan pegawai kependidikan menjadi hal yang utama untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi, selain itu juga daya saing lulusan perguruan tinggi merupakan salah satu indikator untuk menilai kekuatan daya saing suatu kualitas perguruan tinggi. Berbagai isu dan berbagai kondisi internal dan eksternal yang ada di dalam Perguruan Tinggi Swasta memiliki dampak positif dan negatif. Keberadaan IAIS Sambas yang berada di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan daerah yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia bertujuan sangat kuat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang berilmu dan beradab. Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi dan peranan IAIS Sambas yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah perbatasan untuk mendukung sepenuhnya rencana penegerian IAIS Sambas tersebut. Usulan penegerian IAIS Sambas bukanlah semata-mata inisiatif atau keinginan dari sivitas akademika, melainkan merupakan keinginan dari masyarakat dan kebutuhan pemerintah daerah yang akan menjadikan IAIS Sambas penghasil sumber daya manusia yang unggul dan profesional yang mampu bersaing baik ditingkat lokal maupun nasional pada era globalisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntono, I. (2012). Mendikbud Kenapa Kampus Swasta Dinegerikan. *Kompas.Com*.
- Hamid, E. S. (2012). Peran Pendidikan Untuk Mengukuhkan Nasionalisme dan Membangun Karakter Bangsa. *UNISA*, 34(76), 41-46.
- Mahfud, M. A. Z., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. V. (2011). Peran dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 2070-2076
- Minhaji, H. A. (2007). Masa Depan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia (Perspektif Sejarah-Sosial). *Tadris*, 2(2), 145-175
- Muhtaram, A., Sutarsih, C., & Rosalin, E. (2012). Strategi dan Hasil Kompetisi Perguruan Tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 14(1), 169-184.
- Nulhaqim, S. A., Heryadi, D. H., Pancasilawan, R., & Ferdryansyah, M. (2016). Peranan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Menghadapi Asean Community 2015 Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 154-272. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13209>
- Pairin. (2017). *Sejarah Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam*.
- Purnama, R. (2014). Analisis Model Kekuatan Stakeholder Dalam Desain dan Implementasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 5(2), 85-96.
- Ferrijana, S., Basseng, & Sejati, T. (2018). *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Tunru, Muh. I. (2009). STAIN/IAIN Menuju UIN (Perspektif Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar). *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 3(1), 21-36. <https://doi.org/10.30984/jii.v3i1.547>.
- Yaniasti, N. L. (2017). Strategi Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta. *Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi*, 11.

MENJADI PERGURUAN TINGGI RUJUKAN DALAM PENGEMBANGAN KAJIAN KEILMUAN DAN KEISLAMAN BERWAWASAN LINTAS NEGARA DI ASIA TENGGARA

Hifza

A. *Pendahuluan*

Perubahan dalam kehidupan manusia merupakan *sunnatullah*. Sejarah telah membuktikan bahwa sejak kehidupan manusia pertama di muka bumi, manusia telah mengalami (melakukan) banyak perubahan dalam kehidupannya. Dengan sifatnya yang dinamis dan kompleks, manusia akan selalu bergerak, berkembang, bahkan berinovasi, sehingga tidak pernah berhenti pada satu titik pencapaian.

Begitupun dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan, khususnya institusi perguruan tinggi. Perubahan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kelembagaan. Apalagi tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah tujuan yang bersifat jangka panjang. Perubahan menjadi sangat diperlukan, agar dalam prosesnya dapat dilakukan secara maksimal (Hifza, Antoni et al., 2020).

Tujuan jangka panjang atau yang biasa disebut dengan visi adalah cita-cita atau masa depan yang ingin dicapai dan mengarah kepada suatu keadaan yang ideal, namun tetap terukur dan realistis (Hifza, Juliana et al., 2020). Visi merupakan suatu cita-cita tentang keadaan di masa mendatang yang ingin diwujudkan oleh seluruh personel organisasi, mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah (Akdon, 2005).

Guna mencapai visi kelembagaan pada institusi perguruan tinggi tersebut, upaya perubahan menjadi bagian penting, karena didalamnya terkandung tahapan-tahapan yang menjadi titik pijak

dalam proses mencapai tujuan. Menurut Akdon, upaya pencapaian tujuan organisasi merupakan suatu proses berkesinambungan yang memerlukan pentahapan dengan menentukan tolak ukur untuk menentukan apakah suatu tahapan sudah dicapai atau belum (Wright, 1998).

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas sebagai perguruan tinggi Islam yang berada di wilayah perbatasan, sejak berdiri hingga sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan, baik perubahan status maupun bentuk kelembagaan. Dimulai dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sulthan Muhammad Syafiuddin Sambas pada tahun 2006, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas pada tahun 2010, dan yang terakhir berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas pada tahun 2014.

Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa semangat kemajuan selalu menjiwai gerak langkah civitas akademika IAIS Sambas dalam rangka menghadirkan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas, khususnya di wilayah perbatasan. Upaya perubahan dan pengembangan ini tentu saja masih terus berlanjut, sehingga IAIS Sambas diharapkan tetap eksis dan mampu memberikan manfaat secara lebih luas, baik di masa sekarang maupun yang akan datang.

B. Perubahan Kelembagaan dan Paradigma Keilmuan

Jika dihubungkan dengan visi IAIS Sambas, yakni “Menjadi Perguruan Tinggi Rujukan Dalam Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Bagi Kemajuan Peradaban di Asia Tenggara”, cita-cita ini memerlukan proses yang cukup panjang dan sudah tentu memerlukan

upaya perubahan, yakni perubahan pada aspek kelembagaan dan paradigma keilmuan.

Dari sisi kelembagaan, perubahan setidaknya diarahkan pada dua aspek pokok, yaitu:

1. Perubahan dalam Tata Kelola atau Manajemen Kelembagaan.

Perubahan dalam aspek tata kelola mencakup banyak hal. Mulai dari perubahan visi dan misi, manajemen SDM, sistem pengembangan kelembagaan dan sistem pengelolaan keuangan. Dari sisi perubahan visi dan misi, IAIS Sambas tidak hanya berorientasi pada lingkup keindonesiaan, namun sudah menetapkan tujuan untuk menjadi perguruan tinggi rujukan di kawasan Asia Tenggara di masa mendatang. Berikutnya dari sisi manajemen SDM, sudah mengarah pada birokrasi yang berorientasi pada pengembangan potensi-petensi SDM, khususnya di bidang tri dharma perguruan tinggi dengan teknologi sebagai basis pengembangan sistemnya. Selanjutnya pada sistem pengembangan kelembagaan, telah disusun *milestone* atau roadmap jangka panjang yang terbagi dalam lima tahapan yang sejalan dengan periode perencanaan strategis, yakni dimulai pada tahun 2018 hingga 2038. Dengan mengacu pada teori Tuckman, (1965) lima tahapan tersebut adalah tahap *forming* (penataan), *empowering* (penguatan), *storming* (tanggap), *norming* (tangguh), dan *performing* (berkinerja). Adapun dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan, telah diselenggarakan sistem keuangan satu pintu. IAIS Sambas juga telah memulai upaya pengembangan *support system* keuangan, yang diusahakan dari sumber-sumber eksternal kelembagaan.

2. Perubahan dalam Bentuk Kelembagaan, Khususnya Perubahan dari Institut Menjadi Universitas.

Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan dari IAIS Sambas menjadi Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Perubahan kelembagaan ini pada dasarnya sejalan dengan roadmap jangka panjang IAIS Sambas tahun 2018-2038. Dengan perubahan bentuk menjadi universitas, IAIS Sambas dapat menyediakan layanan pendidikan berbasis akademik dan vokasi, dimana beberapa fakultas dapat menyelenggarakan pendidikan tersebut dengan rumpun ilmu yang lebih bervariasi, tidak hanya dalam satu jenis rumpun keilmuan. Selama berbentuk institut, walaupun IAIS Sambas sudah berkembang dengan beberapa fakultas, namun masih dalam rumpun keilmuan yang sama, yakni rumpun ilmu Agama (Islam). Dengan bervariasinya rumpun ilmu yang diselenggarakan, memberikan peluang bagi IAIS Sambas untuk menjadi pusat keunggulan dalam upaya memajukan peradaban di wilayah Asia Tenggara. Oleh sebab itu, pengembangan IAIS Sambas menjadi universitas pada dasarnya sejalan dengan cita-cita dan tuntutan lingkungan yang terus berkembang.

IAIS Sambas yang secara geografis berada di ibu kota Kabupaten Sambas, merupakan wilayah yang terletak pada sisi sebelah Utara Kalimantan Barat yang berkembang dengan beberapa kekhasan, diantaranya adalah: *pertama*, Daerah yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia dan berdekatan dengan negara Brunei Darussalam, sehingga menjadi gerbang terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Utara Kalimantan Barat, khususnya pada bidang pendidikan; dan *kedua*, Daerah dengan sejarah dan budaya yang identik dengan Islam. Bahkan di masa kerajaan

(kesultanan), Sambas pernah 'melahirkan' beberapa ulama besar yang diakui oleh dunia (Islam), seperti Ahmad Khattib Sambas dan Muhammad Basiuni Imran. Bahkan di masa itu, Islam menjadi pandangan hidup masyarakat (Melayu), sehingga budaya yang berkembang adalah budaya yang sarat dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, sebagai perguruan tinggi Islam yang berada di wilayah perbatasan (lintas negara), IAIS Sambas berupaya secara konsisten menjalankan peran-peran kebangsaan, terutama peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan. Sementara itu, dalam kaitannya dengan sejarah kesultanan dan kondisi demografi, IAIS Sambas berupaya mengembalikan semangat keilmuan yang pernah berkembang di masa lalu (kesultanan), sehingga mampu melahirkan para ulama atau cendekiawan muslim yang bisa menjadi panutan umat secara keseluruhan. IAIS Sambas juga berupaya mengembangkan hubungan yang harmoni antara keilmuan dan nilai-nilai Islam dengan budaya serta dinamika sosial yang berkembang, khususnya di wilayah perbatasan.

Secara spesifik, dalam konteks perubahan paradigma keilmuan, IAIS Sambas berupaya terus melakukan pembenahan dan pengembangan, tanpa meninggalkan spirit dan cita-cita kelembagaan pada saat awal didirikan. Bagaimanapun juga, sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), IAIS Sambas memiliki dua tugas pokok yang harus ditunaikan sesuai fungsi dan kedudukannya, yaitu: *pertama*, sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang terikat pada kaidah-kaidah ilmiah. Seluruh proses keilmuan tersebut harus tetap berpegang pada prinsip integrasi antara dalil naqli dan aqli, serta

sublimasi keilmuan dan keislaman secara lebih komprehensif dalam mewujudkan kemajuan peradaban di kawasan Asia Tenggara. Dalam dimensi ini, kajian ilmu-ilmu Islam (*Islamic studies*) dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner, guna menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan, mendukung program pembangunan bangsa, serta dalam menyikapi isu-isu strategis di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, sebagai lembaga dakwah yang tetap berupaya melaksanakan peran sebagai lembaga yang mampu menginternalisasi ajaran Islam *rahmatan lil 'alamin* yang dihasilkan dari proses sublimasi nilai-nilai keislaman. Kesemuanya itu menjadi *worldview* dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Peran dakwah merupakan kelanjutan dari peran IAIS Sambas sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang terikat oleh nilai-nilai Islam, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, peran dakwah yang dilaksanakan tetap sejalan dengan kepentingan keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan.

Dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi pada konteks pengembangan paradigma keilmuan, IAIS Sambas tetap berupaya berpegang pada aspek-aspek fundamental keislaman dan unsur-unsur pokok keilmuan, yakni:

1. Pokok-pokok Ajaran Islam (Akidah, Ibadah dan Akhlak)

Aqidah Islamiyah adalah kepercayaan yang teguh kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, para Rasul-Nya, hari Akhir, qadar baik dan buruk yang bersumber pada Alquran dan Sunnah. Dalam hal ini, aqidah islamiah di IAIS Sambas dikembangkan dalam kerangka implementasi nilai-nilai universal dalam perwujudan Islam

sebagai *rahmatan lil-alamin* yang toleran, inklusif, dan humanis. Melalui penguatan aqidah islamiyah tersebut, maka nilai-nilai tradisi dan budaya lokal, serta nilai-nilai keadaban bangsa dapat disinergikan. Begitupula dengan aspek ibadah dan akhlak. Dua pokok ajaran Islam ini diharapkan menjadi spirit sekaligus amal yang menjiwai gerak langkah maupun perilaku seluruh civitas akademika IAIS Sambas.

2. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni

Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni adalah ilmu pengetahuan yang berpijak dan dikembangkan secara integral pada dua hal pokok, yakni: (1) Dalil Naqli atau wahyu al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw yang shahih (*bayani*). Pengembangan aneka keilmuan berdasarkan ayat-ayat naqliyah ini dielaborasi melalui pemosisian khazanah dan tradisi keilmuan Islam sebagai metodologi sekaligus sumber; dan (2) Dalil Aqli atau sumber ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan berdasarkan pada penalaran akal manusia dengan mengelaborasi fenomena alam semesta (*burhani*) dan intuisi (*irfani*). Pengembangan keilmuan dan keislaman pada titik ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari fenomena alam sekaligus dinamika sosial. IAIS Sambas sebagai perguruan tinggi Islam berperan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, tanpa melepaskan diri dari dinamika kehidupan yang berkembang di daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara luar. Hal ini berarti bahwa membaca dan memahami ayat-ayat kauniah sama pentingnya dengan membaca dan memahami ayat-ayat qauliyah. Implementasinya adalah dengan tetap mengembangkan kecakapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

3. Kecakapan Hidup Abad 21 (*Life skill*)

Sejalan dengan tuntutan dunia di abad 21, kecakapan hidup yang dikembangkan adalah berbasis teknologi. Hal ini diupayakan guna menyeimbangkan dinamika perubahan zaman di era milenia dengan tujuan jangka panjang IAIS Sambas, dimana nantinya peserta didik terbiasa dengan kecakapan hidup abad 21. Greenstein (2012) menyebutkan bahwa peserta didik yang hidup pada abad 21 harus menguasai keilmuan, berketerampilan metakognitif, mampu berpikir kritis dan kreatif, serta bisa berkomunikasi atau berkolaborasi secara efektif.

Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan pembelajaran abad 21 dengan kurikulum yang berbasis pada peserta didik. Pada lembaga pendidikan formal, pembelajaran sudah dituntut untuk menerapkan kemampuan 4C, yakni *Critical Thinking, Communication, Collaboration, and Creativity*.

Adapun *life skill* yang dirancang IAIS Sambas lebih dikembangkan lagi dengan beberapa kemampuan lainnya, yakni *self awareness/personal skill* (kesadaran diri), *thinking skill* (keterampilan berpikir), *social skills* (keterampilan sosial), *academic skills* (keterampilan akademik) dan *vocational skill* (keterampilan kejuruan atau keterampilan tugas tertentu).

Tujuan pengembangan pendidikan berbasis *life skill* tersebut, diantaranya adalah untuk: (1) mengaktualisasi potensi mahasiswa, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi; (2) memberikan wawasan yang luas dalam mengembangkan karier; (3) memberikan bekal dengan latihan dasar tentang nilai-nilai

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari meliputi keimanan, kejujuran, kecerdasan, kreativitas, kompetitif, dan kebersamaan; (4) memiliki kecakapan mengatasi (*cope-ability*), terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup yang penuh daya saing; dan (5) menanamkan jiwa kewirausahaan, sehingga mampu bersikap mandiri dan mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk pembangunan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam.

Manfaat pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup bagi peserta didik (mahasiswa) adalah sebagai bekal dalam memecahkan persoalan hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun sebagai warga negara.

C. Menuju Eksistensi Kampus Islam Rujukan di Asia Tenggara

Seiring perkembangan zaman, penyelenggaraan pendidikan tinggi menghadapi perubahan situasi lingkungan yang tidak mudah diprediksi dan dikendalikan. Esensi perubahan tersebut meliputi perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat global, dari kohesi sosial ke partisipasi demokratis, dari *government* ke *governance*, dari *state-oriented* ke *society-oriented*, dan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan. Menyikapi perubahan situasi tersebut, arah pengembangan pendidikan tinggi memosisikan perguruan tinggi sebagai tempat pembelajaran sekaligus sumber daya pengetahuan. Pendidikan tinggi juga berperan dalam menanggapi perubahan tuntutan pasar kerja sebagai pusat kebudayaan dan pembelajaran terbuka untuk semua, serta menjadikan pendidikan tinggi sebagai wahana kerjasama internasional.

Mengingat pentingnya peran pendidikan tinggi di satu sisi, serta adanya perubahan lingkungan (eksternal) yang begitu kompleks di sisi lain, maka setiap lembaga pendidikan tinggi perlu mencermati lingkungan secara optimal. Tindakan untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan, khususnya lingkungan eksternal menjadi sangat penting, karena berada di luar kendali institusi perguruan tinggi. IAIS Sambas perlu mencermati peluang yang ada dan memanfaatkannya agar memiliki *sustainability* atau kemampuan dalam menjaga keberlanjutan organisasi (institusi). Lebih daripada itu, lembaga pendidikan tinggi bahkan perlu memiliki suatu keunggulan bersaing, yakni kemampuan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan jasa yang lebih dihargai oleh pengguna (*user*) dibandingkan lembaga pesaing, serta lebih tinggi dari apa yang dimiliki oleh pesaingnya (Porter, 1992). Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan harus mampu menemukan dan mengembangkan kompetensi inti agar mampu memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing (Dirgantoro & Putra, 2002).

Berikutnya, pemahaman terhadap kondisi lingkungan internal kelembagaan secara luas dan mendalam juga perlu dilakukan, sehingga strategi pengembangan yang dibuat bisa konsisten dan realistis sesuai dengan situasi dan kondisinya (Wright, 1998). Berdasarkan pemahaman yang cermat terhadap lingkungan internal, maka kelemahan dan kekuatan yang dimiliki lembaga pendidikan tinggi dapat diketahui.

Guna menjaga keberlangsungan pertumbuhan IAIS Sambas ke depan, di tengah perkembangan zaman dan tantangan perubahan lingkungan yang begitu kompleks, mutlak diperlukan perencanaan

strategis, baik yang bersifat jangka panjang (Rencana Induk Pengembangan) maupun jangka menengah (Rencana Strategis). Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan *grand strategy* menuju apa yang dicita-citakan. Dalam hal ini, RIP yang telah ditetapkan IAIS Sambas adalah menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai *Southeast Asia Class University*, yakni dalam pengembangan keilmuan dan keislaman yang berwawasan lintas negara pada tahun 2038.

Namun demikian, dalam upaya memantapkan eksistensi IAIS Sambas sebagai kampus Islam yang eksis di kawasan Asia Tenggara, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, baik dalam skala mikro maupun makro. Secara mikro, menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 58 disebutkan bahwa Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi adalah sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan pusat pengembangan peradaban bangsa.

Dengan fungsi dan peran tersebut, maka lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia adalah sentra pembangunan SDM. Tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa masa depan SDM Indonesia ditentukan oleh mutu perguruan tinggi yang ada di negeri ini. Tidak berlebihan pula apabila bangsa Indonesia sangat berharap pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk dapat melahirkan generasi yang terampil dan mandiri. Karena profil para lulusan perguruan tinggi di Indonesia akan menentukan daya saing bangsa dalam menghadapi dinamika persaingan global.

Adapun SDM yang dibutuhkan di era globalisasi, tidak hanya mereka yang pandai memanfaatkan peluang, tetapi juga yang mampu menciptakan peluang, baik bagi dirinya maupun orang lain. Apalagi jika dihubungkan dengan pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) di kawasan Asia Tenggara sejak tanggal 31 Desember 2015. Sudah tentu, keterampilan dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang, sedangkan kemandirian diperlukan untuk menciptakan peluang. Keduanya sangat dibutuhkan oleh para lulusan perguruan tinggi agar bisa mengatasi berbagai tantangan, memanfaatkan berbagai peluang, dan menghadapi berbagai bentuk kompetisi kehidupan yang terjadi, baik di tingkat lokal, nasional bahkan internasional.

Tanpa keterampilan dan kemandirian, para lulusan perguruan tinggi pasti akan menghadapi banyak kesulitan untuk bisa bersaing di dunia kerja dan dalam mengembangkan profesinya. Keterampilan dan kemandirian yang rendah akan membuat mereka hanya bisa menunggu dan bergantung pada sesuatu yang sifatnya 'tidak pasti,' seperti menunggu dan bergantung pada formasi pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai pusat pembinaan SDM bangsa, lembaga-lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk memainkan peran yang sangat penting, khususnya dalam memberantas wabah *ASN minded*, yakni dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan tri dharma yang dapat memacu peningkatan keterampilan dan kemandirian para mahasiswa. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pendidikan tinggi perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan karakter dan penanaman sikap wirausaha (*entrepreneurship*), baik dalam bentuk program kurikuler maupun ekstrakurikuler untuk menunjang

pengembangan keterampilan, karakter, dan sikap kewirausahaan pada mahasiswa.

Memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan adanya kemungkinan berkembang menuju revolusi pada fase berikutnya, dunia bergerak cepat menuju terbentuknya suatu tatanan masyarakat berbasis sains dan teknologi-informasi. Menyikapi kondisi ini, apabila tidak segera bertindak, maka era mendatang akan tetap didominasi oleh pihak-pihak lain, khususnya negara dan bangsa-bangsa yang secara konsisten mengandalkan pembangunannya pada kemampuan SDM yang menguasai IPTEK serta memelihara keberlanjutan kegiatan-kegiatan riset, pengembangan dan perekayasaan.

Kualitas SDM yang rendah akan menyebabkan proses pembangunan kurang didukung oleh produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kader-kader terbaik bangsa yang memiliki kecerdasan tinggi, sikap mental prima, unggul dan berdaya saing tinggi, serta memiliki kemampuan yang handal dengan nasionalisme sejati berlandaskan nilai-nilai keislaman untuk tampil ke depan dalam membangun bangsa (Hifza, Widiyanti et al., 2020). Disinilah diharapkan peran dan kontribusi pendidikan tinggi dalam melakukan regenerasi umat yang lebih baik, serta memacu percepatan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, IAIS Sambas sudah tentu berkomitmen untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. IAIS Sambas berupaya untuk menjadi perguruan tinggi rujukan dalam pengembangan keilmuan dan keislaman berwawasan lintas negara. IAIS Sambas juga terus berupaya untuk berperan penting dalam

konteks pembangunan manusia yang utuh dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan, serta tetap berupaya professional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, pengembangan IAIS sambas ke depan diarahkan pada *redesign* pendidikan yang lebih berorientasi pada kepuasan pengguna (*customers satisfaction*), yaitu peningkatan kualitas umat dan bangsa, khususnya umat Islam agar terbebas dari kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Oleh sebab itu, rencana strategis IAIS Sambas telah didasarkan pada kondisi objektif kekinian, baik menyangkut faktor internal maupun eksternal, untuk meraih cita-cita institusi di masa depan.

Kondisi objektif kekinian yang berhubungan dengan internal kelembagaan, di antaranya adalah:

1. Upaya peningkatan dan pengembangan civitas akademika yang terkait dengan *input* mahasiswa, proses pendidikan, pengajaran, dan faktor pendukungnya, serta *output* kelulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi di dunia kerja dan atau menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk dirinya sendiri. Pada titik ini, pengembangan kampus kewirausahaan (*entrepreneurship*) menjadi wacana yang dipertimbangkan untuk diupayakan di IAIS Sambas pada tahap-tahap berikutnya. Kampus kewirausahaan dapat dikembangkan dengan membangun dan mengembangkan budaya *entrepreneurship* dalam keseluruhan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kampus kewirausahaan juga dapat dikembangkan dengan membangun *support system* keuangan, yakni melalui jaringan

kerjasama, investasi, dan pengembangan usaha-usaha yang dikelola oleh manajemen kampus. Dengan pengembangan kampus kewirausahaan, secara kelembagaan dapat mendorong tercapainya kemandirian kampus dalam aspek sumber-sumber pendanaan.

2. IAIS Sambas diharapkan dapat membangun kultur dan spirit civitas akademika, termasuk lulusan diploma, sarjana dan pascasarjana yang memiliki nilai keunggulan dan kompetensi dalam pemahaman teori yang luas, kemahiran praktis, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama Islam yang terbuka, moderat, dan terintegrasi dengan nilai-nilai budaya, serta bergerak mengikuti perubahan sosial tanpa meninggalkan agama dan budaya. Atas dasar itu, proses pendidikan di IAIS sambas berupaya mengintegrasikan pendidikan akademik sebagai proses *educating and transferring of knowledge and values* dalam membentuk kompetensi-kompetensi tertentu dengan kurikulum yang terstruktur yang mampu merespon isu-isu kontemporer dan lokalitas.
3. Dalam pengembangan kelembagaan di lingkungan internal IAIS Sambas juga harus mampu menuntaskan beberapa persoalan manajemen, dikarenakan kompleksitas manajemen yang belum terurai dengan baik. Di antara kompleksitas manajemen yang sering mengemuka adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang belum terstruktur rapi dan berkesinambungan. Begitu pula dengan arah kebijakan pengembangan yang belum sepenuhnya berdasar pada cetak biru atau *road map master plan*. Namun demikian, dengan telah ditetapkan RIP IAIS Sambas, upaya penataan

lembaga pada dasarnya sudah dimulai secara lebih maksimal dan sistematis.

Sementara itu, faktor eksternal adalah kondisi objektif di luar IAIS Sambas yang bersifat *uncontrollable* (tidak bisa dikontrol) tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut. Dalam konteks konstalasi pendidikan tinggi, IAIS Sambas dihadapkan dengan tantangan kemajuan ilmu pengetahuan, problematika umat dan kebangsaan. Tantangan-tantangan yang dimaksud adalah:

1. IAIS Sambas dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia pada umumnya masih dihadapkan dengan realitas dikotomi ilmu pengetahuan. Ilmu masih dipahami dalam bentuk ilmu umum dan ilmu agama. Hal itu seakan dilegitimasi oleh pemilahan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Kementerian Ristekdikti dan Kementerian Agama. Program-program studi umum berada dalam pembinaan Kementerian Ristekdikti, sementara program-program studi ilmu agama dalam pembinaan Kementerian Agama. Realitas dikotomis itu, merupakan tantangan serius yang harus diurai oleh PTKI, karena ilmu pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas optimalisasi akal manusia yang dihasilkan dari sumber ilmu qauliyah dan sumber ilmu kauniyah. Dengan pemahaman itu, maka semua ilmu merupakan hasil dari proses produktivitas manusia dan pancaran dari Allah yang Maha Mengetahui.
2. Problem kesejahteraan umat. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada dalam standar kesejahteraan minimum. Problem kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan menjadi masalah

bangsa yang berakar dari banyal hal, di antaranya kelemahan iman, etos kerja, karakter, kebijakan penguasa, serta keterbatasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup (*life skill*).

3. Kebijakan terkait produktivitas ilmiah yang memberikan pengaruh pada tinggi-rendahnya kualitas reputasi akademik pada sebuah perguruan tinggi secara keseluruhan.

Menghadapi beberapa tantangan tersebut, IAIS Sambas berupaya secara terus-menerus dan berkesinambungan meningkatkan produktivitas ilmiah dan kualitas reputasi akademiknya yang diarahkan guna mengurai permasalahan kesejahteraan umat, sekaligus mengusung pengembangan integrasi keilmuan dan keislaman.

D. Mewujudkan IAIS Sambas Sebagai Rujukan Dalam Pengembangan Kajian Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara di Asia Tenggara

IAIS Sambas pada tahun 2018 telah menetapkan cita-cita besar bahwa pada tahun 2038 akan menjadi perguruan tinggi rujukan dalam pengembangan keilmuan dan keislaman berwawasan lintas negara bagi kemajuan peradaban di Asia Tenggara. Dengan kata lain, tujuan jangka panjang IAIS sambas adalah menjadi perguruan tinggi yang berkelas di kawasan Asia Tenggara (*Southeast Asia Class Islamic University*). Melalui visi ini, IAIS Sambas telah mencanangkan diri untuk menjadi *centre of excellence* (pusat keunggulan) agar mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat. Tidak hanya di tingkat lokal, regional maupun nasional, bahkan sudah ke tingkat yang lebih tinggi, yakni internasional.

Untuk mewujudkan IAIS Sambas sebagai *centre of excellence* di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2038, pengembangan IAIS Sambas harus mampu memenuhi beberapa kriteria pokok sebagai berikut:

1. Unggul dalam Tata Kelola (Manajemen Kelembagaan)

Keunggulan dalam aspek tata kelola atau manajemen kelembagaan di antaranya dapat diukur dari perubahan bentuk IAIS Sambas menjadi universitas. Berikutnya, dapat pula diukur dari perkembangan atau bertambahnya fakultas dan program studi yang sejalan dengan bertambahnya jumlah minat masyarakat terhadap IAIS Sambas. Pada tahun 2038, IAIS Sambas ditargetkan telah memiliki minimal 6 (enam) fakultas, dan 37 (tiga puluh tujuh) program studi S1, 11 (sebelas) prodi S2 dan 4 (empat) prodi S3. Fakultas-fakultas tersebut adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Dakwah dan Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Keunggulan dalam aspek tata kelola juga teraktualisasi dalam proses perencanaan dan pengorganisasian, kepemimpinan yang handal, serta berkarakter kuat. Baik dalam kepemimpinan organisasional, operasional maupun publik, yakni di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Untuk menjalankan kepemimpinan tersebut, IAIS Sambas ditargetkan sudah menerapkan sistem pengelolaan yang berjalan sesuai dengan SOP (*Standart Operating Procedure*) dan didukung dengan dokumen yang lengkap melalui sistem informasi berbasis teknologi.

IAIS Sambas juga ditargetkan telah memiliki sistem penjaminan mutu berstandar internasional, dimana IAIS Sambas memiliki minimal

20 prodi terakreditasi A atau Unggul yang berstandar nasional, kemudian 5 prodi terakreditasi dengan standar ASEAN, 3 prodi terakreditasi dengan standar negara-negara Islam, dan 2 prodi terakreditasi standar Internasional. Adapun jumlah kerjasama di dalam negeri juga telah mencapai 100% dari total dosen, sedangkan kerjasama luar negeri mencapai 50% dari total jumlah dosen.

2. Keunggulan Sumber Daya Manusia

Keunggulan dalam bidang pengelolaan SDM, telah tersedia pedoman yang mengatur tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen serta tenaga kependidikan yang dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Pelaksanaan *movev* kinerja dan tindak lanjut, seperti Audit Mutu Internal (AMI) dan Penilaian Kinerja telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Terkait rasio jumlah dosen dan mahasiswa pada masing-masing prodi, sudah tercapai secara konsisten sebesar 1 : 27-33. Jumlah dosen pada masing-masing prodi minimal 6 orang dengan proporsi minimal 60% berpendidikan S3 (Doktor). Dari jenjang kepangkatan, jumlah dosen yang bergelar lektor kepala dan atau guru besar minimal 60%. Rasio tenaga kependidikan dengan dosen dan mahasiswa terpenuhi minimal 50% dari jumlah prodi (1 : 100 mahasiswa dan 1 : 10 dosen). Tenaga kependidikan tersebut sedikitnya 25% sudah berpendidikan S1/D4.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada kalangan internal dan eksternal, telah tersedia sistem pengukuran dan survey kepuasan *stakeholder* yang dilaksanakan secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu, yakni dilakukan minimal satu kali dalam tiap

semester. Dengan kegiatan evaluasi (monev) yang dilaksanakan secara berkala, mampu memberikan input yang positif bagi perbaikan dan pengembangan lembaga secara lebih optimal.

3. Keunggulan Mahasiswa dan Alumni

Profil mahasiswa IAIS Sambas pada tahun 2038 adalah mahasiswa yang berkarakter, berbudaya, mandiri dan memiliki kompetensi unggul, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Hal ini didukung oleh input mahasiswa baru yang berkualitas dengan adanya pedoman dan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru yang baik dan lengkap.

Jumlah mahasiswa baru yang diterima juga terus meningkat, yakni sebanyak 15.000 mahasiswa. Dari total mahasiswa baru tersebut, 60% diantaranya adalah mahasiswa dari luar daerah dan 10% mahasiswa asing dari berbagai negara. Demikian pula proporsi mahasiswa S2 dan S3 meningkat dari tahun ke tahun. Kegiatan kemahasiswaan selalu berorientasi pada pengembangan minat dan bakat mahasiswa, serta bersifat kompetitif di tingkat Internasional. Pada tahun 2038, proporsi kegiatan di tingkat internasional mencapai 30% dari total kegiatan mahasiswa. Kegiatan alumni juga mendukung pengembangan akademik dan nonakademik. Dukungan tersebut berupa sumbangan dana, fasilitas, keterlibatan dalam kegiatan akademik, serta dalam pengembangan jaringan di berbagai sektor.

4. Keunggulan dalam Pembelajaran dan Suasana Akademik

Kurikulum sudah menjadi rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa dan menjadi rujukan bagi semua program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan

mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum IAIS Sambas sudah tersusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu, sehingga dapat menjamin tercapainya kompetensi lulusan. Program studi menerapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Suasana akademik dibangun dengan menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber, demi meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun luar kelas. Suasana akademik telah terwujud secara baik yang ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

Kebijakan suasana akademik yang meliputi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan kemitraan dosen dan mahasiswa dapat berjalan dengan baik. Hal ini didukung pula oleh dokumen kebijakan pendidikan dan pedoman pembelajaran yang lengkap, yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kurikulum pendidikan selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan diadakan *review* kurikulum minimal 2 (dua) tahun sekali dengan melibatkan semua stakeholders dan para pakar.

5. Keunggulan dalam Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh IAIS Sambas atau Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas pada tahun 2038 diarahkan untuk mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan yang baru,

sehingga mampu membangun reputasi IAIS Sambas di tingkat internasional, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Budaya *research* (penelitian dan pengkajian) menjadi sangat dominan dalam semua aspek dan menjadi pendukung utama dalam proses pembelajaran, serta menjadi penyumbang utama anggaran pendidikan lembaga. Pada tahap ini, penelitian telah berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat atau pihak-pihak eksternal. Penelitian tidak lagi menjadi beban bagi anggaran, tetapi justru menjadi penyumbang anggaran pendidikan. Hal ini disebabkan hasil-hasil penelitian telah berorientasi pada pasar (eksternal), sehingga hasil penelitian dapat diproduksi secara massal (skala industri). Hasil-hasil penelitian memperoleh pengakuan internasional dan mendapatkan hak paten. Staf pengajar juga banyak yang menjadi anggota dari kelompok peneliti tingkat nasional maupun internasional.

Pimpinan juga menyediakan Kebijakan dan Rencana Induk Penelitian. Kebijakan dan Rencana Induk Penelitian tersebut selalu diarahkan pada *Southeast Asia Class Islamic University*, untuk mendukung agar semua dosen melakukan penelitian minimal setahun 2 kali. Semua hasil penelitian atau riset dosen dipublikasikan dalam jurnal ilmiah maupun buku, yakni minimal 40% terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan 15% pada jurnal internasional bereputasi per tahun. Hasil publikasi tersebut telah dibaca dan disitasi oleh orang lain dari berbagai kalangan, sehingga jumlah sitasi karya ilmiah minimal 4x lipat dari jumlah dosen.

Selain itu, disediakan pula pedoman mekanisme pemberian penghargaan berdasarkan kualitas dan kontribusi hasil penelitian pada kebutuhan masyarakat. Selain publikasi ilmiah, hasil penelitian dosen

juga dimanfaatkan dengan maksimal, yakni dengan mengintegrasikannya dalam pengembangan pembelajaran, pengembangan lembaga dan pengembangan keilmuan. Untuk mendukung program tersebut, jumlah dana penelitian minimal rata-rata Rp. 15.000.000 per tahun untuk tiap-tiap penelitian. Jumlah dana penelitian tersebut tidak sepenuhnya disediakan oleh kampus, tetapi diperoleh melalui sumber dari lembaga lain, baik nasional maupun internasional minimal 50% dari total dana penelitian.

6. Keunggulan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian pada masyarakat pada tahun 2038 sudah diorientasikan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, yaitu *community based science and technology*. Kegiatan pengabdian pada masyarakat telah menjadi bagian integral dari pendidikan dan penelitian, sehingga dapat dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan misi pemberdayaan umat.

Kebijakan dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat telah terumuskan secara komprehensif. Program kerja pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. Semua hasil pengabdian kepada masyarakat terpublikasi dalam jurnal ilmiah atau buku.

Publikasi nasional terakreditasi setiap tahunnya minimal 40%, sedangkan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian minimal 50%, sehingga tercipta integrasi antara penelitian dan pengabdian masyarakat. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per tahun rata-rata minimal Rp. 10.000.000 per kelompok. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari lembaga lain, baik

nasional maupun internasional telah mencapai minimal 20% dari total dana pengabdian kepada masyarakat.

7. Keunggulan Sarana dan Prasarana

IAIS Sambas pada tahun 2038 sudah memiliki lahan kampus yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan, yakni dengan luas lahan minimal 50 hektar. Prasarana pendidikan beserta penunjangnya sudah tersedia secara lengkap dengan mutu yang sangat baik untuk proses pembelajaran. Demikian juga dengan sarana yang digunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran, dimana sarana pembelajaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan terjadwal. Pedoman maupun SOP pengelolaan sarana dan prasarana yang komprehensif dan integratif juga sudah tersedia.

8. Keunggulan dalam Kemampuan Keuangan

Mekanisme pengelolaan keuangan IAIS Sambas pada tahun 2038 telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan didukung sistem informasi keuangan yang telah mapan. Komponen keuangan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu, mencakup pengadaan, pengelolaan dana, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi IAIS Sambas.

Pedoman pengelolaan dana yang dimiliki sudah lengkap, baik yang bersumber dari APBK maupun sumber-sumber lain. Demikian juga dengan pedoman dan mekanisme penetapan biaya pendidikan. Jumlah biaya pendidikan per mahasiswa per tahun minimal Rp. 18.000.000 yang diambil dari sumber-sumber yang ada. Besaran UKT maksimal 30% dari total pembiayaan Perguruan Tinggi. Pembiayaan

pendidikan berbasis program studi sudah dilaksanakan, yakni mulai dari perencanaan, alokasi, dan pengelolaannya. Unsur pembiayaan meliputi biaya investasi, biaya personal (UKT) dan biaya operasional.

Guna menjamin pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, sistem audit keuangan internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal maupun audit keuangan kelembagaan yang dilakukan oleh yayasan hasilnya dinilai Baik, sehingga dapat memenuhi standar pengelolaan keuangan, bahkan lebih baik dibanding pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan milik pemerintah yang telah mapan.

Beberapa indikator keunggulan tersebut di atas, menjadi kriteria penting bagi IAIS Sambas untuk menjadi pusat keunggulan dalam bidang pengembangan keilmuan dan keislaman di kawasan Asia Tenggara. Melalui perencanaan yang baik dan didukung oleh implementasi yang konsisten dan maksimal, Insha Allah cita-cita tersebut akan dapat direalisasikan.

E. Penutup

Tahap-tahap perubahan dan pengembangan IAIS Sambas sebagaimana telah dirumuskan dalam *roadmap* IAIS Sambas tahun 2018-2038, menjadi gambaran utuh tentang bagaimana profil IAIS Sambas di masa mendatang. Perubahan dan pengembangan yang dilakukan secara matang dan terukur, bukanlah mimpi yang bersifat angan-angan. Melainkan cita-cita yang sangat realistis untuk diraih. Belajar dari rumus orang-orang sukses, yakni Berani bermimpi besar, Berani memulai, dan Berani menyelesaikan sampai tuntas, maka atas

izin Allah, semoga cita-cita tersebut bisa diwujudkan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. (2005). *Pengembangan Sekolah di Era Desentralisasi Otonomi Daerah*. Mutiara Ilmu.
- Dirgantoro, C. & Putra, R. M. S. (2002). *Keunggulan Bersaing Melalui Proses Bisnis*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasin do).
- Greenstein, L. M. (2012). *Assessing 21st Century Skills: A Guide to Evaluating Mastery and Authentic Learning*. Corwin Press.
- Hifza, H., Antoni, A., Syakhrani, A. W., & Hartati, Z. (2020). The Multicultural Islamic Education Development Strategy on Educational Institutions. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 5(1), 158–170.
- Hifza, H., Widiyanti, M., Rustam, A., Fathani, A. H., & Wahyuni, P. (2020). The Implications of The Application of Differentiation Focus Strategies to Competitive Advantage At Private Islamic Education Institutions. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(06).
- Hifza, Juliana, Palapa, A., Maskur, & Aslan. (2020). The Strategic Foundation for Competitive Excellent Development in Integrated Islamic Primary Schools in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(12s), 1747–1753.
- Porter, M. E. (1992). *Keunggulan Bersaing: Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*.
- Tuckman, B. W. (1965). Developmental Sequence in Small Groups. *Psychological Bulletin*, 63(6), 384.
- Wright, P. L. (1998). *Strategic Management: Concepts*. Prentice Hall.

MEMBANGUN PERADABAN BANGSA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

**Pengembangan Keilmuan dan Keislaman
Berwawasan Lintas Negara**


Buku ini menjadi istimewa karena disiapkan secara khusus sebagai rekam jejak perjalanan IAIS Sambas, dalam kiprahnya membangun dunia pendidikan di wilayah perbatasan. Penerbitan buku seperti ini adalah sebuah tradisi akademik yang sangat baik dan perlu terus didukung agar tumbuh berkembang di lingkungan IAIS Sambas. Kita menyadari bahwa buku adalah media penunjang kemajuan ilmu pengetahuan, komunikasi gagasan, dan salah satunya dilakukan melalui penerbitan buku.

Buku ini diuraikan dalam empat bagian pembahasan; pertama, Dinamika Sosial Budaya dan Pembangunan Daerah. Kedua, Sejarah dan Perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Wilayah Perbatasan Indonesia. Ketiga, Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara. Keempat, Menuju *World Class Islamic University* di Kawasan Asia Tenggara.




CV. FENIKS MUDA SEJAHTERA

MENCERAHKAN DAN MEMBERDAYAKAN

+62 812 2087 6346  phoenixpublishing.id

 cs@feniksmudasejahtera.com

 www.feniksmudasejahtera.com

ISBN 978-623-5403-39-7 (PDF)



9

786235

403397